



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 - 2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No.3, Lubang Panjang,
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
Telp. (0754) 6109, Fax (0754) 62200
website : Barenlitbangda.sawahlunto.go.id
E-mail : bappedaswl@gmail.com



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 - 2023



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019



SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **5** TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta agar kegiatan pembangunan di Kota Sawahlunto dapat berjalan efektif, inovatif dan berdaya saing tinggi guna mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah menuju Sawahlunto yang lebih baik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) adalah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan :

- a. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempedomani RPJPD Kota Sawahlunto;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan pedoman serta arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, swasta dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam :

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Sawahlunto.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja OPD.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Walikota disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Walikota pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

- (2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2018 – 2023, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RPJMD Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. Merugikan kepentingan daerah.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan.
- (3) Merugikan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Sawahunto tahun 2018-2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

26 MAR 2019

Calvinus Desuail danpan : ulinye
PEL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19920411 201001 1 0 1 3

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **26** Maret 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **26** Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR **5**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5 /32/ 2019)



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya maka penulisan dokumen "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023" dapat dirampungkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Penulisan dokumen ini merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah lima tahun yang akan datang yang dilengkapi dengan kebijakan pelaksanaan program perencanaan pembangunan. Dokumen ini tidak hanya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh para stakeholders namun lebih dari pada itu adalah sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya.

Dalam dokumen ini kami mencoba mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam menjalankan skenario pemerintahan yang baik, benar, dan bertanggung jawab ditinjau dari segala aspek sebagai implementasi dari pelaksanaan *Good Governance*. Sehingga dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menjawab opini dan estimasi masyarakat dan stakeholder selama ini.

Kami menyadari sepenuhnya, penyajian isi dokumen ini secara menyeluruh masih jauh dari yang idealnya, bahkan data dan informasi yang disajikan pun mungkin belum dapat menjawab semua pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Atas ketidaksempurnaan itulah kami mengharapkan segala kritik, saran, sumbangan ide-ide pikiran yang bersifat konstruktif, dapat membantu kami dalam penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi, kerjasama, bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak dalam pelaksanaan penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang telah kita perbuat mendatangkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat dalam proses percepatan pembangunan Kota Sawahlunto.

Wassalam.

Sawahlunto, Maret 2019
**KEPALA BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO**

ttd

ANDY RASTIKA, SH,MM
NIP. 19660905 199308 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-11
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-49
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-134
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-1
3.2. Analisis Pembiayaan Daerah	III-13
3.3. Analisis Neraca Daerah	III-18
3.4. Analisis Kerangka Pendanaan	III-22
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Isu Strategis Daerah	IV-5
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi.....	V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa Serta Kecamatan.....	II-1
	2.2.	Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto	II-3
	2.3.	Ketinggian Lahan Kota Sawahlunto	II-3
	2.4.	Penggunaan Lahan Tahun 2012– 2017 (Ha)	II-5
	2.5.	Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-9
	2.6.	Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013–2017 (jiwa/Km ²).....	II-10
	2.7.	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2017	II-10
	2.8.	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-11
	2.9.	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2017	II-14
	2.10.	Pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017.....	II-15
	2.11.	Indeks Gini Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-19
	2.12.	Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.....	II-24
	2.13.	Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017.....	II-25
	2.14.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Di Kota Sawahlunto Tahun 2013– 2017	II-26
	2.15.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-27
	2.16.	Peringkat Angka Harapan Hidup Kab/Kota Se-Propinsi Sumatera Baarat Tahun 2017	II-29
	2.17.	Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2013–2017.....	II-30
	2.18.	Jumlah Kasus TB di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-30
	2.19.	Jumlah Kasus HIV AIDS di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-31
	2.20.	Persentase Kasus Diare yang ditangani di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-31
	2.21.	Jumlah Kasus Malaria di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-32
	2.22.	Jumlah Kasus DBD di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-32
	2.23.	Persentase RT Yang Memenuhi Syarat	II-33
	2.24.	Persentase RT dengan SAB yang Memenuhi Syarat	II-34
	2.25.	Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat.....	II-34
	2.26.	Persentase RT dengan PHBS yang Memenuhi Syarat.....	II-34
	2.27.	Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif	II-35
	2.28.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-35
	2.29.	Jumlah Kasus Gizi di Kota Sawahlunto Tahun 2013 s/d 2017	II-36
	2.30.	Penggunaan Lahan Tahun 2017	II-37
	2.31.	Penggunaan Lahan Tahun 2012– 2016 (Ha).....	II-38
	2.32.	Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-40
	2.33.	Susunan Pola Pangan Harapan Nasional	II-43
	2.34.	Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2016	II-43
	2.35.	Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-45



2.36.	Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-46
2.37.	Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2013-2017	II-47
2.38.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-47
2.39.	Jumlah Mubaligh Dan Penyuluh Agama Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-47
2.40.	Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-48
2.41.	Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-48
2.42.	Jumlah Pondok Tahfidz Dan Santrinya di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-48
2.43.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-49
2.44.	Rasio Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.....	II-50
2.45.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-50
2.46.	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2013- 2017.....	II-51
2.47.	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-51
2.48.	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017	II-52
2.49.	Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-52
2.50.	Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-53
2.51.	Nilai rata-rata UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Kota Sawahlunto	II-53
2.52.	Kualifikasi tenaga pendidik di Kota Sawahlunto	II-54
2.53.	Jumlah Tenaga Pendidik Kota Sawahlunto.....	II-54
2.54.	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Luar Sekolah di Kota Sawahlunto	II-54
2.55.	Kondisi Fisik Bangunan Sekolah di Kota Sawahlunto Tahun 2017	II-55
2.56.	Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2017	II-56
2.57.	Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2015 - 2017	II-57
2.58.	Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2012 - 2017	II-57
2.59.	Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-58
2.60.	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2012 - 2017.....	II-58
2.61.	Rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto	II-59
2.62.	Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2013 S/D 2017	II-59
2.63.	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-60
2.64.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-60
2.65.	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-61
2.66.	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-61
2.67.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-62



2.68.	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-62
2.69.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-63
2.70.	Luas Pola Ruang Di Kota Sawahlunto	II-63
2.71.	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2013-2018 Kota Sawahlunto.....	II-64
2.72.	Data Jumlah KK Yang Memiliki Rumah Di Kota Sawahlunto 2016-2017	II-65
2.73.	Data Rumah Tidak Layak Huni Kota Sawahlunto 2017 .	II-66
2.74.	Luas dan Kawasan Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2015	II-67
2.75.	Cakupan Linmas di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-68
2.76.	Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-68
2.77.	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Kota Sawahlunto Tahun 2016 dan 2017.....	II-69
2.78.	Supra Struktur Politik, serta Jumlah Fraksi Yang Ada .	II-69
2.79.	Jumlah Panti Asuhan, Penghuni dan Pengasuh	II-70
2.80.	Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota	II-71
2.81.	Penyandang Disabilitas (Usia diatas 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.....	II-71
2.82.	Jumlah Anak Berkebutuhan khusus (Usia 0 s/d 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.....	II-72
2.83.	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa/Psikotik di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.....	II-72
2.84.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018	II-73
2.85.	Jumlah korban dan Pengungsi Akibat Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2017.....	II-73
2.86.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-74
2.87.	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-75
2.88.	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-75
2.89.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu ang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2017	II-76
2.90.	Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan	II-76
2.91.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-77
2.92.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Tingkat Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia	II-77
2.93.	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-78
2.94.	Besaran Tenaga kerja yang mendapat pekatihan berbasis Kompetensi, Kewirausahaan dan Masyarakat..	II-79
2.95.	Jumlah KDRT di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017 .	II-80
2.96.	Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2015 - 2017	II-81
2.97.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2015.....	II-81
2.98.	Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-82
2.99.	Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2013 S/D 2018	II-82
2.100.	Prediket kota Layak Anak Kota Sawahlunto Tahun 2013 s/d 2018	II-82
2.101.	Ketersediaan Pangan Utama Beras berdasarkan jumlah Produksi Kota Sawahlunto Tahun 2012-2017..	II-82



2.102.	Ketersediaan Daging Sapi Berdasarkan Jumlah Produksi Tahun 2013–2017	II-85
2.103.	Ketersediaan Ayam Pedaging berdasarkan jumlah produksi Tahun 2013-2017	II-86
2.104.	Ketersediaan Telur Ayam Berdasarkan Jumlah Produksi Tahun 2013-2017	II-87
2.105.	Realisasi Pelacakan Dan Penegasan Batas Di Kota Sawahlunto	II-89
2.106.	Dokumen Lingkungan Hidup Yang ada Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-90
2.107.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-90
2.108.	Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-91
2.109.	Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2013-2017	II-92
2.110.	Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-92
2.111.	Rasio Jumlah Daya Tampung Truk Terhadap Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-93
2.112.	Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017.....	II-94
2.113.	Data Kepemilikan KTP-el di Kota Sawahlunto Tahun 2017	II-94
2.114.	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2017	II-95
2.115.	Data Kepemilikan Akta Perkawinan di Kota Sawahlunto Tahun 2017	II-95
2.116.	Data Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2017	II-96
2.117.	Jumlah Layanan Komunikasi Dan Informasi Tahun 2013-2017	II-97
2.118.	OPD Yang Sudah Memiliki Website	II-98
2.119.	Data Desa/Kel Yang Terkoneksi Internet di Kota Sawahlunto	II-98
2.120.	Data OPD Yang Sudah Memiliki Aplikasi.....	II-98
2.121.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-99
2.122.	Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto.....	II-99
2.123.	Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2015	II-100
2.124.	Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM Tahun 2013 – 2017	II-101
2.125.	Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-102
2.126.	Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto	II-102
2.127.	Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-103
2.128.	Penyelenggaraan Pertunjukan (festival) Seni dan Budaya di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-103
2.129.	Kamunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto.....	II-104
2.130.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-105
2.131.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) di Kota Sawahlunto	II-106
2.132.	Ketersediaan Ikan Darat Tahun 2013-2017.....	II-107
2.133.	Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha).....	II-108
2.134.	Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Tiket Masuk).....	II-108
2.135.	Data Potensi/Destinasi Wisata Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-110
2.136.	Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-112
2.137.	Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-113
2.138.	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-114



2.139.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Berlaku Sektor Usaha Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2013-2017 (jutaan Rupiah).....	II-115
2.140.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2013-2017	II-115
2.141.	Produktivitas Padi Tahun 2013-2017	II-116
2.142.	Luas lahan pertanian dan bukan pertanian Kota sawahlunto Tahun 2013-2017	II-116
2.143.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Kota Sawahlunto Tahun 2013- 2017	II-116
2.144.	Jumlah Sawah Yang Teririgasi dan Tadah Hujan Tahun 2013-2017	II-117
2.145.	Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2013-2017	II-118
2.146.	Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2013- 2017	II-119
2.147.	Populasi, KK Pemelihara dan Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-120
2.148.	Populasi, KK Pemelihara dan Rata-Rata Kepemilikan Ayam Ras Pedaging Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-121
2.149.	Populasi, KK Pemelihara dan Rata-Rata Kepemilikan Ayam Ras Petelur Kota Sawahlunto Tahun 2012-2017	II-121
2.150.	Tingkat Ketercapaian dan Realisasi Ayam Ras Petelur Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-123
2.151.	Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2013-2018	II-124
2.152.	Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-124
2.153.	Jumlah Pedagang Kaki lima di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-125
2.154.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2013-2017	II-126
2.155.	Jumlah Industri dan Omset Di Kota Sawahlunto Tahun 2014 s/d 2017	II-127
2.156.	Penyebaran Industri Kecil Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-128
2.157.	Penyebaran Industri Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-128
2.158.	Ketersediaan Dokumen PerencanaanKota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-129
2.159.	Peringkat LPPD Kota Sawahlunto di Tingkat Provinsi Sumatera Barat	II-130
2.160.	Realisasi APBD Kota Sawahlunto.....	II-131
2.161.	Daftar Temuan Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2015-2017	II-131
2.162.	Daftar Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2015-2017 ...	II-131
2.163.	Daftar Status Penyelesaian Kasus Tahun 2015-2017...	II-132
2.164.	Jumlah Auditor di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-132
2.165.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 5 Tahun Terakhir	II-133
2.166.	Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir	II-134
2.167.	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2016-2017	II-136
2.168.	Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 da 2017.....	II-138
2.169.	Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	II-139
2.170.	Luas Pola Ruang Di Kota Sawahlunto	II-143
2.171.	Rasio RTH Per Satuan Luas Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-144



2.172.	Rasio Bangunan Ber IMB Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-144
2.173.	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.....	II-145
2.174.	Luas Wilayah Industri Tahun 2013-2017.....	II-146
2.175.	Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2017.....	II-146
2.176.	Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2013-2017.....	II-147
2.177.	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2013- 2017	II-148
2.178.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2013-2017.....	II-148
2.179.	Persentase Penduduk Kota Sawahlunto yang menggunakan HP/Telepon Tahun 2013-2017	II-149
2.180.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-149
2.181.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015	II-150
2.182.	Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2014 – 2017	II-150
2.183.	Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto.....	II-151
2.184.	Kesesuaian Pelaksanaan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan SOP Tahun 2017	II-151
2.185.	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah 2015-2017	II-153
2.186.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sawahlunto.....	II-155
3.1.	Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	III-3
3.2.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017	III-4
3.3.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	III-6
3.4.	Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	III-8
3.5.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	III-9
3.6.	Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Wajib dan Mengikat Terhadap Total Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	III-10
3.7.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023	III-12
3.8.	Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	III-15
3.9.	SILPA Kota Sawahlunto TA 2013-2017.....	III-17
3.10.	Tolok Ukur Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD).	III-17
3.11.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	III-18
3.12.	Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Kota Sawahlunto, tahun 2013-2017	III-19
3.13.	Analisis Rasio Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	III-20
3.14.	Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2013-2017	III-20
3.15.	Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2013-2017	III-21
3.16.	Rata-rata Tingkat Perputaran Piutang Kota Sawahlunto TA 2013-2017	III-21
3.17.	Rata-rata Tingkat Perputaran Persediaan Kota Sawahlunto TA 2013-2017	III-21



3.18.	Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013 – 2017	III-23
3.19.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023	III-25
3.20.	Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto TA 2015-2017	III-26
3.21.	Kinerja Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto 2013-2017	III-27
3.22.	Anggaran dan Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	III-30
5.1.	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Sawahlunto	V-8
6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kota Sawahlunto.....	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sawahlunto	VI-3
6.3.	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Sawahlunto.....	VI-11
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kota Sawahlunto.....	VII-2
7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sawahlunto	VII-4
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto..	VIII-2
8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-4



DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1. Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-13
	2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2013 – 2017	II-13
	2.3. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2013– 2017.....	II-16
	2.4. Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2013-2017	II-17
	2.5. PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017 ...	II-18
	2.6. Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2013 – 2017	II-19
	2.7. Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2013 – 2017.....	II-20
	2.8. Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kota Sawahlunto dan Sumatera Barat.....	II-21
	2.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto....	II-21
	2.10. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto	II-22
	2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-23
	2.12. Tabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-24
	2.13. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-24
	2.14. Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-27
	2.15. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-28
	2.16. Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto pada Tahun 2013-2017	II-29
	2.17. Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018	II-42
	2.18. Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2016	II-44
	2.19. Jumlah Grup Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-45
	2.20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.....	II-74
	2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017	II-77
	2.22. Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017.....	II-78
	2.23. Rasio Penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2017	II-79
	2.24. Perbandingan ketersediaan beras dengan konsumsi beras Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-84
	2.25. Perbandingan konsumsi beras (kg/kapita/tahun) Nasional, Propinsi dan Kota Sawahlunto Tahun 2015-2017	II-85
	2.26. Perbandingan Ketersediaan Produksi Dengan Konsumsi Daging Sapi Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017.....	II-85
	2.27. Perbandingan Konsumsi Daging Sapi (Kg/Kapita/Tahun) Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota Sawahlunto.....	II-86



2.28.	Perbandingan Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Konsumsi Ayam Pedaging (Kg/Kapita/Tahun) Tahun 2013-2017	II-87
2.29.	Perbandingan Ketersediaan Dan Konsumsi Telur Ayam Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-88
2.30.	Perbandingan Konsumsi Telur Ayam Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2016	II-88
2.31.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2015 dan 2016	II-101
2.32.	Perbandingan Ketersediaan Dan Konsumsi Ikan Darat Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2016	II-107
2.33.	Perbandingan konsumsi perkapita ikan tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017 (Kg/kapita/tahun)	II-107
2.34.	Perbandingan produktivitas padi (ton/ha) tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-118
2.35.	Perbandingan Target dan Realisasi Populasi Ternak Sapi Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-120
2.36.	Perbandingan Target dan Realisasi Populasi Ayam Petelur di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017	II-123
2.37.	Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)	II-134
2.38.	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Barang Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2017 (Dalam Rp.)	II-137
2.39.	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Barang (Dalam Rp) Kota Sawahlunto Tahun 2015 – 2016	II-138
2.40.	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2013 – 2017...	II-141
2.41.	Perkembangan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2013 – 2017	II-141



DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Peta Administrasi Kota Sawahlunto	II-2
	2.2.	Peta Geologi	II-4
	2.3.	Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto ..	II-6



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 MARET 2019
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan strategis, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan Kepala Daerah yang dilandasi oleh kondisi daerah. RPJMD juga merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk dipedomani oleh pelaku pembangunan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun bermitra dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah, memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional memperhatikan tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan gender.

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023. Dilihat dari arah dan pentahapan pembangunan Kota Sawahlunto yang termuat dalam RPJPD Kota Sawahlunto, saat ini RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 berada pada tahap keempat periode RPJMD dalam RPJPD. Secara umum arah pembangunan pada tahap keempat harus menjadi pedoman dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2018-2023 berdasarkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2018-2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, dan dilantik pada tanggal 17 September 2018.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



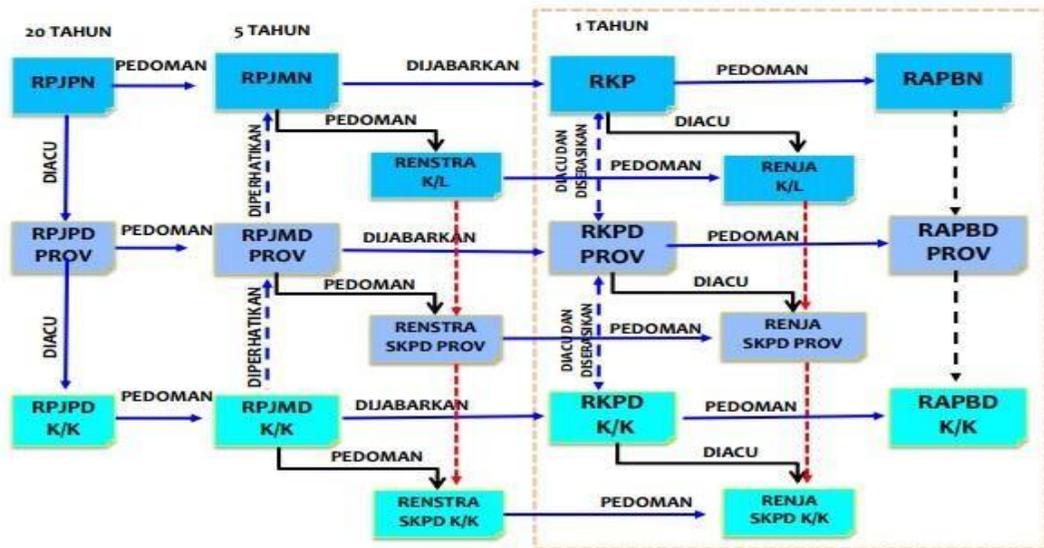
- Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032;
 28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 16).
 29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);



1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



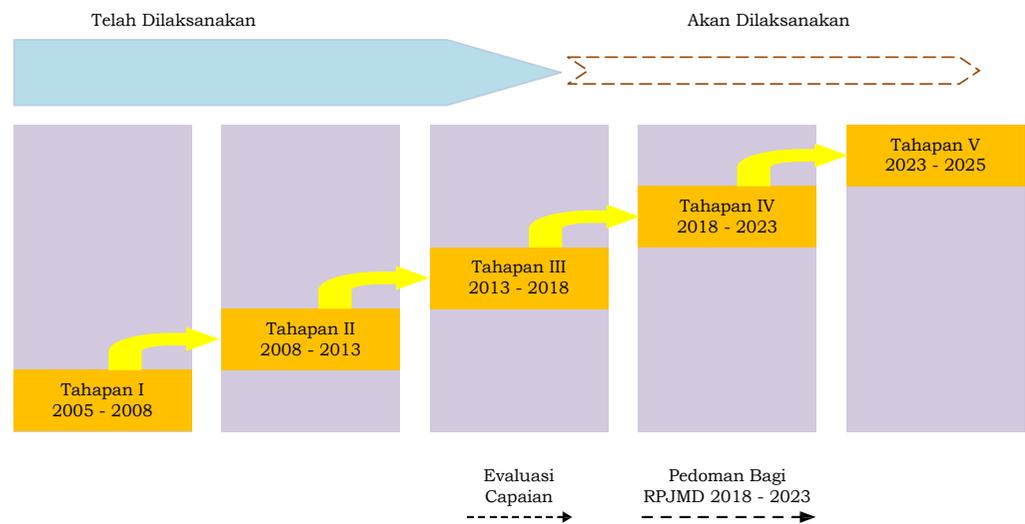
Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/ Daerah

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Sawahlunto dengan RPJPD Kota Sawahlunto

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto periode 2018-2023, juga berpedoman RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.



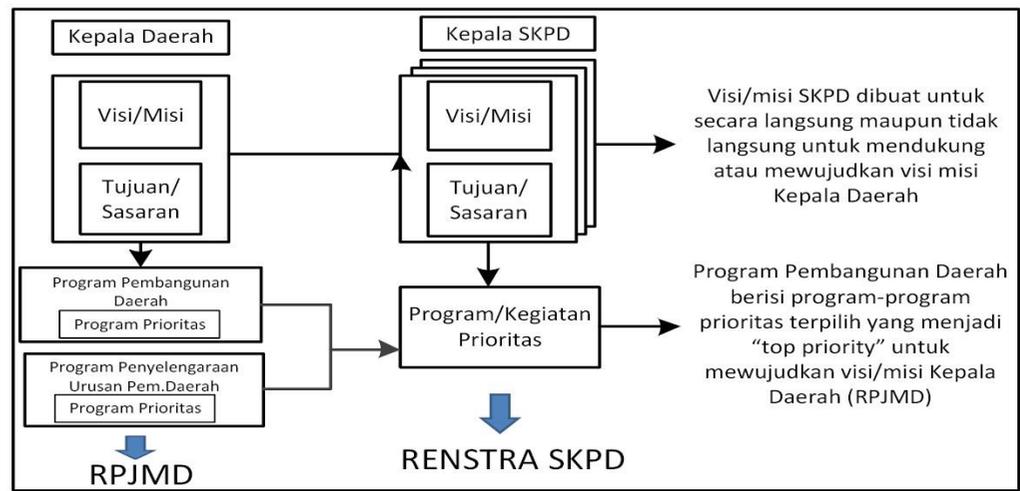
2. RPJMD Kota Sawahlunto dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan responsif Gender.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Barenlitbangda) Kota Sawahlunto.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

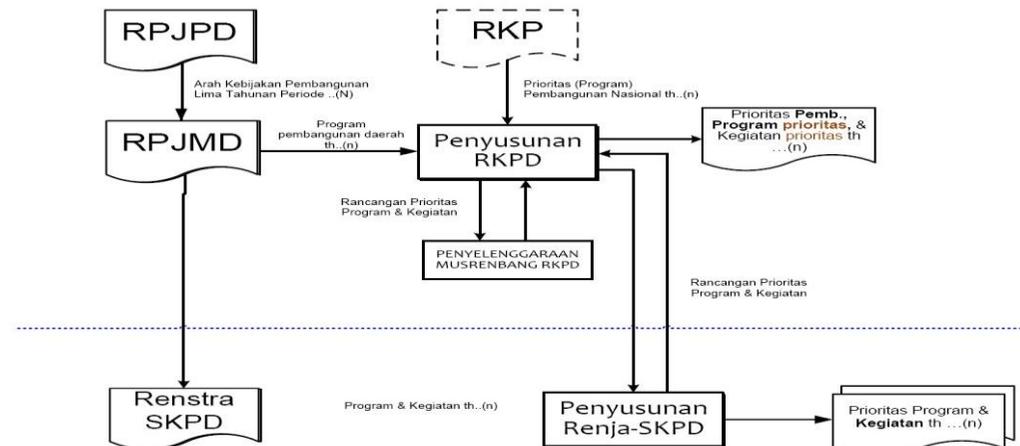


Gambar 1.4. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

3. RPJMD Kota Sawahlunto dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama Musrenbang atau yang dikenal dengan Mekanisme Perencanaan Berbasis Masyarakat MPBM/ Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Sawahlunto, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar 1.5. Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

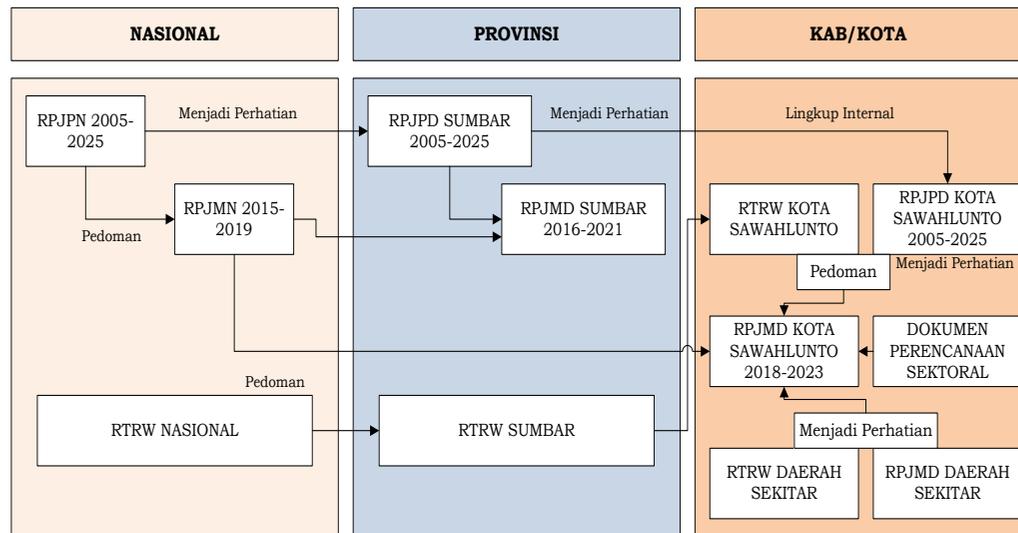
4. RPJMD Kota Sawahlunto dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Sawahlunto, yaitu:



- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto;
- Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Sawahlunto seperti Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung;

Skema hubungan antara RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 1.6 : Hubungan Antara RPJMD Kota Sawahlunto Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto berpedoman pada RTRW Kota Sawahlunto yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW Kota Sawahlunto, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten sekitarnya, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



5. RPJMD Kota Sawahlunto dengan Rencana Pembangunan Sektoral.

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 serta Rekomendasi Musrenbang RPJMD Kota Tahun 2018-2023. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sumatera Barat, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Barat, Grand design Smart City Kota Sawahlunto, RAD Universal akses RAD 100-0-100 Kota Sawahlunto tahun 2017 dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pembangunan daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah :

1. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah;
4. Memudahkan dalam mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
5. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian pembangunan daerah untuk lima tahun.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX : PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. KONDISI GEOGRAFI DAERAH

1. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Kondisi Geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dimana posisi koordinat antara 100°41'00' - 100°49'60" Bujur Timur dan 00°33'40' - 00°48'33" Lintang Selatan, dibagian Propinsi Sumatera Barat, sedangkan batasan wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tanah Datar
- ❖ Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Solok
- ❖ Sebelah Timur : dengan Kabupaten Sijunjung
- ❖ Sebelah Barat : dengan Kabupaten Solok.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang memiliki luas wilayah 27.345 Ha (273.45 Km²) atau sekitar 0,65% dari luas Propinsi Sumatera Barat, secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km² atau sebesar 12.04% sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km² atau sekitar 36.35% untuk lebih jelasnya mengenai jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan peta wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar 2.1:

Tabel 2.1
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM ²)
(1)	Kecamatan Barangin	32	13	25	88,55
01	Desa Lumindai	-	-	5	20,10
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3	12,95
03	Kel. Saringan	11	5	-	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-	1,00
05	Kel. Durian I	6	2	-	1,17
06	Kel. Durian II	8	4	-	1,25
07	Desa Talago Gunung	-	-	4	17,30
08	Desa Santur	-	-	5	8,69
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3	8,52
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5	16,76
(2)	Kecamatan Lembah Segar	32	14	22	52,58
01	Desa Lunto Barat	-	-	4	5,11
02	Desa Lunto Timur	-	-	4	4,89
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3	9,32
04	Desa Kubang Tengah	-	-	5	20,15
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6	11,56
06	Kel. Pasar	6	3	-	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-	0,16
11	Kel. Air Dingin	4	2	-	0,14
(3)	Kecamatan Silungkang	-	-	21	32,93
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4	6,57
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3	8,43
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6	8,58
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5	5,13
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3	4,22
(4)	Kecamatan Talawi	-	-	39	99,39
01	Desa Sikalang	-	-	4	6,59
02	Desa Rantih	-	-	2	6,22
03	Desa Salak	-	-	3	6,60
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3	6,40



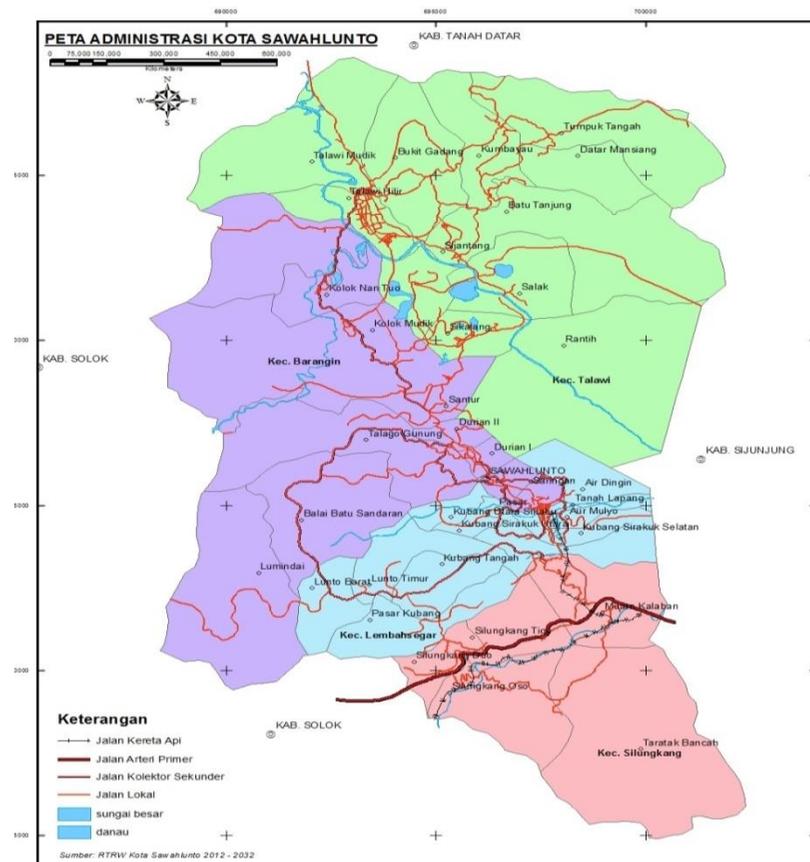
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM ²)
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4	10,21
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4	8,76
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3	7,74
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4	15,90
09	Desa Kumbayau	-	-	4	8,36
10	Desa Data Mansiang	-	-	2	6,29
11	Desa Tumpuak Tengah	-	-	6	16,32
Jumlah		64	27	107	273,45

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2017

Dari tabel diatas diketahui, bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya, atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga dan bahkan didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh Dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yng mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Untuk kategori Desa, Desa Lumindai yang terletak di Kecamatan Barangin adalah Desa yang terluas dengan Luas 20,10 KM². Sedangkan desa terkecil menurut luasannya adalah Desa Silungkang Duo yang terletak di Kecamatan Silungkang dengan Luas Daerah Administratif 4,22 KM². Sedangkan untuk Kelurahan Terluas adalah Kelurahan Durian II yang juga terletak di Kecamatan Barangin dengan Luas 1,25 Km², dan Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Air Dingin yang terletak di Kecamatan Lembah Segar dengan Luas Daerah Administratif hanya 0,14 Km².

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Peta Adminstratif Kota Sawahlunto di Bawah ini :



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto



2. Topografi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari Utara ke Selatan. Bagian Timur dan Selatan memiliki topografi yang relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relatif datar, temperatur udara berkisar antara 22°C - 30°C. Kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100-500m di atas permukaan laut. Kemiringan dan keterjaln bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Perbukitan yang terjal merupakan bentang alam yang dominan dalam daerah administrasi Kota Sawahlunto. Perbukitan ini dicirikan oleh bukit-bukit yang membulat dengan lereng bukit curam sampai terjal.

Kemiringan dan keterjaln bentang alam ini telah menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Selengkapnya kelerengan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					Jumlah
	0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.855
Lb. Segar	240	358	694	1.836	2.110	5.258
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012 - 2032

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), wilayah yang layak huni berada pada kemiringan < 15%. Jika dikonversikan, maka untuk Kota Sawahlunto, wilayah yang bisa dibudidayakan hanya seluas 5.183 Ha.

Tabel 2.3
Ketinggian Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (m dpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santua
Lb. Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

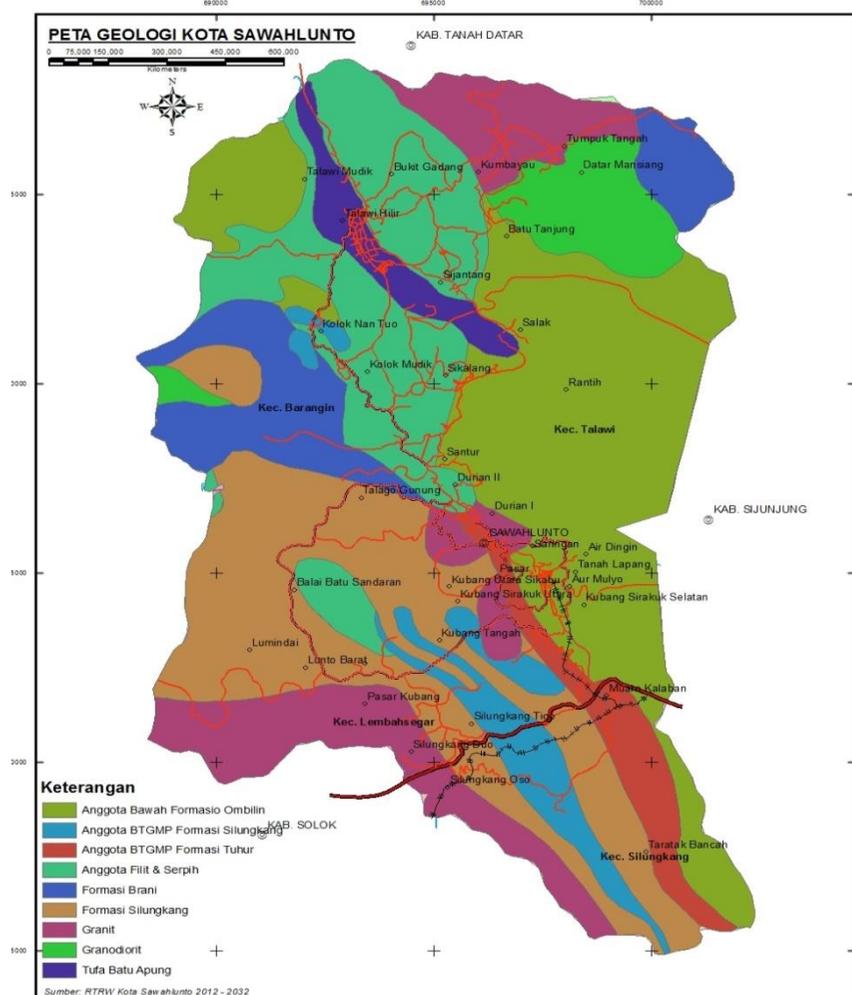
Sumber : SDA Tahun 2018

3. Geologi

Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) *Eocen* sekitar 40-60 juta tahun yang lalu, serta berada di cekungan *pra-tercier* Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan



Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman *tersier* atau berumur sekitar 2 juta tahun.



Gambar 2.2. Peta Geologi

4. Iklim dan Meteorologi

Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22°-30°C sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-30°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam *isohyat* (garis curah hujan) antara 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

5. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai utama yaitu:

a. Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik.

b. Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari Barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ke Timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.



c. Batang Lunto

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah Barat menuju Timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

d. Batang Sumpahan

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

e. Batang Lasi

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.

Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto, tetapi pada musim kemarau semua potensi sumber air baku dari mata air tidak mengalir sehingga terdapat masalah sumber air baku untuk wilayah Kota Sawahlunto perlu solusi yang komprehensif.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah sebesar 17.080 Ha. Pertanian lahan sawah sebesar 1.680 Ha dan lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) sebesar 8.585 Ha, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Tahun 2012- 2017 (Ha)

Penggunaan Lahan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kampung/pemukiman	3,071.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00
Kantor/Industri	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00
Sawah	2,097.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00
Tegal/Kebun/Ladang/Huma	283.00	283.00	283.00	283.00	283.00
Kebun Campuran	10,069.00	10,069.00	10,061.00	10,061.00	10,061.00
Perkebunan	2,123.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00
Hutan	4,298.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00
Semak/Alang-Alang	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00
Kolam/Tebat/Empang/D anau	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
Tanah terbuka/tandus Rusak	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00



Penggunaan Lahan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Taman Rekreasi/ <i>Olah Raga</i>	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
Lain-lain	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Jumlah	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

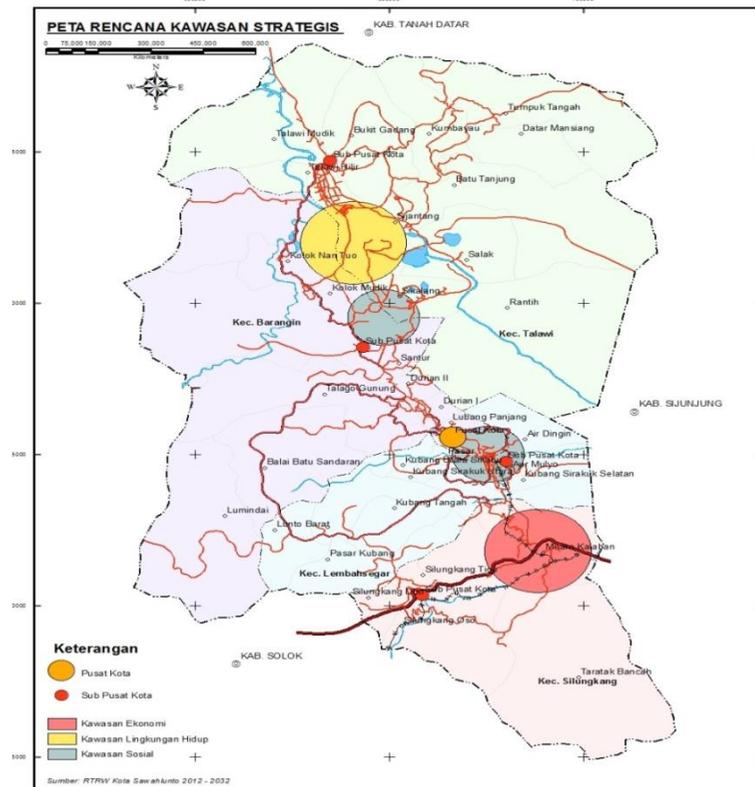
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut.

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi :

- 1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** ditetapkan di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muara Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.
- 2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** terdiri dari; Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; dan Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.
- 3. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata

Berikut disajikan Peta pengembangan Wilayah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.



Gambar 2.3. Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto



2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana alam yang sering terjadi berupa tanah longsor dan patahan (sesar).

Potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor dapat dipengaruhi dengan kondisi morfologi dan kemiringan lereng suatu wilayah. Pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam dan perusahaan lainnya di daerah Sawahlunto dan sekitarnya, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

1. Struktur Geologi (Patahan)

Pada Kota Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut - Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pebukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto-Santur.

Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Ombilin berarah Barat Laut-Tenggara dan Timur Laut - Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun perlipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Sesar turun Ombilin terlihat pada kontrol arah aliran Sungai Ombilin yaitu Barat Laut-Tenggara, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batukunit, sesar Sugar, sesar Salak dan sesar Sipang berarah Timur Laut-Barat Daya.

Berdasarkan analisa struktur mikro yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya bidang sesar (gores garis) dan arah kekar/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah umum dan jenis patahan. Sedangkan identifikasi adanya seretan (drag fold) akibat patahan dengan skala kecil, terlihat pada pemotongan tebing-tebing jalan raya propinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam skala besar seretan pebukitan.

Beberapa sesar geser (thrust fault) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (orde pertama) yang berarah barat laut-tenggara dan sesar Sugar berarah Utara Selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunto, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Parambahan telah mempengaruhi pola aliran Sungai Batang Ombilin dan anak-anak sungainya yang membentuk pola aliran Sungai Menangga (trellis).

2. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi, sedangkan longsor dan bidang lemah patahan akan cenderung menjadi faktor kendala dalam pengembangan wilayah. Kegempaan di Daerah Cekungan Ombilin berdasarkan catatan episenter (pusat gempa) dengan radius 400 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intensitas antara 4,5 sampai 5,5.



Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegempabumian, dalam banyak hal dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan batuan setempat, di samping karakteristik guncangan {ground shaking} yang dihasilkan oleh suatu besaran kegempabumian {magnitude}. Untuk memprediksi terjadinya gempa bumi di wilayah Sawahlunto secara makro didasarkan atas Peta Zonasi gempa-gempa yang bersifat merusak di Indonesia, menunjukkan posisi wilayah Ombilin atau Sawahlunto berada pada zone 3 dan 4 dengan besaran intensitas berkisar antara 0,13 - 0,25 g. Bencana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi baik itu kaitannya secara langsung yaitu berupa pergerakan patahan/sesar maupun gempabumi, sedangkan yang tidak langsung berupa gerakan tanah/ longsoran.

3. Banjir

Banjir merupakan suatu peristiwa ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan korban jiwa, harta benda fasilitas umum dan fasilitas kritis seperti rumah, pertokoan, jalan, jembatan, pasar dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada pengkajian resiko bencana yang dilakukan berdasarkan dokumen kajian resiko bencana di Kota Sawahlunto.

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya bencana banjir adalah geomorfologi, persentase luas DAS, landuse (tutupan vegetasi), jenis tanah, intensitas hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks bahaya dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian resiko bencana pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto. Dari hasil analisa kajian resiko bencana didapatkan bahwa indeks ancaman bencana banjir adalah tinggi, pada tahun indeks penduduk terpapar tinggi dengan jumlah jiwa yang terancam karena bencana ini sebanyak 20.564 jiwa yang tinggal/beraktifitas di kawasan terancam, maka tingkat ancaman bencana banjir di kota Sawahlunto adalah Tinggi.

4. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Dampak dari bencana ini bukan hanya pada fisik (kerugian harta benda, fasilitas umum dan fasilitas kritis) namun juga pada dampak nonfisik (korban jiwa).

Berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Resiko Bencana ada beberapa perhitungan untuk mengukur parameter indeks ancaman tanah longsor. Parameter yang dilihat untuk perhitungan indeks ancaman bencana tanah longsor adalah geomorfologi, tutupan vegetasi, jarak sesar/patahan, dan persentase kemiringan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian resiko bencana pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto.

Dari hasil analisa kajian resiko bencana Kota Sawahlunto didapatkan bahwa indeks ancaman bencana tanah longsor adalah tinggi, dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi. Jumlah jiwa terpapar yang terancam karena bencana ini ada sebanyak 23.366 jiwa yang tinggal/beraktifitas di kawasan terancam. Dengan demikian dapat



ditarik kesimpulan bahwa tingkat ancaman bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto adalah Tinggi.

5. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim (angin puting beliung) adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5 % distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer.

Berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Resiko Bencana ada beberapa perhitungan untuk mengukur parameter indeks ancaman cuaca ekstrim. Parameter yang dilihat untuk perhitungan indeks ancaman bencana cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian resiko bencana pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto.

Dari hasil analisa kajian resiko bencana Kota Sawahlunto didapatkan bahwa indeks ancaman bencana cuaca ekstrim adalah sedang, dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi. Jumlah jiwa yang terancam karena bencana ini ada sebanyak 23.366 jiwa yang tinggal dan beraktifitas di kawasan terancam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maka tingkat ancaman bencana cuaca ekstrim di Kota Sawahlunto adalah Sedang.

2.1.4. Demografi

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerjakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)					Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Silungkang	10.637	10.795	10.962	11.117	11.280	1,48
Lembah Segar	12.206	12.214	12.143	12.123	12.106	-0,203
Barangin	17.681	17.918	18.161	18.391	18.631	1,32
Talawi	18.448	18.681	18.920	19.147	19.381	1,24
Jumlah	58.972	59.608	60.186	60.778	61.398	1,01

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2018



Berdasarkan data diatas kecamatan Silungkang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan lebih tinggi dari kecamatan lainnya yaitu 1,48 persen sedangkan yang cenderung menurun jumlah penduduknya adalah kecamatan Lembah Segar -0,203 persen. Ini berarti di Kecamatan Silungkang angka kelahiran penduduknya cukup tinggi dari kecamatan lainnya sehingga sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Namun secara keseluruhan kota Sawahlunto mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 1,01 persen, jadi setiap tahunnya dari tahun 2013-2017 jumlah penduduk di Kota Sawahlunto meningkat 1,01 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini berpengaruh terhadap kepadatan penduduk suatu daerah, di Kota Sawahlunto kepadatan penduduknya dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017 (jiwa/Km²)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Silungkang	312,72	327,82	332,43	337,59	342,54
Lembah Segar	231,08	232,29	232,59	230,56	230,24
Barangin	193,95	202,34	204,40	207,69	210,40
Talawi	180,55	187,96	190,26	192,65	194,99
Jumlah	210,52	217,99	220,10	220,10	224,53

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dilihat dari laju pertumbuhan, Kecamatan Silungkang ini juga merupakan Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Sawahlunto. Seiring dengan hal tersebut, Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan talawi yang luas dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun 2013-2017 seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Sawahlunto.

Penduduk dapat dikelompokkan yang menggambarkan susunan penduduk menurut karakteristik tertentu, salah satunya pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur untuk tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Sawahlunto Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	3.095	3.043	6.138
5 - 9	3.071	2.897	5.968
10 - 14	2.638	2.693	5.331
15 - 19	2.500	2.351	4.851
20 - 24	2.051	1.936	3.987
25 - 29	2.331	2.375	4.706
30 - 34	2.332	2.320	4.652
35 - 39	2.193	2.307	4.500
40 - 44	2.183	2.218	4.401
45 - 49	2.145	2.041	4.186
50 - 54	1.678	1.739	3.417
55 - 59	1.452	1.602	3.054
60 - 64	1.029	1.186	2.215
65 - 69	838	932	1.770
70 - 74	469	569	1.038
75 +	481	703	1.184
Jumlah	30.486	30.912	61.398

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2018



Berdasarkan tabel diatas di Tahun 2017 kelompok umur 0-4 tahun mendominasi dari kelompok umur lainnya. Sedangkan komposisi yang paling sedikit adalah yang berumur 70-74 tahun. Perbandingan jumlah penduduk yang produktif (usia 15-65) dengan penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) untuk Tahun 2017 adalah 186,51 persen ini berarti dari 100 jumlah penduduk yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 186 -187 penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan ini sangat tinggi , karena penduduk yang tidak produktif lebih dominan dari pada penduduk yang produktif.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dan mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah di masa yang akan datang. PDRB menurut Lapangan Usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen (penduduk/masyarakat) atau non-residen.

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)* disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. Saat ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Berikut disajikan perkembangan nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.8
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

NO	Lapangan Usaha	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	182.045,58	189.795,25	198.647,23	203.193,18	207.669,66
2	Pertambangan dan Penggalian	179.391,64	181.563,40	189.314,59	174.569,61	161.365,58
3	Industri Pengolahan	251.716,12	269.428,58	279.553,65	301.299,65	317.440,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	35.060,16	39.453,64	40.974,49	45.304,49	50.107,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.046,57	7.403,83	7.836,52	8.381,74	8.942,48
6	Konstruksi	198.592,30	214.395,87	230.088,41	245.419,26	266.154,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	309.761,55	330.614,91	347.869,21	370.227,29	397.072,49
8	Transportasi dan Pergudangan	164.523,93	177.844,58	192.400,94	208.237,76	226.211,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.096,56	34.338,71	36.823,23	41.506,30	43.407,61
10	Informasi dan Komunikasi	142.235,65	155.261,70	168.768,91	185.427,19	204.441,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	67.374,07	71.922,70	75.703,37	81.223,08	83.075,58
12	Real Estat	35.025,21	36.431,93	38.588,70	40.093,66	41.676,63
13	Jasa Perusahaan	2.556,66	2.721,88	2.889,68	3.067,76	3.272,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	246.045,61	252.664,23	266.945,60	280.561,74	296.518,09



NO	Lapangan Usaha	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
15	Jasa Pendidikan	49.510,47	53.337,07	58.284,48	63.416,89	69.851,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.800,21	21.354,88	23.272,54	25.163,62	27.876,73
17	Jasa Lainnya	79.071,78	85.120,77	93.819,48	103.675,55	112.619,48
	Total PDRB ADHK	2.001.854,07	2.123.644,91	2.251.781,01	2.380.768,78	2.517.704,07

Sumber : Buku PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan perkembangan yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2013, PDRB Kota Sawahlunto Rp. 2.001,85 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp. 2.123,64 Milyar pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi Rp. 2.517,70 Milyar pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Sawahlunto secara riil memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, *karena perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mengabaikan faktor harga*. Dengan kata lain, jika harga tidak naik atau turun, nilai PDRB tetap naik, maka ini berarti *volume produksi atau output perekonomian Kota Sawahlunto terus menerus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017*.

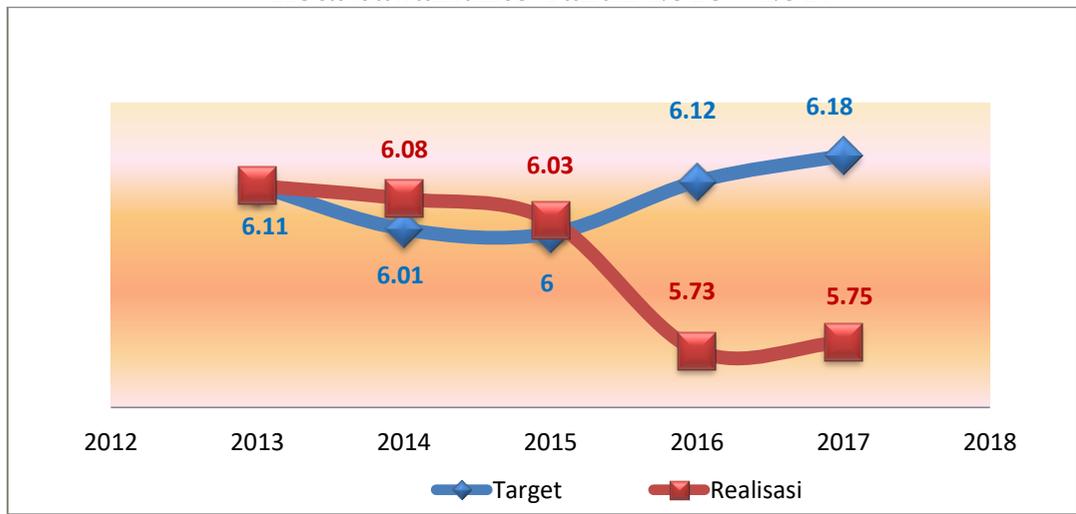
Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk mengukur *Laju Pertumbuhan Ekonomi* yang biasa disingkat dengan LPE dengan cara mengurangi nilai PDRB ADHK pada tahun ke-n dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1 atau tahun sebelumnya, dibagi dengan nilai PDRB ADHK pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Hasil perhitungan dimaksud menunjukkan perkembangan agregat produksi atau pendapatan atau pengeluaran suatu wilayah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto *mulai meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,75*, dimana sebelumnya mengalami pelambatan mulai tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada tahun 2013 *Laju Pertumbuhan Ekonomi* terrealisasi sebesar 6,11 kemudian melambat menjadi 6,08 pada tahun 2014, kemudian melambat lagi menjadi 6,03 pada tahun 2015 dan 5,73 pada tahun 2016. Pelambatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto ini tentu saja tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai sebagaimana yang dituangkan dalam target RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2018. Dimana berdasarkan capaian laju pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya, ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto periode 2013 – 2017 senantiasa meningkat.

Perbedaan target dan realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto ini *cukup signifikan*, dapat dilihat *dari gap* antara grafik target dengan grafik realisasi, dimana grafik realisasi *cenderung cekung terhadap grafik target*, yang merupakan indikasi *realisasi semakin menjauh dari target yang diinginkan*. Berikut disajikan grafik target dan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017.



Grafik 2.1
Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

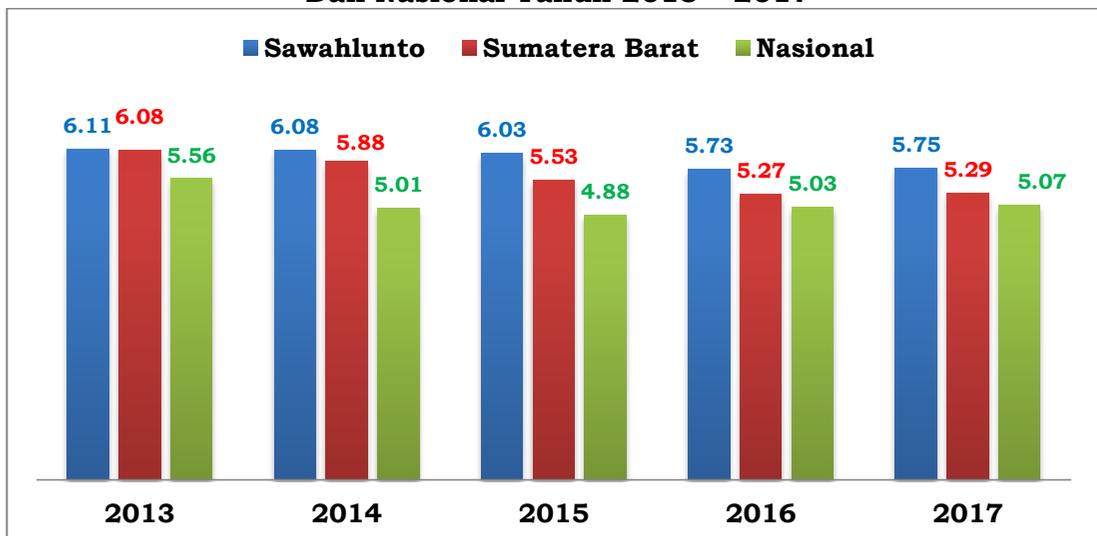


Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto (data diolah)

Melambatnya dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto ini seiring dengan melambatnya dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. Dimana *LPE Provinsi Sumatera Barat* sebesar 6,08 pada tahun 2013, kemudian melambat menjadi 5,88 tahun 2014, melambat lagi menjadi 5,53 tahun 2015, melambat lagi menjadi 5,27 tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 5,29 tahun 2017. Begitu juga dengan *LPE Nasional*, tahun 2013 sebesar 5,56, kemudian melambat menjadi 5,01 pada tahun 2014, melambat lagi menjadi 4,88 pada tahun 2015, kemudian mulai meningkat menjadi 5,03 tahun 2016 dan 5,07 pada tahun 2017. Hal ini berarti *melambat/meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto lebih disebabkan faktor eksternal yaitu lesu/bangkitnya perekonomian regional dan nasional sebagai dampak lesu/bangkitnya perekonomian global.*

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum tahun 2017 melambat, namun laju perkembangannya lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada Tahun 2013, *LPE Kota Sawahlunto* 6,11 sedangkan *LPE Provinsi Sumatera Barat* dan *LPE Nasional* berada di bawah *LPE Kota Sawahlunto*, yaitu 6,08 dan 5,56. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Pada grafik di bawah ini disajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumbar dan Nasional Tahun 2013-2017.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat
Dan Nasional Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS



PDRB Kota Sawahlunto juga dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku atau disingkat dengan PDRB ADHB. Berdasarkan nilai PDRB ADHB, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan tiga lapangan usaha dengan rata-rata kontribusi PDRB terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya dalam perekonomian Kota Sawahlunto selama tahun 2013 – 2017.

Pada Tahun 2017, kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah yang terbesar, yaitu mencapai 474,3 milyar rupiah atau sebesar 14,66 % dari total PDRB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 423,4 milyar rupiah atau 13,09 %. Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menghasilkan PDRB sebesar 378,6 milyar rupiah atau 11,70 % dari total PDRB.

Sedangkan Lapangan Usaha yang memiliki kecenderungan meningkat kontribusinya dari tahun ke tahun terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada periode tahun 2013–2017 adalah sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, dan Jasa lainnya. Sedangkan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kecenderungan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian telah berjalan dengan baik di Kota Sawahlunto. Karena pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika peralihan dari sektor primer (pertanian, pertambangan, dll) ke sektor industri dan bahkan ke sektor jasa berhasil dilakukan. Karena Sawahlunto dengan status Kota, maka seharusnya kontribusi sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian) semakin lama harus semakin berkurang, sedangkan kontribusi sektor jasa atau tersier semakin lama semakin besar. Berikut disajikan perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2017 :

Tabel 2.9
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017

NO	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB (%)					Rata-Rata Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,75	9,93	10,07	9,95	9,57	9,85
2	Pertambangan dan Penggalian	8,89	8,28	7,74	5,79	5,26	7,19
3	Industri Pengolahan	12,53	12,81	12,67	12,96	13,09	12,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,10	1,26	1,65	1,75	1,81	1,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,33	0,35	0,37	0,38	0,35
6	Konstruksi	10,44	10,55	10,85	10,99	11,00	10,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,94	14,63	14,56	14,79	14,66	14,72
8	Transportasi dan Pergudangan	7,72	7,78	7,80	7,88	8,00	7,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,69	1,79	1,95	2,17	1,88	1,9
10	Informasi dan Komunikasi	6,37	6,63	6,35	6,50	6,84	6,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	3,57	3,64	3,73	3,55	3,58
12	Real Estat	1,74	1,80	1,87	1,85	1,79	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,11	12,40	11,86	11,97	11,70	12,21



NO	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB (%)					Rata-Rata Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
15	Jasa Pendidikan	2,59	2,68	2,79	2,94	3,18	2,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,10	1,12	1,03	1,08
17	Jasa Lainnya	4,19	4,34	4,63	5,10	6,14	4,88
	Total PDRB ADHB	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto periode 2013–2017, terlihat semua lapangan usaha menunjukkan nilai yang positif, kecuali untuk lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif, karena penurunan produksi tambang batubara yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,62); Jasa Lainnya (9,16); Jasa Pendidikan (9,06), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial(8,81). Hal ini menunjukkan kecenderungan peran sektor jasa yang semakin meningkat terhadap pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto.

Berdasarkan laju pertumbuhan lapangan usaha pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, terlihat bahwa sektor yang dapat menjadi andalan perekonomian Kota Sawahlunto ke depan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor karena memiliki laju pertumbuhan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2013 laju pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,34%, kemudian meningkat menjadi 8,10 tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya. Begitu juga lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, meskipun pada tahun 2024 dan 2015 sempat menurun laju pertumbuhannya namun pada tahun 2016 dan 2017 meningkat lagi dengan laju pertumbuhan yang signifikan, dimana lapangan usaha Informasi dan Komunikasi meningkat menjadi 9,87% pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 10,25% pada tahun 2017, sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat menjadi 6,44% pada tahun 2016 dan 7,25% pada tahun 2017. Ketiga lapangan usaha ini, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang berkaitan langsung dan atau tidak langsung dengan sektor pariwisata. Ini sejalan dengan Visi Kota Sawahlunto, yaitu : **“Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”**.

Tabel 2.10
Pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-Rata Pertumbuhan PDRB per Tahun
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,05	4,26	4,66	2,29	2,20	3,49
2	Pertambangan dan Penggalian	0,88	1,21	4,27	-7,79	-7,56	-1,80
3	Industri Pengolahan	7,13	7,04	3,76	7,78	5,36	6,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,59	12,53	3,85	10,57	10,60	7,83
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,83	5,07	5,84	6,96	6,69	8,28
6	Konstruksi	11,34	7,96	7,32	6,66	8,45	8,35



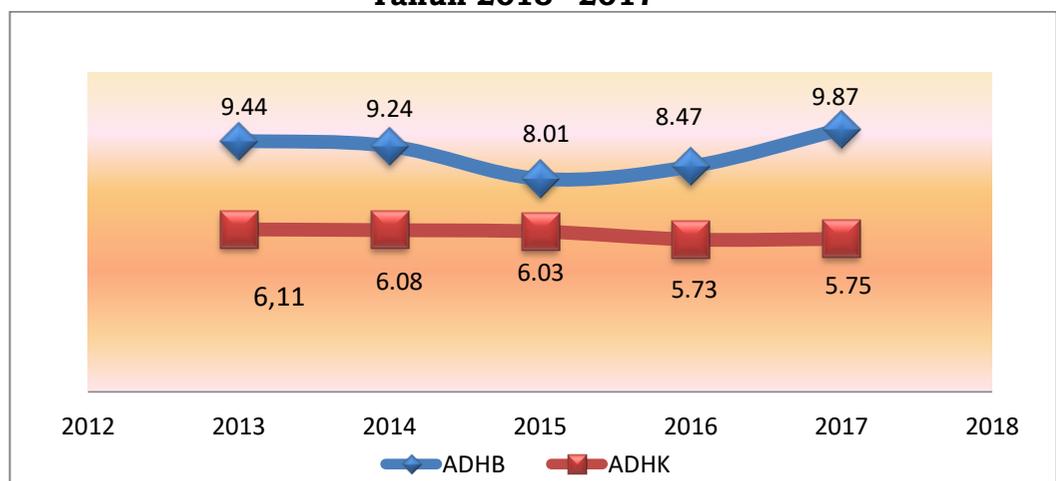
No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-Rata Pertumbuhan PDRB per Tahun
		2013	2014	2015	2016	2017	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,06	6,73	5,22	6,43	7,25	6,74
8	Transportasi dan Pergudangan	4,34	8,10	8,18	8,23	8,63	7,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	6,99	7,24	12,72	4,58	7,48
10	Informasi dan Komunikasi	10,1	9,16	8,70	9,87	10,25	9,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,82	6,75	5,26	7,29	2,28	5,28
12	Real Estat	5,69	4,02	5,92	3,90	3,95	4,70
13	Jasa Perusahaan	5,93	6,11	6,52	6,16	6,66	6,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,49	2,69	5,65	5,10	5,69	4,32
15	Jasa Pendidikan	9,33	7,73	9,28	8,81	10,15	9,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,29	7,85	8,98	8,13	10,78	8,81
17	Jasa Lainnya	8,78	7,65	10,22	10,51	8,63	9,16
	PDRB ADHK	6,11	6,08	6,03	5,73	5,75	5,94

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku jika kita bandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan pada periode tahun 2013-2017 akan membentuk perbedaan yang sangat signifikan. Secara teoritis perbedaan ini adalah karena adanya inflasi atau deflasi. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar 10,78 %, sedangkan laju pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan sebesar 5,53 %, ini secara teoritis terindikasi terjadi inflasi sebesar 5,25 %. Begitu juga untuk tahun 2016, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar 8,24 %, sedangkan laju pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan sebesar 5,71%, berarti terindikasi inflasi sebesar 2,53%. Dengan demikian, semakin besar gap antara laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan laju pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan, maka semakin tinggi tingkat inflasi.

Perbandingan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK
Tahun 2013- 2017



Sumber : Buku PDRB Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama periode



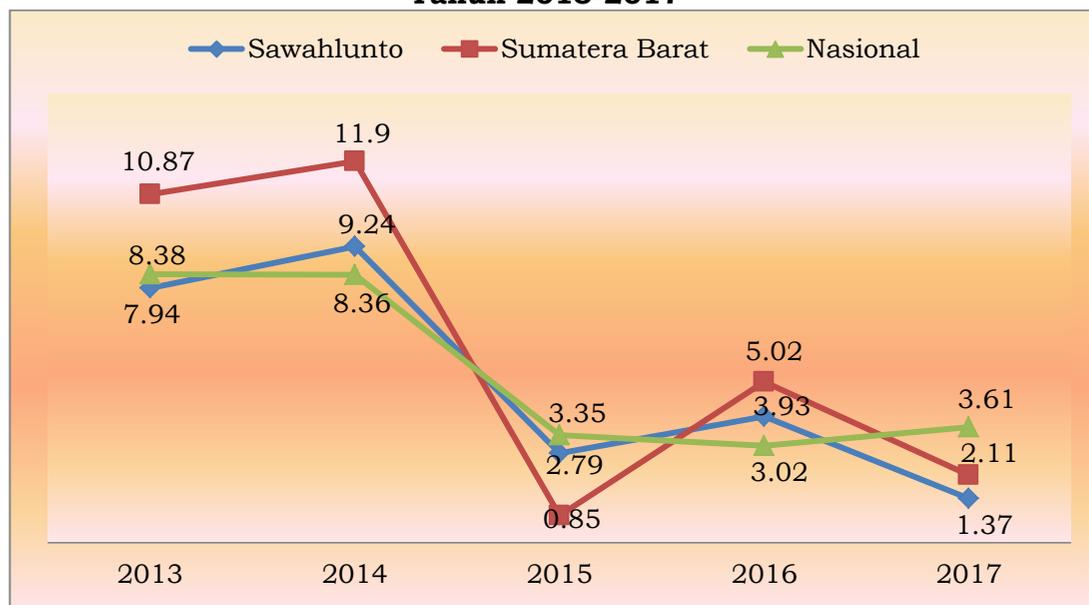
2013-2015, bahkan tahun 2015 *penurunannya sangat tajam* menjadi 8,01% dengan *indikasi terjadi deflasi*, dan meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menurun, namun *penurunannya cukup landai* pada periode 2013-2015, dan *cukup tajam pada tahun 2016*, kemudian mulai *merangkak naik tahun 2017*. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode 2013-2016 tersebut terjadi penurunan produksi yang diakibatkan turunnya harga barang secara umum/deflasi. Akan tetapi *penurunan produksi tidak setajam penurunan harga-harga barang*. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada periode 2016, dimana terjadi peningkatan laju pertumbuhan PDRB ADHB diiringi dengan penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK, ini *berarti inflasi yang berimbang pada terjadinya penurunan volume output* produksi. Hal ini sejalan dengan lesunya perekonomian global.

2.2.1.2. Laju Inflasi Kota

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka berarti harga barang dan jasa secara umum di suatu wilayah mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang, dengan demikian daya beli masyarakat juga menurun.

Laju inflasi Kota Sawahlunto merujuk ke laju inflasi Kota Bukitting. Karena untuk Provinsi Sumatera Barat, hanya 2 (dua) kota yang dihitung laju inflasinya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Berikut disajikan perkembangan laju inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2013-2017



Sumber : Buku PDRB Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa tingkat inflasi Kota Sawahlunto *cenderung berfluktuasi, meningkat/menurun seiring dengan inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat*. Inflasi terendah Kota Sawahlunto terjadi pada Tahun 2017, dimana inflasi Kota Sawahlunto 1,37%, sedangkan inflasi Provinsi Sumatera Barat 2,11% dan inflasi Nasional sebesar 3,61%. Inflasi tertinggi Kota Sawahlunto terjadi tahun 2014, yakni sebesar 9,24 %.



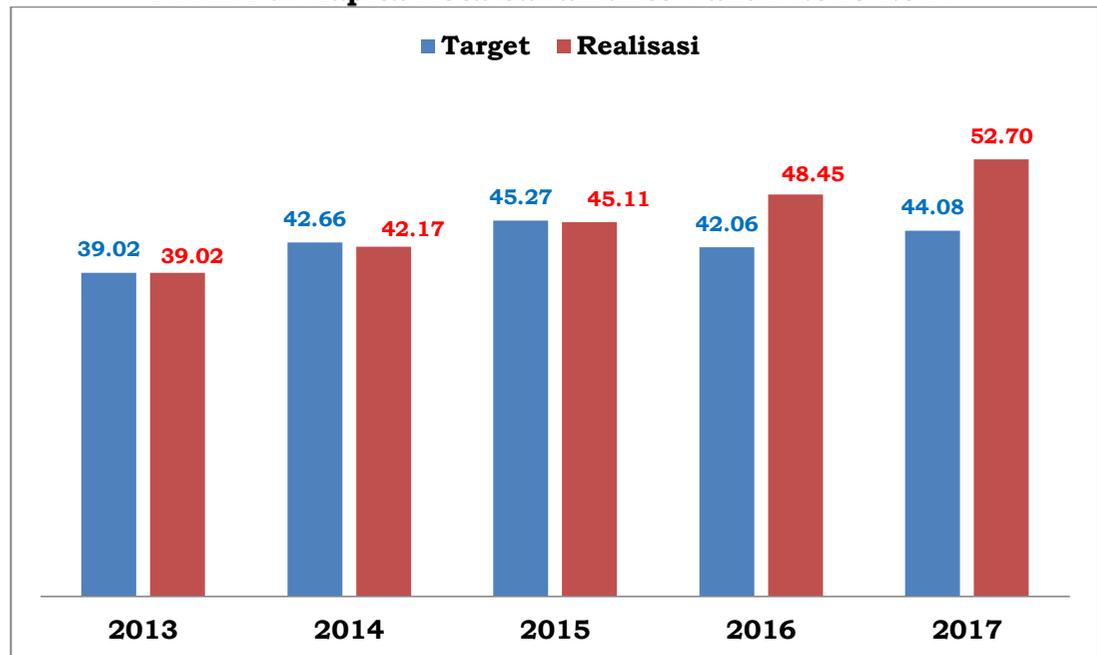
2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan total produksi domestik regional dibagi dengan jumlah penduduk disuatu daerah. Dengan demikian, PDRB Per Kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian per kapita penduduk suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB Per Kapita dapat menggunakan angka PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, tergantung kebutuhan. Namun yang lebih sering digunakan untuk menghitung PDRB Per Kapita per tahun adalah PDRB atas Dasar Harga Berlaku.

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan perbedaan antara target dan realisasinya cukup lebar, dengan kata lain realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016, target PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Rp. 42,06 juta, sedangkan realisasinya Rp. 48,45 juta, terdapat selisih Rp. 6,39 juta. Begitu juga tahun 2017, target PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Rp. 44,08 juta dan realisasi Rp. 52,70 juta, dengan demikian terdapat selisih Rp. 8,62 juta. Selisih yang cukup besar ini diduga terjadi karena adanya rasa pesimis dalam mengestimasi indikator makro pendapatan per kapita pada Perubahan RPJMD 2013 – 2018, dimana pada tahun 2016 tersebut terjadi defisit anggaran di tingkat pusat dan daerah yang berimplikasi pada pemangkasan anggaran pusat dan daerah yang cukup signifikan.

Namun pada kenyataannya, ekonomi masyarakat dan investasi tetap meningkat sejalan dengan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dari pemerintah melalui penurunan suku bunga bank untuk mengimbangi kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif.

Grafik 2.5
PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

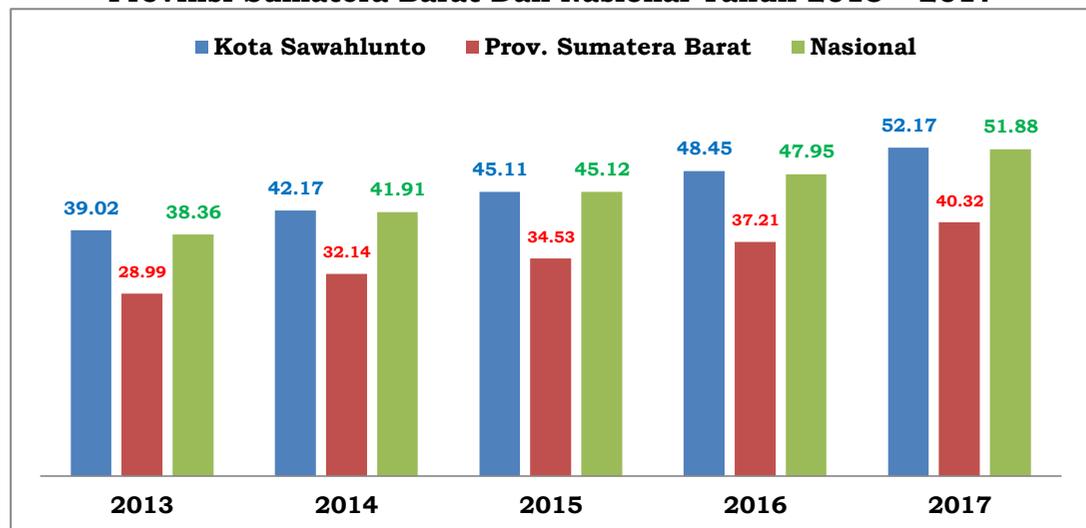


Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Di samping realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto jauh lebih tinggi dari targetnya, besaran PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2013-2017 juga lebih besar dari PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Per Kapita Nasional. Berikut disajikan grafik PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2013 – 2017.



Grafik 2.6
Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2013-2017 berada di atas PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Per Kapita Nasional. Tingginya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto didukung oleh *karakteristik Kota Sawahlunto sebagai Kota Tambang Batubara*, meskipun produksinya saat ini sudah mulai berkurang.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2017, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar Rp. 52,70 juta, sedangkan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 40,32 juta dan PDB Per Kapita Nasional sebesar 51,88 juta. Begitu juga pada tahun 2016, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar Rp. 48,45 juta, sementara PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 37,35 juta dan PDB Per Kapita Nasional sebesar Rp. 47,95 juta.

2.2.1.4. Indeks Gini

Ketimpangan perekonomian penduduk dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka Indeks Gini adalah 1-0. Semakin Indeks Gini mendekati angka 1, maka diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Sebaliknya, apabila Indeks Gini mendekati 0, maka diartikan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik. Indeks Gini < 0,3, tergolong ketimpangan rendah, Indeks Gini \geq 0,3 dan \leq 0,5 tergolong ketimpangan moderat dan Indeks Gini > 0,5, tergolong ketimpangan tinggi.

Tabel 2.11
Indeks Gini Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,29	0,34	0,33	0,31	0,29
Kriteria Ketimpangan	rendah	moderat	moderat	moderat	Rendah

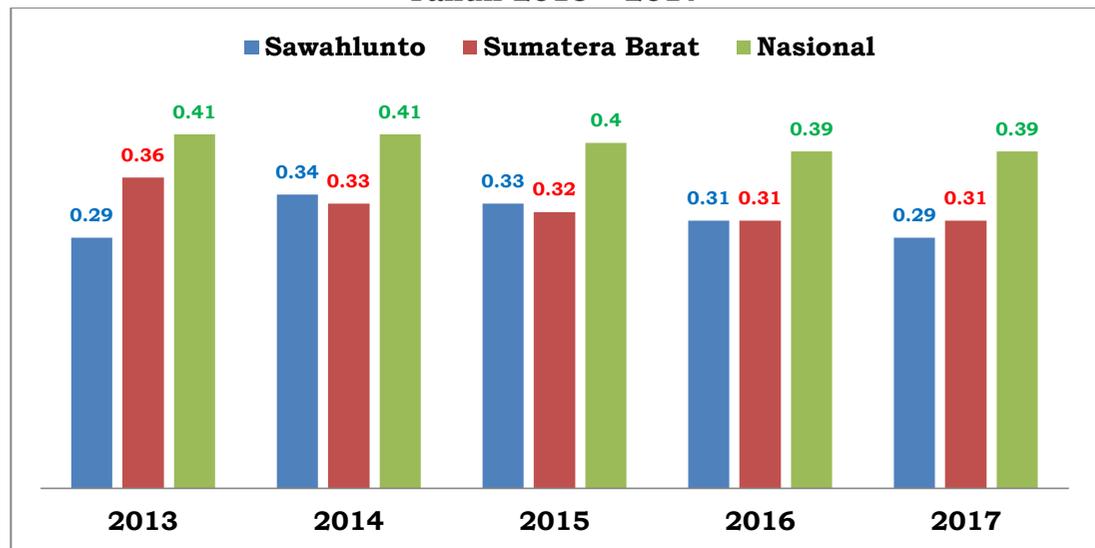
Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Indeks Gini Kota Sawahlunto dari tahun 2013–2017 berfluktuasi, dimana ketimpangan pendapatan kategori rendah pernah terjadi pada tahun 2013, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 0,34. Dan kembali cenderung menurun mulai tahun 2015 menjadi 0,33 dan 0,31 pada Tahun 2016 dan serta turun kembali menjadi 0,29 tahun 2017. Indeks Gini Kota Sawahlunto berdasarkan kriteria ketimpangan, tergolong ketimpangan moderat. Ketimpangan pendapatan di Kota Sawahlunto ini



tidak berbeda jauh dengan ketimpangan pendapatan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan perbandingan Indeks Gini Kota Sawahlunto dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 2.7
Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Berdasarkan grafik terlihat bahwa Indeks Gini Kota Sawahlunto selalu lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional setiap tahunnya. Terakhir pada tahun 2017, Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,29, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,31, dan Nasional sebesar 0,39

2.2.1.5. Persentase Tingkat Kemiskinan

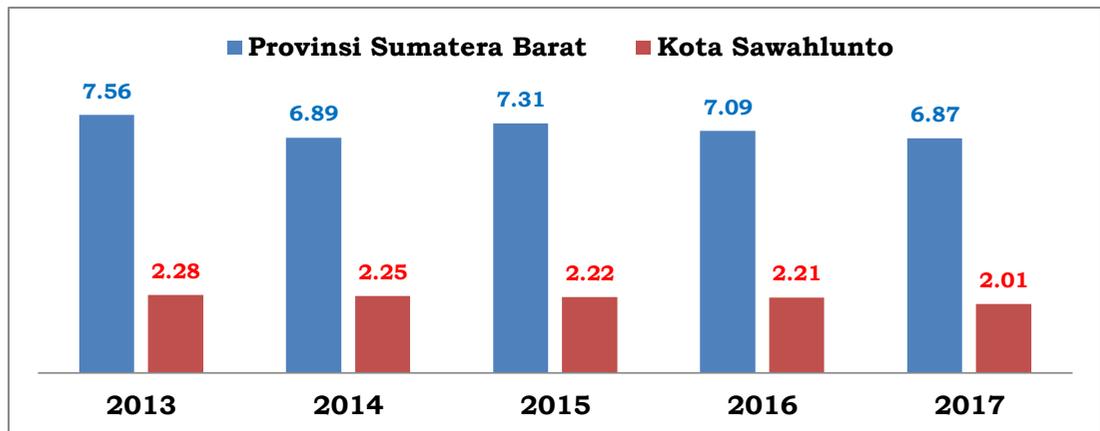
Tingkat kemiskinan di Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan di suatu daerah, yang mana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makan.

Target tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto pada akhir periode RPJMD tahun 2013-2018 adalah sebesar 1,75 persen, sedangkan berdasarkan data BPS, sampai akhir tahun 2017 sebesar 2,01 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 337.682,-. Ini berarti bahwa 97,99 persen Penduduk Kota Sawahlunto mempunyai tingkat pengeluaran kebutuhan dasar di atas Garis Kemiskinan dan target RPJMD untuk Tahun 2017 belum tercapai. *Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan mulai dari bantuan permodalan, pembekalan keterampilan sampai jaminan sosial bagi keluarga miskin yang sudah tidak produktif. Masing-masing instansi berupaya memaksimalkan program dan kegiatannya agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai.*

Grafik penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto seperti tergambar pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.8
Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kota Sawahlunto dan Sumatera Barat



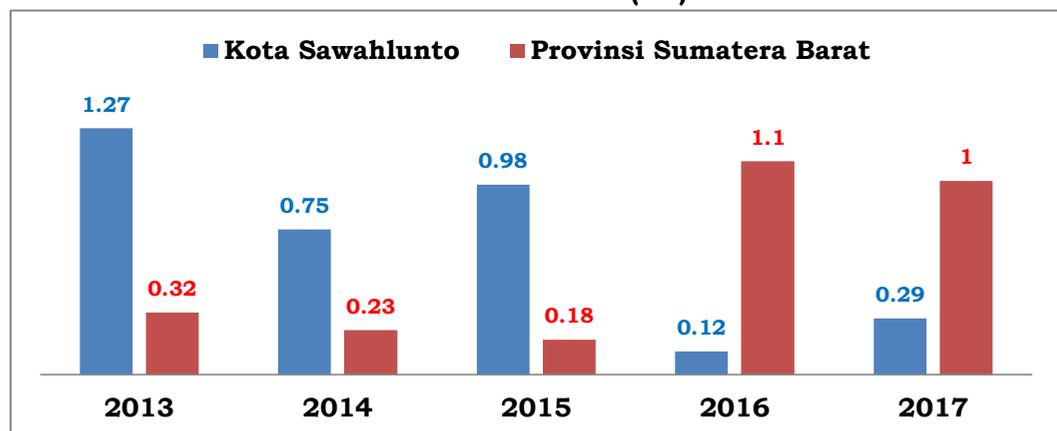
Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto cenderung melambat, namun berada jauh di bawah tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat. Bahkan secara nasional tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto berada di peringkat ke-2 terendah sesudah Kota Tangerang Selatan. Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan ini disebabkan sebagian besar dari penduduk miskin adalah kelompok usia tidak produktif, dimana dari 6.413 jiwa penduduk miskin, 3.390 jiwa berumur 60 tahun keatas dan 0-18 tahun, sedangkan yang usia produktif 3.023 jiwa. Berdasarkan data di atas maka program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ke depan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak usia 0-18 tahun dan lansia yang berumur 60 tahun ke atas seperti program bantuan kesehatan dan pendidikan.

2.2.1.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto

Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menggambarkan seberapa jauh kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan Garis kemiskinan yang telah di tetapkan. Ukuran indeks ini merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin jika diambil tolok ukurnya dari garis kemiskinan. Kriteria penilaian indeks ini adalah semakin besar nilai indeks, maka kedalaman kemiskinan makin jauh. Artinya jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Berikut disajikan data indeks P1 Kota Sawahlunto

Grafik 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Pada grafik diatas, terlihat bahwa untuk tahun 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Sawahlunto adalah sebesar 0,29. Dari kriterianya, nilai indeks kedalaman ini sangat rendah (Kecil). Apalagi jika

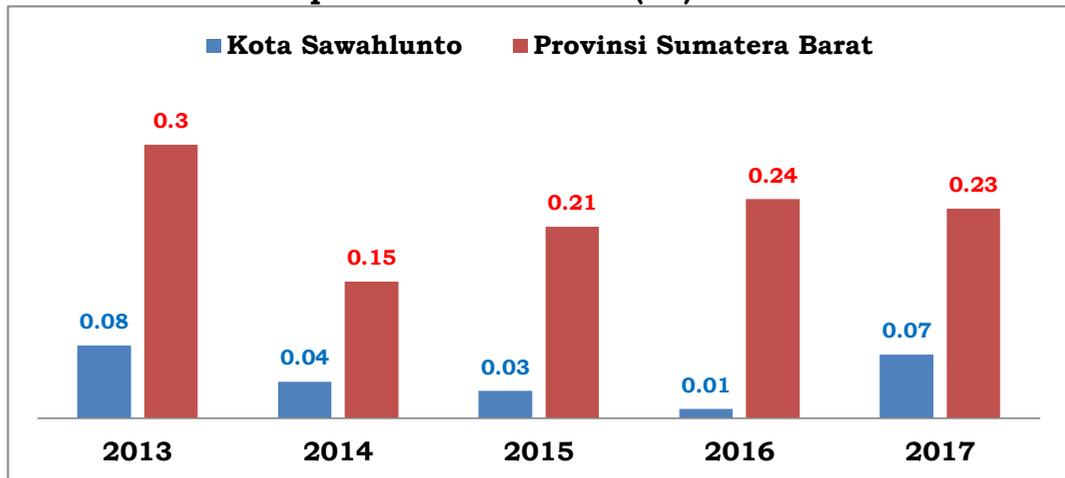


dibandingkan dengan Indeks P1 Provinsi Sumatera Barat sebesar 1 Hal ini dapat diartikan, penduduk miskin di Kota Sawahlunto secara rata-rata pengeluarannya tidak jauh dari garis kemiskinan yang sudah ditetapkan, dengan keseriusan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengentasan kemiskinan di Kota Sawahlunto, diharapkan target pengentasan kemiskinan menjadi 1,75 % Tahun 2018 dapat tercapai.

2.2.1.7. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto

Indikator Kemiskinan dengan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara Penduduk Miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Berikut disajikan data Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 dan disandingkan dengan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat dengan tahun yang sama.

Grafik 2.10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik diatas, terlihat bahwa nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto tahun 2017 sangat kecil yaitu sebesar 0,07. Hal ini sejalan dengan nilai indeks kedalaman yang juga rendah. Secara umum, jika dilihat perbandingan dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Sumatera Barat, indeks keparahan kemiskinan ini juga merupakan nilai terendah. Untuk Provinsi Sumatera Barat, nilai indeks Keparahan Kemiskinan di Sumatera Barat adalah 0,24. Artinya GAB pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih kecil dibandingkan secara rata-rata di Provinsi Sumatera Barat.

Dari analisa Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penduduk miskin di Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan. Bahkan jarak pengeluaran antara sesama penduduk miskin pun juga sangat kecil. Hal ini tentunya suatu apresiasi atas keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kota Sawahlunto. Keseriusan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan diharapkan dapat segera mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

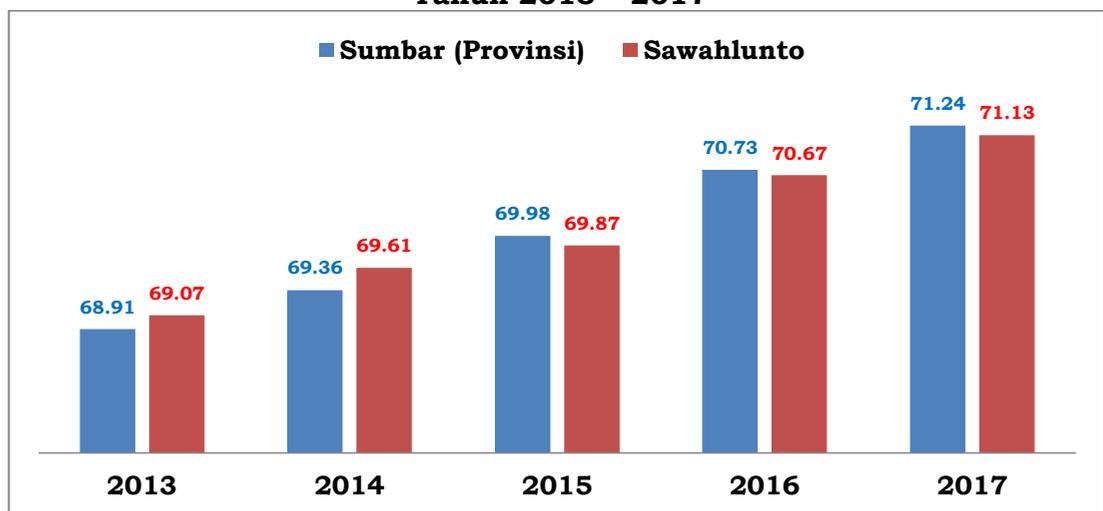
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM ini merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan membangun kualitas



hidup manusia. Metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia saat ini mengalami perubahan dari sebelumnya. Metode perhitungan IPM yang lama dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Kemampuan daya beli. Sedangkan metode perhitungan yang baru menggunakan Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Indikator Pengeluaran Perkapita.

Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dihitung dengan rumus : $1 - \text{Angka Kematian Bayi}$, angka ini merepresentasikan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, sedangkan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) mencerminkan output dari dimensi pendidikan, adapun indikator pengeluaran Perkapita digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Selanjutnya perkembangan Angka IPM Kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

Perkembangan IPM Kota Sawahlunto 2013-2017 memperlihatkan peningkatan yang sangat baik dan hal ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk IPM. Pada tahun 2013 angka IPM di Kota Sawahlunto baru mencapai 69,07 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 yaitu 71,13. Status IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2013-2015 adalah sedang dan pada tahun 2016 dan 2017 naik statusnya menjadi tinggi.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, IPM Kota Sawahlunto berada pada peringkat ke 7 di Propinsi Sumatera Barat dari 19 Kabupaten/Kota yang ada. Tetapi untuk cakupan Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terendah, yaitu ke 7 dari 7 kota yang ada. Hal ini disebabkan karena faktor pendukung dari IPM ini masih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian kota-kota lain di Propinsi Sumatera Barat.

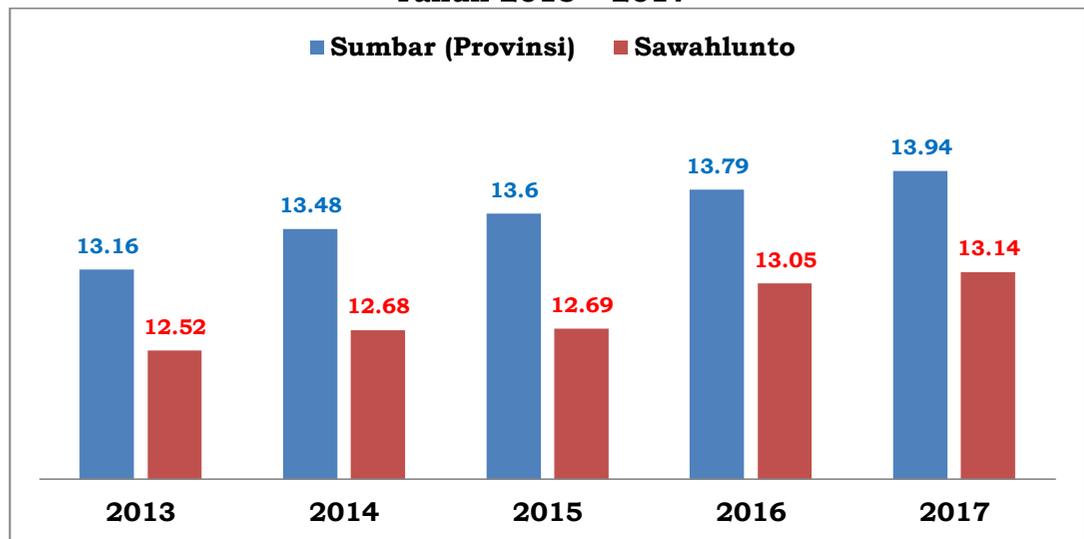
2.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini menggambarkan berapa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di



berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLIS di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Grafik 2.12
Tabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLIS) Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017



Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (ALHS) dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 AHLIS Kota Sawahlunto sudah mencapai pada angka 13,14. Angka ini merupakan peringkat ke 11 untuk dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto menduduki AHLIS terendah di antara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota
se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	KABUPATEN/KOTA	AHLS	Peringkat di Sumatera Barat
1	Kota Padang	16,15	1
2	Kota Padang Panjang	15,03	2
3	Kota Bukittinggi	14,94	3
4	Kota Pariaman	14,51	4
5	Kota Payakumbuh	14,23	5
6	Kota Solok	14,29	6
7	Kabupaten Agam	13,94	7
8	Kabupaten Tanah Datar	13,59	8
9	Kabupaten Padang Pariaman	13,56	9
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	13,26	10
11	Kota Sawahlunto	13,14	11
12	Kabupaten Pasaman Barat	13,06	12
13	Kabupaten Pesisir Selatan	13,06	13
14	Kabupaten Solok	13,01	14
15	Kabupaten Pasaman	12,72	15
16	Kabupaten Solok Selatan	12,68	16
17	Kabupaten Dharmasraya	12,4	17
18	Kabupaten Sijunjung	12,34	18
19	Kabupaten Kep. Mentawai	12,07	19

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan

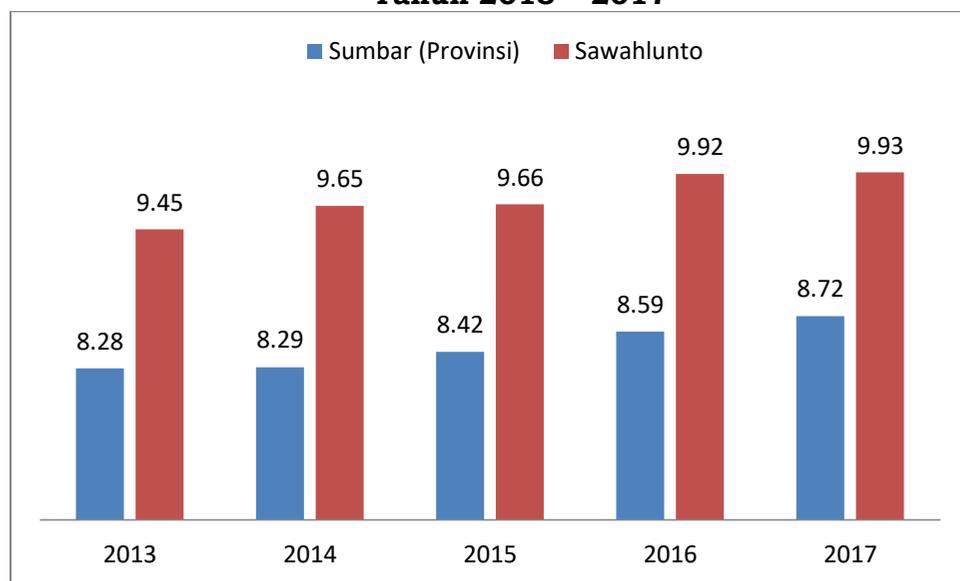


kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2013 sampai 2017 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Angka Rata Rata Lama Sekolah 9.45 Tahun dan pada tahun 2017 meningkat signifikan 9,93 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas I SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 7 dari Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan untuk tingkat Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terakhir dari kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota
se Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	KABUPATEN/KOTA	ARLS	Peringkat di Sumatera Barat
1	Kota Padang Panjang	11,43	1
2	Kota Padang	11,32	2
3	Kota Bukittinggi	11,30	3
4	Kota Solok	10,95	4
5	Kota Payakumbuh	10,45	5
6	Kota Pariaman	10,10	6
7	Kota Sawahlunto	9,93	7
8	Kabupaten Agam	8,39	8
9	Kabupaten Dharmasraya	8,24	9



No	KABUPATEN/KOTA	ARLS	Peringkat di Sumatera Barat
10	Kabupaten Tanah Datar	8,14	10
11	Kabupaten Pesisir Selatan	8,13	11
12	Kabupaten Solok Selatan	8,00	12
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	7,96	13
14	Kabupaten Pasaman Barat	7,85	14
15	Kabupaten Sijunjung	7,72	15
16	Kabupaten Pasaman	7,65	16
17	Kabupaten Solok	7,60	17
18	Kabupaten Padang Pariaman	7,21	18
19	Kabupaten Kep. Mentawai	6,69	19

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%. Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2013– 2017

No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2013	107,90	91,48	98,77
2.	2014	112,99	89,08	79,77
3.	2015	110,73	86,46	95,25
4.	2016	112,94	108,25	93,28
5	2017	105,93	95,21	100,20

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2018

Dilihat dari tabel di atas APK pada jenjang pendidikan SD sederajat selalu berada diatas 100 % setiap tahun. APK Jenjang pendidikan SD sederajat melebihi 100% yang berarti jumlah siswa SD sederajat lebih besar dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, nilai APK selalu berada dibawah 100 %, kecuali tahun 2016, sebesar 108,25%. Pada Tahun 2017, nilai APK tingkat SMP ini mengalami penurunan dari 108.25% menjadi 95,21%. Hal ini pada Tahun 2016 jumlah siswa yang lulus di tingkat SMP, usianya rata-rata lebih dari 15 tahun untuk melanjutkan ke tingkat SMA. Hal ini yang menyebabkan penurunan yang signifikan tingkat SMP pada tahun berikutnya, dan jenjang pendidikan SMA sederajat mengalami peningkatan untuk tahun yang sama. Untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, Nilai APK pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 95,21 % menjadi 100,20 %. Hal ini



menunjukkan bahwa jumlah siswa SD sederajat dan SMA sederajat lebih besar dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2013	92,52	68,16	79,07
2.	2014	100,00	85,63	76,43
3.	2015	96,39	76,98	82,47
4.	2016	100,00	100,00	87,04
5.	2017	99,70	86,83	72,26

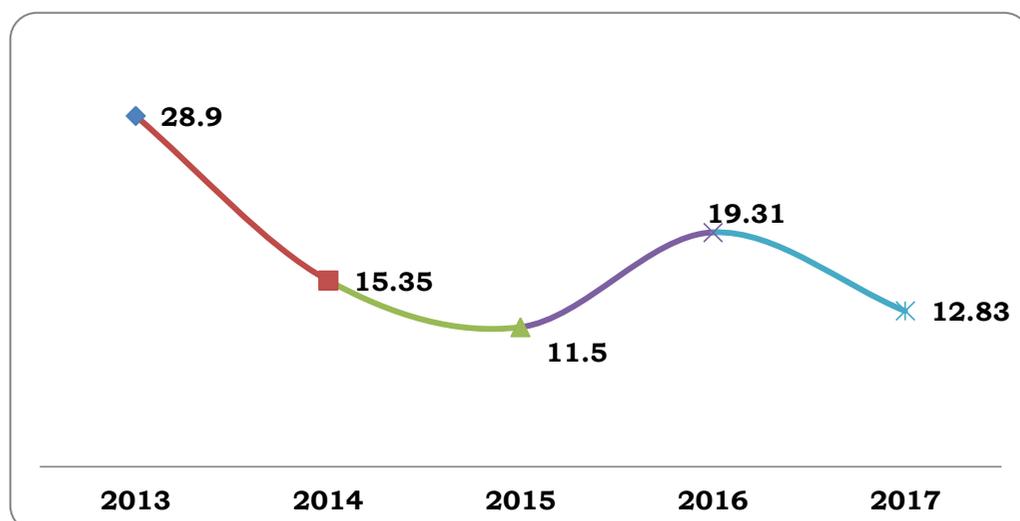
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2017

Pada tabel di atas, terlihat bahwa Nilai APM tingkat SD cenderung lebih tinggi dibanding Tingkat SMP dan SMA sederajat. Hal ini berarti, antusiasme bersekolah masyarakat pada usia SD (7-12 Tahun) masih tinggi. Seiring peningkatan jenjang pendidikan, nilai APM ini cenderung mengalami penurunan. Selain itu, faktor tinggal kelas juga akan mempengaruhi nilai APM ini. Pada tahun 2016, nilai APM ini mempunyai nilai tertinggi disbanding tahun-tahun sebelumnya untuk semua jenjang pendidikan. Bahkan nilai ini mencapai 100 %. Artinya, semua siswa dijenjang Pendidikan SD dan SMP sederajat, memang betul-betul berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun seluruhnya.

2.2.2.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1 - Angka Kematian Bayi). Angka Kematian Bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut dikali 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017



Sumber : Profil 2017

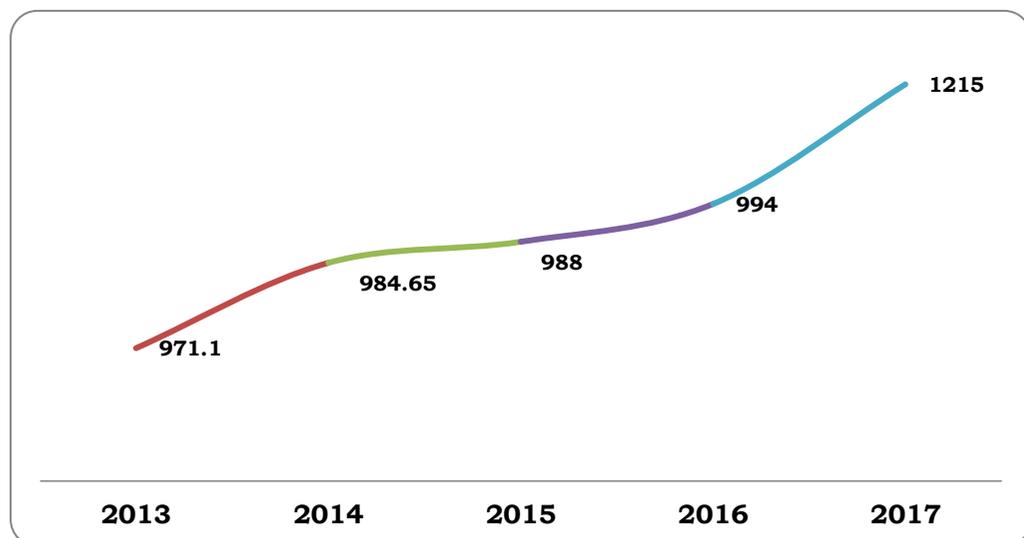
Pada grafik di atas, terlihat bahwa angka kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Angka



terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 11,5, sedangkan pada tahun 2016, terjadi sedikit peningkatan menjadi 19,31 kemudian turun lagi menjadi 12,83. Secara umum, angka ini sudah menunjukkan bahwa penanganan kesehatan ibu dan anak bayi mengalami perbaikan setiap tahun. Usia bayi merupakan suatu kondisi yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian dan hal ini juga dipengaruhi banyak hal. Beberapa program dan kegiatan telah dan akan tetap dilaksanakan dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi, melalui promosi kesehatan (penyuluhan-penyuluhan dan konseling tentang kesehatan ibu dan anak), melalui program P4K, kelas ibu hamil serta kemitraan bidan dan dukun melahirkan. Diharapkan kegiatan-kegiatan ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya penurunan angka kematian bayi ini. Bila dilihat dari grafik diatas dalam lima tahun terakhir Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dari data di atas juga dapat kita ketahui Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.15
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Data Olahan Bappeda

Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Sawahlunto selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Sawahlunto secara umum sudah makin membaik/meningkat, khususnya untuk indikator keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Peningkatan kelangsungan hidup bayi ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya frekuensi pemeriksaan antenatal, berat badan lahir, waktu pemberian ASI, pertolongan persalinan, nomor urut lahir dan lain lain. Oleh karena itu upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi serta pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan selalu dilakukan dan diintensifkan. Disamping itu program desa/kelurahan siaga, Gerakan Sayang Ibu (GSI), PHBS dan program lainnya, baik itu yang diprakarsai oleh OPD maupun Tim Penggerak PKK yang menunjang program kesehatan juga tetap dijalankan dan lebih diintensifkan sampai terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan AKI dan AKB yang makin menurun.

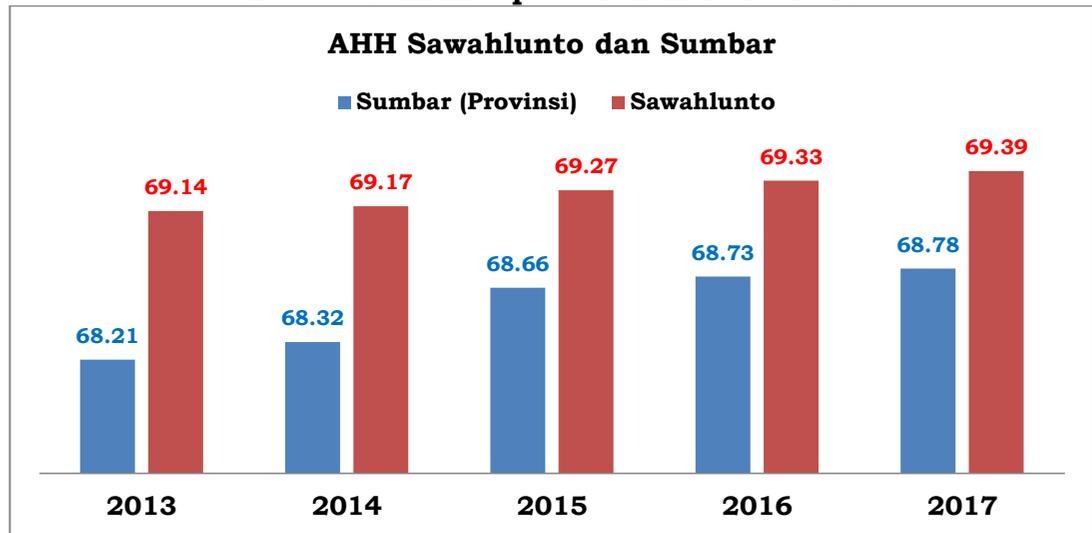
2.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka



ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.

Grafik 2.16
Angka Harapan Hidup
Kota Sawahlunto pada Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2013–2017 selalu mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Akan tetapi jika dilihat perbandingan dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat, ternyata Angka Harapan hidup (AHH) Kota Sawahlunto berada pada peringkat ke-10 (Sepuluh). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Peringkat Angka Harapan Hidup Kab/Kota
se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	2017	
		AHH	Peringkat
1	Kota Bukittinggi	73,69	1
2	Kota Padang	73,20	2
3	Kota Payakumbuh	73,13	3
4	Kota Solok	72,92	4
5	Kota Padang Panjang	72,46	5
6	Kabupaten Agam	71,57	6
7	Kabupaten Dharmasraya	70,44	7
8	Kabupaten Pesisir Selatan	70,23	8
9	Kota Pariaman	69,67	9
10	Kota Sawahlunto	69,39	10
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,31	11
12	Kabupaten Tanah Datar	69,11	12
13	Kabupaten Padang Pariaman	67,96	13
14	Kabupaten Solok	67,65	14
15	Kabupaten Pasaman Barat	67,15	15



16	Kabupaten Solok Selatan	66,92	16
17	Kabupaten Pasaman	66,54	17
18	Kabupaten Sijunjung	65,44	18
19	Kabupaten Kep Mentawai	64,37	19

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2.2.2.8. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2017 tidak terjadi kematian ibu di Kota Sawahlunto, hal ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yang kematiannya sebanyak 3 orang. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan superfisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Parinatal (RMP) serta peningkatan sosialisai tentang kelas ibu dan program P4K.

Tabel 2.17
Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH KEMATIAN IBU	1	3	1	3	0
	-KEMATIAN IBU NIFAS	1	2	1	2	0
	-KEMATIAN IBU HAMIL	0	1	0	1	0

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas kematian pada ibu terjadi pada ibu dan ibu hamil dengan penyebab 2 orang penyakit jantung, 1 orang kasus oedema paru, 3 orang kasus eklamasi, 1 orang kasus infeksi dan 1 orangm komplikasi tumor usus.

2.2.2.9. Jumlah Kasus Penyakit TB Paru

TBC adalah penyakit yang sangat menular dan mempunyai angka kematian yang sangat tinggi, ditularkan oleh organism Mycobacterium Tuberculosis complek. TBC bukan merupakan penyakit turunan atau guna-guna. Kebanyakan TBC menyerang paru paru tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti kelenjer getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan bagian tubuh lainnya. Seseorang dicurigai menderita TBC bila menunjukkan gejala batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kadang kadang dahaknya bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, badan lemah, demam meriang lebih dari sebulan dan lain lain. Pada tahun 2017 dari jumlah penduduk 61.398 orang yang diperiksa maka jumlah kasus TB semua type ditemukan 92 orang, sedangkan untuk Angka Notifikasi Kasus/ Case Notification Rate (CNR) sebanyak 149,8 per 100.000 penduduk, hal ini menunjukkan penurunan dari tahun 2016 yang mana jumlah kasus TB semua type ditemukan 97 orang dengan CNR 159,6 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.18
Jumlah Kasus TB di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH KASUS TB	55	62	59	97	92

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto



2.2.2.10. Jumlah kasus penyakit HIV AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus. Seseorang yang terinfeksi HIV akan mengalami infeksi seumur hidup. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang hidup didalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, sperma, vagina dan air susu ibu.

Untuk kasus HIV/AIDS di Kota Sawahlunto dari tahun 2013 s/d 2017 ditemukan sebanyak 19 kasus dengan rincian kasus yang ditemukan pada tahun 2013 sebanyak 11 kasus dan 3 kasus merupakan kumulatif dari tahun 2002 yang masih melakukan pengobatan. Sedangkan untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 sebanyak 1 kasus setiap tahunnya dan pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus HIV AIDS dengan jenis kelamin laki laki prakiraan usia 35 sampai 45 tahun dengan kematian 16 orang. Untuk kedepannya kasus ini perlu ditekan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi, membentuk tim komisi penanggulangan, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kelompok resiko tinggi, pengawasan minum obat bagi penderita dan lain sebagainya.

Tabel 2.19
Jumlah Kasus HIV AIDS di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH KASUS HIV AIDS	11	1	1	1	2

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

2.2.2.11. Jumlah Kasus Diare

Diare adalah buang air besar lembek, cair bahkan seperti air yang frekuensinya lebih sering dari biasanya (3 kali dalam sehari) dan ada juga yang disertai muntah., dehidrasi, lender dan darah dalam tinja serta gejala lain. Hal ini dapat disebabkan karena konsumsi air, lingkungan yang tidak bersih, tidak mencuci tangan dengan sabun saat makan, pengelolaan masakan dan lain-lain. Untuk kasus diare di Kota Sawahlunto pada tahun 2017 mencapai 76,5 persen dan meningkat dari tahun 2016 sebesar 70,5 persen. Sehubungan dengan adanya peningkatan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah tindakan seperti pemeriksaan Ecoli dan kimia air yang dikonsumsi masyarakat, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pembuatan jamban gratis dan sarana air bersih dan sebagainya.

Tabel 2.20
Persentase Kasus Diare yang ditangani di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	% Kasus Diare Ditangani	94	85	87	70,5	76,5

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

2.2.2.12. Jumlah Kasus Penyakit Malaria

Malaria adalah salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk jenis Anopheles, yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan yang memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak dan berpotensi melakukan kontak dengan manusia dan menularkan parasit malaria.

Secara teoritis nyamuk bisa terbang sampai 2-3 km, namun pengaruh angin jarak terbang nyamuk bisa mencapai 40 km. Bahkan dengan perkembangan sarana transportasi nyaamuk bisa mencapai daerah yang jauh dengan menumpang alat transportasi. Para ahli juga memperkirakan bahwa perubahan iklim global turut mempengaruhi penyebaran nyamuk malaria yang biasanya hanya ditemukan didaerah



dataran rendah sekarang bahkan bisa ditemukan didaerah pegunungan yang tingginya diatas 2000 m dari permukaan laut. Pada tahun 2017 di Kota Sawahlunto ditemukan 3 kasus yaitu di Kelurahan Tanah lapang 1 orang, dan Desa Kolok Mudik 2 orang. Semua ditangani sesuai protap dan dinyatakan sembuh setelah melalui perawatan.

Tabel 2.21
Jumlah Kasus Malaria di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus Malaria	3	2	3	1	3

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

2.2.2.13. Jumlah Kasus Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegyti yang tempat perindukannya pada air tergenang yang tidak kontak langsung dengan tanah, dibak mandi, tempayan, pot bunga yang berisi air, baju yang bergantung dan lain-lain serta kebiasaan menggigit pada pagi dan sore hari. Demam Berdarah Dengue ditandai dengan demam mendadak yang diikuti rash kemerahan, dan menunjukkan tanda tanda perdarahan, trombositopenia <100.000 iu dan Hematokrit yang meningkat tajam lebih dari 20 %. Kasus DBD ditahun 2017 di Kota Sawahlunto sebanyak 180 kasus dengan tanpa kasus kematian. Pada tahun 2016 sebanyak 205 kasus dan ini menunjukkan adanya penurunan kasus sebesar 20%. Untu mencegah kasus KLB dilakukan pengasapan atau fogging. Sawahlunto tidak termasuk endemis DBD karena tahun 2017 tidak terjadi kematian dan semua tertangani dengan baik.

Tabel 2.22
Jumlah Kasus DBD di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus DBD	77	41	170	205	180

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

2.2.2.14. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik

a. Jamban

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa factor seperti lingkungan, prilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih.

Tabel 2.23
Persentase RT Yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah	12.799	12.869	13.255	13.488	13.607
2	Jumlah rumah yang diperiksa	12.799	12.869	13.255	13.488	13.607
3	Jumlah rumah dengan jamban	11.557	11.715	12.160	13.073	12.702
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat	9.686	10.073	10.470	10.842	11.496
5	Persentase yang memenuhi syarat	83,81	85,98	86,10	82,93	90,50

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto



Dalam tujuh tahun terakhir ini dikota Sawahlunto Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2017 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 90,50 %. Disamping itu melalui kerja sama lintas sector program PNPM mandiri dilakukan kegiatan perbaikan rumah yang tidak layak huni beserta jambannya. Dilihat dari hasil cakupan rumah tangga tentang penggunaan jamban dari tahun ketahun ada peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban sudah dirasakan sehingga penularan penyakit menular dapat ditekan. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacangan dan lainnya.

b. Sarana Air Bersih

Air adalah kebutuhan pokok manusia dan sangat penting bagi kesehatan. Untuk menjamin kualitas air yang akan digunakan untuk konsumsi air minum, masak, mandi, cucian dan lain lain perlu adanya suatu pengawasan terhadap penyediaan air tersebut guna mengkaji dan menjamin keamanan, kenyamanan air yang akan didistribusikan dan digunakan masyarakat sehingga terlindung dari kontaminasi bahan yang membahayakan kesehatan. Rendahnya cakupan air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan berhubungan dengan penyakit berbasis lingkungan seperti tingginya kejadian penyakit diare, tifus, kolera dan lain lain. Agar masyarakat terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan timbul maka perlu diadakan monitoring dan surveilen terhadap penyedia air minum (Depot air minum isi ulang, PDAM, sumur gali, PAH dan lain lain) dalam pengawasan berbentuk sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, pencemaran, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, pemberian rekomendasi. Syarat air bersih secara fisik, kimia dan mikrobiologi adalah air tersebut bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak mengandung zat kimiawi dan tidak mengandung kuman penyakit.

Tabel. 2.24
Persentase RT dengan SAB yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah	12.799	12.869	13.255	13.488	13.607
2	Jumlah rumah yang diperiksa	12.799	12.869	13.255	13.488	13.607
3	Jumlah rumah dengan SAB	11.163	11.437	12.002	12.197	13.190
4	Jumlah rumah dengan SAB yang memenuhi syarat	10.121	10.429	10.903	10.954	11.557
5	Persentase yang memenuhi syarat	90,66	91,18	90,84	89,80	87,61

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Sesuai dari hasil capaian program dari table diatas untuk kota Sawahlunto rumah tangga yang menggunakan sarana air bersih cukup tinggi rata rata 90 % dan hal ini perlu terus dikembangkan. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar masyarakat benar benar dapat memenuhi kebutuhan air sesuai standar kesehatan.

c. Sarana Pembuangan Air Limbah

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada factor ekonomi,



kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septictank, sumur resapan, got dan lainnya.

Tabel 2.25
Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah	12.799	12.869	13.255	13.488	13.607
2	Jumlah rumah yang diperiksa	12.799	12.869	13.255	13.488	13.607
3	Jumlah rumah dengan SPAL	9.873	12.183	12.706	13.017	13.148
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat	7.902	10.247	10.484	10.320	10.386
5	Persentase yang memenuhi syarat	80,03	84,10	82,51	79,28	78,99

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga rata rata sudah mencapai 81 %. Diharapkan hal ini terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan pendekatan keluarga sehingga pemahaman akan fungsi dan manfaat SPAL dapat tercapai sesuai harapan serta angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan.

2.2.2.15. **Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Ber PHBS)**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sesuai perkembangan dan kemajuan sektor kesehatan juga mengalami perubahan yang mendasar yaitu mengajak dan memotivasi masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir dan sudut pandang sehat yang lebih dikenal dengan istilah Paradigma Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang merupakan budaya hidup perorangan, keluarga dan masyarakat. Tatanan dalam PHBS dapat dilakukan di Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Kerja, Institusi Kesehatan dan Tempat Umum.

Tabel 2.26
Persentase RT dengan PHBS yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tangga	13.733	16.422	16.477	16.502	16.349
2	Jumlah dipantau	13.733	11.509	8.224	13.058	10.158
3	Jumlah ber- PHBS	3.460	3.802	4.278	6.915	5.769
4	Persentase ber-PHBS	25.2	33.04	52	52.36	56.79

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Dari hasil capaian program tersebut di Kota Sawahlunto baru mencapai 56,79 persen rumah tangga yang melaksanakan PHBS. Hal ini harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat, OPD terkait, lintas sektor, swasta dan lainnya serta melakukan monev oleh tenaga kesehatan dilapangan karena target 60 % di tahun 2017 belum tercapai. Disamping itu survey PHBS perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana masalah dan tingkat pengetahuan masyarakat, kesadaran, kemauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap sisi kehidupan manusia sehingga melekat dalam diri seseorang.



2.2.2.16. Cakupan ASI Eksklusif

ASI adalah makanan bayi ciptaan tuhan yang paling sempurna sehingga tidak dapat digantikan oleh makanan dan minuman lainnya. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi yaitu gizinya lengkap, mudah dicerna dan diserap, melindungi terhadap infeksi, membantu bonding dan perkembangan, membantu menunda kehamilan barudan melindungi kesehatan ibu serta biaya lebih rendah dibandingkan dengan susu formula.

Tabel 2.27
Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH BAYI	969	964	972	624	843
2	JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSLUSIF	705	720	762	526	606
3	PERSENTASE	72.8	74.7	78.4	84.3	71.9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto

Dari table diatas masih terjadi penurunan capaian pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh beberapa factor terjadinya penurunan capaian Asi Eksklusif seperti Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang tertunda dapat mempengaruhi pemberian Asi Eksklusif. Disamping itu peran serta keluarga masih kurang dalam pemberian Asi Eksklusif ini pada bayi serta masih ada perkantoran dan fasilitas umum yang belum menyediakan fasilitas ruang laktasi/menyusui serta gencarnya promosi susu formula. Berbagai upaya harus dan terus dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya dan tenaga yang ada seperti pendampingan pada ibu hamil, ibu menyusui bersama konselor ASI, dibentuknya kelompok pendukung ASI dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan daya ungkit terhadap cakupan ASI Eksklusif. Monitoring dan evaluasi terhadap bayi dan ibu menyusui harus terus dipantau dan perlu dukungan baik dari keluarga dan masyarakat agar ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi umur 6 bulan. Penyuluhan dan pemantauan harus terus ditingkatkan agar ibu menyusui mengerti dan paham tentang manfaat dari ASI Eksklusif tersebut.

2.2.2.17. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Beberapa penyakit menular yang termasuk kedalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain difteri, tetanus, hepatitis B, radang selaput otak, radang paru paru, pertusis dan polio. Imunisasi merupakan program rutin yang dilaksanakan dalam upaya memberikan kekebalan terhadap sasaran dari penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Tabel 2.28
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah sasaran proyeksi bayi dari pusdatin	1.038	1.042	1.256	1.244	1.235
2	Jumlah bayi dengan imunisasi dasar lengkap	1.094	910	974	922	929
3	Persentase	105.4	87.3	77.55	74.11	75.22

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Cakupan imunisasi lengkap (BCG,DPT,POLIO,CAMPAK,HEPATITIS B) tiap tahunnya selalu mengalami perubahan perubahan hal ini disebabkan karena balita yang datang keposyandu dan sarana kesehatan lainnya tidak melapor ke tenaga kesehatan/kader, disamping itu kondisi balita yang kurang sehat serta pindah domisili. Oleh karena itu penyuluhan dan pendekatan keluarga harus terus ditingkatkan, sehingga pemahaman terhadap manfaat imunisasi tersebut benar benar bisa dirasakan oleh masyarakat terhadap kesehatannya. Disamping itu



pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama perlu juga dilakukan dan yang tak kalah pentingnya melakukan sweeping sehingga dapat diketahui penyebab masalahnya.

2.2.2.18. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama kehamilan dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama, kedua dan 2 kali pada trisemester ketiga. Cakupan pelayanan kontak pertama (K1) ibu hamil pada tahun 2016 sebesar 66,5% dan Tahun 2017 turun 62,51%. Untuk pelayanan K4 cakupan pelayanan pada tahun 2016 sebesar 83,5% dan Tahun 2017 sebesar 82,89%. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pencapaian K4 ibu hamil berupa adanya kasus abortus, adanya ibu hamil yang pindah alamat keluar kota dan juga engganannya ibu hamil melakukan pemeriksaan lanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan permasalahan ini adalah dengan memotivasi ibu hamil, dan keluarga melalui konseling dan penyuluhan. Disamping itu juga meningkatkan motivasi kerja petugas dilapangan dengan peningkatan jadwal pertemuan, konsultasi rutin, bintek dan evaluasi rutin.

Kebijakan program kesehatan ibu dan anak terkait penanganan persalinan adalah semua ibu hamil melahirkan dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2016 persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 77% dan yang ditolong oleh dukun 1,1%. Pada tahun 2017 yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 76,3% dan persalinan yang ditolong dukun sebesar 0,45%. Beberapa upaya sudah banyak dilakukan dalam rangka Peningkatan cakupan ini seperti dibentuknya tim kemitraan bidan dengan dukun, pembinaan dukun secara berkala, dalam arti dukun bukan ditiadakan tetapi beralih fungsi dari pemberi pelayanan persalinan menjadi kader kesehatan yang ikut membantu memberikan data dan informasi ibu hamil serta ikut memotivasi ibu hamil dan keluarga untuk bersalin dengan bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disarana pelayanan kesehatan.

2.2.2.19. Jumlah Kasus Gizi Kurang dan Gizi Buruk do Kota Sawahlunto

Salah satu indicator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja karena penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sector terkait. Kurang gizi dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi karbohidrat dan protein dalam makanan sehari-hari, tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang pada usia balita, adanya penyakit infeksi, rendahnya ketahanan pangan keluarga dan pola asuh anak yang tidak baik serta factor lingkungan yang jelek. Pada masyarakat dan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan ini dipengaruhi oleh factor pendidikan, dan perilaku. Oleh karena itu penanganannya harus terpadu yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.29
Jumlah Kasus Gizi di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 s/d 2017

No	Uraian	Pencapaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita gizi buruk	10	10	13	10	9
2	Balita gizi kurang	142	183	142	162	97

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk



Berdasarkan data diatas hasil kasus gizi buruk pada balita tahun 2017 berjumlah 9 orang dan masih rendah dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumbar dengan peringkat nomor 6, namun demikian kegiatan ini harus terus ditingkatkan dengan cara tetap melacak kasus kasus yang muncul dilapangan, pemberian makanan tambahan pada balita ibu hamil dan menyusui, mengadakan konseling kedokter spesialis dan monitoring evaluasi dengan melakukan pemetaan dan kunjungan rumah .

2.2.2.20. Persentase penduduk yang memiliki lahan

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah sebesar 17.080. Pertanian lahan sawah sebesar 1.680 dan lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) sebesar 8.585, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.30
Penggunaan Lahan Tahun 2017

NO	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Jumlah (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu kali	Dua kali	Tiga kali	Ditanami	Tidak Ditanami	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan sawah						
	a. Irigrasi	4	863	103	14	0	984
	b. Tadah hujan	10	658	0	10	18	696
	c. Rawa Pasang surut	0	0	0	0	0	0
	d. Rawa lebak	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Sawah	14	1521	103	24	18	1.680
No	Penggunaan Lahan						Luas
1	2						3
1.2	Lahan Pertanian bukan Sawahlunto						
	a. Tegak kebun						2.136
	b. Ladang huma						4.455
	c. Perkebunan						2.466
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat						4.100
	e. Padang penggembalaan / padang rumput						658
	f. Sementara tidak diusahakan *)						1.090
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll)						2.173
	Jumlah lahan pertanian bukan sawah						17.080
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll) **)						8.585
Total (Luas wilayah Kecamatan) = Jumlah lahan sawah + jumlah lahan pertanian bukan sawah + jumlah lahan bukan pertanian							27.345

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2017

Keterangan : *) Lebih dari 1 tahun tetapi < 2 tahun
Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan
**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah sebesar 17.080 Ha. Pertanian lahan sawah sebesar 1.680 Ha dan lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) sebesar 8.585 Ha, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.31
Penggunaan Lahan Tahun 2012- 2016 (Ha)

Penggunaan Lahan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kampung/pemukiman	3,071.70	3,071.70	3,080.00	3,080.00	3,080.00
Kantor/Industri	975.30	975.30	975.00	975.00	975.00
Sawah	2,097.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00
Tegal/Kebun/Ladang/ Huma	283.00	283.00	283.00	283.00	283.00
Kebun Campuran	10,069.00	10,069.00	10,061.00	10,061.00	10,061.00
Perkebunan	2,123.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00
Hutan	4,298.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00
Semak/Alang-Alang	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00
Kolam/Tebat/Empang/Danau	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
Tanah terbuka/tandus Rusak	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00
Taman Rekreasi/ <i>Olah Raga</i>	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
Lain-lain	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Jumlah	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2017

2.2.2.21. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah. Pemerintah Kota Sawahlunto belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat berupa dana transfer/ dana perimbangan. Sebaiknya Pemerintah Kota Sawahlunto berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi sumber daya yang tersedia agar menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun propinsi.

Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 62.964.990.149,37 terdiri dari: Pajak Daerah Rp. 5.337.144.416,00 Retribusi Daerah Rp 3.954.648.882,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 10.290.929.176,00 Dan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah Rp. 43.382.267.675,37.

Sedangkan jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp. 585.387.335.481,37 yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Rp. 65.580.286.618,00 Pendapatan Transfer Rp. 522.257.503.732,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 164.841.600,00.

Tahun Anggaran 2016 realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 588.749.624.048,54 yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah Rp. 53.399.735.599,54 yang diperoleh dari Pajak Daerah Rp. 4.686.268.341,00 Retribusi Daerah Rp. 2.701.515.584,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 10.095.311.774,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah Rp. 35.916.639.900,54. Pendapatan Transfer Rp. 532.746.888.449,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 2.603.000.000,00. Dari angka-angka tersebut dapat dihitung persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9 % sama dengan tahun 2018.



Tahun Anggaran 2015 realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 537.483.538.214,19 yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah Rp. 52.268.500.528,00 yang diperoleh dari Pajak Daerah Rp. 4.101.043.541,00 Retribusi Daerah Rp. 2.540.177.543,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 8.280.727.904,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah Rp. 37.346.551.540,19. Pendapatan Transfer Rp. 471.923.233.686,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 13.291.804.000,00. Dari angka-angka tersebut dapat dihitung persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10 %. Dan untuk tahun 2014 dan 2013 persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10 % dan 9 %.

Selama tahun 2013 s.d 2017 rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9,80 %. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.32
Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

URAIAN	REALISASI				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	37.104.573.790,92	48.680.391.650,27	52.268.500.528,00	53.399.735.599,54	62.964.990.149,37
Pajak Daerah	3.185.508.186,00	4.190.396.080,04	4.101.043.541,00	4.686.268.341,00	5.337.144.416,00
Retribusi Daerah	3.044.138.867,00	2.885.464.543,00	2.540.177.543,00	2.701.515.584,00	3.954.648.882,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.342.355.040,00	9.151.546.652,00	8.280.727.904,00	10.095.311.774,00	10.290.929.176,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.532.571.697,92	32.452.984.375,23	37.346.551.540,19	35.916.639.900,54	43.382.267.675,37
Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	388.97922.723,00	436.449.625.354,00	471.923.233.686,00	532.746.888.449,00	522.257.503.732,00
Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18.777.454.723,00	21.563.293.390,00	15.476.081.447,00	12.562.336.783,00	16.164.696.046,00
Dana Alokasi Umum	296.397.490.000,00	332.780.291.937,00	344.941.712.000,00	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00
Dana Alokasi Khusus	30.307.130.000,00	31.072.890.000,00	49.424.430.000,00	96.833.140.486,00	75.861.363.283,00
Dana Alokasi Desa	-	-	8.191.432.000,00	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00
Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-	-	-	-	7.500.000.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	31.421.831.000,00	34.786.227.000,00	34.203.008.000,00	-	7.500.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.075.117.000,00	16.246.923.027,00	19.686.570.239,00	20.681.044.180,00	22.184.455.403,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	2,435.248.000,00	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	1.750.000.000,00
Lain-lain Pendapatan	2.597.905.280,00	3.375.300.000,00	13.291.804.000,00	2.603.000.000,00	164.841.600,00



URAIAN	REALISASI				
	2013	2014	2015	2016	2017
Daerah yang Sah					
Hibah	2.075.800.000,00	1.470.300.000,00	6.708.204.000,00	2.589.000.000,00	-
Dana darurat	-	-	-	-	-
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	522.105.280,00	1.905.000.000,00	6.583.000.000,00	14,000,000,00	164.841.600,00
Dana Alokasi Desa	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	428.681.501.793,92	488.505.317.004,27	537.483.538.214,19	588.749.624.048,54	585.387.335.481,37
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	9,00 %	10,00 %	10,00 %	9,00 %	11,00 %

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



2.2.2.22. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

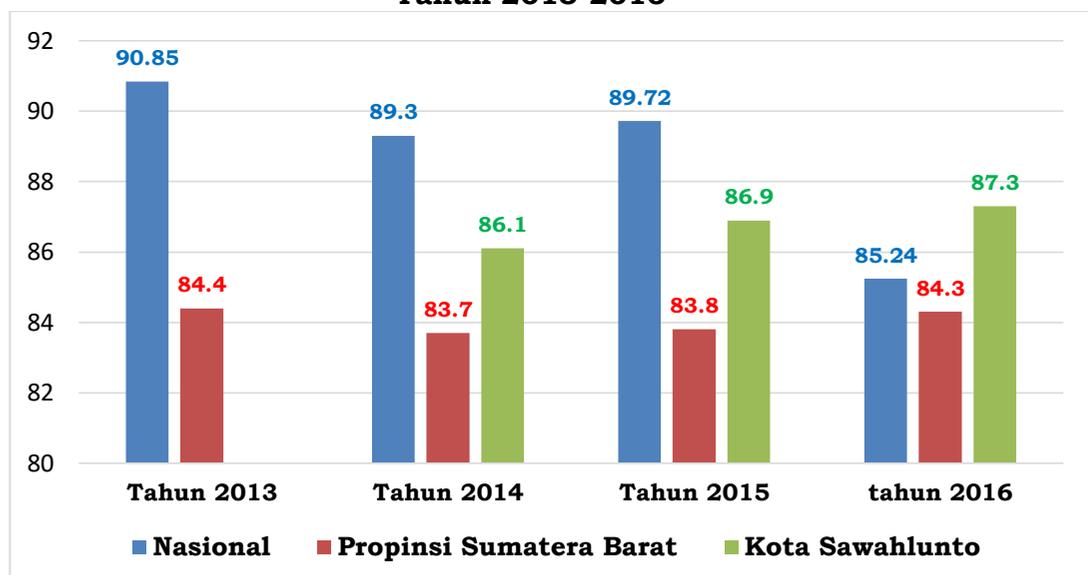
Untuk pertama kalinya pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015. Dimana sebelumnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Dan secara berturut-turut tahun 2017 dan 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

2.2.2.23. Pencapaian SKOR Pola Pangan Harapan (PPH)

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015-2019 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumber daya dan budaya lokal. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH) kesedian. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Perbandingan skor Pola Pangan Harapan tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto tergambar dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2.17
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto (%)
Tahun 2013-2016



Sumber Data : SIPD Kota Sawahlunto



Dilihat dari grafik diatas skor Pola Pangan Harapan Kota Sawahlunto pada tahun 2014 dan 2015 lebih tinggi dari pada skor Pola Pangan Harapan Propinsi Sumatera Barat tetapi masih dibawah skor Pola Pangan Harapan Nasional sedangkan pada tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan Kota Sawahlunto berada diatas Pola Pangan Harapan Nasional dan Pola Pangan Harapan Propinsi Sumatera Barat. Skor pola pangan harapan Kota Sawahlunto nilainya berada diatas 85 persen dan terus meningkat setiap tahunnya, berarti konsumsi pangan Kota Sawahlunto sudah mulai beragam dan bergizi seimbang.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah baik kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan ditingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi. Dalam pasal 60 UU No. 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Standar Skor Pola Pangan Harapan Nasional berdasarkan petunjuk teknis SPM Badan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.33
Susunan Pola Pangan Harapan Nasional *)

No	Kelompok Pangan	Estimasi Berat Gram/Hari	Standar AKE (Angka Kecukupan Energi) kkal/Hari	Kontribusi % AKE	Bobot	Skor PPH Ideal
1.	Padi-padian	275	1075	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	100	129	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan hewani	150	258	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	20	215	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	10	64,5	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	35	107,5	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	30	107,5	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	250	129	6,0	5,0	30,0
9.	Lain-lain	-	64,5	3,0	0,0	0,0
	Total		2150	100,0		100,0

Sumber : *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan, 2015

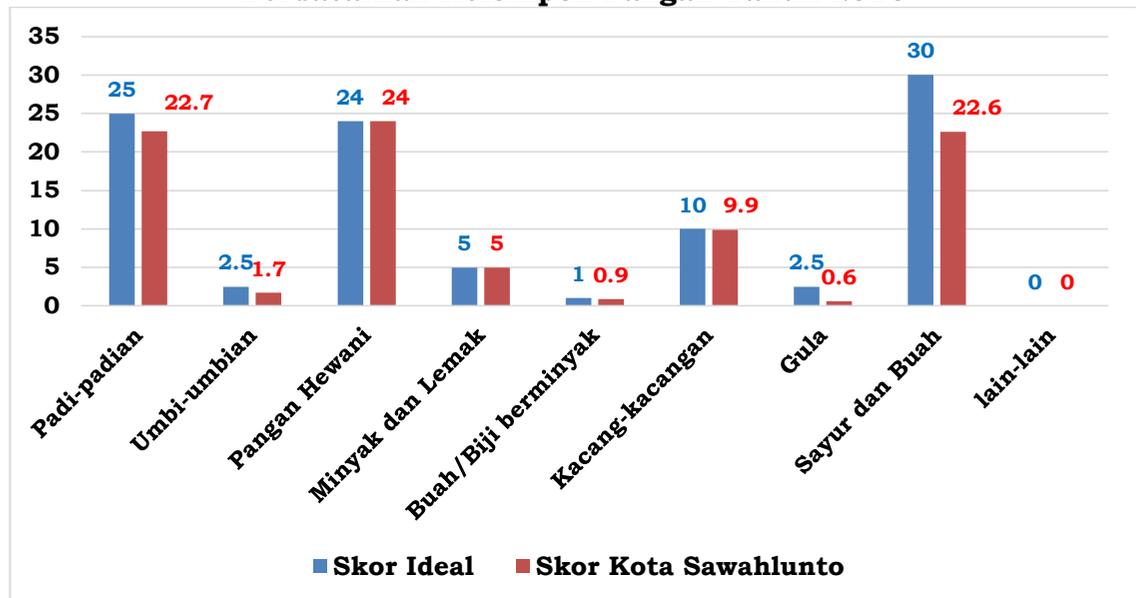
Tabel.2.34
Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2016

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2016		
		Kkal/kap/hari	Gr/kap/hari	Skor PPH
1.	Padi-padian	907,7	252,0	22,7
2.	Umbi-umbian	66,2	76,4	1,7
3.	Pangan hewani	290,0	236,4	24
4.	Minyak dan Lemak	279,9	31,0	5
5.	Buah/Biji Berminyak	36,3	19,0	0,9
6.	Kacang-kacangan	98,5	29,8	9,9
7.	Gula	24,1	6,6	0,6
8.	Sayur dan Buah	90,3	266,0	22,6
9.	Lain-lain	9,3	3,1	0,0
	Total	1802,2	920.3	87,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan



Grafik 2.18
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal
Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2016



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari grafik diatas konsumsi kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, gula dan sayur/buah di Kota Sawahlunto masih jauh dari skor idealnya. Dari standar pola pangan harapan diatas, faktor-faktor yang berhubungan dengan pola pangan harapan adalah :

1. Besar anggota keluarga, semua program masyarakat perlu menekan pentingnya keluarga berencana dalam pembatasan penduduk, sehingga dapat menekan cukup pangan guna menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan keluarga. Bila Keluarga Berencana terwujud maka ketersediaan konsumsi pangan akan terpenuhi sehingga status gizi akan lebih baik sehinggadapat ditunjukkan untuk meningkatkan skor PPH.
2. Pengetahuan Gizi,
3. Tingkat Pendidikan
4. Pengeluaran pangan rumah tangga
5. Pantangan makan

2.2.3. FOKUS ADAT, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.2.3.1. Kesenian dan Kebudayaan

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Budaya merupakan kristalisasi nilai pola hidup yang dianut suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola hidup komunitas dan karya-karya manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multicultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal



ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar. Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.35
Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

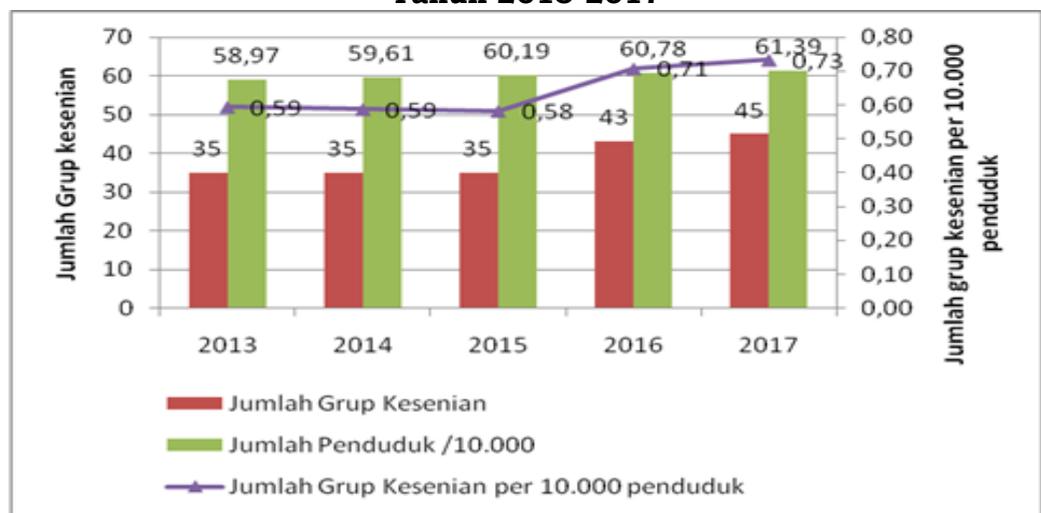
No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	35	35	35	43	45	6,88
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	58,97	59,61	60,19	60,78	61,39	1,01
3.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Unit	0,59	0,59	0,58	0,70	0,73	5,82

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2013-2016.
2. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2017.
3. Hasil Olahan, 2017

Jumlah Grup kesenian yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2013 sampai tahun 2015 berjumlah 35 grup kesenian, di tahun 2016 terjadi penambahan menjadi 43 grup dan di tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 2 grup kesenian lagi, sehingga berjumlah sebanyak 45 grup. Grup kesenian yang aktif sebanyak 43 grup, dari 43 grup yang aktif 16 grup diantaranya sudah berbadan hukum sedangkan yang pasif sebanyak 2 grup. Perkembangan kesenian di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan randai pada anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kegiatan ini menjadi event tahunan di Kota Sawahlunto yaitu Sawahlunto Randai Festival.

Grafik 2.19
Jumlah Grup Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017



Sumber: Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan



budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.36
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	10	10	10	10	10	0,00
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	58,97	59,61	60,19	60,78	61,39	1,01
3.	Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk	Unit	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	-1,00

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2013-2016
2. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 18lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 10 tempat dan luar ruangan (outdoor) 8 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda. Penyelenggaraan pertunjukan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertunjukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.13 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya "Mak Itam". Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para



pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu.

Tabel 2.37
Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Museum Goedang Ransum	12.981	13.725	20.943	22.288	18.851	12,33
2	Lubang Tambang Mbah Soero	10.299	10.764	12.938	10.905	10.653	1,67
3	Museum Kereta Api	4.760	5.657	6.556	6.423	12.220	30,74
	Jumlah	28.040	30.146	40.437	39.616	41.724	11,23

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

2.2.3.2. Fokus Pengamalan Ajaran Agama

Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman multietnis dengan beberapa agama yang dianut, dan pembangunandisektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas rancangan terkecil yaitu keluarga dan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Agama	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Islam	58.668	61.273	61.764	63.747	63.922
2.	Khatolik	119	122	108	112	115
3.	Protestan	214	260	240	247	262
4.	Hindu	-	-	-	-	-
5.	Budha	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	-
	TOTAL	56.161	58.068	59.001	64.106	64.299

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2017

Pemeluk agama Islam dari tahun 2013 sebanyak 56.161 orang, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 menjadi 64.299 orang, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam.

1. Jumlah Penyuluh Agama dan Mubaligh

Selain tempat pendidikan agama, peranan mubaligh dan penyuluh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan penyuluh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Jumlah Mubaligh Dan Penyuluh Agama Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Mubaligh	162	162	162	162	162
2.	Jumlah Penyuluh Agama	107	106	104	104	104

Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto 2017

Jumlah mubaligh mengalami stagnan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Begitupun juga Jumlah Penyuluh Agama tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017.



2. Jumlah Tempat Ibadah

Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang dianut sebagian penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkembangan kehidupan beragama sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh penganutnya serta tidak terlepas dari keberadaan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.40
Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017

No	Tempat Ibadah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mesjid	48	48	48	48	49
2.	Mushalla/Langgar	342	342	272	275	275
3.	Gereja	2	2	2	2	2

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto 2017

Dilihat dari jumlah tempat ibadah di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, jumlah mesjid pada tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 1 unit. Untuk mushalla jumlahnya tetap dari tahun sebelumnya begitu juga dengan jumlah gereja yang masih tetap dari tahun sebelumnya.

3. Tempat Pendidikan Agama

Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.41
Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017

No	Tempat Pendidikan Agama	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	TPQ	177	177	177	179	179
2.	TPSQ	9	9	9	9	9
3.	MDA	15	13	13	9	9
4.	Pondok Taman Al-quran	4	4	4	4	4
5.	Pondok Pesantren	2	2	2	2	2

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2017

Jumlah tempat pendidikan agama dari tahun 2016 masih sama dengan tahun 2017, meliputi jumlah TPQ, TPSQ, MDA, Pondok Taman Al-quran dan Pondok pesantren.

4. Jumlah Pondok Tahfidz Dan Santrinya

Tabel 2.42
Jumlah Pondok Tahfidz Dan Santrinya di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pondok Tahfidz :					
- Kec. Silungkang	-	-	-	-	-
- Kec. Lembah Segar	-	-	-	-	1
- Kec. Barangin	-	-	-	1	1
- Kec. Talawi	-	-	-	-	-
Jumlah Pondok Tahfidz :					
- Kec. Silungkang	-	-	-	-	-
- Kec. Lembah Segar	-	-	-	-	25



Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
- Kec. Barangin	-	-	-	30	60
- Kec. Talawi	-	-	-	-	-

Sumber : Bag. Kesra Setdako

Dalam usaha melahirkan generasi penghafal al-Qur'an maka masyarakat bersama guru-guru TPQ berusaha menumbuhkan pondok-pondok tahfidz yang khusus untuk membina anak-anak yang mempunyai bakat dan kemauan untuk menghafal al-Qur'an. Dengan didirikannya pondok-pondok tahfidz ini, semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan anak-anaknya seorang Hafidz al-Qur'an

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2013-2017:

Tabel 2.43
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2013	99,82	85,42	71,07
2.	2014	99,80	94,97	68,49
3.	2015	98,17	64,68	69,04
4.	2016	101,45	67,86	84,54
5.	2017	99,56	74,13	84,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap kelompok umur. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7 - 12 tahun dari 98,17 % menjadi 101,45%. Pada kelompok umur 13-15 tahun dari 64,68% menjadi 67,86 % dan pada kelompok umur 16-18 dari 69,04 menjadi 84,54 %. Namun untuk tahun 2017 mengalami sedikit penurunan pada kelompok umur 7-12 menjadi 99.56 sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun menurun menjadi 74,13 % dan pada kelompok umur 16-18 tetap pada angka 84,54 %.



Tabel 2.44
Rasio Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa pada jenjang TK	3.452	4.062	4.602	4.110	3.829
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	4.119	4.667	4.661	4.689	4.271
3	Rasio Pendidikan anak usia dini	1:0,83	1:0,87	1:0,87	1:0,87	1:0,89

Sumber :

1. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto 2017
2. Hasil Olahan 2017

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.45
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TK					
1.1	Jumlah Sekolah	124	124	124	123	123
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	3.680	3.563	3.678	3.499	3.390
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	1:29,67	1:28,73	1:29,66	1:28,44	1:27,56
2	SD/MI/SDLB					
1.1	Jumlah Sekolah	65	65	65	65	64
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	9.847	8.106	7.305	6.977	6.994
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:151,49	1:124,70	1:123,69	1:118,61	1:109,28
3	SMP/MTs/SMPLB					
2.1	Jumlah Sekolah	15	15	15	15	14
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3190	3430	3809	3.562	3.506
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1:227,86	1 : 245	1 : 394	1:345,36	1:399

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi kecendrungan penurunan jumlah penduduk kelompok usia TK, kelompok usia SD/MI/SDLB kecuali tahun 2017, kelompok usia SMP/MTs/SMPLB kecuali Tahun 2015. Kondisi ini tentu saja menyebabkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menjadi meningkat, sehingga jumlah sekolah melebihi kebutuhan. Akibatnya terjadi pengurangan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan pada Tahun 2017. Dimana jumlah TK berkurang dari 124 unit menjadi 123 unit, jumlah SD/MI/SDLB berkurang dari 65 sekolah menjadi 64 sekolah dan jumlah SMP/MTs/SMPLB berkurang dari 15 sekolah menjadi 14 sekolah.

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.



Tabel 2.46
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2013- 2017

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	142	161	186	183	172
1.2	Jumlah Murid	1295	1294	1556	1488	1543
1.3	Perbandingan Jlh Guru Terhadap Jlh Murid	1 : 9,11	1 : 8,04	1 : 8,36	1 : 8	1 : 8,97
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	691	672	611	605	603
2.2	Jumlah Murid	7661	7340	7136	6772	6691
3.3	Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 11,08	1 : 10,92	1:11,67	1: 11,08	1 : 11.02
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	378	341	305	287	285
3.2	Jumlah Murid	2834	2790	2681	2667	2615
3.3	Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jmlh Murid	1 : 7,49	1 : 8,18	1 : 8,79	1 : 9,29	1 : 8,27

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2017

Selama kurun waktu 2013–2017 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 9 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 12 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 9 murid SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tingkat TK dan mengalami sedikit penurunan pada tingkat SD dan SMP. Jumlah ini telah memenuhi untuk kondisi idealnya, dimana untuk jenjang pendidikan TK 1 orang guru idealnya melayani 15 murid.

d. Rasio Murid Dan Kelas

Rasio Muriddan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1295	1294	1556	1488	1543
1.2	Jumlah Kelas	73	102	104	109	100
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	17,73 : 1	12,69 : 1	14,96 : 1	13,65 : 1	15,43 : 1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7951	7661	7340	6772	6727
2.2	Jumlah Kelas	435	362	376	374	378
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,28 : 1	21,16 : 1	20,22 : 1	18,10 : 1	17,79 : 1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	2045	2834	2790	2667	2359
3.2	Jumlah Kelas	90	113	107	109	107
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	22,72 : 1	25,07 : 1	24,05 : 1	24,46 : 1	22,04 : 1

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2017

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2017 Kota Sawahlunto mengalami penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP, kecuali pada jenjang pendidikan TK mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa perbandingan jumlah kelas dengan murid untuk tingkat TK satu kelas berisi rata-rata 16 siswa, untuk tingkat SD



satu kelas berisi rata-rata 18 siswa dan untuk tingkat SMP berisi rata-rata 23 orang siswa.

Jika dibandingkan dengan roombel yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017, sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas
Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 18 - 28
2	SMP	1 : 20 - 32
3	SMA	1 : 20 - 36
4	SMK	1 : 15 - 36

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2017

Dapat dilihat bahwa rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas untuk setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto telah memenuhi kondisi ideal yang telah ditetapkan. Secara kuantitas, jumlah guru telah dapat melayani jumlah murid sesuai dengan kondisi idealnya. Jenjang pendidikan SD dengan rasio satu kelas berisi 18 orang murid dan jenjang pendidikan SMP satu kelas dengan 23 orang murid telah sesuai dengan batasan yang ditetapkan Permendikbud. Tetapi ada kasus di beberapa sekolah yang jumlah muridnya tidak sesuai dengan kondisi ideal dan tidak memenuhi kuota untuk roombelnya. Hal ini disebabkan karena faktor topografi Kota Sawahlunto yang menjadikan jarak rumah penduduk ke sekolah sangat jauh. Sehingga jumlah murid di sekolah tersebut hanya sedikit dan tidak memenuhi untuk kondisi idealnya.

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.49
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	4	0	0	2	4
1.2	Jumlah Murid	7.661	7.386	7.136	6.772	6.727
1.3	Angka Putus sekolah (%)	0,052	0	0	0,03	0,06
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	4	32	12	12	11
2.2	Jumlah Murid	2.834	2.790	2.681	2.667	2.359
2.3	Angka Putus sekolah (%)	0,141	0,44	0,44	0,49	0,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2016 dari 2 orang menjadi 4 orang dan tingkat SMP/MTs mengalami sedikit penurunan sebanyak 1 orang dari tahun sebelumnya. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga *broken home*, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah.



Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

f. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD					
	Ikut Ujian	1.137	1.136	1.093	1.179	1.217
	Lulus Ujian	1.137	1.136	1.093	1.179	1.217
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	MI					
	Ikut Ujian	61	65	51	62	69
	Lulus Ujian	61	65	51	62	69
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
3.	SMP					
	Ikut Ujian	753	749	775	832	841
	Lulus Ujian	745	747	774	830	838
	Persentase (%)	98,93	99,73	99,87	99,75	99,69
4.	MTs					
	Ikut Ujian	81	81	122	141	120
	Lulus Ujian	81	81	121	141	120
	Persentase (%)	100	100	99,18	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2013 sampai 2017 tingkat SD/MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2017 turun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,69% dan untuk tingkat MTsn tetap diangka 100%. Untuk nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51
Nilai Rata-Rata UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Kota Sawahlunto

No	Uraian	Jumlah Nilai Rata-rata					
		TA. 2014/2015	Peringkat Propinsi	TA. 2015/2016	Peringkat Propinsi	TA. 2016/2017	Peringkat Propinsi
1	SD/MI	79,68	2	77.4	5	78.86	
2	SD	79,90	2	77.6	5	78,97	
3	MI	76,46	4	75,00	8	77,31	
1	SMP/MTs	56.73	7	55.98	4	53.64	5
2	SMP	56.95	7	56.76	4	53,90	5
3	MTs	55.93	9	51.19	7	51,00	7
1	SMA/MA (IPA)	70.20	3	58.27	7		
2	SMA/MA (IPS)	59.31	9	51.59	9		
3	SMK	57.00	4	57.27	3		

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto



g. Kualitas Tenaga Pendidik

Tabel 2.52
Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kota Sawahlunto

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Guru TK bersertifikasi	70	70	70	70	58
2	Guru SD bersertifikasi	393	393	393	393	359
3	Guru SMP bersertifikasi	232	232	232	232	136

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2017

Kualitas dari tenaga pendidik juga mempengaruhi Angka Rata-rata Lama Sekolah. Kualitas tersebut ditandakan dengan telah bersertifikasi atau belumnya tenaga pendidik yang ada. Karena jika kualitas tenaga pendidiknya baik maka materi yang disampaikan kepada murid akan dapat tersampaikan dengan baik pula, begitu juga sebaliknya. Berikut ini data tenaga pendidik yang ada di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.53
Jumlah Tenaga Pendidik Kota Sawahlunto

No	Uraian	Bersertifikasi (orang)	Belum Bersertifikasi (orang)	Jumlah (orang)
1	TK	72	48	120
	Persentase (%)	60	40	100
2	SD	361	242	603
	Persentase (%)	59,86	40,13	100
3	SMP	186	106	292
	Persentase (%)	63,69	36,30	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih dari separoh tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan telah bersertifikasi. Itu artinya murid pendidikan dasar di Kota Sawahlunto telah diajar oleh guru yang berkualitas. Dalam pandangan bahwa tenaga pendidik yang berkualitas tentunya juga mengajarkan pendidikan yang berkualitas kepada murid. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun di samping itu, masih ada jumlah tenaga pendidik yang belum bergelar Sarjana (S1), sehingga mereka tidak bisa mendapatkan sertifikasi karena belum memenuhi syarat yang ada.

h. Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan Luar Sekolah merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan melek huruf dan menurunkan tingkat putus sekolah. Pendidikan Luar Sekolah ini terdiri dari 3 paket, yaitu Paket A untuk pendidikan luar sekolah setara SD, Paket B untuk pendidikan luar sekolah setara SMP dan Paket C untuk pendidikan luar sekolah setara SMA. Berikut ini menunjukkan perkembangan keberadaan pendidikan luar sekolah yang ada di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.54
Jumlah Peserta Didik Pendidikan Luar Sekolah di Kota Sawahlunto

No	Indikator	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Paket A	Peserta didik	20	30	30	30	22
2	Paket B	Peserta didik	15	25	60	55	30
3	Paket C	Peserta didik	35	50	103	103	77

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari data di atas terlihat bahwa keberadaan pendidikan luar sekolah dalam hal ini paket belajar di luar sekolah semakin tahun mengalami peningkatan jumlah peserta didik. Dalam artian masyarakat Sawahlunto



tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan walaupun itu di luar gedung sekolah. Kesempatan ini tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang telah berumur tinggi untuk tetap mendapatkan ijazah dari pendidikan yang selama ini pernah didapatkannya. Sehingga program pemerintah ini sangat membantu dalam menuntaskan melek huruf.

h. Kondisi Fisik Bangunan Sekolah

Secara umum kondisi fisik bangunan sekolah di Kota Sawahlunto dinilai sangat baik. Tercatat sebanyak 60 unit bangunan Sekolah Dasar dan sebanyak 9 unit bangunan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Sawahlunto keseluruhannya masih berada dalam keadaan baik.

Tabel 2.55
Kondisi Fisik Bangunan Sekolah di Kota Sawahlunto
Tahun 2017

No	Nama Sekolah	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	SD	60	75%	25%	0
2	SMP	9	45%	55%	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa keberadaan fisik bangunan sekolah di Kota Sawahlunto secara keseluruhan dalam keadaan baik, hanya ada beberapa kerusakan ringan di beberapa sekolah pada kelas belajar. Dalam hal ini upaya untuk perbaikan bangunan yang rusak ringan dan perawatan selalu tetap dilakukan. Karena secara langsung dan tidak langsung kondisi bangunan sekolah yang baik akan berdampak pada kemampuan daya serap peserta didik dan begitu juga sebaliknya.

i. Pendidikan Berkarakter

Pendidikan karakter merupakan suatu bentuk kegiatan manusia yang didalamnya terdapat suatu tindakan mendidik yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan dari pendidikan karakter ini adalah membentuk penyempurnaan diri secara terus menerus sehingga dapat melatih kemampuan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan karakter menjadi hal penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter akan menjadi dasar dalam pembentukan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, gotong royong, saling membantu dan menghormati serta lainnya. Pendidikan karakter juga akan melahirkan pribadi yang unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan.

Pelaksanaan program pendidikan berkarakter untuk sekolah-sekolah di Kota Sawahlunto sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Di mana pada tahun 2014 sebagai tahun awal menetapkan satu sekolah untuk setiap jenjang pendidikan sebagai pilot project sekolah dengan pendidikan berkarakter. Untuk tahun 2015 pelaksanaan pendidikan berkarakter ini sudah mulai menyeluruh ke sekolah-sekolah. Begitu juga dengan tahun selanjutnya. Sampai tahun 2017 pelaksanaan kurikulum pendidikan berkarakter sudah menyeluruh dilaksanakan oleh semua sekolah SD dan SMP di Kota Sawahlunto. Bentuk pelaksanaannya yang sudah dilakukan adalah berupa kegiatan sholat zuhur berjamaah di sekolah, kegiatan pramuka, kegiatan hafiz Al Quran, kegiatan seni budaya dan lain sebagainya. Sampai saat ini pelaksanaan kegiatan pendidikan berkarakter sudah dilaksanakan di Kota Sawahlunto dengan cukup baik. Akan tetapi untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap karakter dan moral anak dan remaja, kegiatan ini perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan kedepannya. Selain itu, jika kota sawahlunto mengembangkan Wisata Tambang yang berbudaya, perlu diperhatikan penguatan karakter masyarakat, utamanya generasi muda untuk mengantisipasi dampak negatifnya.



j. Lulusan Pengujian Hafal Al Quran

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kurikulum pendidikan berkarakter, Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto mengadakan pengujian hafalan Al Quran bagi siswa pendidikan dasar. Untuk tingkat SD adalah hafalan Al Quran Juz 30 dan untuk tingkat SMP adalah hafalan Al Quran Juz 1. Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto telah menetapkan sebanyak 42 orang siswa lulusan pengujian hafal Al Quran juz 30 untuk tingkat SD dan sebanyak 7 orang siswa lulusan pengujian hafal Al Quran juz 1. Ini juga merupakan bentuk penguatan karakter keagamaan bagi siswa di Kota Sawahlunto.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

a. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2015 - 2017

No	Nama Sarana	2015	2016	2017
1	Polindes	5	5	4
2	Poskesdes	5	5	5
3	Puskesmas	6	6	6
4	Pustu	23	23	23
5	Puskesmas Keliling	17	17	17
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	29	29	29
8	Bidan Praktek	27	27	27
9	Klinik KB	13	13	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1
TOTAL		127	127	120

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2017

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu factor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 23 Puskesmas Pembantu, 4 Polindes dan 5 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Selain dari sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sebagai sumber daya manusia harus cukup, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi jenis/profesi yang dibutuhkan, disamping itu tenaga kesehatan juga harus sebanding dengan kepadatan dan persebaran penduduk didalam penempatannya sehingga derajat kesehatan yang optimal di masyarakat dapat tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.57
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2017

No	Tenaga Kesehatan	2015	2016	2017
1	Dokter umum	30	10	23
2	Dokter gigi	9	6	7
3	Perawat	203	152	214
4	Bidan	112	58	136
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	33	10	29
6	Ahli Gizi	23	17	24
7	Analisis Laboratorium	20	14	18
8	Perawat Gigi	14	10	12
9	Ahli Penyehatan Lingkungan	14	12	16
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	30	23	30
11	Teknisi Elektromedis	3	1	4
12	Apoteker	7	3	10
13	Rekam Medis	21	8	22
14	Tenaga Keterampilan Fisik	6	2	7
15	Refraksionis Optisien	1	1	1
16	Teknisi Transfusi Darah	0	5	5
	Jumlah	526	332	558

Sumber :Profil Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dari sisi jumlah dan jenis keahlian/profesi, dilakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak dan sukarela. Disamping itu juga dilakukan perhitungan kebutuhan tenaga untuk diusulkan pada formasi kebutuhan tenaga dalam pengangkatan CPNS daerah. Dengan ketersediaan tenaga sesuai kebutuhan, diharapkan semua program dapat berjalan optimal, permasalahan kesehatan terpetakan dan terselesaikan sesuai SOP dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahann kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.58
Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto
Tahun 2012 s/d 2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Posyandu	Unit	99	100	102	102	103
2.	Jumlah Balita	Anak	6.025	6.093	6.230	6.184	6.138
3.	RasioPosyandu /Jml Balita	Per 1.000 balita	16,43	16,41	16,37	16,49	16,79

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2017

Jumlah Posyandu dari Tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2017 yaitu 16,79 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun2017 rata-rata melayani 59 sampai 60 orang. Hal ini memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, angka ini sedikit mengalami peurunan diakibatkan tingginya jumlah baita di Kota Sawahlunto, dengan tanpa diringi jumlah



Posyandu yang ada. Aka tetapi secara umum, rasio posyandi per satuan balita di Kota Sawahlunto tidak mengalami masalah yang berarti.

Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata diPosyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemilik posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kot Sawahlunto.

Tabel 2.59
Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN	6.021	6.093	6.230	6.184	6.138
2	Jumlah D/S	4.642	4.610	4.443	4.652	4.551
3	Persentase D/S	77.1	75.7	71.3	75.2	74.1
4	Jumlah N/D	2.826	2.855	3.902	4.130	4.107
5	Persentase N/D	69.3	70.5	71.4	69.1	68.5

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu. Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupan pelayanan Gizipada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevelensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang diKota Sawahlunto Tahun 2017 adalah sebesar 74,1 persen dan yang naik timbangannya 68,5 persen dari jumlah balita sasaran 6183 orang. Ini menunjukkan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

c. Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat.Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.60
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2012 s/d 2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	42	29	29	29	29
3	Jumlah Pustu	Unit	23	23	23	23	23
4	Jumlah Total Puskesmas,	Unit	71	58	58	58	58



No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	Praktek Dokter dan Pustu						
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	58.068	58.972	60.186	60.778	61.398
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	1,22	0,98	0,96	0,95	0,94

Sumber : Profil 2017 dan Data Olahan Barenlitbangda

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend penurunan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang tidak diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto. Pada tahun diatas, terlihat jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto. Yang ada di Kota Sawahlunto tetap dan tidak berubah, akan tetapi jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahun

d. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.61
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	58.068	58.972	60.186	60.778	61.398
	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0172	0,0169	0,0166	0,0165	0,0163

Sumber : Profil 2017 dan Data Olahan Barenlitbangda

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah Kota sawahlunto. Rumah sakit ini juga merupakan rumah Sakit favorit daerah retangga untuk berobat.

Tabel 2.62
Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2013 S/D 2017

No	Uraian	Pencapaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah desa siaga aktif	37	37	37	37	37
	a. Tingkat pratama	37	0	0	0	0
	b. Tingkat madya	0	37	37	37	37
	c. Tingkat purnama	0	0	0	0	0
	d. Tingkat mandiri	0	0	0	0	0

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan desa dan kelurahan dimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk melaksanakan survailans, kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana dan penyehatan lingkungan serta penerapan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Diharapkan desa/kelurahan nantinya peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya secara mandiri sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat tiap tahunnya. Sehubungan dengan table diatas pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sejak Tahun 2013 belum ada peningkatan



pengembangannya sesuai yang diharapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (indicator) dan SDGs (goals 3).

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penetaan Ruang disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah kondisi jalan baik di bagi dengan panjang jalan kota. Berikut secara lengkap persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatann Kota Sawahlunto selama periode 2013-2017.

Tabel 2.63
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	Km-	306,12	302,82	324,15	287,35	298.15
2	Panjang Jalan Kota (Km)	Km-	440,29	440,29	454,52	454,87	454.87
3	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	0,695	0.688	0.713	0.631	0.655

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2018

Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (akseibilitas) menjadi 100 persen, proporsi jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) menjadi 100 persen, proporsi jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

Pada tahun 2013 hingga 2014 Proporsi kondisi jalan baik mengalami penurunan. Di tahun 2015 proporsi jalan kondisi baik mengalami kenaikan, kalau dari tahun 2015 hingga tahun 2016 proporsi kondisi jalan baik terjadi penurunan, hingga tahun 2017 proporsi jalan baik mengalami kenaikan.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah merupakan jumlah panjang jalan di bagi jumlah penduduk. Indikator ini di hitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah.

Tabel 2.64
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Panjang Jalan (Km)	Km	440,29	440,29	454,52	454,87	454.87
2	Jumlah Penduduk	Orang	58,972	59,608	60,186	60,778	61,398
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	KM/ Org	0.0074	0.0074	0.0075	0.0075	0.0074

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan SDA Kota Sawahlunto 2018

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecendrungan menurun ini diduga dipengaruhi



oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan panjang jalan tidak bertambah dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Namun semakin menurunnya nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan kualitas penggunaan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat.

Di kota Sawahlunto rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal panjang jalan 0.74 Km/100 penduduk.

c. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa Indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di bagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100.

Tabel 2.65
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase
Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar Dan Drainase (Km)	Km	-	15.380	8.300	8.300	8.300
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	Km	440,29	440,29	454,52	454,87	454.87
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase.	KM/ Org	-	3.493	1.826	1.824	1.824

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2018

d. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tersedianya system drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan system drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan system drainase dilakukan perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.66
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	-	15.380	8.300	8.300	8.300
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	Km	440,29	440,29	454,52	454,87	454.87
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.	Persen	-	3.493	1.826	1.824	1.824

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2018

e. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan di kali 100 persen. Irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha.



Tabel 2.67
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	98,915	97,379	149,458	76,875	84,273
2	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	27,833	29,368	29,369	33,869	35,721
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	28,14	30,15	19,65	44,06	42,38

Sumber : Profil Dinas PUPR Kota Sawahlunto 2018

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena kondisi alam dan kondisi saluran yang rusak karena usia.

f. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen.

Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha.

Tabel 2.68
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota
Sawahlunto Tahun 2013-2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	Ha	984	836	762	762	762
2	Luas Lahan Budi Daya(Ha)	Ha	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	Persen	58.57	49.76	45,35	45,35	45,35

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2018

Perkembangan persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2013 sampai 2014 memiliki nilai kecendrungan menurun hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu kondisi jaringan irigasi dan kondisi air yang kurang memadai, adanya perubahan lahan pertanian. Dari tahun 2015 sampai 2017 kondisi luas lahan pertanian yang terairi irigasi tidak ada mengalami peningkatan.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.840 Ha.



Tabel 2.69
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

NO	JENIS DATA	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%/TAHUN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	98,915	97,379	149,458	76,875	91,039	
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	Ha	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	-
3	Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,0589	0,0580	0,0890	0,0458	0,0542	-

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2018

Rasio jaringan irigasi selalu berubah setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya saluran yang rusak, tidak teraliri air dan sebagainya. Panjang saluran irigasi 91,039 Km, luas lahan budi daya pertanian 1.680 hektar, rasio jaringan irigasi tahun 2017 adalah 0,0542.

h. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusatpusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan).

Penataan ruang kota bertujuan untuk melestarikan kota pusaka dan mewujudkan kota wisata yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sawahlunto 2012-2032 bertujuan untuk menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang dimana RTRW akan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota yang sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

Tabel 2.70
Luas Pola Ruang Di Kota Sawahlunto

NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)	PERSEN (%)
I	KAWASAN LINDUNG	2,234.68	8.17
1	Daerah Hijau (Sempadan Sungai, Danau Dan Kereta Api)	936.66	3.43
2	Danau (Kolam Bekas Galian Tambang)	28.98	0.11
3	Hutan Lindung	72.71	0.27
4	Taman	14.49	0.05
6	RTH Taman	37.06	0.14
7	Hutan Kota Kolok	70.00	0.26
8	Hutan Kota	1,074.79	3.93
II	KAWASAN BUDIDAYA	25,110.32	91.83
7	Sawah	2,097.16	7.67
8	Tambang	2,024.08	7.40
9	Hutan Produksi	6,802.48	24.88
10	Hutan Produksi Konversi	4,113.18	15.04
11	Pemukiman	3,461.90	12.66
12	Pendidikan Tinggi	19.14	0.07
13	Perkantoran	127.48	0.47



NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)	PERSEN (%)
14	Pertanian Lahan Kering	6,039.36	22.09
15	Wisata Kandih	400.00	1.46
16	TPA	25.54	0.09
TOTAL		27,345.00	100.00

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

i. Persentase Tingkat Kesesuaian Penataan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Rencana Umum Tata Ruang yang telah disusun perencanaannya Di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

- 1) RTBL Muaro Kalaban Kawasan Simpang Tiga
- 2) RDTR Kawasan Kota Lama
- 3) RDTR Kecamatan Silungkang
- 4) RDTR Kecamatan Talawi
- 5) RDTR Kawasan Pusat Pemerintahan di Kolok Mudik
- 6) Master Plan Kawasan Kandih
- 7) Master Plan Kawasan DAS Batang Lunto
- 8) Master Plan Kawasan RSUD Kota Sawahlunto
- 9) Master Plan Penataan Pelestarian Kota Pusaka
- 10) Master Plan Kawasan Bekas Tambang
- 11) Master Plan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 12) RTBL Kawasan Kota Lama
- 13) Master Plan Kawasan Industri Silungkang

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Di samping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persolan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.71
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2013–2018
Kota Sawahlunto

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi RTRW	3	3	14	16	17
2	Rencana Peruntukan RTRW	20	20	20	20	20
3	Persentase	15,00	15,00	70,00	80,00	85,00

Sumber : Evaluasi RPJMD 2013 - 2018

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 untuk tahun 2013–2018 terdapat 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Untuk realisasi hingga tahun 2017 baru 17 dokumen rencana yang



terrealisasi sehingga baru 85% dari rencana pada tahap I RTRW di RPJMD tahun 2013 – 2018.

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Berikut ini adalah data penanganan perumahan dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu:

Tabel 2.72
Data Jumlah KK Yang Memiliki Rumah
Di Kota Sawahlunto 2016-2017

NO	DESA/KELURAHAN	2015	2016	2017
I	KECAMATAN SILUNGKANG			
1	Muara Kalaban		1059	1164
2	Silungkang Duo		247	271
3	Siulungkang Oso		308	338
4	Silungkang Tigo		438	481
5	Taratak Bancah		127	139
II	KECAMATAN LEMBAH SEGAR			
6	Air Dingin		226	248
7	Aur Mulyo		222	244
8	Kubang Sirakuk Selatan		213	234
9	Kubang Sirakuk Utara		194	213
10	Kubang Tengah		317	348
11	Kubang Utara Sikabu		239	262
12	Lunto Barat		285	313
13	Lunto Timur		284	312
14	Pasar		293	322
15	Pasar Kubang		210	231
16	Tanah Lapang		322	354
17	Balai Batu Sandaran		165	181
III	KECAMATAN BARANGIN			
18	Durian I		513	564
19	Durian II		465	511
20	Kolok Mudiak		261	287
21	Kolok Nan Tuo		263	289
22	Lubang Panjang		281	309
23	Lumindai		534	587
24	Santur		752	827
25	Saringan		369	405
26	Talago Gunuang		371	408
IV	KECAMATAN TALAWI			
27	Batu Tanjuang		449	493
28	Bukik Gadang		282	310
29	Datar Mansiang		38	41
30	Kumbayau		358	393
31	Rantih		139	152
32	Salak		248	272



NO	DESA/KELURAHAN	2015	2016	2017
33	Sijantang Koto		233	256
34	Sikalang		393	432
35	Talawi Hilia		792	871
36	Talawi Mudiak		540	594
37	Tumpuak Tengah		461	507
Jumlah			12.891	14.163

Sumber : Dinas Perkim dan LH Kota Sawahlunto

Dilihat dari data diatas untuk data KK yang memiliki rumah di Kota Sawahlunto tahun 2016 sebanyak 12.891 KK yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto, dan pada tahun 2017 mengalami penambahan kebutuhan rumah meningkat sebanyak 14.163 KK. Hal ini dapat dilihat kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan yang sangat di butuhkan oleh penduduk kota Sawahlunto.

Pemerintah Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2017 telah melakukan penanganan rumah tidak layak huni dengan memberikan bantuan fasilitasi bahan bangunan bagi keluarga kurang mampu sebanyak 15 orang tersebar di 4 Kecamatan sesuai dengan 188.45/159/Wako-Swl/2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Fasilitasi Bahan Bangunan untuk Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Fasilitasi Bahan Bangunan Untuk Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Kurang Mampu Kota Sawahlunto Tahun 2017:

Tabel 2.73
Data Rumah Tidak Layak Huni
Kota Sawahlunto 2017

NO	URAIAN	2017
1	Kecamatan Silungkang	131
2	Kecamatan Barangin	245
3	Kecamatan Talawi	154
4	Kecamatan Lembah Segar	281
Total		811

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2017 jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) berjumlah 811 unit rumah yang tersebar di 4 kecamatan dimana di kecamatan Silungkang sebanyak 131 unit, kecamatan barangin sebanyak 245 unit, kecamatan Talawi sebanyak 154 dan Kecamatan Lembah Segar sebanyak 281 unit.

Pada Tahun 2018 Kota Sawahlunto melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni sebanyak 232 unit rumah, 200 unit rumah dari dana BSPS dan 32 Rumah dari danan DAK. Untuk dana BSPS dilakukan peningkatan Kualitas sebanyak 17,5 juta masing-masing rumah dengan rincian 15 Juta untuk Pembangunan Rumah dan 2.5 juta untuk upah. Sementara itu untuk sumber dana dari DAK diberikan sebanyak 15 juta per masing-masing rumah.

Untuk program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) tahun 2017 merupakan lanjutan dari kegiatan KOTAKU tahun 2016 yang dilaksanakan di 8 desa/kelurahan yang terdiri dari 6 Desa program PLPBK di Desa Santur, Desa Lunto Barat, desa Silungkang Tigo, Desa Sikalang, Desa Sijantang dan Kelurahan Kubang Sirakuk Utara dan 2 Desa/Kelurahan dengan kegiatan BDI di Desa Muaro Kalaban dan Desa Lumindai sesuai dengan SK Kawasan Kumuh yang ditetapkan dengan SK Walikota Nomor 188.45/249/Wako-Swl/2015 tanggal 1 November 2015.



Tabel 2.74
Luas dan Kawasan Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2015

No	Kecamatan	Nama Desa/ Kelurahan	Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Luas (Ha)
1	Silungkang	Desa Muara Kalaban	Sawah Talang , Sawah Tambang	4.08
		Silungkang Tigo	Dusun Pasar Baru, Dusun Pasar Usang, Dusun Stasiun	2.13
2	Barangin	Lumindai	Pasar Mudik	5.21
		Santur	Dusun Kayu Gadang	6.00
		Durian II	RT 01/RW I, RT 01/RW IV RT 02 / RW IV	8.2
		Durian I	RT 01/RW I, RT 02/RW II RT 03 / RW II	1.17
3	Talawi	Sikalang	Tarandam	3.29
		Sijantang	Dusun Muaro, Dusun Parigi, Dusun Sawah, Dusun Liek	8.50
4	Lembah Segar	Lunto Barat	Batu Anyir	3.11
		Air Dingin	RT 01/RW II, RT 02/RW I RT 03/ RW II	0.14
		Kubang Sirakuk Selatan	RT 01/RW I, RT 02/RW I RT 03/ RW II	0.27
		Aur Mulyo	RT 01/RW I, RT 02/RW I RT 03/ RW II	0.20
Jumlah				42.58

Sumber : Dinas Perkim dan LH Kota Sawahlunto

Untuk pencapaian Akses Universal pengurangan Kawasan kumuh Tahun 2021 dan target pengurangan kumuh menjadi 0% untuk Kota Sawahlunto dari Tahun 2016 sampai tahun 2018 ini telah mengalami pengurangan luasan kawasan kumuh dengan telah melakukan kegiatan di beberapa Desa dan kelurahan pada penataan lingkungan permukiman dan penataan bangunan perumahan masyarakat yang kurang mampu/gakin di Kota Sawahlunto. Sehingga target rencana Aksi Daerah 100-0-100 dapat tercapai pada tahun 2021.

Berbagai perkembangan, isu strategis, dan permasalahan perumahan dan permukiman tersebut tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi ruang dan waktu, tetapi juga perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman yang masih relatif terbatas dan mulai bertumbuh-kembangnya peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan sendiri kebutuhannya akan perumahan dan permukiman, juga sangat mendasari kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Rumusan kebijakan dan strategi tersebut diharapkan realistis, dengan mengkaitkannya dengan kebijakan ekonomi makro, sosial, demografi, lingkungan, dan kebudayaan. Disamping itu, implementasinya dapat mendorong pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan, serta telah mengadopsi dan melaksanakan pendekatan lintas sektoral dan desentralisasi.

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ini berdasarkan permendagri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota bahwa petugas



perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Untuk di Kota Sawahlunto cakupan linmas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.75
Cakupan Linmas di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Linmas	370	370	370	370	370
Jumlah Wilayah kerja kabupaten/Kota (=lokasi Tempat Pemungutan Suara)	117	172	126	-	131
Cakupan Linmas	3,16	2,15	2,93	-	2,82

Sumber : KPU Kota Sawahlunto dan Sawahlunto Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan linmas di kota Sawahlunto dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tidak mengalami perbedaan yang begitu signifikan yaitu antara 2-3 orang linmas per wilayah kerja, dengan jumlah linmas yang sama setiap tahunnya tetapi mengalami perubahan terhadap jumlah wilayah kerjanya. Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 cakupan untuk Petugas perlindungan masyarakat untuk tahun 2015 harus 50 persen.

Selain pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh petugas perlindungan masyarakat urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (angka kriminalitas)juga dipengaruhi oleh Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan salah satu yang memperngaruhinya yaitu tingkat keamanan suatu daerah kabupaten/kota, ini dapat dilihat dari angka kriminalitas yang pada daerah tersebut. Di kota Sawahlunto angka kriminalitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.76
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Curat (pencurian dan pemberatan)	13	23	29	30	17
Penggelapan	13	6	15	6	6
KDRT	9	3	10	2	4
Penipuan	15	20	7	9	8
Pengrusakan	4	6	2	2	4
Curanmor	17	11	10	19	24
Pembakaran	2	-	1	1	-
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	6	12	1	2	-
Curas	1	-	1	2	-
Perkosaan/Cabul	6	4	4	6	4
Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah kriminal	86	85	80	79	67
Jumlah penduduk	58.972	59.608	60.186	60.778	61.398
Angka kriminalitas (%)	0,145	0,142	0,133	0,129	0,109

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018



Dilihat dari tabel diatas angka kriminalitas kota sawahlunto dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Rata-rata dari 100 jumlah penduduk yang mengalami tindakan criminal hanya 0.1orang. Ini bisa dikatakan bahwa di Kota Sawahlunto sangat aman dari tindakan kejahatan. Angka kriminalitas yang rendah ini tidak mengurangi pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan oleh pihak yang berwenang yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kota Sawahlunto.

Angka kriminalitas yang rendah merupakan salah satu indikator semakin baiknya kesejahteraan masyarakat. Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dapat diukur dari jumlah kasus pelanggaran hukum yang terdiri dari jumlah perkara dilaporkan, jumlah perkara tersisa dan jumlah perkara terselesaikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.77
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Kota Sawahlunto
Tahun 2016 dan 2017

NO	Jumlah Perkara Dilaporkan	2016	2017
1	2	3	4
1	Pidana	23	20
2	Perdata	6	8
3	Politik dan Ham	0	0
4	Lalu lintas	198	178
5	Tata Usaha	0	0
Jumlah perkara tersisa			
1	Pidana	5	6
2	Perdata	4	4
3	Politik dan Ham	0	0
4	Lalu lintas	0	0
5	Tata Usaha	0	0
Jumlah perkara terselesaikan			
1	Pidana	18	14
2	Perdata	2	4
3	Politik dan Ham	0	0
4	Lalu lintas	198	178
5	Tata Usaha	0	0

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Kondisi perpolitikan di kota Sawahlunto khusus yang duduk di DPRD kota sawahlunto terdiri dari jumlah keanggotaan DPRD sebanyak 20 orang, dengan 4 Fraksi dan 3 Komisi. Adapun nama fraksi dan keanggotaan per partai politik sebagaimana yang tersaji pada data berikut ini:

Tabel 2.78
Supra Struktur Politik, serta Jumlah Fraksi Yang Ada

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1	Fraksi PPP, Nasdem dan PAN	7
	Partai PPP	4
	Partai Nasdem	1
	Partai PAN	2
2	Fraksi Demokrat Plus PDI-P	5
	Partai Demokrat	3
	Partai PDI-P	2
3	Fraksi Golkar	3



NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
	Partai Golkar	3
4	Fraksi PKPI-PKS	5
	Partai PKPI	3
	Partai PKS	2

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Sementara itu dari Infrastruktur politik jumlah parpol di daerah 11 sedangkan yang ikut pemilu 8 partai politik. Dalam keanggotaan DPRD dengan komposisi nya 16 orang anggota pria dan 4 orang anggota wanita. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum ada 6 dan yang tidak berbadan hukum ada 26 Organisasi

2.3.1.6. Urusan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, salah satunya SPM bidang Sosial. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM bidang Sosial untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitasterlantar di dalam panti
2. Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
4. Rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Sawahlunto mempunyai sarana yang difasilitasi oleh pemerintah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.79
Jumlah Panti Asuhan, Penghuni dan Pengasuh

Tahun	Panti Asuhan	Penghuni	Pengasuh
2013	2	37	6
2014	2	37	6
2015	2	37	6
2016	2	41	4
2017	2	47	4

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas jumlah panti asuhan yang memelihara(mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu dan juga anak terlantar dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tetap 2 (dua) panti asuhan yang mengalami peningkatan terhadap penghuninya pada tahun 2016 dan 2017, tetapi jumlah pengasuh mengalami penurunan di tahun tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan kabupaten/Kota sebagai berikut:



Tabel 2.80
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota

No	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti
1	Penyediaan Permakanan	Pengasuhan	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan
2	Penyediaan Sandang	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
3	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan Sandang	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan asrama yang mudah akses
4	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social
6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan Aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan Keterampilan dasar
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Fasilitasi Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Fasilitasi pembuatan nomr induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran. Surat nikah dan atau kartu identitas anak
9	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses layanan Pendidikan kesehatan
10	Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	Pemulangan ke daerah asal
11	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	
12		Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Pemulasaraan	

Sumber : Permensos Nomor 9 tahun 2018

Dari Standar Pelayanan Minimal di atas, untuk Kota Sawahlunto Pemerintah Daerah memberikan fasilitas untuk panti YPAY Mudik air dan panti penyandang cacat waringin Lubang Panjang yaitu biaya permakanan anak panti, transport ke sekolah, paket lebaran dan honor pengasuh. Jadi masih ada pelayanan -pelayanan yang belum terpenuhi dari SPM permensos tersebut, untuk itu harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Sawahlunto karena ini menyangkut pelayanan dasar.

1. Penyandang Disabilitas (Usia diatas 18 Tahun)

Tabel 2.81
Penyandang Disabilitas (Usia diatas 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penyandang Disabilitas	250	252	409	403	431	375



URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbantu	11	17	13	19	20	28
Persen (%)	4.4	6.75	3.18	2.23	4.64	7.47

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Data yang ditampilkan diatas tentang Penyandang cacat baik dari segi jumlah , yang telah terbantu dan terfasilitasi adalah jumlah keseluruhan yang ada dikota Sawahlunto, dari jumlah Penyandang Disabilitas semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terus bertambah seperti yang tertulis pada tabel diatas, namun karena belum terpenuhinya anggaran untuk membantu penyandang Disabilitas secara sempurna maka setiap tahun itu jumlah yang terbantu kadang meningkat dan ada juga yang menurun itu pun didasarkan kepada kebutuhan yang mendesak dan yang sangat urgen sekali, sehingga dari segi persentase juga terlihat turun naik.

2. Anak Berkebutuhan khusus (Usia 0 s/d 18 Tahun)

Tabel 2.82
Jumlah Anak Berkebutuhan khusus (Usia 0 s/d 18 Tahun)
di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Anak Berkebutuhan khusus	117	123	120	120	114	188
Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang terbantu	31	50	33	55	51	43
Persen (%)	26.50	40.65	27.50	45.83	44.74	22.87

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Pada data yang ditampilkan tentang Anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK) dari segi jumlah, maupun yang telah terbantu dan terfasilitasi seperti yang tergambar pada table diatas adalah jumlah keseluruhan yang ada dikota Sawahlunto, dari jumlah Penyandang Disabilitas semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 kadang bertambah dan ada juga yang berkurang hal itu disebabkan oleh ada diantara ABK tersebut yang pindah domisili keluar daerah dan ada yang sudah meninggal dunia seperti yang tertulis pada tabel diatas, dan juga disebabkan karena belum terpenuhinya anggaran untuk membantu secara sempurna untuk seluruh ABK , maka setiap tahun itu jumlah yang terbantu kadang meningkat dan kadang , dan juga itu pun didasarkan kepada kebutuhan yang mendesak dan yang sangat urgen sekali, sehingga dari segi persentase juga terlihat turun naik.

3. Penyandang Gangguan Jiwa/ Psikotik

Tabel 2.83
Jumlah Penderita Gangguan Jiwa/Psikotik di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penyandang gangguan jiwa	80	83	86	88	92	97
Jumlah Penyandang gangguan jiwa/ Psikotik yang terbantu	11	9	14	7	5	3
Persen (%)	13,75	10.84	16.28	7.95	5.43	3.09

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA



Selanjutnya khusus untuk penyandang jiwa/psikotik dari segi jumlah setiap tahun bertambah, Seperti yang terlihat dari tabel diatas, namun dalam hal yang sudah terbantu pada setiap tahunnya belum terfasilitasi semuanya, hal ini karena menurut kepentingan yang paling mendesak atau berkaitan tingkat kefatalan dari penderita gangguan jiwa/psikotik itu sendiri. Begitu juga dari segi persentasenya juga demikian.

Untuk 5 tahun kedepan kita akan berupaya memberikan bantuan pada penyandang gangguan jiwa/psikotik ini secara keseluruhan sehingga bisa menekan angka masyarakat Sawahlunto yang mengalami gangguan jiwa tersebut paling tidak bisa mendekati 60 %. Sesuai dengan target yang dicanangkan.

4. Lanjut Usia Terlantar

Tabel 2.84
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	695	691	685	697	775	769
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terbantu	100	245	177	170	153	148
Persen (%)	14.39	35.46	25.84	24.39	19.74	19.25

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Dari tabel diatas gambaran tentang Lanjut Usia Terlantar (LANSIA) pada tahun 2013 berjumlah 695, untuk dua tahun kemudian terjadi penurunan karena sudah ada yang meninggal dunia, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 terjadi sedikit peningkatan ini dikarenakan pada waktu pendataan awal ada yang tertinggal pendataannya oleh pemerintahan desa , dari segi bantuan yang disalurkan belum semuanya terbantu secara sempurna hal itu terlihat dari persentase pada tabel diatas.

Untuk korban bencana di Sawahlunto sejak tahun 2014 -2017 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.85
Jumlah korban dan Pengungsi Akibat Bencana di Kota Sawahlunto
Tahun 2014-2017

Tahun	KK	Jumlah Korban Bencana (jiwa)				
		Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi
2014	2	5	-	-	20	-
2015	3	3	0	0	0	9
2016	3	4	-	2	1	-
2017	58	-	-	-	1	12

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah korban bencana terbesar pada tahun 2017 yaitu sampai 58 KK. Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana terutama penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimal.



2.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam suatu wilayah peranan Sumber Daya manusia (SDM) memiliki komponen yang penting. Individu berperan dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Sehingga dengan membaiknya perekonomian maka akan berdampak pada membaiknya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Tabel. 2.86
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata Pertahun (%)
Angkatan Kerja 15 tahun ke atas	Jiwa	28.181	27.700	30.018	30.018	31.049	2,52
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas	Jiwa	41.750	42.290	42.938	42.938	44.077	1,37
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Jiwa	67,5	65,5	69,91	69,91	70,44	1,13

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto 2018, Data diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2013-2017, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto menunjukkan tren terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,13% per tahun. Pada tahun 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Sawahlunto adalah sebesar 67,5%, sedangkan pada tahun 2017, angka ini meningkat hingga menjadi 70,44%. Semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan jumlah pengangguran di Kota Sawahlunto.

Grafik 2.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka, Data Hasil Olahan, 2018



Tabel 2.87
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	TPAK Kota Sawahlunto	67,5	65,5	69,91	69,91	70,44	
2	TPAK Provinsi Sumatera Barat	62,92	65,19	64,56	67,08	66,29	
3	TPAK Indonesia	66,9	66,6	65,76	66,34	66,67	

Sumber : BPS, 2018

Apabila dilihat pada tabel di atas perbandingan TPAK Kota Sawahlunto lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPAK Provinsi dan TPAK Nasional. Ini menandakan partisipasi Angkatan kerja Kota Sawahlunto lebih banyak dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.

2.3.2.1.2. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2013-2017, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung turun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -18,8% per tahun. Pada tahun 2013 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah 11,73%, dan menurun menjadi 3,47% pada tahun 2017.

Tabel 2.88
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jiwa	154	175	75	75	19	-29,54
2	Pencari kerja yang mendaftar	Jiwa	1.313	1.501	690	690	547	-15,11
3	Pencari kerja yang Ditempatkan	Persen	11,73	11,65	10,86	10,86	3,47	-18,88

Sumber : Data SIPD Kota Sawahlunto, data diolah, 2018

2.3.2.1.3. Lapangan Usaha Penduduk yang bekerja

Pada tahun 2015 Di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbanyak di lapangan usaha Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 7.696 orang atau 27,62 %, disusul perdagangan besar dan eceran, Rumah makan dan hotel sebanyak 6.559 orang atau sebesar 23, 54 %. Pada tahun 2017 adanya perubahan yaitu jumlah penduduk yang bekerja paling banyak pada lapangan usaha lainnya (Pertambangan dan penggalan, Listrik, Gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) yaitu 7.688 orang atau sebesar 26,32%. Disusul pada lapangan usaha jasa usaha kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 24,05% atau sebanyak 24,05%. Untuk lapangan industri pengolahan mengalami kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yaitu dari 2.467 orang atau sebesar 8,85% pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.559 orang atau meningkat sebesar 12,19% pada tahun 2017. Dilihat dari komposisi ini mayoritas pekerja Kota Sawahlunto banyak bekerja pada lapangan usaha lainnya dan lapangan jasa usaha kemasyarakatan, sosial dan perorangan.



Tabel 2.89
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2017

No	Menurut Lapangan Usaha	Tahun 2015	Persen tase (%)	Tahun 2016*	Persen tase (%)	Tahun 2017	Persen tase (%)
1	Pertanian	4.627	16,60	4.627	16,60	4.889	16,78
2	Industri Pengolahan	2.467	8,85	2.467	8,85	3.553	12,19
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	6.559	23,54	6.559	23,54	5.990	20,56
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	7.696	27,62	7.696	27,62	7.007	24,05
5	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan)	6.513	23,37	6.513	23,37	7.688	26,32
Total		27.862	100	27.862	100	29.127	100

Sumber : Data BPS, tahun 2016 data tidak tersedia, disamakan dengan tahun 2015

2.3.2.1.4. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Jumlah pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto tahun 2015 banyak dari tamatan SLTA yaitu sebesar 65,72% atau 1162 orang, dan pada tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka yang tamat SLTA menurun menjadi 43,86% atau sebesar 843 orang. Akan tetapi pada tamatan perguruan tinggi meningkat dari 7,07% atau 125 orang menjadi 30,48% atau 586 orang. Sehingga pengangguran di Kota Sawahlunto banyak dari pengangguran terdidik.

Tabel 2.90
Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan

No	Kegiatan Utama	2015				2016				2017			
		Pendidikan tertinggi yang ditamatkan				Pendidikan tertinggi yang ditamatkan				Pendidikan tertinggi yang ditamatkan			
		SD Ke bawah	SLTP	SLTA	PT	SD Ke bawah	SLTP	SLTA	PT	SD Ke bawah	SLTP	SLTA	PT
1	Bekerja	8723	5088	9333	4718	8723	5088	9333	4718	7734	5517	10815	5061
2	Pengangguran Terbuka	312	557	1162	125	312	557	1162	125	206	287	843	586

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2018

2.3.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran disebabkan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja.



Tabel 2.91
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah pengangguran Terbuka	Jiwa	1.737	1.768	2.156	2.156	1.922	3,22
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	26.444	27.700	30.018	30.018	31.049	4,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,16	6,38	7,18	7,18	6,19	0,58

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Kota Sawahlunto, 2018

Selama tahun 2013-2017, tingkat pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto menunjukkan perkembangan fluktuatif. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto adalah sebesar 0,58 persen. Jumlah penduduk angkatan kerja juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 4,14%. Pada tahun 2013, TPT di Kota Sawahlunto adalah sebesar 6,16 persen dan naik menjadi 7,18 persen pada tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 6,19%.

Grafik 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017



Sumber : Hasil Olahan, 2018

Pada tahun 2017 Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi dan Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto berada di atas tingkat pengangguran terbuka Provinsi dan Indonesia. Untuk Provinsi tingkat pengangguran terbukanya adalah 5,58% dan tingkat pengangguran terbuka Nasional adalah 5,50 %. Sedangkan Kota Sawahlunto berada pada angka 6,19 %. Sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat mengentaskan pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.92
Perbandingan Tingkat Pengangguran Tingkat Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto	6,16	6,38	7,18	7,18	6,19	
2	Tingkat Pengangguran	7,02	6,5	6,89	5,09	5,58	

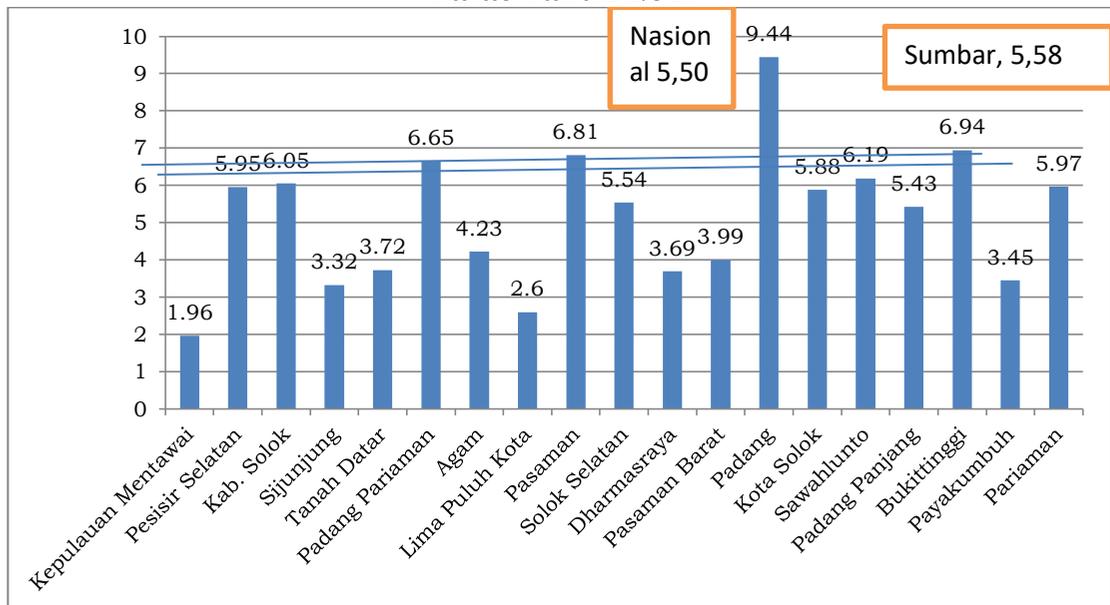


No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
	Terbuka Provinsi Sumatera Barat						
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50	

Sumber : BPS 2018

Pada tahun 2017 perbandingan tingkat pengangguran terbuka kota Sawahlunto apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat berada pada posisi ke 5 tertinggi. tingkat pengangguran terbuka Kota Sawahlunto berada di atas pengangguran Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 6,19% . Tingkat Pengangguran paling tinggi di Sumatera barat adalah Kota Padang, yaitu 9,94 % sedangkan tingkat pengangguran yang paling rendah adalah Kepulauan Mentawai dengan nilai 1,90 % . Dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka Kota Sawahlunto dibandingkan provinsi dan nasional maka perlu dicari solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kota ini.

Grafik : 2.22
Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2.3.2.1.6. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto tahun 2013–2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.93
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

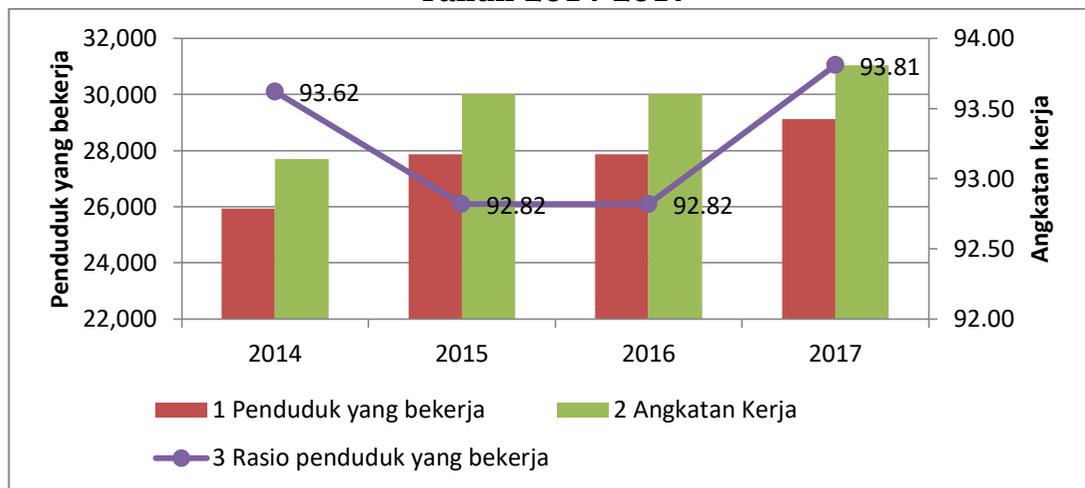
No	Indikator	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan rata rata per tahun (%)
1	Penduduk yang bekerja	25.936	27.862	27.862	29.127	3,99
2	Angkatan Kerja	27.700	30.018	30.018	31.049	3,93
3	Rasio penduduk yang bekerja	93,62	92,82	92,82	93,81	0,07

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka, Hasil Olahan, 2018



Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuasi. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Sawahlunto tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto pada periode 2014 – 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, rasio penduduk yang bekerja sebesar 93,62; menurun menjadi menjadi 92,82 pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017, rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto meningkat lagi menjadi 93,81. Peningkatan kembali terjadi pada tahun . Hal tersebut berarti 93,81 persen dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 6,19 persen yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Pertumbuhan rasio penduduk bekerja di Kota Sawahluntomasih rendah sebesar 0,07 %.

Grafik 2.23
Rasio Penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto
Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2.3.2.1.7. Pelatihan Untuk Tenaga Kerja

Dalam mengatasi pengangguran di Kota Sawahlunto maka Dinas yang membidangi tenaga kerja yaitu Dinas Perindagkopnaker dari tahun 2013-2016, dan Dinas PTSP2naker pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Dari tahun 2013-2017 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan, dan berbasis masyarakat adalah 100%. Akan tetapi tidak setiap tahun pelaksanaan pelatihan. Rata-rata untuk besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan yang dilaksanakan jumlah tenaga kerja yang dilatih sama banyak dengan jumlah pendaftar. Diharapkan dengan pelatihan yang dilaksanakan akan mengurangi tingkat pengangguran tenaga kerja dapat membuat lapangan usaha sendiri. Pelatihan yang dilaksanakan berupa pelatihan sepeda motor, dll.

Tabel 2.94
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pekatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Kerja yang dilatih	Jiwa	0	0	40	46	50
2	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi	Jiwa	0	0	40	46	50
3	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	Persen	0	0	100	100	100
No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017



No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Kerja yang dilatih	Jiwa	0	10	60	0	80
2	Pendaftar Pelatihan kewirausahaan	Jiwa	0	10	60	0	80
3	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Persen	0	100	100	0	100
No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga kerja yang dilatih	Jiwa	20	20	20	0	80
2	Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat	Jiwa	20	20	20	0	80
3	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	100	100	0	100

Sumber : Dinas Perindagkopnaker dan DPMTSPNAKER, 2018

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

a. Kasus Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.95
Jumlah KDRT di Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga	14.578	14.729	14.864	15.010	14.452
2	Jumlah KDRT	16	9	8	10	3
3	Rasio KDRT	0,110	0,06	0,00	0,02	0,02

Sumber : Dinas Sosial PM Kota Sawahlunto

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel I di atas rasio KDRT mengalami penurunan setiap tahunnya. Pemerintah Sawahlunto harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah P2TP2A.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan



anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran. Untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.96
Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota Arang
Berdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2015 – 2017

NO	Jenis Kasus	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
1	Kekerasan Fisik	0	2	0	3	0	3
2	Kekerasan Seksual	1	1	2	8	2	9
3	Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0
4	Penelantaran Rumah Tangga	2	6	0	3	0	3
5	Eksplorasi	0	0	0	0	5	0
6	Trafficking	0	0	0	0	0	0
7	Lainnya		3		8		7
Jumlah Jenis Kasus		3	12	2	22	7	22
Total		15 Kasus		24 Kasus		29 Kasus	

Sumber : Dinas Sosial dan PM Kota Sawahlunto

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak dan pembangunan yang Responsif Gender. Pada Tahun 2017 sudah ada sebanyak 19 Desa/Kelurahan Ramah Anak Kota Sawahlunto.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.97
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Sawahlunto Tahun 2015

No	Uraian	2015
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,52%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,59%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2015

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah : pemilihan laki-laki dan perempuan sementara yang dimaksud dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah keberperanan perempuan dalam komposisi strategis seperti di jabatan struktural atau keterwakilan perempuan di legislatif.

Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Pembangunan anak dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan



pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak

Tabel 2.98
Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Forum Anak Kota Sawahlunto	1	1	1	1	1
2	Forum Anak Kecamatan	0	0	2	3	4
3	Forum Anak Desa/Kelurahan	0	0	1	14	23

Sumber : Dinas Sosial dan PM Kota Sawahlunto

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

b. Kasus Kenakalan Remaja Yang Tertangani Di Kota Sawahlunto

Tabel 2.99
Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir
Tahun 2013 S/D 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kenakalan Remaja	7 orang	8 orang	3 orang	7 orang
Kasus Kenakalan Remaja yang terselesaikan	7 kasus	8 kasus	3 kasus	7 kasus
Persentase (%)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA

Data kenakalan remaja yang ditampilkan diatas merupakan data kenakalan remaja yang diselesaikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dinas sosial Kota Sawahlunto, dan setiap kasus tersebut adalah berdasarkan laporan yang di terima melalui masyarakat dan di bantu penyelesaiannya oleh P2TP2A sehingga bisa normal kembali. Namun dalam hal ini belum termasuk data kenakalan remaja yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada karena antara Dinas Sosial PMDPPA belum melakukan kerja sama dengan pihak sekolah yang ada di kota Sawahlunto dan dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, namun untuk tahun-tahun kedepannya akan di upayakan kerja sama dengan Instansi terkait sehingga keseluruhan data kenakalan Remaja akan bisa terpantau dan terselesaikan dengan sempurna.

c. Predikat Kota Layak Anak Di Kota Sawahlunto

Tabel 2.100
Prediket kota Layak Anak Kota Sawahlunto
Tahun 2013 s/d 2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pratama	Tidak ada penilaian	Madya	Tidak ada Penilaian	Madya	Nindya

Sumber : Dinas Sosial dan PMDPPA

Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan



pengasuhan alternatif, 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan, 5. Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari prediket pratama, Madya, Nindya, Utama, khusus untuk kota Sawahlunto baru mencapai pada tingkatan Nindya, seperti yang tergambar dalam tabel di atas.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Ketersediaan pangan merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar manusia. Apalagi melihat perkembangan masyarakat yang kian meningkat, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terus menerus, dengan cara meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan dan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan. Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil kehewanian dan perikanan serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian perlu mendapat perhatian khusus, karena secara keseluruhan saling bersinergi satu dengan yang lain. Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal. Perwujudan ketahanan pangan dapat diindikasikan dengan ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, panganekaragaman konsumsi pangan dan pencegahan/penanggulangan masalah pangan. Ketahanan Pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan. Sementara itu untuk ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Ketersediaan Pangan Utama Beras Berdasarkan Jumlah Produksi Kota Sawahlunto Tahun 2012-2017

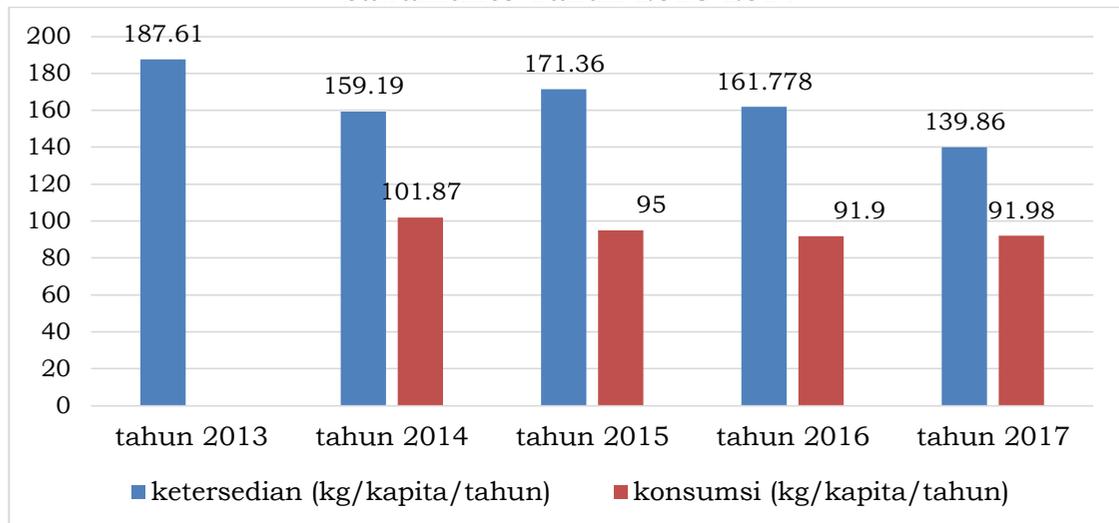
NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas panen (Ha)	3.541	3.104	3.332	2.985,9	2.650,2
2	Produksi GKG(ton)	17.655	15.116	16.651	15.055	14.274
3	Beras* (Ton)	11.063,57	9.483,78	10.446,84	9.834,13	8.992,62
4	Beras* (Kg)	11.063.572	9.483.778	10.446.837	9.834.131	8.992.620
5	Ketersediaan padi (kg/kapita/tahun)	299,02	253,59	276,66	257,90	221,99
6	Ketersediaan Beras (kg/jiwa/tahun)	187,61	159,10	173,58	161,80	139,86
7	Konsumsi Beras (kg/kapita/tahun)	103,9	101,87	95	91,9	91,98

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2018

*Faktor konversi 62.74% dari GKG yang digunakan oleh BPS dan Kementerian Pertanian sejak tahun 2009.



Grafik 2.24
Perbandingan Ketersediaan Beras Dengan Konsumsi Beras Kota
Sawahlunto Tahun 2013-2017



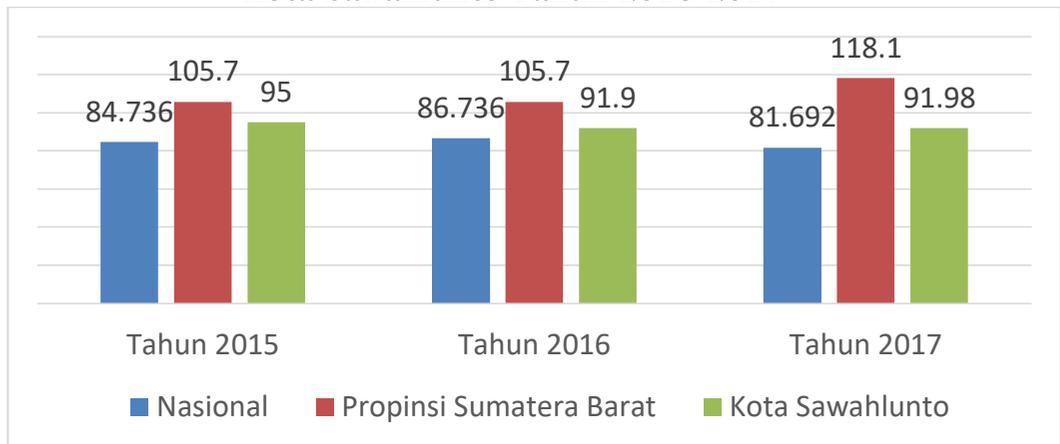
Sumber : Data Olahan Barelitbangda

Ketersediaan beras Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan. Berdasarkan penjelasan yang didapat dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan semakin menurunnya luas panen dan produksi diakibatkan oleh kecilnya luas tanam karena ketersediaan air yang terbatas, akibat kemarau panjang. Walaupun demikian ketersediaan beras untuk penduduk di kota Sawahlunto tetap surplus namun dilihat dari tingkat konsumsi beras Kota Sawahlunto cenderung menurun, penurunan ini mendukung upaya diversifikasi pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan.

Selain pengaruh musim menurunnya ketersediaan beras di Kota Sawahlunto disebabkan oleh perilaku petani, ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2017 dalam kegiatan evaluasi ekonomi kerakyatan sebagian dari petani kita menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering sehingga mengurangi ketersediaan beras yang ada di Kota Sawahlunto. Hal ini menyebabkan ketersediaan beras Kota Sawahlunto yang surplus tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap petani Kota Sawahlunto. Untuk itu perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap petani dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Sawahlunto, sehingga upaya peningkatan produksi dan produktifitas padi dengan cara intensifikasi harus dilakukan diantaranya melalui pemberian sarana produksi, penggunaan benih unggul terutama varietas lokal Kota Sawahlunto Gadang Rumpun Kumbayau yang telah dilepas oleh menteri pertanian RI, penggunaan pupuk An Organik dan Organik (pupuk kandang, kompos) serta melakukan pengendalian terhadap Hama dan Penyakit tanaman, serta melakukan budidaya dengan teknologi yang tepat. Upaya pengelolaan sumber air untuk pengembangan irigasi juga harus menjadi perhatian yang sangat penting di Kota Sawahlunto, seperti pembangunan kincir serta embung.



Grafik 2.25
Perbandingan konsumsi beras (kg/kapita/tahun) Nasional, Propinsi dan Kota Sawahlunto Tahun 2015-2017



Sumber : Data Olahan Barenlitbangda

Dilihat dari grafik diatas tingkat konsumsi beras dikota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan dengan tingkat konsumsi beras perkapita pertahun Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dan semoga dapat dipertahankan sehingga akan dapat mendukung terhadap diversifikasi pangan dan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

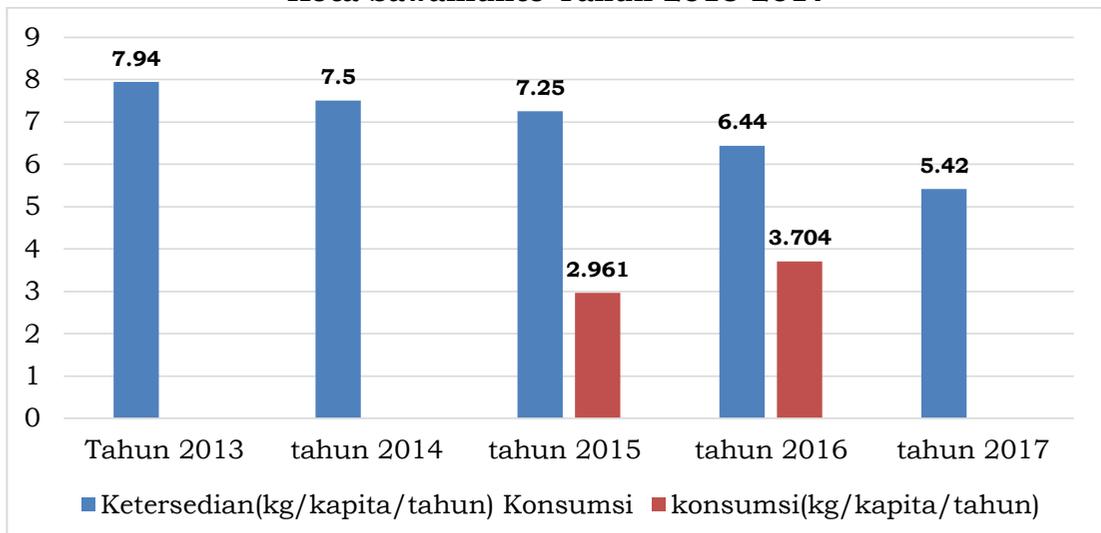
Tabel 2.102
Ketersediaan Daging Sapi Berdasarkan Jumlah Produksi Tahun 2013-2017

Daging Sapi	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi (Kg)	468.372	446.891	441.858	391.182,15	332.695,35
Ketersediaan daging sapi (Kg/kapita/tahun)	7,94	7,50	7,34	6,44	5,42
Konsumsi daging sapi (kg/kapita/tahun)	5,367	5,530	2,961	3,704	4,135

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017 dan data diolah

Ketersediaan daging sapi Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan, namun menurunnya ketersediaan daging sapi ini sangat dipengaruhi oleh berkurangnya populasi sapi yang ada, sehingga banyak ketersediaan daging sapi ini berasal dari peternak sapi luar kota Sawahlunto. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan populasi ternak sapi pedaging di Kota Sawahlunto.

Grafik 2.26
Perbandingan Ketersediaan Produksi Dengan Konsumsi Daging Sapi Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

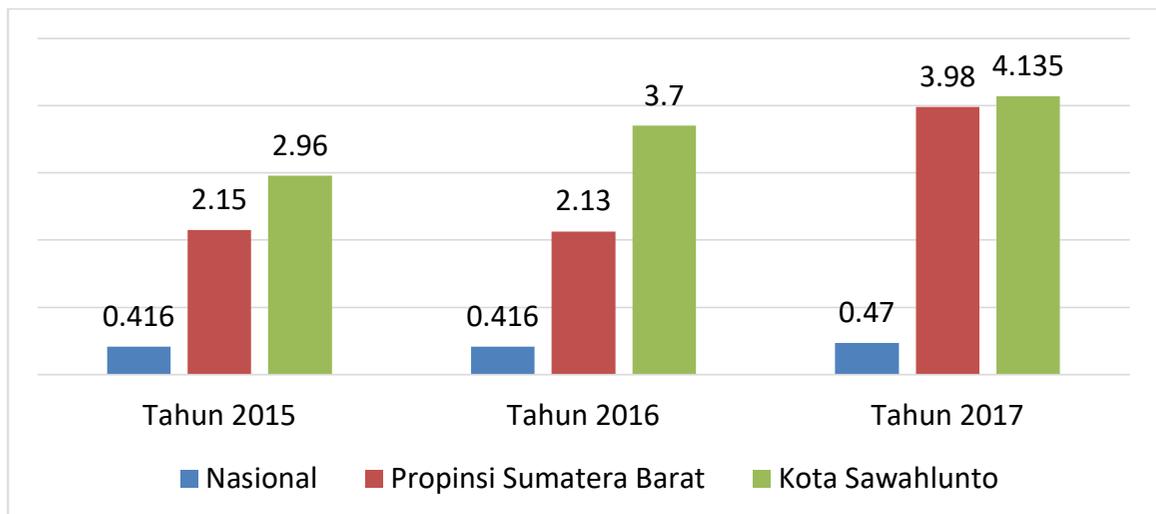


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto



Dilihat dari perbandingan ketersediaan dengan konsumsi daging sapi di Kota Sawahlunto tahun 2016 dan 2017 surplus sekitar $\pm 50\%$, sehingga kebutuhan masyarakat akan daging sapi dapat terpenuhi. Selain itu dapat dilihat perbandingan konsumsi Daging Sapi Kota Sawahlunto dengan propinsi dan nasional sebagai berikut:

Grafik 2.27
Perbandingan Konsumsi Daging Sapi (Kg/Kapita/Tahun) Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota Sawahlunto



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto

Dilihat dari perbandingan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat konsumsi Kota Sawahlunto terhadap daging sapi lebih tinggi. Menurut ahli gizi IPB mengatakan bahwa konsumsi daging idealnya ± 7 ons perhari, berarti 255,5 kg/kapita/tahun. Namun konsumsi daging sapi Kota Sawahlunto sangat jauh sekali dari standar idealnya, begitu juga dengan nasional dan Propinsi Sumatera Barat. Tingginya harga daging sapi sangat berpengaruh terhadap konsumsi daging sapi, selain itu juga masalah kesehatan yang mengakibatkan masyarakat takut untuk mengkonsumsi daging. Kestabilan harga daging sapi yang harus dijaga oleh pemerintah agar masyarakat masih bisa mengkonsumsi daging sapi.

Tabel 2.103
Ketersediaan Ayam Pedaging Berdasarkan Jumlah Produksi Tahun 2013-2017

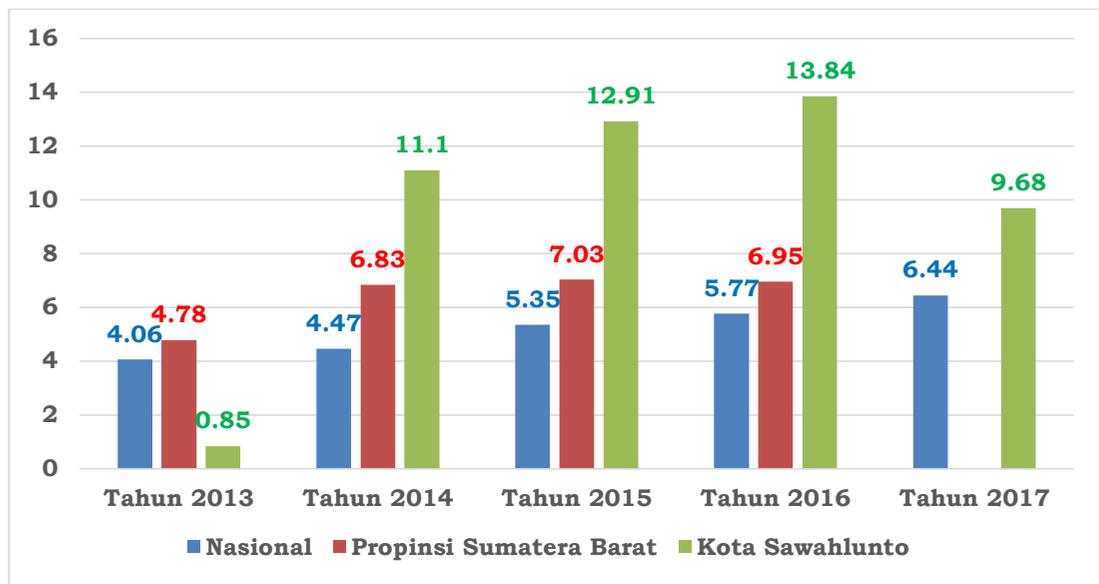
Ayam Pedaging	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi (Kg)	3.416.729	5.357.764,6	6.440.920,2	6.984.192,4	5.060.272,04
Ketersediaan Ayam Pedaging (Kg/kapita/tahun)	57,94	89,88	105,65	114,89	82,42
Konsumsi ayam pedaging (kg/kapita/tahun)	0,85	11,10	12,91	13,84	9,68

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017 dan data diolah

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan ayam ras pedaging kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan begitu juga dengan konsumsi masyarakat terhadap ayam pedaging.



Grafik 2.28
Perbandingan Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota
Sawahlunto Konsumsi Ayam Pedaging (Kg/Kapita/Tahun)
Tahun 2013-2017



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Dari grafik diatas terlihat di tahun 2014 dan 2015 konsumsi ayam pedaging Kota Sawahlunto lebih tinggi dari nasional dan propinsi Sumatera Barat, karena ayam pedaging adalah penyedia protein bagi masyarakat dengan harga yang relatif murah dan tersedia cukup banyak. Standar konsumsi daging ayam berada pada kisaran 13-15 kg per tahun, untuk Kota Sawahlunto bisa dikatakan sudah memenuhi standar yang idealnya, namun untuk Propinsi dan Nasional sangat jauh dari standar yang diharapkan.

Tabel 2.104
Ketersediaan Telur Ayam Berdasarkan Jumlah Produksi
Tahun 2013-2017

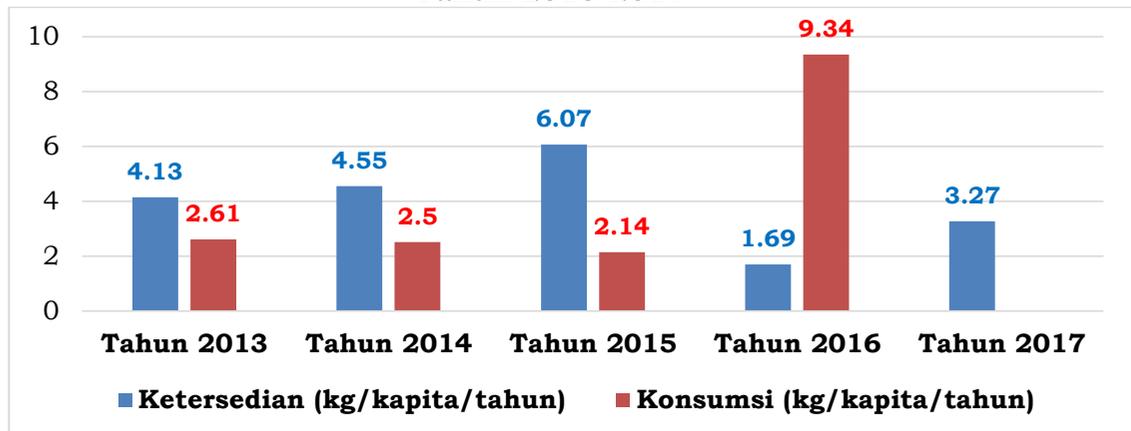
Telur Ayam	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi (Kg)	243.558	271.191,84	369.835,80	102.787,68	200.484,18
Ketersediaan Telur Ayam (Kg/ kapita/ tahun)	4,13	4,55	6,07	1,69	3,27
Konsumsi (kg/ kapita/ tahun)	2,61	2,50	2,14	9,34	1,686

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017 dan data diolah

Dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2013-2015 ketersediaan telur ayam di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan, yang disebabkan kurang diminat masyarakat karena harga pakan dan sarana kandang yang cenderung terus naik, sedangkan modal usaha terbatas selain itu juga sering memberikan dampak ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Ketersediaan telur ayam di kota Sawahlunto masih jauh dari tingkat kebutuhan masyarakat kota Sawahlunto. Telur yang ada kebanyakan telur ayam ras yang dipasok dari kab/kota tetangga seperti Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan usaha telur ayam ras ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan telur masyarakat kota Sawahlunto. Perbandingan ketersediaan dan kebutuhan telur di Kota Sawahlunto sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.29
Perbandingan Ketersediaan Dan Konsumsi Telur Ayam Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

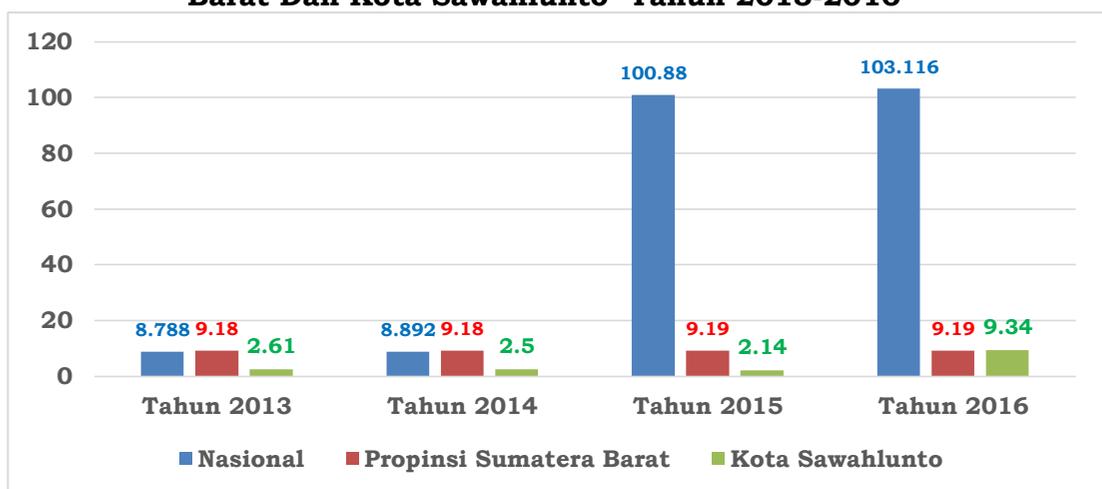


Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Dilihat dari grafik bahwa ketersediaan telur ayam Kota Sawahlunto minus jika dibandingkan dengan konsumsi telur ayam Kota Sawahlunto. Peternak telur ayam di Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan perusahaan luar sehingga produksi telur ayam di Kota Sawahlunto belum tentu untuk kebutuhan Kota Sawahlunto, ini tergantung kepada perusahaan yang kita ajak kerjasama. Ini merupakan salah satu alasan kenapa ketersediaan telur ayam di Kota Sawahlunto minus. Pemerintah Daerah harus lebih memfokuskan pada ketersediaan telur ayam ini, karena sangat berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Perbandingan konsumsi telur ayam Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto tergambar dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2.30
Perbandingan Konsumsi Telur Ayam Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2016



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Dilihat dari gambaran grafik diatas konsumsi telur ayam Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2015 rendah dari Propinsi Sumatera Barat, sedangkan di tahun 2016 mengalami peningkatan tetapi masih jauh dari konsumsi nasional. Standar konsumsi telur ayam 146 kg/kapita/tahun, sedangkan Kota Sawahlunto sangat jauh dari standar. Kurangnya daya beli masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein dari telur ayam merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Dengan ini maka dapat meningkatkan konsumsi akan telur ayam di Kota Sawahlunto sesuai standar yang ada.



2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Program Kegiatan Pertanahan yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalikan tata administrasi pertanahan dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanahan dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Tabel 2.105
Realisasi Pelacakan Dan Penegasan Batas Di Kota Sawahlunto

No	Pelacakan dan Penegasan Batas	Segmen	Panjang	Jumlah titik batas	Jumlah titik batas yang telah disepakati				
					2013	2014	2015	2016	2017
1	Wilayah Daerah	3			14	0	0	12	6
2	Wilayah Desa/Kelurahan				0	0	0	12	15
3	Ulayat Nagari				0	0	0	4	8

Sumber : DKP3LH Kota Sawahlunto, 2017

Dari table tersebut terlihat dari tahun 2013 hingga tahun 2017 masih sedikit titik batas yang disepakati dari 37 desa/kelurahan yang ada di Kota Sawahlunto, maka dari itu perlu penegasan tapal batas ini untuk mengantisipasi konflik antar daerah.

Secara nasional isu pemberitaan bidang pertanahan terfokus pada pengelolaan hutan, alih fungsi hutan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di Kota Sawahlunto, selain isu nasional tersebut, masih terdapat beberapa isu lainnya yang meliputi;

- a. Isu adanya 25 (dua puluh lima) dari 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang berada di Kota Sawahlunto seluas \pm 8.970,37 Ha lahan atau 3,62 % dari Luas Kota Sawahlunto berada dalam kawasan hutan, hal ini mendatangkan persoalan khusus yang harus dihadapi karena sebagian besar berada di pusat-pusat pemukiman dan sentra ekonomi masyarakat, hal ini dibutuhkan pemikiran dan kebijakan khusus serta program inovasi dalam penataan lahan dan untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah di atasnya.
- b. Isu adanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Ulayat Nagari dan Kaum dari 10 (Sepuluh) Nagari yang ada di Kota Sawahlunto, belum pernah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, saat ini baru diperoleh data awal penguasaan tanah ulayat dan kaum sebanyak 1500 persil tanah dari 2 (dua) Nagari, sementara 8 (delapan) Nagari lainnya belum diketahui sampai saat ini. Hal ini perlu dilakukan inventarisasi khusus.
- c. Isu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Tanah Pasca Tambang yang masih belum jelas penyelesaiannya status haknya, munculnya isu ini dipicu dengan akan berakhirnya IUP PT.BA Pertambangan Ombilin di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sehingga isu ini sangat berpotensi sebagai bom waktu yang sangat serius terutama adanya kepentingan-kepentingan banyak pihak, baik PT.BA, Pemerintah Daerah, Ulayat Nagari dan masyarakat banyak yang selama ini memanfaatkan dan menguasai tanah pasca tambang tersebut melalui SIPT dan sewa pakai dari PT.BA (Persero) UPO.Tbk. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan harus diantisipasi dengan melakukan dialog-dialog dan sosialisasi yang intensif, terutama dengan masyarakat adat, dan dilakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak PT.BA dalam pemanfaatan aset-aset pasca tambang yang saling menguntungkan semua pihak tanpa menerobos regulasi dan aturan hukum yang telah ada.
- d. Isu adanya persoalan-persoalan penyerahan P3D khususnya yang menyangkut tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Propinsi maupun sebaliknya terkait dengan



diundangkannya PP No. 44 tahun 1990 tentang perluasan wilayah daerah.

- e. Isu adanya persoalan-persoalan tapal batas pasca diundangkannya PP No 44 tahun 1990 Tentang Perluasan Wilayah Daerah Kota Sawahlunto pada 27 tahun yang silam tanah pemda yang sudah dibebaskan tetapi belum dimanfaatkan, adanya tanah pemda yang dipakai oleh Instansi vertikal dan masyarakat umum.
- f. Isu adanya kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur daerah
- g. Isu banyaknya tanah yang telah dikuasai tidak terpelihara dan termanfaat (Penatagunaan Tanah) sementara karena belum adanya kepastian hukum.

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Perencanaan Tata Kelola Lingkungan

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.106
Dokumen Lingkungan Hidup Yang ada Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

Dokumen Rencana	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
DDDTLH	-	-	-	-	-
RPPLH	-	-	-	-	-
KLHS	1	-	-	-	-
Masterplan Air Minum	1	-	-	-	-
Masterplan Air Limbah	1	-	-	-	-
Masterplan Persampahan	-	-	1	-	-

Sumber : DPKP2LH, 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kota Sawahlunto belum melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaa Lingkungan Hidup, dimana Pemerintah Kota wajib menyusun dokumen tata kelola Lingkungan yang menjadi acuan dalam pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup.

2.3.2.5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran awal kondisi Lingkungan hidup pada rentang waktu tertentu. IKLH inidipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan.

Tabel 2.107
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

Indeks	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Air	50,23	53,05	55,52	56,25	55,25
Indeks Kualitas Udara	86,41	83,9	88,48	83,90	89,97
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85
Indeks Lingkungan Hidup	55,73	55,83	57,94	56,79	58,31

Sumber : DPKP2LH, 2017



Dari tabel tersebut banyak data yang belum tersedia oleh OPD teknis terkait. Sehingga kualitas lingkungan hidup tidak dapat dihitung secara baik. Hal ini disebabkan belum beroperasinya secara optimal laboratorium lingkungan yang telah dibangun sejak tahun 2006, sampai saat ini Akreditasi laboratorium belum juga terbit, sehingga kesulitan dalam penyediaan data-data teknis terkait lingkungan hidup.

2.3.2.5.3. Persentase penanganan sampah.

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH. Cakupan pelayanannya adalah:

- 1) Sudah dilayani : 68% atau 24 desa/kelurahan
- 2) Belum terlayani : 32% atau 13 desa/kelurahan

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 25-30 m³/hari, sementara timbulansampah per harisekitar 45 m³/hari (± 45.235. Kg/hari). Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2.108
Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

Pengelolaan	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Timbulansampahkota (M ³ /hari)	147,43	149,02	150,47	151,945	153,50
Rata-rata Timbulan (M ³ /hari)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Jumlah sampahterolah TPA dan TPST (M ³)	42	42	42	46	81
Persentase Sampah Terolah dengan Timbulan Sampah (%)	28,49	28,18	27,91	30,27	52,77

Sumber : DKP2LH Kota Sawahlunto, 2017

Timbulan Sampah Kota Sawahlunto pada tahun 2013 sebanyak 147,43 M³/hari, sedangkan tahun 2017 terjadi peningkatan, dengan jumlah 153,50 M³/hari. Sedangkan yang sampah yang terolah di TPA dan TPST pada tahun 2017 meningkat dari 42 M³/hari menjadi 81 M³/hari sehingga sampah yang tidakterangkutpadaumumnyamenumpuk di TempatPenampungan Sementara yang ada baik di desa – desamaupun dipinggiran perkotaan yang belum terjangkau pelayanan. Tingkat pelayanan sampah yang terolah meningkat dari 28,49% menjadi 52,77% di tahun 2017.

Jangkauanpelayanan persampahan di Kota Sawahlunto sampai saat ini baru 68% atau sebanyak 24 Desa/Kelurahan yang baru terlayani. Hal ini bukan hanya kemampuan tenaga yang terbatas atau kekurangan sarana yang ada, akan tetapi lebih disebabkan lokasi tersebut yang tidak memungkinkan dijangkau oleh armada persampahan dengan kata lain topografi Kota Sawahlunto yang belum bisa dilalui oleh armada/angkutan mobil sampah.

Salah satuupaya yang perludilakukan adalah denganmembentuk Kader Pengomposan Sampah desa yang mampu mengolah sampah di lokasinya sendiri. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola DKP2LH adalah berupa :



Tabel 2.109
Sarana Dan Prasarana Persampahan
Tahun 2013-2017

NO.	JENIS SARANA	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	TPA Lontiek Maloweh (Ha)	2	2	2	2	-	Tidak aktif
2	TPA Kolok Nan Tuo (Ha)	1,50	1,50	1,50a	1,50	1,50	Tidak aktif
3	TPA Kayu Gadang (Ha)	5	5	5	5	9,7	Dijadikan Sanitary Landfill
4	TPST (unit)	1	2	4	5	5	
5	TPS						
6	Truck Sampah						
a	Arm Roll Truck (unit)		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
b	Dump Sampah (unit)		4 unit	4 unit	4 unit	4 Unit	
7	Container (unit)		24 unit	17 unit	17 unit	17 Unit	
8	BakSampah (buah)		14 buah	14 buah	14 buah	30 Buah	
9	Drum/Tong Sampah (buah)		344 buah				
10	GerobakSampah (unit)		7 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
12	Becak Motor (unit)		13 unit	11 unit	18 unit	22 Unit	
13	Petugas K3 (orang)		48	48	152		
14	Bulldozer		1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	
15	Incenerator	2	2 unit	2 unit	3 unit	4 unit	2 rusak 2 baik
16	MesinKompos		1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	
18	Excavator		1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2017

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Sawahlunto ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan Truck Sampah dan armrolltrukkarena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang telah ditingkatkan metode pemusnahan sampah dari sistem control landfill menjadi sanitary landfill melalui dana APBN tahun 2014 dan 2015.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang layak secara teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan.

2.3.2.5.4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah TPSS (unit)	271	112	344	344	344
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m ³)	127,7	48,70	147,92	147,92	147,92
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	58.991	59.608	62.112	63.560	63.560
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m ³ /1000 jiwa)	2,2	0,87	2,38	2,32	2,32

Sumber : DPKP2LH, 2017

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2011 sebanyak 246 unit dengan daya tampung 106,2 m³, di tahun 2014 menurun menjadi 112 dengan daya tampung 48,70 m², namun tahun 2015 dan 2016 terjadi penambahan menjadi 344 unit dengan daya tampung 147,92 m³, dengan



rasio daya tampung sebesar 2,32 m³/1000 jiwa, artinya untuk setiap 1000 jiwa tersedia TPSS 2,32 unit.

2.3.2.5.5. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah

Pengangkutan sampah yang dihasilkan rumah tangga dan tempat-tempat umum lainnya dari TPS menuju TPA menggunakan truk pengangkut sampah setiap hari. Berikut disajikan data rasio truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.111
Rasio Jumlah Daya Tampung Truk Terhadap Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit)	7	7	7	7	7
2	Jumlah Daya Tampung Truk (m3)	28	28	28	28	28
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	58.991	59.608	62.112	63.560	64.299
4	Rasio Daya Tampung Truk thd Jumlah penduduk	0,00047	0,00046	0,00045	0,00044	0,00044

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2017

Jumlah truk pengangkut sampah yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2011 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan, yaitu sebanyak 7 unit, dengan kapasitas 28 m³, sehingga rasio daya tampung truk terhadap 1000 penduduk tahun 2016 adalah 0,00044 yang berarti kemampuan untuk mengangkut sampah dengan truk hanya sebanyak 440 kg untuk setiap 1000 penduduk. Kemampuan daya tampung ini dirasa sangat kurang karena setiap 1000 penduduk menghasilkan sampah 1.679 kg per hari, dan dibutuhkan tambahan truck sampah sebanyak 4 unit lagi.

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Penduduk Yang Sudah Teraftar Dalam Catatan Sipil

Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 42.569 orang. Sedangkan yang belum mempunyai KTP-el pada tahun 2017 hanya 329 orang. Penduduk yang sudah memiliki KK pada tahun 2017 yaitu dari 18.353 KK. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta lahir pada tahun 2017 31.515 orang, yang belum memiliki akta lahir 33.527 orang pada tahun 2017. Penduduk yang memiliki Akte perkawinan pada tahun 2017 22.170, yang tidak memiliki Akte Perkawinan sebanyak 3.209, Penduduk yang memiliki Akte kematian adalah sebanyak 916 dan yang tidak memiliki akte kematian 82 sebagaimana yang tertera pada table berikut ini :



Tabel 2.112
Data Kepemilikan Kartu Keluarga
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah kepala keluarga			Jumlah penduduk memiliki kartu keluarga			Jumlah penduduk tidak memiliki kartu keluarga		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lembah segar	3,219	800	4,019	3,219	800	3,219	-	-	-
2	Barangin	4,742	1,017	5,759	4,742	1,017	4,742	-	-	-
3	Silungkang	2,628	662	3,290	2,628	662	2,628	-	-	-
4	Talawi	4,723	562	5,285	4,723	562	4,723	-	-	-
	T o t a l	15,312	3,041	18,353	15,312	3,041	18,353	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2017

Tabel 2.113
Data Kepemilikan KTP-el di Kota Sawahlunto
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Penduduk Memiliki KTP -El			Jumlah Penduduk Tidak Memiliki KTP-El		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lembah Segar	4,933	5,058	9,991	4,562	4,751	9,313	371	307	678
2	Barangin	6,899	7,099	13,998	6,302	6,617	6,302	597	482	1,079
3	Silungkang	3,994	4,022	8,016	3,609	3,761	3,609	385	261	646
4	Talawi	6,885	6,972	13,857	6,386	6,581	6,386	499	391	890
	T O T A L	22,711	23,151	45,862	20,859	21,710	42,569	1,852	1,441	3,293

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2017



Tabel 2.114
Data Kepemilikan Akta Kelahiran
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran			Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Akta Kelahiran		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	LEMBAH SEGAR	6,921	6,941	13,862	3,321	3,296	6,617	3,600	3,645	7,245
2	BARANGIN	9,887	9,962	19,849	4,956	4,968	4,956	4,931	4,994	9,925
3	SILUNGKANG	5,907	5,713	11,620	2,744	2,525	2,744	3,163	3,188	6,351
4	TALAWI	9,902	9,809	19,711	4,925	4,780	4,925	4,977	5,029	10,006
	TOTAL	32,617	32,425	65,042	15,946	15,569	31,515	16,671	16,856	33,527

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2017

Tabel 2.115
Data Kepemilikan Akta Perkawinan Di Kota Sawahlunto
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin			Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perkawinan			Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Akta Perkawinan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	LEMBAH SEGAR	3,040	3,105	6,145	2,272	2,151	4,423	768	954	1,722
2	BARANGIN	4,497	4,558	9,055	3,477	3,170	3,477	1,020	1,388	2,408
3	SILUNGKANG	2,483	2,540	5,023	1,983	1,930	1,983	500	610	1,110
4	TALAWI	4,551	4,665	9,216	3,630	3,557	3,630	921	1,108	2,029
	TOTAL	14,571	14,868	29,439	11,362	10,808	22,170	3,209	4,060	7,269

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2017



Tabel 2.116
Data Kepemilikan Akta Kematian
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Mati	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kematian	Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Akta Kematian
1	LEMBAH SEGAR	230	211	19
2	BARANGIN	300	281	19
3	SILUNGKANG	188	174	14
4	TALAWI	280	250	30
	TOTAL	998	916	82

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto 2017



Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kesadaran penduduk Kota Sawahlunto akan pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah baik, hal ini juga tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam mensosialisasikan dan menghimbau seluruh penduduk Kota Sawahlunto untuk melengkapi administrasi kependudukannya.

2.3.2.7. Urusan Komunikasi & informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.117
Jumlah Layanan Komunikasi Dan Informasi
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kantor Pos (unit)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Sambungan Telepon (SST)	3.008	3.008	1.426	1.426	1.426
3	Jumlah Warnet(unit)	45	45	29	29	29

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017

Dari tabel tersebut dapat dirinci bahwa Kantor Pos cabang sebanyak 2 unit dan Kantor Pos Pembantu sebanyak 2 unit, sementara jumlah Warnet pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yakni 29 unit. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Kota Sawahlunto yang telah menggunakan layanan internet di rumah masing-masing sehingga tidak perlu lagi ke warnet untuk menggunakan Internet sedangkan sambungan telepon (SST) juga tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2017 yaitu 1.426 unit.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Penyusunan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto yang dilaksanakan oleh Konsultan PT. Pilar Cipta Solusi Integratika, pada penyusunan tersebut telah dilakukan survey kondisi eksisting: jaringan internet, Local Area Network (LAN), ketersediaan komputer dan perangkat pendukung, spesifikasi hardware (perangkat keras), sistem informasi eksisting, kondisi sumber daya manusia, anggaran TIK, kondisi ideal dan GAP analisis.

Dari hasil survey tersebut disusunlah konsep smart city Kota Sawahlunto yang mencakup arah pengembangan smart city, blue print pengembangan infrastruktur TIK, blue print pengembangan aplikasi dan integrasi, blue print pengembangan sumber daya manusia, blue print tata kelola TIK, blue print pemeliharaan sistem dan perencanaan anggaran untuk 5 tahun ke depan. Untuk penerapannya telah disusun Peraturan



Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerapan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto.

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi menjadikan kurang efektifnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informatika. Selain itu perlunya peningkatan kerja sama informasi dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara intens untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.118
OPD Yang Sudah Memiliki Website

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah OPD Yang Memiliki Website	5	6	8	9	10
%	17,86%	21,43%	28,57%	32,14%	38,46%

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Web Pemerintah Daerah merupakan salah satu media informasi dan komunikasi dari suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi, yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet. Dilihat dari tahun ke tahun perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami kenaikan yang sudah memiliki website.

Tabel 2.119
Data Desa/Kel Yang Terkoneksi Internet di Kota Sawahlunto

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Desa Yang Terkoneksi Internet	14	14	20	21	21
Jumlah Desa	37	37	37	37	37
%	37,83	37,83	54,05	56,75	56,75

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Internet sebagai salah satu sumber informasi bukan lagi menjadi sesuatu yang hanya dikenal di masyarakat perkotaan, namun masyarakat pedesaan pun telah mulai mengenal dan menggunakan internet itu sendiri. Penggunaan fasilitas internet di desa masih sangat terbatas, tidak seperti di perkotaan yang sudah maju. Hal ini disebabkan kurangnya infrastruktur telekomunikasi di desa. Sehingga untuk mengatasi hal ini, secara perlahan peran serta pemerintah menjadi sangat penting dalam rangka memberikan fasilitas internet di desa. Dapat dilihat pada tabel diatas peningkatan desa yang terkoneksi internet di Kota Sawahlunto sudah mencakup 21 desa/kel dari 37 desa/Kel yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.120
Data OPD Yang Sudah Memiliki Aplikasi

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah OPD Yang Memiliki Aplikasi	3	4	5	7	11
%	10,71	14,29	17,86	25,00	42,31

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto



Sistem Informasi (Aplikasi) yang dikembangkan dalam pemerintahan membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Sistem Informasi (Aplikasi) juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan berbagai sektor. Disamping itu juga masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Dilihat dari tahun ke tahun perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami kenaikan yang sudah memiliki Sistem Informasi (Aplikasi).

Tabel 2.121
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	2,02

Sumber : Bag. Humas Setdako Kota Sawahlunto

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE tersebut. Pelaksanaan SPBE baru dimulai pada tahun 2018 dengan mengevaluasi pelaksanaan SPBE tahun 2017.

2.3.2.8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu sarana utama perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadikan koperasisebagai peningkat kesejahteraan masyarakat maka diperlukan koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing dan mampu menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya, maka harus dilakukan revitalisasi sesuai dengan Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/per/M.KUKM/IX/2015 tentang revitalisasi koperasi. Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar. Koperasi yang aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.122
Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	62	63	66	66	60
2	Jumlah koperasi (unit)	78	78	80	81	68
3	Persentase koperasi aktif	79,49	80,77	82,5	81,48	88,24

Sumber : Dinas Koperindag '2018

Dari Tahun 2013-2017 persentase koperasi yang aktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terakhir di Tahun 2017 sebesar 88,24 persen. Namun meningkatnya persentase koperasi ini tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah koperasi yang ada di Kota Sawahlunto. Ini merupakan permasalahan yang harus dapat diselesaikan untuk lima tahun mendatang, karena koperasi aktif ini tidak terlepas dari kemampuan manajerial para pengurus dalam mengelola koperasi, akses permodalan dan teknologi mendukung. Untuk itu dapat dilihat Perkembangan koperasi dari Tahun 2013-2017 seperti dibawah ini:



Tabel 2.123
Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2015

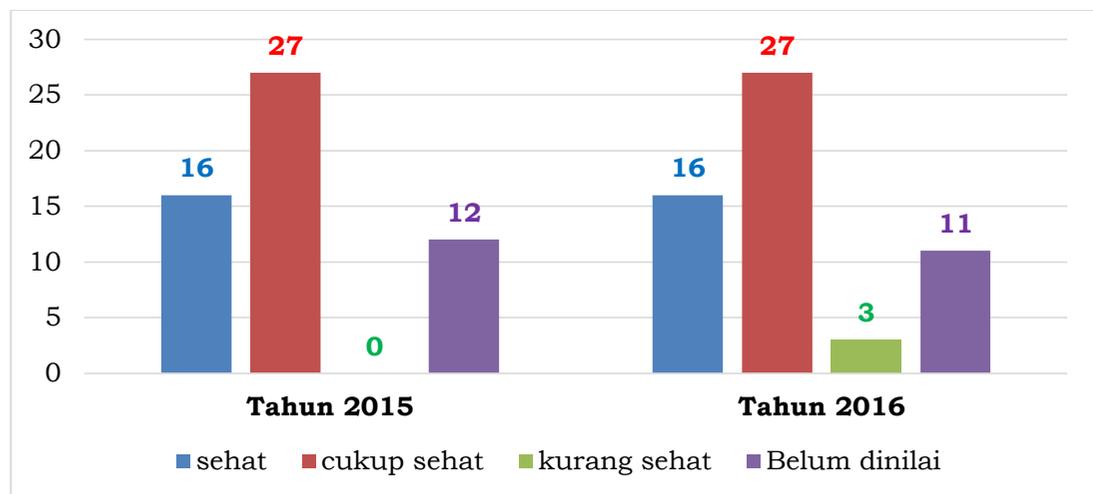
NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi (unit)	78	78	80	81	68
2	Jumlah Koperasi Aktif	62	63	66	66	60
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	16	15	14	15	8
4	Jumlah Koperasi RAT	47	48	49	49	49
4	Jumlah Anggota orang)	9.054	9.108	9.128	10.099	9.377
5	Jumlah Tenaga Kerja	238	268	271	271	113
3	Volume Usaha (Rp))	107.653.000.000	109.721.000.000	111.702.420.393	112.571.756.401	113.515.889.660
4	Modal Sendiri (Rp)	29.138.000.000	32.147.000.000	35.146.505.339	35.146.505.339	40.546.929.884
5	Modal Luar (Rp)	53.641.000.000	50.615.000.000	38.909.707.203	38.909.707.203	34.999.816.019
6	Asset (Rp)	76.780.000.000	78.033.000.000	79.328.495.127	79.328.495.127	75.437.273.734
7	SHU (Rp)	2.848.000.000	2.879.000.000	3.813.074.400	4.393.942.021	4.087.398.324

Sumber : Dinas Koperindag, 2017



Dari tabel diatas perkembangan koperasi dari Tahun 2013-2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dilihat dari jumlah koperasi yang berkurang diiringi dengan berkurangnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan dilihat dari permodalan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dengan modal sendiri dan volume usaha, untuk modal yang dari luar dan asset menurun karena berkurangnya jumlah koperasi yang ada. Ini berarti faktor permodalan sangat perlu dijadikan perhatian. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Untuk Koperasi simpan pinjam berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, maka penilaian untuk koperasi simpan pinjam di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Grafik.2.31
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2015 dan 2016 (koperasi)



Sumber : Dinas Koperindag 2017

Dilihat dari kualitas koperasi Simpan Pinjam Dan Usaha Simpan Pinjam yang ada di Kota Sawahlunto jumlah koperasi yang dinyatakan sehat di Kota Sawahlunto untuk penilaian tahun 2015 dan 2016 tidak mengalami peningkatan, begitu juga dengan koperasi yang cukup sehat. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari koperasi sinoam pinjam tersebut.

Selain koperasi keberadaan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menyediakan modal pada pelaku usaha lokal. Berikut ini perkembangan UKM, BPR dan LKM selama 2013-2017:

Tabel 2.124
Jumlah UKM Non BPR/LKM dan Jumlah BPR/LKM
TAHUN 2013 - 2017

NO	UKM NON BPR/LKM	2013	2014	2015	2016	2016
1	Jumlah UKM NON BPR/LKM UKM Aktif	417	437	3.312	3.312	3.312
2	Jumlah BPR /LM Aktif	34	34	34	34	34

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017



Dari Tahun 2013-2016 jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 34 unit, tidak mengalami peningkatan kurun waktu tiga tahun terakhir ini, sedangkan untuk jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2017 adalah 3.312 unit, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2015. Meningkatnya jumlah UKM yang aktif ini sangat mendukung terhadap perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun dilihat dari realitanya jumlah UKM yang meningkat ini belum begitu signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat, untuk itu sangat diperlukan partisipasi pemerintah dalam pembinaan-pembinaan terhadap UKM yang ada.

2.3.2.9. Urusan Penanaman modal

2.3.2.9.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.125
Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA)	118	128	66	185	168	

Sumber : DPMPTSPNaker, 2018

Dari data diatas dapat terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha di Kota sawahlunto menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Dan sebagian besar perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan jasa usaha pertambangan. Dan sebagian besar perusahaan yang berinvestasi adalah berasal dari dalam Kota Sawahlunto.

Perusahaan yang berinvestasi di Kota Sawahlunto adalah PMDN, untuk PMA dari tahun 2015-2017 tidak ada berinvestasi. Tahun 2013-2014 hanya 1 PMA yang ada di Kota Sawahlunto.

2.3.2.9.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya dari tahun 2014 s/d 2016 mengalami penurunan yang sangat besar hal ini disebabkan oleh mulai menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan peningkatan investasi pada tahun 2017 disebabkan oleh investasi pada sektor perumahan.

Tabel 2.126
Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto

No	Jenis	Tahun/Rp. Juta				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PMDN	-	1.401.035	504.794	37.648	587.975
2	PMA	-	82.000	-	-	-

Sumber : DPMPTSPNaker

2.3.2.9.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi



peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Sawahlunto menunjukkan tren negatif, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri.

Pada Kota Sawahlunto rasio penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan yang rata-rata pertahun yang positif sebesar 14,21 %.

Tabel 2.127
Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

No	Tenaga Kerja	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
1.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.664	4.183	1.132	4.577	2.928	52,38
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	118	128	66	185	168	32,79
3.	Rasio	31	33	86	44	17	14,21

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2017

2.3.2.10. Urusan Kebudayaan

2.3.2.10.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menuru pola tertentu. Berikut ini data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.128
Penyelenggaraan Pertunjukan (festival) Seni dan Budaya
di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Penyelenggaraan pertunjukan(festival) seni dan budaya	Hari	59	62	64	88	63	4,35

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2013-2016.
2. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2017.
3. Hasil Olahan, 2017

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya di Kota Sawahlunto meningkat dari Tahun 2013-2016, namun di tahun 2017 terjadi penurunan penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya disebabkan rasionalisasi kegiatan-kegiatan yang dulunya berada pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dengan dibentuknya OPD Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman akhir tahun 2016 dan mulai beraktifitas di



awal tahun 2017, sehingga membutuhkan waktu dalam rangka peralihan tugas pokok dan fungsinya. Namun hal ini tidak mempengaruhi kegiatan grup-grup kesenian dan budaya yang ada di Kota Sawahlunto.

Di Kota Sawahlunto, terdapat beberapa komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.129
Kamunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

No	Nama Komunitas	Jumlah
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	1
2.	Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	10
4.	Bundo Kandung Kerapat Adat nagari	10
5.	Paguyuban Jawa	1
6.	Paguyuban Batak	1
7.	Paguyuban Sunda	1
Total Komunitas Budaya		25

Sumber :

Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2017

Berdasarkan informasi dari Dinas Kebudayaan, Peninggalan bersejarah dan Permuseuman, dari 25 komunitas budaya yang ada, 11 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni dengan persentase sebesar 44%, sementara masih ada 14 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 56%, artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

2.3.2.10.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto.

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.130
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian	Set	7	7	7	7	9	7,14
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	Unit	23	68	68	68	69	49,28
3.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	Unit	68	74	74	74	119	17,41
4.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	Persen	33,82	91,89	91,89	91,89	57,98	39,79
5.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola	Unit	17	17	17	17	21	5,88
6.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	Unit	68	74	74	74	119	17,41
7.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola	Persen	25	22,97	22,97	22,97	17,65	-7,82

Sumber :

1. Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, 2013-2016.
2. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2017



Tahun 2017 ada penambahan penetapan benda, bangunan, struktur dan situs serta kawasan cagar budaya sebanyak 45 cagar budaya, sehingga keseluruhan berjumlah 119 cagar budaya, yang sudah dilestarikan sebanyak 69 cagar budaya sementara yang belum dilestarikan sebanyak 50 cagar budaya lagi sehingga Persentase jumlah benda cagar budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 57,98%. Kalau dilihat dari data persentase tahun sebelumnya terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah benda, bangunan, struktur dan situs terjadi penambahan di tahun 2017.

Berdasarkan data di atas, dalam rangka pelestarian benda cagar budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata. Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (tangible), tetapi juga akan melestarikan budaya tak benda (intangible). Untuk data awal, ada 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto sebagai Budaya Tak Benda (intangible). Berikut ini data warisan budaya tak benda (intangible) di Kota Sawahlunto berdasarkan Data Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2.131
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) di Kota Sawahlunto

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1.	Manuskrip	5
2.	Tradisi Lisan	46
3.	Adat Istiadat	40
4.	Ritus	12
5.	Pengetahuan Tradisional	18
6.	Teknologi Tradisional	27
7.	Seni	38
8.	Bahasa	2
9.	Permainan Rakyat	35
10.	Olahraga Tradisional	2
Total Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		225

Sumber :

Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2018

Dari tabel di atas, dapat di lihat total objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Sawahlunto berjumlah sebanyak 225 OPK, yang merupakan warisan budaya tak benda (intangible), namun belum satupun dari objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan. Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

2.3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Potensi bagi pengembangan perikanan di Kota Sawahlunto sangat terbatas akibat ketersediaan air bagi budidaya perikanan sangat kecil. Pada sisi lain seiring perkembangan jumlah penduduk kebutuhan atas ikan terus meningkat sehingga ketersediaan ikan produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan. Berikut dapat dilihat Ketersediaan Ikan Darat berdasarkan produksi ikan.



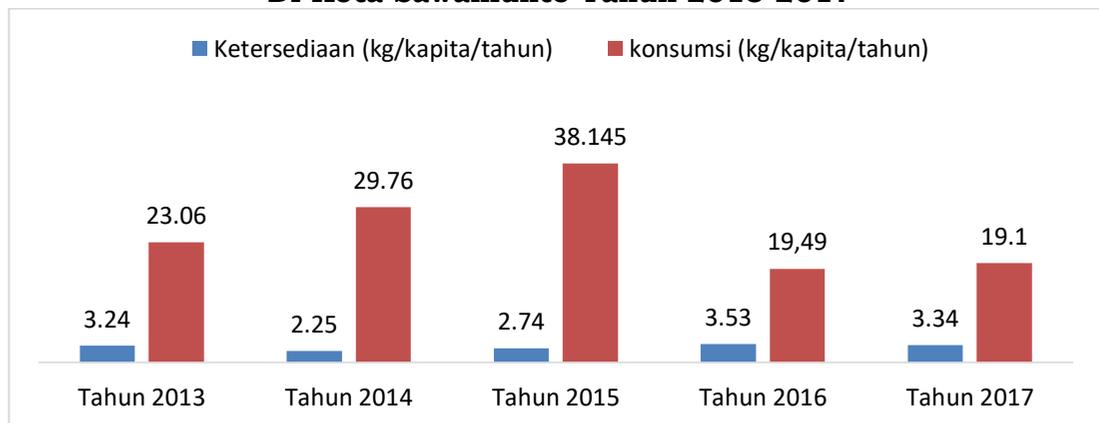
Tabel 2.132
Ketersediaan Ikan Darat Tahun 2013-2017

Ikan Darat	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Ikan (Ton)	103,6	134,22	164,83	214,70	214,98
Produksi Ikan (Kg)	103.600	134.220	164.830	214.700	214.980
Ketersediaan Ikan (Kg/jiwa/tahun)	3,24	2,25	2,74	3,53	3,34
Jumlah konsumsi ikan (ton)	1359,90	1773,90	2295,83	1183,40	1228,11
Jumlah Konsumsi ikan (kg)	1.359.900	1.773.900	2.295.830	1.183.400	1228110,9
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	23,060	29,76	38,145	18	19,1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Ketersediaan ikan di Kota Sawahlunto yang berdasarkan jumlah produksi ikan di lima tahun terakhir terus meningkat, namun belum mencukupi untuk konsumsi ikan di Kota Sawahlunto. Dilihat dari ketersediaan dan konsumsi rata-rata ikan darat di Kota sawahlunto tergambar pada grafik dibawah ini:

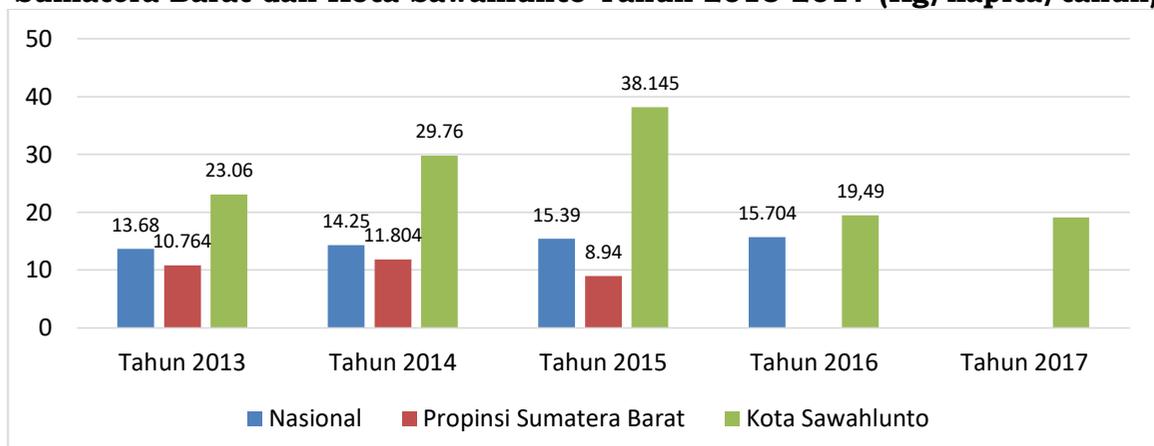
Grafik 2.32
Perbandingan Ketersediaan dan Konsumsi Ikan Darat Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik diatas terlihat bahwa ketersediaan ikan darat yang ada tidak mencukupi untuk konsumsi masyarakat kota Sawahlunto. Berdasarkan tinjauan lapangan untuk mencukupi kebutuhan akan ikan darat, Kota Sawahlunto mengimpor ikan darat terutama dari kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok. Selain itu Sawahlunto juga mengimpor ikan laut dari Kota Padang, karena letak geografis Sawahlunto yang berada didaerah yang jauh dari laut. Untuk itu perhatian pemerintah terhadap Perbandingan konsumsi ikan untuk tingkat nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Sawahlunto sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.33
Perbandingan konsumsi perkapita ikan tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017 (Kg/kapita/tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik



Dibandingkan dengan Rata-rata konsumsi ikan nasional dan rata-rata konsumsi propinsi Sumbar (termasuk ikan laut dan udang segar), rata-rata konsumsi ikan Kota Sawahlunto jauh lebih tinggi, ini karena upaya pemerintah kota dalam meningkatkan konsumsi ikan melalui gemarikan (gerakan memasyarakatkan makan ikan) dan pengembangan diversifikasi pangan produk ikan di Kota Sawahlunto, terbukti dengan Kota Sawahlunto juara I tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan 2018 dan mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional dalam kegiatan olahan ikan. Tingginya tingkat konsumsi ikan Kota Sawahlunto ini berbanding terbalik dengan ketersediaan ikan yang terbatas di kota Sawahlunto. Dalam memenuhi konsumsi ikan, Kota Sawahlunto mempunyai luas areal budidaya perikanan darat seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.133
Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)

Jenis	2013	2014	2015	2016	2017
Sungai	164,97	164,97	164,97	164,97	96
Kolam	58,21	58,20	58,20	58,20	52,77
Sawah	-	123	123	123	-
Total	223,18	237,15	238,15	238,15	148,77

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2013-2016 total luas area budidaya perikanan darat di Kota Sawahlunto relatif konstan sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan kampung produktif yang dimulai sejak tahun 2014, pada kampung produktif ini masyarakat diberi bantuan pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

2.3.3.2.1. Jumlah Kunjungan

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.134
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017
(Berdasarkan Tiket Masuk)

Objek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Museum Gudang Ransum	14.102	13.725	20.943	22.287	19.619	90.676
Museum Kereta Api	5.003	5.657	6.557	6.423	12.220	35.860
Water Boom	144.121	118.339	101.063	114.003	93.446	570.972



Objek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Taman Satwa Kandi	168.061	132.636	115.845	110.289	89.927	616.758
Lubang Tambang Mbah Soero	10.298	10.764	12.938	10.965	10.653	55.618
Desa Wisata Rantih	3.628	5.358	6.583	4.513	2.171	22.253
Kelok 16	-	-	2.687	2.743	7.326	12.756
Puncak Cemara	-	-	45.611	101.149	65.227	211.987
Taman Buah	-	-	-	9.834	12.339	22.173
Camping Ground Kandi	-	-	-	7.300	18.555	25.855
Total	345.213	286.479	312.227	389.506	331.483	1.664.908

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2013-2016.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk pada masing-masing objek terjadi penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014, kemudian terjadi kenaikan pengunjung di tahun 2015 dan 2016, hal ini merupakan disebabkan karena ada penambahan 3 destinasi baru di Kota Sawahlunto yakni Puncak Cemara, Taman Buah dan Camping Ground Kandi. Adanya penambahan objek wisata baru dan atraksi baru diharapkan terjadinya peningkatan jumlah kunjungan pada masing-masing objek wisata, sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata.

Terkait perkembangan destinasi pariwisata sejak tahun 2013 s/d 2017 dapat disampaikan bahwa dari target 9 Destinasi pariwisata yang dikembangkan telah terealisasi sebanyak 3 destinasi baru, sedangkan objek wisata baru yang dibangun adalah kelok 16 dan batu runcing (geopark). Terkait keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata baru terlihat dari gerakan PT.WWS yang mengelola Waterboom, Taman Satwa Kandi dan Bioskop 4 Domensi.

Potensi objek wisata yang terdata sampai 2017 tercatat sebanyak 25 objek, semua objek tersebut telah dikembangkan secara bertahap sesuai dengan tingkat prospek yang bagus.



Tabel 2.135
Data Potensi/Destinasai Wisata Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Destinasai	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Taman Satwa Kandi	Barangin	√		√	√	√	√	√
2	Camping Ground Wisata	Barangin	√				√	√	√
3	Taman Buah	Barangin	√			√	√	√	√
4	Batu Tanjung/Paralayang	Talawi	√				√	√	√
5	Hutan Kota	Talawi	√				√	√	√
6	Desa Wisata Rantih	Talawi	√		√	√	√	√	√
7	Makam M.Yamin	Talawi	√		√	√	√	√	√
8	Makam Syeh Kolok	Talawi	√		√	√	√	√	√
9	Kuburan Keramat	Talawi		√					
10	Waterboom	Silungkang	√		√	√	√	√	√
11	Goa Lakuak Kuali	Silungkang		√					√
12	Kawasan Tenun Silungkang	Silungkang	√		√	√	√	√	√
13	Kawasan Kota Lama	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
14	Museum Gudang Ransum	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
15	Lubang Tambang Mbah Soero	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
16	Museum Kereta Api	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
17	Kelok 16	Lembah Segar	√			√	√	√	√
18	Puncak Polan	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
19	Puncak Cemara	Barangin	√			√	√	√	√
20	Panorama Bukik Gadang	Talawi		√					
21	Panorama Guguk Bungo	Barangin		√					
22	Goa Slamet	Barangin		√					
23	Goa Bunian	Talawi		√					



No	Destinasi	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2013	2014	2015	2016	2017
24	Panorama Sundak Langik	Talawi		√					
25	Kawasan Kebun Serai Wangi	Barangin	√						
26	Wisata Batu Runcing	Silungkang		Rencana Pengembangan					
27	Wisata Batu Hitam	Lumindai		Rencana Pengembangan					
28	Danau Biru	Talawi		Rencana Pengembangan					
JUMLAH					11	14	17	17	18

Sumber : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2013-2016.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017



Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah objek wisata yang sudah dikembangkan sebanyak 18 objek, dan 7 objek wisata yang belum dikembangkan dan 3 objek wisata dalam tahap rencana pengembangan. Untuk objek wisata yang sudah dikembangkan ada peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2018.

Tabel 2.136
Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Hotel					
	-Bintang 1	1	1	1	1	1
	-Bintang 2	1	1	1	1	1
	-Non Bintang/Melati	9	9	9	9	9
2	Usaha Perjalanan Wisata					
	-Agen Perjalanan Wisata	4	4	4	4	4
3	Jasa Transportasi (termasuk penyewaan kendaraan)	1	1	1	1	3
4	Usaha Pondok Wisata	50	50	50	50	50
5	Usaha Cafe	5	5	5	5	10
6	Rumah Makan	50	50	50	50	50
7	Toilet Umum Berfungsi dan Bersih	4	4	4	4	6
8	Usaha Karaoke	4	4	4	4	4
9	Usaha Kawasan Pariwisata	4	4	4	4	7
10	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1	1	1	1	1
11	Usaha Taman Rekreasi	2	2	2	2	3
12	Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran/Fasilitas Meeting (termasuk dalam hotel)	4	4	4	4	4
13	Usaha Pentas Pertunjukan Seni Terbuka	1	1	1	1	2
14	Usaha Lapangan Tenis	4	4	4	4	4
15	Usaha Sanggar Seni	42	42	42	42	43
16	Usaha Bumi Perkemahan	1	1	1	1	2
17	Usaha Pusat Penjualan Makan/Cinderamata	4	4	4	4	6

Sumber : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2013-2016
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis usaha pariwisata dari tahun 2013-2017 tidak berkembang, hanya ada beberapa jenis usaha yang ada peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2013 sampai tahun 2017, dan kurangnya promosi pariwisata Kota Sawahlunto sehingga objek wisata yang ada tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luar. Di samping itu Kota Sawahlunto merupakan kota wisata minat khusus, karena objek-objek wisata yang berada di kawasan kota lama merupakan bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga pengunjung umumnya memiliki minat khusus untuk melihat objek-objek bekas tambang tersebut.

Sementara itu, agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang berada di lokasi tempat tinggalnya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga muncul berbagai lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada masing-masing objek wisata yang berkembang. Adapun data kelembagaan



pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.137
Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017

No	Nama Pokdarwis/ Lembaga Desa/ Asosiasi Homestay	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Lembaga Desa Wisata Rantih	V	V	V	V	V
2.	Asosiasi Homestay	V	V	V	V	V
3.	Objek Wisata Muaro Kalaban				V	
4.	Meranti				V	
5.	Desa Kolok Nan Tuo					V
6.	Desa Silungkang Tigo					V
7.	Silungkang					V
8.	Kampung Hijaudan Seni					V
9.	Muaro Kalaban					V
10.	Batu Ponjong Dusun Sionsek					
11.	Objek Wisata Batu Runcing					

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2013-2016
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017

Dari tahun 2013 sampai tahun 2015, jumlah kelembagaan yang ada dan berkembang di Kota Sawahlunto hanya 2 (dua) lembaga yang aktif, namun tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata atau kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa, karena masyarakat mengakui dengan adanya objek wisata yang berada di lokasi desanya, yang dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, tentu akan berdampak terhadap pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata.

2.3.3.3. PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan bagian laba hotel parai. Dari Tahun 2013-2017 PAD sektor pariwisata mengalami fluktuasi, dapat di lihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.138
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	174.944.052	132.853.612	135.881.333	142.353.702	164.733.362
2	Pajak Restoran	704.656.895	622.356.181	524.826.887	640.309.687	638.615.093
3	Pajak Hiburan	504.947.700	474.215.800	422.777.300	462.892.300	394.309.900
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	138.137.000	141.983.000	186.125.000	227.593.000	411.150.000
5	PT.WWS	0	0	0	0	0
6	Bagian Laba Hotel Parai	7.233.722	9.555.527	12.206.267	0	0
	PAD Sektor Pariwisata	1.529.919.369	1.380.964.120	1.281.816.787	1.473.148.689	1.608.808.355
	Total PAD	37.104.573.790,92	48.580.391.650,27	52.268.500.528,19	53.399.735.599,54	62.406.850.149,37
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,123	2,843	2,452	2,759	2,578

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2017



Kalau di lihat dari tabel di atas, persentase pendapatan asli daerah sektor pariwisata terjadi fluktuasi. Pada tahun 2013 berada pada angka 4,123% terjadi penurunan tahun 2015 sampai angka 2,452% kemudian naik lagi ditahun 2016, sampai tahun 2017 berada di angka 2,578%. Hal ini disebabkan PAD sektor pariwisata yang juga fluktuasi sementara total PAD Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 meningkat dari tahun ke tahun. Terjadinya penurunan PAD sektor pariwisata merupakan dampak dari jumlah kunjungan pada objek pariwisata yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017.

Kalau dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan Minum, maka sumbangan sektor pariwisata dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum dari tahun 2013-2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.139
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Dasar Berlaku Sektor Usaha Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2013-2017 (jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	38 964,76	45 042,96	53 001,56	64 045,58	60 733,09

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2018

2.3.3.4. Urusan Pertanian

2.3.3.4.1. Pertanian

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kota Sawahlunto memberikan kontribusi peringkat ke-5 terhadap PDRB Kota Sawahlunto, walaupun secara tingkat propinsi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan tingkat kontribusi tertinggi terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat. Sektor pertanian, kehutanan perikanan di Kota Sawahlunto masih kalah dari sektor perekonomian lainnya karena sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih belum berkembang secara keseluruhan salah satunya karena keterbatasan lahan. Perkembangan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.140
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2013-2017

KONTRIBUSI	2013	2014	2015	2016	2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	224.358,31	249.651,32	274.456,26	292.957,85	309.537,83
Total PDRB (Juta)	2.301.157,00	2.513.741,79	2.715.121,74	2.938.792,97	3.235.479,20
Kontribusi (%)	9,75	9,93	10,11	9,97	9,57

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Dilihat dari tabel diatas Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB cenderung tetap dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Untuk Tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya meskipun tidak begitu signifikan. Meski kontribusi sektor pertanian cenderung menurun, pertumbuhan positif dari PDRB sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini masih mampu bertahan ditengah kompetisi perkembangan sektor lainnya. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor minoritas dan perkembangannya kalah cepat dari sektor-sektor basis di Kota Sawahlunto. Kontribusi sektor pertanian,



kehutanan dan perikanan tidak terlepas produktivitas padi, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.141
Produktivitas Padi Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi tanaman padi (Ton)	17.655	15.116	16.651	15.055	14.274
Luas panen kotor (ha)	3.541	3.104	3.332	2.985,9	2.650,2
Produktivitas (ton/ha)	4,986	4,870	4,997	5,042	5,38

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari tabel di atas perkembangan produksi dan produktivitas tanaman padi yang merupakan bahan pangan utama di Kota Sawahlunto pada tahun 2014 mengalami penurunan dan berfluktuasi, sedangkan pada tahun berikutnya produksi cenderung menurun walaupun produktivitas meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya luas tanam akibat keterbatasan air, dimana luas sawah tadah hujan di kota Sawahlunto lebih luas dibandingkan lahan irigasi sehingga ketergantungan terhadap air hujan sangat tinggi.

Selain itu banyak faktor lain yang juga bisa berpengaruh terhadap produksi padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah Luas lahan, menurut literatur faktor produksi luas lahan garapan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi sawah. Perkembangan luas lahan pertanian dan bukan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.142
Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan sesuai fungsi di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Luas Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian (Ha)	Luas lahan yang dimanfaatkan untuk sawah (Ha)
1.	2013	17.183	5.714	1.772
2.	2014	18.760	9.115	1.680
3.	2015	18.760	9.202	1.680
4.	2016	18.845	8.419	1.680
5.	2017	18.848	8.419	1.680

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel diatas 62 s/d 68 persen dari luas wilayah Kota Sawahlunto merupakan lahan pertanian, namun hanya kurang lebih 50 persen yang dimanfaatkan untuk pertanian. Khusus untuk lahan sawah dari tahun 2013 sampai 2016 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan lahan, petani yang memanfaatkan lahan yang ada untuk meningkatkan produksinya. Untuk itu kedepannya perlu ditambah luas lahan yang dimanfaatkan untuk sawah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi.

Tabel 2.143
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Kota Sawahlunto Tahun 2013- 2017

No	Tahun	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
1.	2013			
2.	2014	3.208	3.212	6.420
3.	2015	2.792	1.835	4.627
4.	2016	2.792	1.835	4.627
5.	2017	3.212	1.677	4.889

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018



Dilihat dari data tabel diatas perkembangan jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang pertanian mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016, ini dikarenakan di Sawahlunto pada jumlah sawah tadah hujan lebih banyak dari sawah teririgasi yaitu tahun 2016 jumlah sawah tadah hujan 918 ha sedangkan teririgasi 762 ha. Ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja pertanian, karena dengan sawah tadah hujan ada saat nya pekerja tidak bekerja pada pertanian. Dalam usaha tani padi sawah tenaga kerja yang efektif disesuaikan dengan kegiatan produksi yang meliputi : pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen. Penggunaan tenaga kerja yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi sawah.

Sistem Irigasi, sistem irigasi teknis berfungsi untuk mengatur air, baik untuk mendatangkan air yang diperlukan untuk kehidupan tanaman dan membuang air yang berlebihan bagi tanaman, mempertahankan dan menambah kesuburan tanah. Dengan melihat fungsi dari sistem irigasi teknis yang dapat mempertahankan dan menambah kesuburan tanah maka sawah yang beririgasi teknis akan memberikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sawah tadah hujan. Jumlah Sawah terigasi dan tadah hujan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.144
Jumlah Sawah Yang Teririgasi dan Tadah Hujan
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Luas Sawah	Sawah Teririgasi (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)
1.	2013	1.772	830	942
2.	2014	1.680	984	696
3.	2015	1.680	984	696
4.	2016	1.680	762	918
5	2017	1.680	762	918

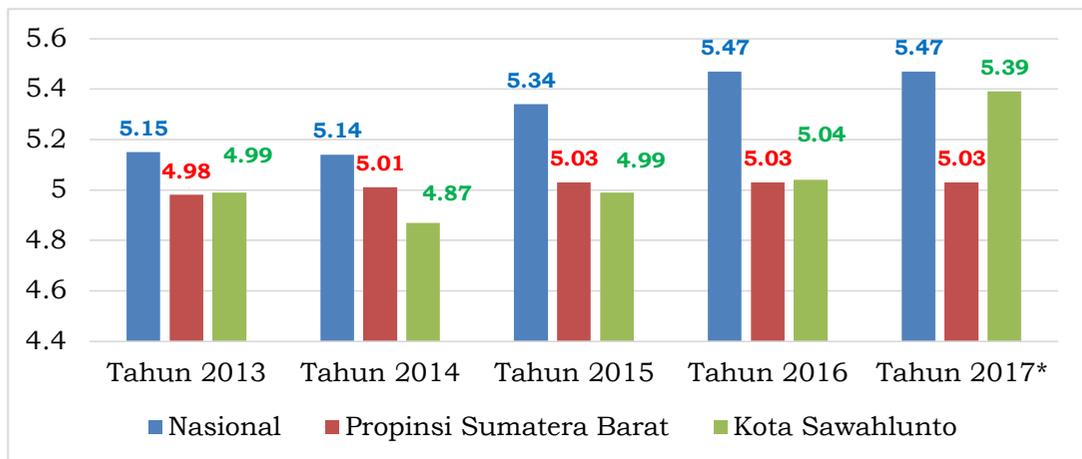
Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lebih kurang separuh dari luas sawah merupakan sawah tadah hujan, sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas padi di Kota Sawahlunto, untuk sangat perlu ditingkatkan lagi irigasi teknis dalam mendukung produksi dan produktivitas padi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa luas area tanaman padi (ha) dan ketersediaan air/luas areal irigasi untuk tanaman padi sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman padi, apalagi kota Sawahlunto pada umumnya merupakan sawah tadah hujan. Peningkatan sarana prasarana untuk penambahan luas areal irigasi akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas tanaman padi di Kota Sawahlunto. Selain itu ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul, kelancaran distribusi pupuk dan perlindungan tanaman dari serangan penyakit tanaman menjadi perhatian dalam meningkatkan produksi tanaman padi. Perkembangan produktivitas tanaman padi Kota Sawahlunto dapat dilihat dengan menyandingkan dengan produktivitas tanaman padi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.34
Perbandingan Produktivitas Padi (Ton/Ha) Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017



Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari tabel diatas, produktivitas padi Kota Sawahlunto masih dibawah produktivitas padi nasional namun setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Peluang untuk peningkatan produksi dan produktifitas harus terus dilakukan dalam mendukung Swasembada Pangan.

2.3.3.4.2. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan.

1. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.145
Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Luas areal tanam (ha)	2.575,75	2.365,98	2.477,67	2.471,52	2.457,11
Produksi (ton)	468,27	562,79	960,13	960,502	1240,85
Produktivitas (ton/ha)	0,70	0,69	1,02	1,03	1,25

Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dapat dilihat perkembangan perkebunan karet dari Tahun 2013-2017 relatif mengalami peningkatan baik produksi maupun produktifitas. Kenaikan ini disebabkan karena pemeliharaan yang sudah mulai dilakukan oleh petani dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Petugas dilapangan selain itu upaya memotivasi petani/kelompok tani melalui lomba budidaya tanaman karet telah pula dilakukan guna memotivasi petani dan kelompok tani.

Namun dari literatur yang ada produktifitas karet yang dihasilkan dikota Sawahlunto masih rendah dari sandart (1.5 ton/ha – 2 ton/ha), sehingga untuk mencapai produksi dan produktifitas optimal harus dilaksanakan. Secara teori tanaman karet dapat tumbuh baik dan berproduksi tinggi pada kondisi iklim dengan suhu optimal 28°C dan berada pada dataran rendah sampai dengan ketinggian 200 meter diatas permukaan laut, sedangkan secara topografi sebagian besar wilayah kota Sawahlunto terletak pada ketinggian 100-450 meter, temperatur udara berkisar antara



22°C-33°C. Dilihat dari topografi kota Sawahlunto ini maka tanaman karet akan tumbuh baik di daerah Sawahlunto dan akan berproduksi tinggi. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu bahan tanam (benih), Pemeliharaan tanaman, proses panen.

2. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan yang utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat, yang mana perkembangan perkebunan kakao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.146
Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao
Tahun 2013- 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Luas areal tanam (ha)	717,40	600,84	601,40	601,40	596,35
Produksi (ton)	410,35	351,58	415,6	468,626	519,74
Produktivitas (ton/ha)	0,70	0,80	0,90	0,95	1,02

Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan tanaman kakao dari Tahun 2013-2017, dari luas areal tanam untuk perkebunan kakao di Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan. Walaupun demikian dari tahun 2014-2017 produksi dan produktifitas tanaman kakao terus mengalami peningkatan. Upaya peningkatan produksi dan produktifitas masih perlu dilakukan, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 – 2 ton/ha. Ini berarti produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar, untuk itu sangat perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kakao ini.

2.3.3.4.3. Peternakan.

Pembangunan sub sektor peternakan harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternakan melalui pemanfaatan sumber daya lokal serta dilaksanakan langsung oleh rakyat. Cara peningkatan sumber daya manusia peternak, pengembangan teknologi peternakan dan pengembangan kemampuan organisasi ekonomi peternak juga dilakukan untuk menunjang pembangunan sub sektor peternakan.

Sub sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan khususnya protein hewani, baik dari jumlah , mutu maupun keragamannya. Selain itu sub sektor peternakan diharapkan dapat menopang pertumbuhan industri dan dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat umum. sub sektor peternakan yang ada di Kota Sawahlunto seperti sapi, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.

1. Ternak Sapi

Peternak sapi di Kota Sawahlunto masih dalam skala rumah tangga. Usaha peternakan sapi skala rumah tangga patut untuk dikembangkan, karena upaya ini mampu memberikan kontribusi berarti bagi roda perekonomian daerah bahkan dapat menjadikan daerah swasembada daging sapi. Untuk itu dapat dilihat perkembangan populasi ternak sapi dari tahun 2013-2017 pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.147
Populasi, KK Pemelihara dan Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi
Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

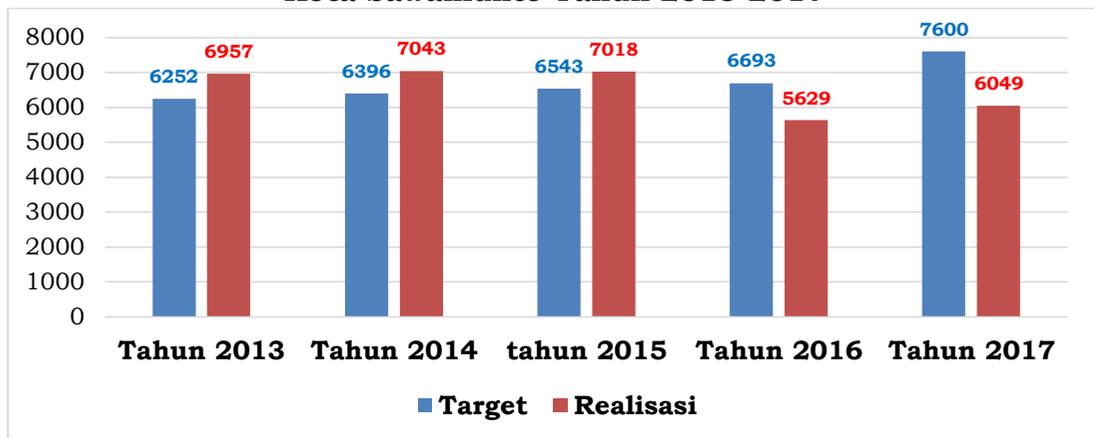
Sapi Pedaging	2013	2014	2015	2016	2017
Populasi (ekor)	6.552	7.043	7.018	5.629	6.049
KK Pemelihara	2.518	2.513	2.505	2.365	2.346
Rata-rata kepemilikan (ekor)	2,6	2,8	2,8	2,4	2,6

Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan ternak sapi dari tahun 2013-2017, dimana populasi sapi pedaging meningkat pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017. Penurunan populasi ternak sapi pedaging juga diiringi dengan penurunan pemilik ternak sapi sampai tahun 2016 dengan KK pemelihara ternak sapi pedaging 2.365 dengan populasi sapi pedaging 5.629 ekor. Pada tahun 2017 populasi sapi menjadi 6.049 ekor dengan KK pemelihara 2.346.

Dari perkembangan populasi sapi diatas dapat dilihat tingkat ketercapaian target pada RPJMD sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.35
Perbandingan Target dan Realisasi Populasi Ternak Sapi
Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017



Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Tahun 2013-2017 Tingkat ketercapaian populasi di dua tahun terakhir dibawah target RPJMD yang mana capaian di tahun 2017 sebesar 79,59 persen. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 populasi utuk sapi pedaging terus mengalami penurunan, ini berarti bahwa sangat perlu kegiatan dan program yang mendorong kembali meningkatnya populasi ternak sapi ini.

2. Ayam Pedaging

Usaha peternakan ayam pedaging di Kota Sawahlunto merupakan usaha dengan pola kemitraan, adapun tujuan utama dari kemitraan adalah membantu peternak kecil agar pendapatannya meningkat dengan cara meningkatkan skala usahanya, menurunkan biaya produksi dan mengurangi resiko serta menjaga kesinambungan usahanya. Perusahaan kemitraan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi ayam pedaging, perkembangan ayam pedaging di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.148
Populasi, KK Pemelihara dan Rata-Rata Kepemilikan Ayam Ras Pedaging Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

Ayam Ras Pedaging	2013	2014	2015	2016	2017
Populasi (ekor)	40.832	179.578	221.057	171.607	175.649
KK Pemelihara	20	27	29	28	31
Rata-rata kepemilikan (ekor)	2.041	6.651	7.622	6.128	5.666

Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari tabel diatas untuk populasi ayam pedaging dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan namun di tahun 2016 mengalami penurunan dan meningkat lagi di tahun 2017. Namun dilihat dari jumlah kepala keluarga yang memelihara ayam ras pedaging cenderung terlihat kenaikan dari tahun ke tahun, ini berarti banyak masyarakat Kota Sawahlunto yang terjun dalam usaha ayam ras pedaging untuk meningkatkan pendapatannya. Faktor yang mendorong peternak ikut pola kemitraan ini adalah tersedianya sarana produksi peternakan dan tenaga ahli, modal kerja dari inti dan pemasaran terjamin. Naik turunnya populasi ayam ras pedaging ini dipengaruhi juga oleh jumlah perusahaan kemitraan yang ada di Kota Sawahlunto, dimanatahun 2017 ini populasi ayam pedaging 175.649 ekor dengan 31 KKpemeliharaan. Meskipun sistem pola kemitraan memberikan kemudahan bagi peternak untuk mendapatkan modal berupa sarana produksi peternakan akan tetapi peternak juga harus belajar untuk menjadi peternak yang mandiri agar usaha ayam ras pedaging menjadi lebih berkembang dan meningkat.

3. Ayam Petelur

Salah satu industri perunggasan yang memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani masyarakat adalah peternakan ayam ras petelur yang menghasilkan produk telur konsumsi. Peternakan ayam ras petelur ini yang dikembangkan dalam menunjang protein hewani masyarakat. Peternakan ayam ras petelur ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan swasta karena sangat prospektif untuk dikembangkan. Di Kota Sawahlunto usahapeternakan ayam petelur ini juga dikembangkan karena kecendrungan konsumsi telur yang terus meningkat setiap tahunnya. Usaha ini dilaksanakan pola kemitraan dengan pihak swasta. Perkembangan populasi ayam petelur di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 2.149
Populasi, KK Pemelihara dan Rata-Rata Kepemilikan Ayam Ras Petelur Kota Sawahlunto Tahun 2012-2017

Ayam Ras Petelur	2013	2014	2015	2016	2017
Populasi (ekor)	53.380	39.388	55.086	13.675	54.154
KK Pemelihara	11	11	5	5	8
Rata-rata kepemilikan (ekor/KK)	4.852	3,581	11.017	2,735	6,769

Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Dari tabel diatas tergambar perkembangan populasi ayam petelur dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan dan terjadi penurunan jumlah populasi yang sangat signifikan di tahun 2016 namun meningkat kembali di tahun 2017. Populasi ayam petelur di Kota Sawahlunto untuk tahun 2017 sebesar 54.154 ekor dengan 8 KK pemelihara. Penurunan populasi ayam petelur tahun 2013-2016 diiringi dengan menurunnya jumlah keluarga pemelihara, dan meningkat kembali di tahun 2017 diiringi meningkatnya KK pemelihara. Jadi jumlah populasi ayam petelur ini salah satunya juga ditentukan dari jumlah kepala keluarga yang memelihara ayam petelur tersebut, karena pemelihara ternak ayam petelur ini harus mempunyai modal usaha. Dalam usaha ini perlu intervensi dari



pemerintah melalui peninjauan kerjasama dengan perusahaan peternakan ayam besar untuk bermitra, memaksimalkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan serta memberikan solusi yang tepat berkaitan dengan pendanaan.

Bukti adanya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha ayam ras petelur ini dengan adanya target populasi ayam ras petelur pada RPJMD kota Sawahlunto. Ketercapaian target ini dapat dilihat dari perkembangan populasi ayam petelur di Kota Sawahlunto, sebagaimana tergambar dalam tabel seperti dibawah ini :

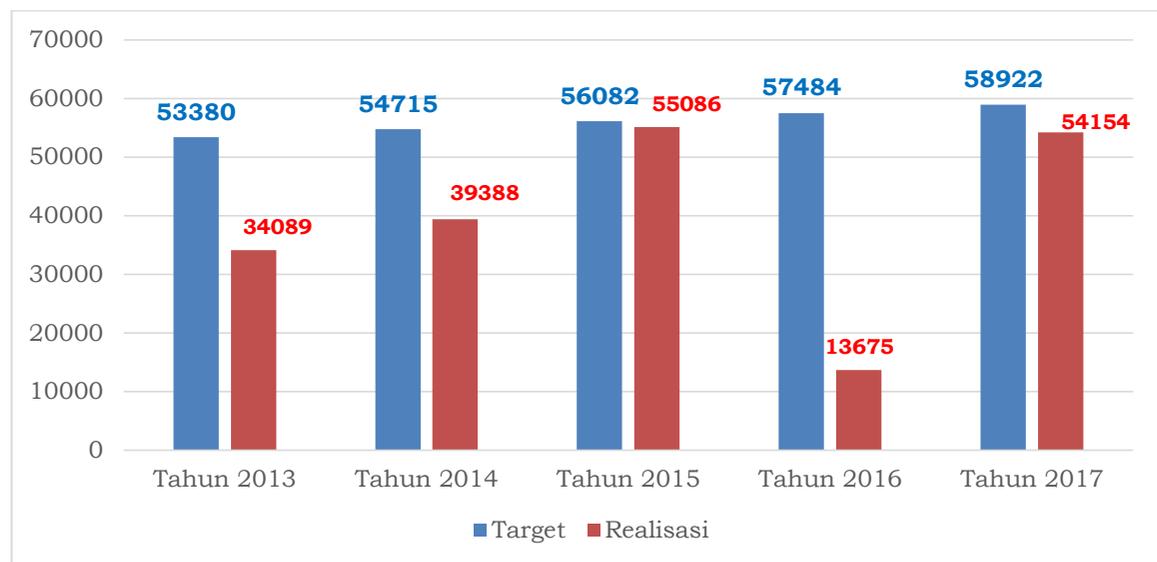


Tabel 2.150
Tingkat Ketercapaian dan Realisasi Ayam Ras Petelur
Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

Ayam Ras Petelur	2013			2014			2015			2016			2017		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Populasi (Ekor)	53.380	34.089	63,86	54.715	39.388	71,98	56.082	55.086	73,40	57.484	13.675	23,79	58.922	54.154	33,48

Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Grafik 2.36
Perbandingan Target dan Realisasi Populasi Ayam Petelur di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017



Sumber : Data Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017



Dalam usaha ayam petelur ini, yang harus diperhatikan masalah konversi pakan, daya hidup, bobot telur dan sebagainya. Kerjasama pemerintah sangat diharapkan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan di Kota Sawahlunto.

2.3.3.5. Urusan Perdagangan

Persaingan global yang semakin terbuka menjadikan sub sektor perdagangan sebagai ujung tombak dalam perekonomian. Capaian pertumbuhan perekonomian Kota Sawahlunto yang tinggi dikontribusi oleh lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Gambaran umum tentang kondisi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.151
Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2013-2018

KONTRIBUSI	2013	2014	2015	2016	2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	343.832,65	367.702,39	392.135,92	433.555,54	456.934,50
Total PDRB (Juta)	2.301.157,00	2.513.741,79	2.715.121,74	2.938.792,97	3.140.158,99
Kontribusi (%)	14,94	14,63	14,56	14,79	14,66

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2018

Dari Tahun 2012-2017 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan, dengan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 14,55 persen pada tahun 2017, namun dilihat dari rupiahnya kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan walaupun melambat dari tahun 2013-2017, dimana tahun 2017 sebesar Rp. 456.934,50 juta. Peningkatan sub sektor ini didukung oleh penataan 9 (Sembilan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto dan Propinsi Sumatera Barat Umumnya. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.152
Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pasar Sawahlunto	643	643	643	779	779
2.	Pasar Silungkang	72	72	72	72	72
3.	Pasar Talawi	140	140	140	140	140
4.	Pasar Sapan	32	32	32	50	50
5.	Pasar Tak Bancah	3	3	3	3	3
6.	Pasar Tumpuak Tengah	0	0	0	0	0
7.	Pasar Lumindai	30	30	30	30	30
8.	Pasar Kolok Mudik	10	10	10	10	10

Sumber Data : Dinas Koperindag 2018

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto tidak mengalami pertambahan kecuali



di Pasar Sawahlunto dan Pasar sapan yang mana pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penambahan , ini seiring dengan peningkatan penataan pasar yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Dengan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan usaha perdagangan di Kota Sawahlunto. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2.153
Jumlah Pedagang Kaki lima di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Nama Pasar	Pedagang kaki lima									
		Asli Sawahlunto					Luar Sawahlunto				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pasar Sawahlunto	135	135	139	145	154	176	176	189	189	200
2.	Pasar Silungkang	99	98	101	101	102	32	31	30	30	29
3.	Pasar Talawi	92	94	95	95	96	121	119	211	213	213
4.	Pasar Sapan	27	27	36	36	38	2	5	8	8	11
5.	Pasar Taratak Bancah	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3
6.	Psar Tumpuak Tengah	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
7.	Pasar Lumindai	11	11	12	12	12	4	4	4	5	5
8.	Pasar Kolok Mudik	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2
9.	Pasar Songket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		382	383	401	407	420	341	341	448	451	464

Sumber : Dinas Koperindag, 2018

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto. Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umumnya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan lainnya yang memang tidak ada di produksi di Kota Sawahlunto. Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Pedagang kaki lima ini dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk itu perlu dikelola dengan baik. Semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katub pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Selain itu, salah satu indikator perputaran ekonomi Kota Sawahlunto dapat dilihat dari aktivitas transaksi jual beli di pasar-pasar Kota Sawahlunto. Hal ini dihitung dari Omset pedagang setiap bulannya. Dari hasil survei terhadap empat pasar yang ada di Kota Sawahluto yaitu pasar Sawahlunto, pasar Talawi, pasar Sapan dan pasar Silungkang. Pada tahun 2017 omset di empat pasar tersebut sebesar 22,767 Milyar rupiah dan di targetkan pada tahun 2018 omset sebesar 23,635 Milyar rupiah.



Hal ini perlu dilanjutkan untuk memastikan peningkatan aktivitas jual beli di pasar-pasar tradisional di Kota Sawahlunto.

Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tingkat propinsi tahun 2017 sebesar *14,84 persendengan *Rp. 31.440.064,42. Dilihat dari persentase kontribusi terhadap PDRB antara Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini berarti pertumbuhan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto tidak jauh beda dibanding dengan propinsi Sumatera Barat. Dengan 6 unit usaha pedagang menengah, 613 unit usaha pedagang kecil dan 1.712 unit usaha pedagang rumah tangga/mikro, maka pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dalam menarik pangsa pasar di Kota Sawahlunto. Selain itu perlu adanya perbaikan terhadap kualitas produk lokal agar memiliki daya saing yang lebih dibandingkan dengan produk dari pesaing. Didukung dengan Dokumen RTRW 2012-2032 Kota Sawahlunto bahwa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang sehingga Desa Muara Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan.

2.3.3.6. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto sesudah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Besarnya nilai kontribusi dari Tahun 2013 -2017 masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing. Pembangunan industri ini diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.154
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Tahun 2013-2017

KONTRIBUSI	2013	2014	2015	2016	2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	288.342,20	321.937,64	343.636,11	381.762,46	423.483,33
Total PDRB (Juta)	2.301.157,00	2.513.741,79	2.715.121,74	2.938.792,97	3.235.479,20
Kontribusi (%)	12,53	12,81	12,67	12,96	13,09

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2018

Dari tabel diatas terlihat perkembangan kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan walaupun naik secara melambat, yang mana Tahun 2017 PDRB sektor industri sebesar Rp.423.483,33 juta dengan kontribusi terhadap PDRB Kota 13,09 persen. Peningkatan ini tidak lepas dari usaha pemerintah kota dalam meningkatkan industri kecil dan industri rumah tangga Kota Sawahlunto, karena industri kecil dan industri rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan. Meningkatkan peranan industri kecil dan industri rumah tangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja. Seperti melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga. Perkembangan industri kecil, menengah dan rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.155
Jumlah Industri dan Omset Di Kota Sawahlunto
Tahun 2014 s/d 2017

No	Uraian	Industri Kecil (Industri makanan dan kerajinan)				Industri Menengah				Industri Rumah Tangga			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Unit Usaha (unit)	437	440	1203	1254	3	3	3	2	1121	1116	1124	
2	Tenaga Kerja (orang)	1870	1872	1922	1697	100	102	102	87	1347	1329	1344	
3	Nilai Produksi (Rp)	18.603.928.850	18.882.832.400	22.882.932.400		3.818.969.000	4.105.392.500	4.105.392.500		4.379.143.244	5.899.426.200	6.908.623.008	
4	Omzet (Rp)	19.290.815.750	20.967.519.100	21.967.519.100		3.202.337.619	3.818.015.000	3.900.685.700		6.433.082.523	5.639.460.648	6.494.104.000	

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2017



Dapat dilihat dari tabel diatas perkembangan industri di Kota Sawahlunto, yang berdasarkan tiga jenis industri yang ada. Pengelolaan industry pengolahan didominasi oleh Usaha Kecil Mikro (UKM), hal ini ditunjukkan dengan 1.254 unit usaha Industri kecil hanya mampu menyerap 1.697 tenaga kerja, oleh karena itu diperlukan penataan UKM di Kota Sawahlunto baik secara sumber daya pelaku, manajemen maupun kemitraan. Perkembangan industri ini sangat berpengaruh terhadap PDRB kota yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan investasinya, sehingga terlihat bahwa peningkatan yang melambat dari segi PDRB sektor industri tidak lepas dari melambatnya perkembangan industri yang ada di Kota Sawahlunto. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 64/M-IND/PER/7/2016 bahwa industry diklasifikasi atas industry kecil, menengah dan besar. Untuk penyebaran industry berdasarkan klasifikasi tersebut yang ada di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.156
Penyebaran Industri Kecil Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

Tahun	Unit Usaha				Total	Tenaga Kerja				Total
	Kec. Talawi	Kec. Barangin	Kec. Lembah Segar	Kec. Silungkang		Kec. Talawi	Kec. Barangin	Kec. Lembah Segar	Kec. Silungkang	
2013	156	150	308	310	924	166	150	310	312	938
2014	161	150	353	367	1.031	321	236	370	486	1.413
2015	198	173	380	427	1.178	328	241	660	516	1.745
2016	203	174	382	429	1.188	318	201	615	479	1.613
2017	148	160	497	446	1.251	186	251	625	635	1.697

Sumber Data : Dinas Koperindag, 2018

Dilihat dari penyebaran industri kecil dari tahun 2013-2017, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di kecamatan Lembah Segar Dan Kecamatan Silungkang dari jumlah unit usaha dan tenaga kerjanya. Ini menjadi permasalahan bagi pemerintah untuk lima tahun kedepan dalam mengembangkan industry kecil yang ada di Kota Sawahlunto. Selain industry kecil, di Kota Sawahlunto ada industry menengah yang penyebarannya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.157
Penyebaran Industri Menengah Kota Sawahlunto
Tahun 2013 - 2017

Tahun	Unit Usaha				Total	Tenaga Kerja				Total
	Kec. Talawi	Kec. Barangin	Kec. Lembah Segar	Kec. Silungkang		Kec. Talawi	Kec. Barangin	Kec. Lembah Segar	Kec. Silungkang	
2013	-	1	-	2	3	-	13	-	87	96
2014	-	1	-	2	3	-	13	-	87	100
2015	-	1	-	2	3	-	13	-	89	102
2016	-	1	-	2	3	-	13	-	87	100
2017	-	1	-	2	3	-	13	-	87	100

Sumber Data : Dinas Koperindag, 2018

Untuk penyebaran industri menengah di Kota Sawahlunto dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang sama dengan industry kecil, dimana perkembangan industry menengah hanya terfokus pada dua kecamatan yaitu kecamatan Barangin dan Kecamatan Silungkang. Namun dilihat dari unit usaha dan tenaga kerjanya dari tahun 2013-2017 tidak mengalami peningkatan sama sekali. Ini harus menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan usaha industry di Kota Sawahlunto.

Dari permasalahan diatas Pemerintah Kota harus bekerja keras dalam percepatan perkembangan industri-industri yang ada melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perindag kopnaker, mulai dari fasilitasi kemasan produk, pengembangan industri kerajinan, pelatihan dan workshop untuk industri kecil dan rumah tangga dan sebagainya. Salah satu usaha pemerintah kota



dengan melaksanakan pembangunan kampung produktif dan kampung tenun, yang mana sampai tahun ini sudah ada 7 (tujuh) kampung produktif dan 1 (satu) kampung tenun. Namun dalam perkembangannya kampung produktif belum optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat oleh karena itu diperlukan adanya program untuk meningkatkan kelayakan kampung produktif sebagai kawasan yang mengembangkan industri rumah tangga. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri perlu ditingkatkan dengan pembinaan yang didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Pengembangan industri juga didukung dengan mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana sehingga tercipta kondisi yang baik dalam pengembangan kegiatan industri.

2.3.4. LAYANAN URUSAN PENUNJANG

2.3.4.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka 20 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.158
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokumen RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Dokumen RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Dokumen RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Dokumen RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Jika dilihat dari aspek ketersediaan maka dokumen perencanaan pembangunan sudah tersedia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian terkait dengan dokumen perencanaan tersebut adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlihatnya permasalahan dan isu strategis yang konkrit sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus sesuai permasalahan dan isu strategis yang ada. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan belum memperlihatkan perbaikan terhadap indikator pembangunan secara signifikan. Oleh karena itu upaya agar program dan kegiatan yang telah dijalankan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat maka kegiatan pembangunan harus focus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Jika dilihat dari indikator ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tidak ada permasalahan karena terpenuhi setiap tahunnya, namun dilihat dari kualitas dokumen perencanaan belum terlihat analisa yang dalam terhadap data dan permasalahan yang ada sehingga program dan kegiatan yang muncul belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan tersebut juga dapat disebabkan oleh factor keterbatasan kemampuan SDM perencana, baik dari kualitas perencana tersebut maupun pelatihan yang kurang terhadap SDM Perencana.



Tabel 2.159

Peringkat LPPD Kota Sawahlunto di Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Peringkat	4	4	10	13	5

Sumber : Bag Tata Pemerintahan Setdako

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan wujud dari tanggungjawab kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana di Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah juga berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

2.3.4.2. Urusan Keuangan

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Tahun Anggaran 2017 realisasi APBD Kota Sawahlunto dapat dijabarkan sebagai berikut: Pendapatan Rp. 585.387.335.481,37 sedangkan Belanja Rp. 579.276.476.215,19 Pembiayaan Rp. 8.394.077.299,69 sehingga Silpa menjadi Rp. 14.504.936.565,87.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Pendapatan Rp. 588.749.624.048,54 Belanja Rp. 602.138.436.500,12 Pembiayaan Rp. 29.045.393.752,93 Silpa Rp. 15.656.581.301,35. Selanjutnya Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015, Pendapatan



Rp. 537.483.538.214,19 Belanja Rp. 549.999.794.211,56 Pembiayaan
Rp. 59.856.975.378,63 Silpa Rp. 47.340.719.381,26

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014, Pendapatan Rp. 488.505.317.004,27 Belanja Rp. 472.392.963.810,74 Pembiayaan Rp. 57.194.793.261,10 Silpa Rp. 73.307.146.454,63. Terakhir realisasi APBD Tahun Anggaran 2013, Pendapatan Rp. 428.681.501.793,92 Belanja Rp. 415.971.618.343,89 Pembiayaan Rp. 40.916.216.940,07 dan Silpa Rp. 53.625.100.390,10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.160
Realisasi APBD Kota Sawahlunto

URAIAN	REALISASI				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan	428.681.501.793,92	488.505.317.004,27	537.483.538.214,19	588.749.624.048,54	585.387.335.481,37
Belanja	415.971.618.343,89	472.392.963.810,74	549.999.794.211,56	602.138.436.500,12	579.276.476.215,19
Pembiayaan	40.916.216.940,07	57.194.793.261,10	59.856.975.378,63	29.045.393.752,93	8.394.077.299,69
Silpa	53.625.100.390,10	73.307.146.454,63	47.340.719.381,26	15.686.581.301,35	14.504.936.565,87

Sumber : BPKAD Sawahlunto

2.3.4.3. Urusan Pengawasan

Untuk pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal. Untuk internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan untuk eksternal dilaksanakan oleh BPKP. Berdasarkan data temuan inspektorat jumlah temuan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan. Tahun 2015 jumlah temuan sebanyak 117 temuan dan pada tahun 2017 jumlah temuan menjadi 100 temuan. Jumlah temuan belum ditindaklanjuti dari tahun 2015 berjumlah 16 temuan menurun menjadi 5 temuan. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengalami fluktuasi pada tahun 2015 adalah 86,32% meningkat pada tahun 2016 menjadi 99,03% serta pada tahun 2017 menurun menjadi 95%. Berarti secara keseluruhan jumlah temuan yang ditindaklanjuti telah mencapai hampir 100%.

Tabel 2.161
Daftar Temuan Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2015-2017

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan			Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti			Jumlah Temuan Belum Ditindaklanjuti			Ket
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Keuangan	36	75	56	20	75	51	16	0	5	
2	Administrasi	81	28	44	81	27	44	0	1	0	
3	Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	117	103	100	101	102	95	16	1	5	

Tabel 2.162
Daftar Temuan Pemeriksaan BPK
Tahun 2015-2017

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan			Jumlah Rekomendasi			Ket
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	LKPD	201	214	228	557	591	631	
2	PDTT	83	83	83	184	184	184	
3	KINERJA	25	35	76	42	76	76	
	Total	309	332	346	783	851	891	

LKPD : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
PDTT : Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Kinerja : Kinerja

Dari data diatas temuan BPK jumlah temuan adalah 309 temuan pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 346 temuan pada tahun 2017. Jumlah temuan ini merupakan dari akumulasi dari tahun 2006 yang tidak



ditindaklanjuti akan menjadi temuan pada tahun berikutnya. Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK juga meningkat dari 783 menjadi 891 rekomendasi.

Tabel 2.163
Daftar Status Penyelesaian Kasus
Tahun 2015-2017

No	Jenis	Status Penyelesaian									Ket
		LKPD			PDTT			KINERJA			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	SSR	431	476	494	114	134	136	26	26	38	
2	BSR	112	103	115	63	44	42	16	49	38	
3	BD	14	12	22	7	6	6	0	1	0	
4	TDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	557	591	631	184	184	184	42	76	76	

Penjelasan pemantauan tindak lanjut

- SSR : Jawaban berupa tindak lanjut yang dilaksanakan oleh entitas sesuai dengan rekomendasi dengan BPK RI
- BSR : Jawaban berupa tindak lanjut yang dilaksanakan oleh entitas belum sesuai rekomendasi BPK RI secara menyeluruh
- BD : Belum Ditindaklanjuti
- TDD: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Dari 3 jenis entitas yang diperiksa yaitu LKPD, PDTT dan Kinerja semuanya telah ditindaklanjuti dan tidak ada yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dari jenis LKPD Status SSR(Status Sesuai Rekomendasi) mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Yaitu dari 431 jenis menjadi 494 jenis rekomendasi yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Jenis rekomendasi untuk LKPD yang belum sesuai rekomendasi (BSR) mengalami penurunan dari 112 jenis rekomendasi meningkat menjadi 115 rekomendasi. Untuk jenis LKPD yang belum ditindaklanjuti mengalami peningkatan pada tahun 2015 hanya berjumlah 14 jenis sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 22 jenis rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Jenis PDTT status penyelesaiannya yang sudah sesuai rekomendasi (SSR) mengalami kenaikan dari 114 rekomendasi menjadi 132 rekomendasi. Sedangkan status penyelesaian yang Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) mengalami penurunan dari 63 jenis rekomendasi menjadi 42 rekomendasi pada tahun 2017. Dan status Belum ditindaklanjuti hanya sedikit mengalami penurunan dari 7 jenis rekomendasi menjadi 6 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Status Jenis Kinerja yang telah sesuai rekomendasi (SSR)pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dari 26 rekomendasi pada tahun 2015 meningkat pada tahun 2017 menjadi 38 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Status yang belum sesuai rekomendasi (BSR) juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 adalah 16 rekomendasi dan meningkat menjadi 38 rekomendasi. Untuk status penyelesaian yang belum ditindaklanjuti hanya satu jenis rekomendasi pada tahun 2016.

Tabel 2.164
Jumlah Auditor di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian Jabatan Fungsional	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	Auditor	5	5	8	8	8	
	Utama	-	-			-	
	Madya	3	3	3	3	3	
	Muda	-	-	2	2	3	
	Pertama	1	1	2	2	1	
	Pelaksana	1	1	-	-	-	
	Pelaksana Lanjutan	-	-	1	1	1	



No	Uraian Jabatan Fungsional	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
2	P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)	7	7	7	5	4	
	Madya	3	3	4	3	2	
	Muda	4	4	3	2	2	
	Utama						
3	Auditor Kepegawaian	0	0	0	0	0	
	Total	12	12	15	13	12	

Sumber : Inspektorat Kota Sawahlunto

Dari data di atas kita lihat jumlah pejabat fungsional di Inspektorat Kota Sawahlunto jumlahnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah pejabat fungsional adalah 12 orang meningkat pada tahun 2015 menjadi 15 orang, dan menurun kembali menjadi 12 orang pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan pindah tugas. Sedangkan untuk auditor kepegawaian di Kota Sawahlunto belum ada.

Nilai pencapaian SAKIP/ LAKIP yang juga menjadi IKU Kota Sawahlunto pada RPJMD tahun 2013 – 2018 tidak mencapai target, dari yang ditargetkan mendapat nilai B pada tahun 2016. Pencapaian nilai SAKIP/ LAKIP pada tahun 2016 adalah CC. kendala yang ditemukan sehingga nilai SAKIP/ LAKIP tidak mencapai target adalah sebagai berikut.

Hasil evaluasi LAKIP Kota, dimana capaian realisasinya 0 %, dan masalah yang dihadapi adalah:

1. Masih rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan Kota Sawahlunto dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
2. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran / cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indicator kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai.
3. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur.
4. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktifitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan.
5. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.
6. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Tabel 2.165
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5 Tahun Terakhir

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Peringkat	N/A	C	C	CC	Dalam Proses
Nilai	N/A	43.66	42.77	50.11	Dalam Proses

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Sawahlunto



2.3.4.4. Urusan Sekretariat Dewan

- a. Adanya tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap kelengkapan alat-alat DPRD Kota
- b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen kerja Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Tahunan (RKPD)
- c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan

Untuk penetapan PERDA tepat waktu yang diukur adalah PERDA APBD dan APBD Perubahan. Untuk penetapan APBD dilakukan tepat waktu, sedangkan APBD Perubahan penetapannya tidak pada waktu yang ditentukan.

Tabel 2.166
Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Angka Pencapaian
1	2013	50 %
2	2014	50 %
3	2015	50 %
4	2016	50 %
5	2017	50 %

Sumber : Bagian Hukum SETDAKO

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

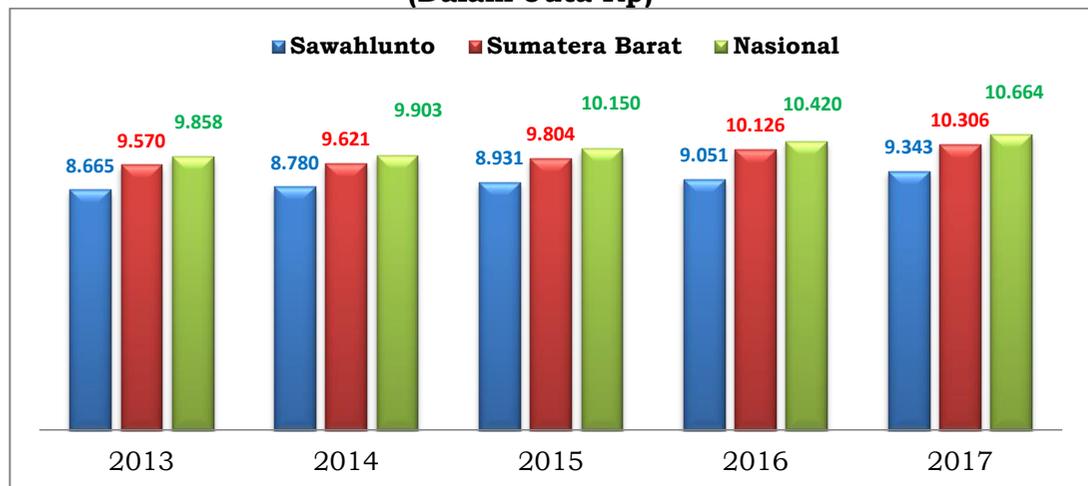
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah merupakan kapasitas ekonomi suatu daerah untuk mampu bersaing dengan daerah lain. Beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan ukuran kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Indikator Pengeluaran Konsumsi Per Kapita berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat. Semakin tinggi angka pengeluaran konsumsi per kapita, maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Berikut perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto periode Tahun 2013 – 2017.



Grafik 2.37
Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2013 – 2017
(Dalam Juta Rp)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Kota Sawahlunto *terus menerus mengalami peningkatan*. Pada tabel di atas terlihat tahun 2013 Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar Rp. 8,665 juta, kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 8,780 juta pada tahun 2014 dan terus meningkat lagi menjadi Rp. 9,343 juta pada tahun 2017. Hal ini *seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita Kota Sawahlunto* yang ditunjukkan oleh PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto periode tahun 2013 – 2017, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Meskipun Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun bila dibandingkan dengan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto *berada cukup jauh dibawah Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional*. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016, Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar Rp. 9,051 juta, sedangkan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 10,126 juta dan Pengeluaran Per Kapita Nasional sebesar Rp. 10,420 juta. Begitu juga pada tahun 2015, Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto sebesar Rp. 8,931 juta, sedangkan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 9,804 juta dan Pengeluaran Per Kapita Nasional sebesar Rp. 10,150 juta. Kondisi Ini merupakan sesuatu hal yang positif bagi Kota sawahlunto, karena dengan lebih tingginya pendapatan atau PDRB per kapita Kota Sawahlunto dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional di satu sisi dan lebih rendahnya pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional di sisi yang lain, menunjukkan bahwa *biaya hidup layak dikotaSawahlunto lebih rendah* dibandingkan biaya hidup layak provinsi dan nasional. Sehingga masyarakat Kota Sawahlunto dapat menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan investasi dan kegiatan lain yang tidak bersifat konsumtif, seperti untuk pendidikan, penambahan brang modal dan kegiatan keagamaan berupa umroh dan haji.

Pengeluaran Per Kapita Kota Sawahlunto pada Tahun 2017 juga memiliki *rasio paling rendah bersama Kota Padang Panjang* terhadap pendapatan atau PDRB-nya jika dibandingkan dengan kota lain yang ada di Sumatera Barat. Namun untuk tingkat Kabupaten, Kepulauan Mentawai memiliki rasio paling rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.167
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/ Kota
Se-Sumatera Barat Tahun 2016–2017

Kabupaten/ Kota	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp./Orang)		PDRB Per Kapita (Juta Rp./Orang)		Rasio Pengeluaran / PDRB	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kepulauan Mentawai	5,77	6,01	42,82	46,21	13%	13%
Pesisir Selatan	8,61	8,82	24,83	27,38	35%	32%
Solok	9,66	9,74	30,18	32,41	32%	30%
Sijunjung	9,89	10,09	32,71	34,68	30%	29%
Tanah Datar	10,29	10,31	31,05	33,53	33%	31%
Padang Pariaman	10,46	10,58	42,91	46,73	24%	23%
Agam	9,11	9,39	34,72	37,62	26%	25%
Lima Puluh Kota	8,94	9,15	34,03	36,62	26%	25%
Pasaman	7,68	7,88	27,01	29,20	28%	27%
Solok Selatan	9,80	9,89	28,26	30,14	35%	33%
Dharmas Raya	10,78	10,85	36,80	39,42	29%	28%
Pasaman Barat	8,39	8,70	30,55	32,92	27%	26%
Kota Padang	13,72	13,96	53,98	58,13	25%	24%
Kota Solok	11,52	11,67	48,14	51,71	24%	23%
<i>Kota Sawahlunto</i>	<i>9,05</i>	<i>9,34</i>	<i>48,45</i>	<i>52,70</i>	<i>19%</i>	<i>18%</i>
Kota Padang Panjang	9,80	10,24	53,65	57,78	18%	18%
Kota Bukit Tinggi	12,48	12,82	54,38	58,78	23%	22%
Kota Payakumbuh	12,71	12,86	40,10	43,70	32%	29%
Kota Pariaman	12,141	12,425	47,11	50,64	26%	25%

Sumber : Statistik Daerah Kota Sawahlunto 2016

b. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran per kapita dikelompokkan dalam : Pengeluaran Konsumsi untuk Makanan dan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Pada Tahun 2017, pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 604.262 atau 54,25 %. Dari jumlah tersebut, pengeluaran konsumsi terbesar diperuntukkan bagi tembakau/rokok dan sirih sebesar Rp. 85.364, diikuti oleh komoditas padi-padian sebagai makanan pokok sebesar Rp. 77.992 dan sayuran sebesar Rp 58.592. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, *pengeluaran per kapita per bulan di Kota Sawahlunto* adalah Rp. 509.574 atau 45,75 %, dengan pengeluaran konsumsi terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 217.546. Dengan demikian pada tahun 2017, distribusi pengeluaran konsumsi non makanan di Kota Sawahlunto *lebih kecil dari* pengeluaran konsumsi untuk makanan (45,75 % < 54,25 %).

Pada Tahun 2016, pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 541.960,96 atau 52,2 %. Dari jumlah tersebut, pengeluaran konsumsi terbesar diperuntukkan bagi komoditas padi-padian sebagai makanan pokok sebesar Rp 79.877,52, diikuti oleh rokok sebesar Rp 74.944,94 dan sayuran sebesar Rp 52.134,81. Sedangkan untuk pengeluaran *konsumsi non makanan* Kota Sawahlunto adalah Rp. 495.383,57 atau 47,8 %, dengan pengeluaran konsumsi terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 216.170,77. Dengan demikian pada tahun 2016, distribusi pengeluaran konsumsi non makanan Kota Sawahlunto *lebih kecil dari* pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih besar dari (47,8 % < 52,2 %).

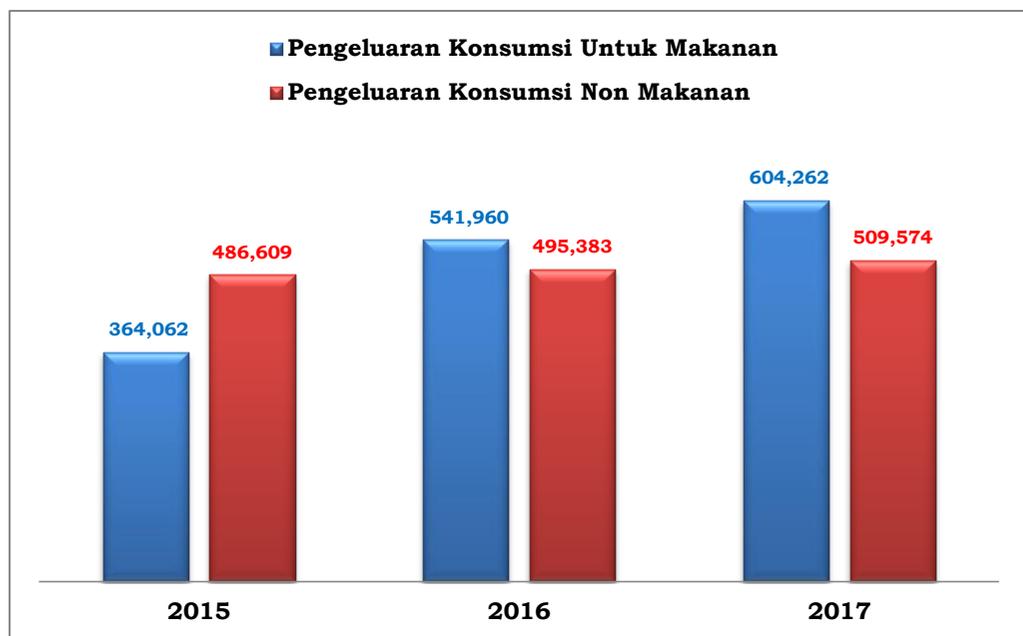
Hal ini bertolak belakang dengan kondisi tahun 2015, dimana pengeluaran konsumsi non makanan per kapita per bulan Kota Sawahlunto adalah Rp. 486.609,62 atau 57,2 %, sedangkan pengeluaran



konsumsi per kapita perbulan untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 364.061,73 atau 42,8 %. Dengan demikian pada tahun 2015, *distribusi pengeluaran konsumsi non makanan lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan (57,2 % > 42,8 %).*

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada *tahun 2015 lebih baik* atau lebih sejahtera dari pada tahun 2016. Karena *distribusi pengeluaran konsumsi non makanan lebih besar* dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini sejalan dengan teori dari ekonomi modern / maju menurut *Walt Whitman Rostow*, salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Dengan demikian *semakin tinggi perekonomian masyarakat, maka konsumsi untuk kebutuhan non makanan semakin tinggi*. Berikut disajikan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Masyarakat Kota Sawahlunto tahun 2015 – 2017, data 2013 – 2014 tidak tersedia.

Grafik 2.38
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan
Menurut Kelompok Barang Kota Sawahlunto
Tahun 2015 – 2017(Dalam Rp.)

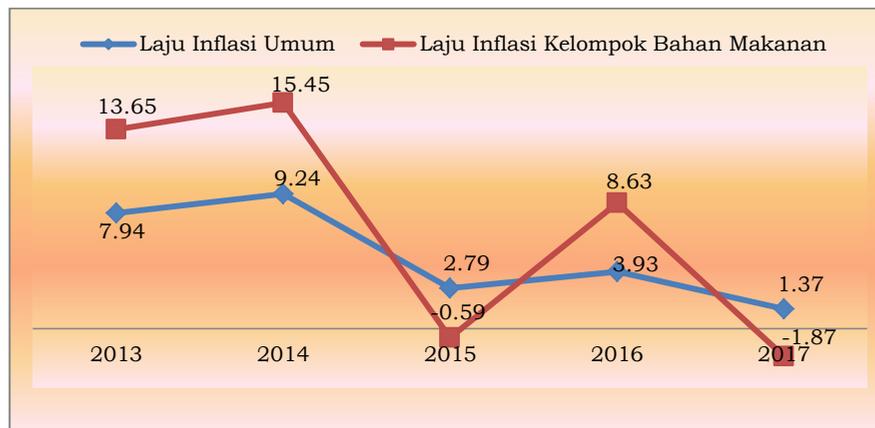


Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2018

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada **tahun 2015 lebih baik** atau lebih sejahtera dari pada tahun 2016 adalah karena terjadinya **deflasi/penurunan harga** pada **kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi**, komunikasi dan jasa keuangan pada **beberapa** bulan di awal tahun 2015. Penurunan harga pada sub kelompok bahan makanan disebabkan oleh penurunan drastis harga cabe merah, sedangkan penurunan harga kelompok transportasi karena adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (Sumber: *Indeks Harga Konsumen Kota Padang 2007 – 2016 dan Kota Bukittinggi 2013 – 2016, hal. 14*). Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan Laju Inflasi Umum dan Kelompok Bahan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017 berikut ini :



Grafik 2.39
Laju Inflasi Umum Dan Kelompok Bahan Makanan
Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara *membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja di masing-masing lapangan usaha*. Perhitungan Produktivitas Total Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.

Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 diperoleh dari membandingkan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada empat lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari keempat lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam 4 sektor besar yaitu : 1). Pertanian; 2). Industri Pengolahan; 3). Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; dan 4). sektor Lainnya. Sektor Pertanian terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor Industri Pengolahan berdiri sendiri. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor Lainnya terdiri dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.

Berikut Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 dan 2017 :

Tabel 2.168
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2015 da 2017

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)			
Lapangan Usaha	2015	2017	+/-
Pertanian	198.647,23	207.669,66	5 %
Industri Pengolahan	279.553,65	317.440,48	14 %
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	347.869,21	397.072,49	14 %
Lainnya	1.425.710,92	1.595.521,44	12 %
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja (Jiwa)			
Lapangan Usaha	2015	2017	+/-
Pertanian	4.627	4.889	6 %
Industri Pengolahan	2.467	3.553	44 %
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	6.559	5.990	-9 %



PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)			
Lainnya	14.209	14.695	-3 %
Produktivitas Total Daerah (Milliar Rupiah / Jiwa)			
Lapangan Usaha	2015	2017	+/-
Pertanian	42,93	42,48	-1 %
Industri Pengolahan	113,22	89,34	-21 %
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	53,04	66,29	25 %
Lainnya	100,34	108,58	8 %

Sumber : Data BPS Diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2015, lapangan usaha yang paling produktif di Kota Sawahlunto adalah *Industri Pengolahan* (113,22), dengan jumlah tenaga kerja 2467 orang menghasilkan PDRB sebesar Rp.279.553,65 (milliar). Sedangkan lapangan usaha *Lainnyayang* paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni sejumlah 14209 orang menghasilkan PDRB sebesar Rp. 1.425.710,92 (milliar) atau dengan produktivitas 100,34. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *sektor Lainnya merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Sawahlunto*, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor Industri Pengolahan. Sedangkan sektor yang paling rendah produktivitasnya adalah sektor Pertanian (42,93).

Pada Tahun 2017, lapangan usaha yang paling produktif di Kota Sawahlunto adalah *lapangan usaha Lainnya* (selain Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel) dengan produktivitas 108,58, disamping itu produktivitas lapangan usaha ini juga meningkat dari periode sebelumnya sebesar 8 %. Sedangkan produktivitas lapangan usaha Industri Pengolahan menurun drastis menjadi 89,34, artinya peningkatan pesat jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan, yakni sebesar 44% tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi (14 %). Namun yang menggembirakan, produktivitas lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel meningkat pesat sebesar 25 %, dimana pada tahun 2015 sebesar 53,04 menjadi 66,29. Sedangkan lapangan usaha yang paling rendah produktivitasnya adalah lapangan usaha Pertanian, yaitu 42,48 yang juga mengalami *penurunan produktivitas sebesar 1%*.

Disamping produktivitas per lapangan usaha, juga dapat dilihat perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.169
Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	2.001.854,07	2.123.644,91	2.251.781,01	2.380.768,78	2.517.704,07
2	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (Jiwa)	Data Tidak Tersedia	26037	27862	Data Tidak Tersedia	29127
3	Produktivitas Total Daerah (Juta Rupiah/Jiwa)	-	81,56	80,81	-	86,44

Sumber : Data BPS diolah

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa *jumlah tenaga kerja* dalam hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dari *periode 2013 -2017mengalami peningkatan*. Begitu juga produksi daerah dalam hal ini ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun *Produktivitas Total Daerah berfluktuasi*, dimana angka produktivitas tahun



2015 mengalami penurunan dibanding tahun 2014. Artinya pada tahun 2015 *produktivitas tenaga kerja menurun* karena peningkatan jumlah pekerja tidak diiringi dengan kenaikan produksi yang sebanding dengan penambahan pekerja. Namun tahun 2017, produktivitas total daerah kembali meningkat.

d. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budidaya).

Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. $NTP > 100$ atau $IT > IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani lebih besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami surplus.

2. $NTP = 100$ atau $IT = IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani sama besar dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami titik impas.

3. $NTP < 100$ atau $IT < IB$

Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani lebih kecil dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami defisit.

Badan Pusat statistik (BPS) Kota Sawahlunto tidak menghitung Nilai Tukar Petani Kota Sawahlunto, dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Sawahlunto merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa Nilai Tukar Petani dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung terus menurun dan berada dibawah 100 atau $NTP < 100$, kecuali tahun 2013 dan 2014, dimana $NTP > 100$ dengan indeks 104,21 dan 100,66. Hal ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) lebih kecil dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan

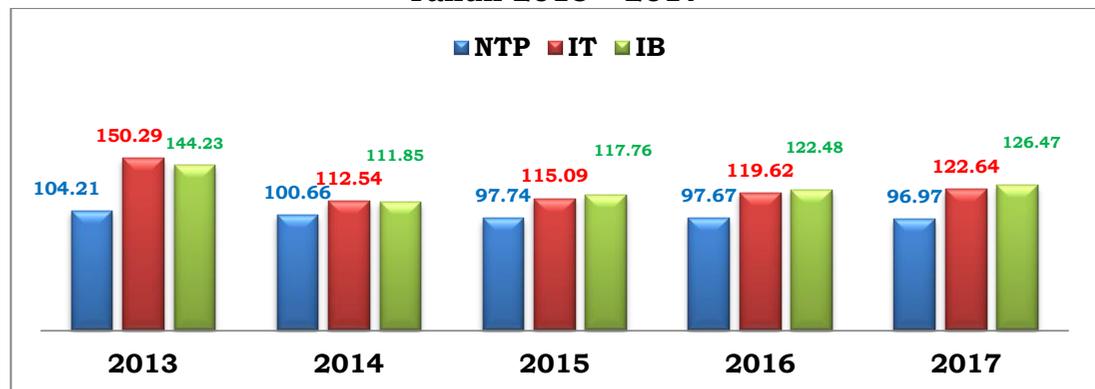


penambahan barang modal dan biaya produksi (IB). Dengan kata lain petani selama 5 (lima) tahun terakhir ini terus menerus mengalami defisit atau tingkat kesejahteraan petani masih rendah.

Penurunan dan rendahnya Nilai Tukar Petani ini sebetulnya tidak disebabkan oleh menurunnya pendapatan sektor pertanian, karena dari grafik terlihat bahwa Indeks harga yang diterima petani (IT) atau pendapatan petani dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus menerus mengalami peningkatan. Namun peningkatan pendapatan petani tersebut diiringi juga oleh peningkatan Indeks harga yang dibayar petani (IB) atau perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian dengan indeks yang lebih tinggi. Akibatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi lebih kecil dari 100 ($NTP < 100$) atau defisit.

Berikut ini disajikan perkembangan Nilai Tukar Petani Periode Januari Tahun 2013 – 2017.

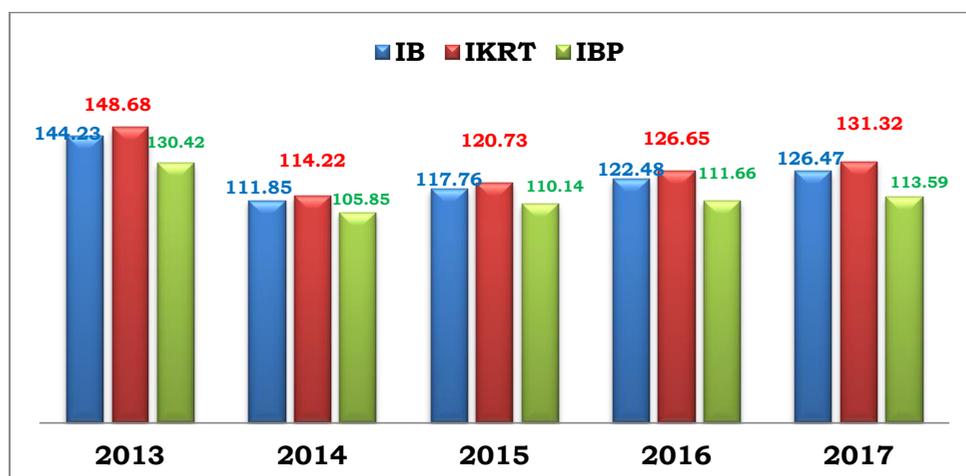
Grafik 2.40
Perkembangan Nilai Tukar Petani
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Sumatera Barat

Indeks harga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP), namun yang lebih dominan adalah *indeks konsumsi rumah tangga*. Artinya para petani belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara **layak**. Berikut disajikan perkembangan Indeks harga yang dibayar petani (IB) periode 2013 – 2017.

Grafik 2.41
Perkembangan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB)
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Kota Sawahlunto



Dari grafik diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lebih tinggi dari Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani sudah dapat menutupi biaya produksi dan penambahan barang modal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu perlu campur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengendalian harga hasil pertanian, dimana pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan petani adalah sebagai **price taker** (penerima harga). Untuk mengatasi hal ini perlu campur tangan pemerintah melalui pembelian hasil pertanian, terutama saat panen berlimpah, supaya petani dapat lebih sejahtera.

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusatpusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan).

Kebijakan penataan ruang kota tersebut meliputi :

a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota

- 1) Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- 2) Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota; dan
- 3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan sistem jaringan sumber daya air.

b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota Sawahlunto

- 1) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi:
 - a. Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
 - b. Pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya Meliputi:
 - a. Pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah
 - b. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan RTH kota;
 - d. Pengembangan kawasan perumahan yang layak huni;
 - e. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
 - f. Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota;
 - g. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
 - h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara



Dari kebijakan pengembangan pola ruang kota yang meliputi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya, luas pola ruang yang ada saat ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.170
Luas Pola Ruang Di Kota Sawahlunto

NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)	PERSEN (%)
I	KAWASAN LINDUNG	2,234.68	8.17
1	Daerah Hijau (Sempadan Sungai, Danau Dan Kereta Api)	936.66	3.43
2	Danau (Kolam Bekas Galian Tambang)	28.98	0.11
3	Hutan Lindung	72.71	0.27
4	Taman	14.49	0.05
6	RTH Taman	37.06	0.14
7	Hutan Kota Kolok	70.00	0.26
8	Hutan Kota	1,074.79	3.93
II	KAWASAN BUDIDAYA	25,110.32	91.83
7	Sawah	2,097.16	7.67
8	Tambang	2,024.08	7.40
9	Hutan Produksi	6,802.48	24.88
10	Hutan Produksi Konversi	4,113.18	15.04
11	Pemukiman	3,461.90	12.66
12	Pendidikan Tinggi	19.14	0.07
13	Perkantoran	127.48	0.47
14	Pertanian Lahan Kering	6,039.36	22.09
15	Wisata Kandih	400.00	1.46
16	TPA	25.54	0.09
	TOTAL	27,345.00	100.00

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Dari luas pola ruang tersebut terlihat bahwa tutupan lahan untuk pertanian lahan kering, hutan produksi konversi dan hutan produksi masih mendominasi kawasan budi daya dengan total luas 16.955,02 ha atau 62,01%. Sedangkan pada kawasan lindung daerah hijau dan hutan kota memiliki porsi yang lebih luas yaitu 2.011,45 ha atau 7,36%.

2.4.2.2. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan amanat UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kebutuhan luas RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, sehingga kebutuhan RTH direncanakan seluas 8.203 ha meliputi RTH privat adalah 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha Perkembangan RTH Kota Sawahlunto sejak 2013-2017 dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 2.171
Rasio RTH Per Satuan Luas Di Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	2.946	3.501	4.327	4.327	4.338
2	Luas Wilayah (ha)	27.345	27.345	27.345	27.345	27.345
3	Persentase (%)	10.77	12.80	15.82	15.82	15.86

Sumber : SIPD Kota Sawahlunto, 2017

Luas RTH di Kota Sawahlunto tahun dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 2.946 ha atau sebesar 10,77 dari luas wilayah kota dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi seluas keseluruhan 4.327 ha atau sebesar 15.82 %, namun pada tahun 2016 ini penambahan RTH tidak ada, sehingga masih membutuhkan tambahan RTH minimal seluas 14,18% dari luas wilayah kota yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan seperti pembuatan taman kota, hutan kota, penghijauan lahan kritis dan reklamasi lahan bekas tambang. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali dengan Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 4.338 Ha atau sebesar 15,86 dari luas wilayah kota.

Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menuju RTH 30%, diantaranya:

- a. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.
- b. Membangun lahan hijau (hub) baru,
- c. Mengembangkan koridor ruang hijau kota.
- d. Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota.
- e. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.
- f. Menghijaukan bangunan (green roof / green wall).
- g. Menyusun kebijakan hijau.
- h. Memberdayakan komunitas hijau.

2.4.2.3. Rasio bangunan yang memiliki IMB

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB untuk bangunan publik maupun bangunan privat serta IMB pemutihan untuk bangunan yang telah berdiri. Jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan terjadi peningkatan dari tahun ketahun, baik untuk bangunan yang sudah ada maupun yang baru dibangun. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IMB.

Setiap orang/badan usaha di Kota Sawahlunto yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku harus memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang supaya sesuai rencana. Perkembangan rumah dan bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.172
Rasio Bangunan Ber IMB Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Bangunan	14.001	18.004	18.189	12.882	12.929
2	Jumlah Bangunan ber-IMB	5.896	6.041	6.150	7.883	7.930
3	Rasio	42,12	33.55	33.94	61,19	61,33

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2017



Untuk Jumlah Bangunan ber-IMB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah bangunan ber-IMB berjumlah 5.896 unit dengan rasio 42.12 dari keseluruhan jumlah bangunan dan terus meningkat hingga pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016-2017 jumlah bangunan ber-IMB meningkat signifikan berjumlah 7.883 unit dengan rasio 61.19% pada tahun 2016 dan 79.30 unit dengan rasio 61.33% tahun 2017. Peningkatan ini dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengurusan IMB sehingga jumlah bangunan ber-IMB meningkat setiap tahunnya.

2.4.2.4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan Nomor 27 Tahun 2012 serta beberapa peraturan pelaksanaannya, efektivitas pelaksanaan pengawasannya masih perlu diuji.

Tabel 2.173
Jumlah Dokumen Izin Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
I	Izin Lingkungan					
1	AMDAL	-		1		1
2	UKL/UPL	5	3	1	3	4
3	SPPL	50	17	7	22	15
II	Penghargaan Lingkungan					
1	Adipura	-				1
2	Adiwiyata	1	4	6	1	1
3	Kalpataru	1				
4	GSB	-				

Sumber : DKP2LH, 2017

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi dokumen izin Lingkungan yang dikeluarkan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan di Kota Sawahlunto. Namun demikian masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal melaporkan kegiatan/usahanya dalam hal pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam hal penghargaan untuk Kota Sawahlunto di tahun 2017 mendapat penghargaan Adipura yang merupakan wujud kebersihan Lingkungan di Kota Sawahlunto.

2.4.2.5. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di kota Sawahlunto sejak tahun 2012 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2016 pada kisaran 15.330. Hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana wilayah produktif hanya \pm 18% dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 Ha.

2.4.2.6. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2014 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2017 pada kisaran 70 Ha, seperti tabel berikut:



Tabel 2.174
Luas Wilayah Industri Tahun 2013-2017

Tahun	Luas Wilayah Industri (ha)
2013	39.84
2014	39.84
2015	39.84
2016	39.84
2017	39.84

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2017

2.4.2.7. Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi banjir di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10-050 m yang berlangsung selama 1-3 jam

2.4.2.8. Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tengah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

2.4.2.9. Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. untuk lebih jelasnya luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.175
Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2017

NO	NAMA WILAYAH PERKOTAAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 2014	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 2015	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 2016	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) 2017
I	KECAMATAN LEMBAH SEGAR		7.310	6.861	7.144	
1	Pasar	0,50	1.560	1.498	1.536	1.532
2	Kubang Sirakuk Utara	0,28	1.012	971	926	935
3	Kubang Sirakuk Selatan	0,27	1.150	1.121	1.147	1.109
4	Aur Mulyo	0,20	1.160	1.090	1.113	1.102
5	Tanah Lapang	0,16	1.373	1.218	1.384	1.374
6	Air Dingin	0,14	1.055	963	1.038	1.026
II	KECAMATAN BARANGIN		8.215	7.272	8.109	7.078
1	Saringan	0,81	1.932	1.779	1.838	1.791
2	Lubang Panjang	1,00	1.436	1.243	1.430	1.431
3	Durian I	1,17	2.648	2.144	2.494	2.450
4	Durian II	1,25	2.199	2.106	2.347	2.346
	TOTAL	5.78	15.525	14.133	15.253	8.018

Sumber : Dinas Dukupil 2017

Penduduk perkotaan dibanding dengan luas dimana untuk setiap jiwa menempati 480,98 M² lahan dengan total jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 14.133 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama



masyarakat kota Sawahlunto masih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Namun apabila melihat tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sepuluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa sudah sangat meningkat di wilayah pinggiran perkotaan seperti Muaro Kalaban, Santur, Talawi Hilir, Sijantang dan disepanjang jalan nasional dan jalan propinsi.

2.4.2.10. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah. Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto:

1. Jumlah Bank dan Asuransi

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersamakerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto:

Tabel 2.176
Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2013-2017

No	Bank dan Asuransi	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1.	Jumlah Bank (unit)	5	5	8	8	9	
2.	Jumlah Perusahaan Asuransi (unit)	5	5	5	2	2	

Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2017

2.4.2.11. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut depoartemen kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 C banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarannya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi



air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.177
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2013- 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga	8.277	16.442	16.542	16.542	16.542
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	4.357	14.219	14.319	14.379	14.379
3	Persentase	52.64	86.48	86.56	86.92	86.92

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017

Untuk kondisi rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan komitmen Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan akses pelayanan terhadap air bersih di kota Sawahlunto, hal ini di tunjukkan dengan meningkatnya persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang pada akhir tahun 2017 ini meningkat sampai 86.92 Persen

2.4.2.12. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik di bagi jumlah seluruh tangga di kali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2.178
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.578	14.729	14.864	15.010	15.163
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	9.489	9.685	9.969	10.212	10.695
3	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	65.09	65.75	67.06	68.03	70.53

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 65.09% pada tahun 2013 menjadi 70.53% pada tahun 2017, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 4.468 rumah tangga yang belum teraliri aliran listrik.

2.4.2.13. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon

Teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator kinerja tabel berikut:

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Persentase penduduk yang menggunakan Hp/Telepon adalah sebagai berikut:



Tabel 2.179
Persentase Penduduk Kota Sawahlunto Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2013-2017

No	Tahun	Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon	Ket
1.	2013	71,37	
2.	2014	71,37	
3.	2015	65,66	
4.	2016	67,64	
5.	2017	83,27	

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kota Sawahlunto, BPS, 2018

Dari data diatas persentase penduduk yang menggunakan HP/Telpon mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah persentase penduduk yang menggunakan HpP atau telepon adalah 71,37 % dan menurun pada tahun 2015 menjadi 65,66 % dan naik lagi menjadi 83, 27 % pada tahun 2017.

2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

2.4.3.1. Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 jumlah Perda di Kota Sawahlunto mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 terdapat dua buah perda yang mendukung iklim usaha yang merupakan perda baru.

Tabel 2.180
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	15	13	13	10	9

Sumber : Bagian Hukum Setdako, 2017

Dari data di atas dapat dilihat jumlah perda yang mendukung iklim usaha dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah perda yang mendukung iklim usaha adalah 15 sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 9 buah perda. Peraturan daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Sawahlunto dilakukan hanya pada tahun 2015, bekerjasama dengan STIA LPPN Padang, tahun anggaran lainnya hanya dilakukan pembinaan saja. Pengukuran dilakukan pada sepuluh (10) SKPD unit pelayanan public di lingkungan Pemko Sawahlunto dengan nilai indeks nya sebagaimana table dibawah ini :



Tabel 2.181
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015

No	NAMA OPD	NILAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	73,25	B	BAIK
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	74,25	B	BAIK
3	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	74,25	B	BAIK
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	71,50	B	BAIK
5	KANTOR PERHUBUNGAN/ KOMUNIKASI DAN INFORMASI	71	B	BAIK
6	KANTOR PENINGGALAN SEJARAN DAN PERMUSEUMAN	75	B	BAIK
7	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	68,25	B	BAIK
8	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL	73,50	B	BAIK
9	DINAS PERTAMBANGAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN TENAGA KERJA	73,50	B	BAIK
10	KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL	64,50	B	BAIK

Sumber : Laporan Hasil Survey IKM Tahun 2015

2.4.3.3. Lama Proses Perizinan

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako No. 42 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto dari tahun 2014 sampai 2017 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.182
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kota Sawahlunto Tahun 2014 - 2017

No	Tahun	Jumlah Izin yang diterbitkan	Ket
1	2014	461	
2	2015	672	
3	2016	842	
4	2017	1093	

Sumber : Dinas PM, PTSP dan Tenaga Kerja



Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2014 adalah 461, pada Tahun 2015 adalah 672, tahun 2016 adalah 842 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.093. Peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSPNaker pada tahun 2017 karena kebijakan tentang pelayanan publik harus di tangani oleh dinas yang menangani pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.183
Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto

No	OPD	2016	2017	2018
1	Dinas PMPTSPNaker	6 orang	6 orang	10 orang
2	Dinas Teknis	10 orang	11 orang	29 orang
	Jumlah	16 orang	17 orang	39 orang

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas bahwa tenaga yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar tenaganya adalah pegawai yang berada diluar DPMPTSPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas teknis. Hal ini akan sangat mempengaruhi dalam memenuhi standar pelayanan operasional yang telah ditetapkan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tabel 2.184
Kesesuaian Pelaksanaan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan SOP Tahun 2017

No	Jumlah Izin	Sesuai SOP	Tidak Sesuai SOP	Ket
1.	167	84 (50,3%)	83(49,7%)	

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2017 yang sesuai SOP adalah 50,3% sedangkan yang tidak sesuai SOP adalah 49,7%. Hal ini menggambarkan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kemudahan perizinan dan non perizinan yang diberikan merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang bedaya saing. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto telah mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Berbasis Rakyat Sawahlunto (SIBARO) yang merupakan modifikasi dari Aplikasi perizinan SiCANTIK dari Kementerian Kominfo RI sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Sawahlunto dalam mengurus perizinan dan non perizinan.

2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Komponen ini merupakan betul-betul usaha pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja disamping tranfer dari pemerintah pusat.



Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.337.144.416,00 yang terdiri dari : Pajak Hotel Rp. 164.733.362,00 Pajak Restoran Rp. 638.615.093,00 Pajak Hiburan Rp. 394.309.900,00 Pajak Reklame Rp. 34.597.079,00 Pajak Penerangan Jalan Rp. 2.857.339.658,00 Pajak Parkir Rp. 3.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 17.905.600,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 975.816.873,00 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 250.826.851,00.

Untuk realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 Rp. 3.954.648.882,00 terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.375.996.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp. 56.371.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 135.400.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 475.960.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 107.959.199,00 Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus Rp. 45.365.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.178.019.905,00 Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 46.040.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga Rp. 411.150.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 114.823.078,00 Retribusi Izin Gangguan Rp. 7.244.700,00 dan Retribusi Izin Trayek Rp. 320.000,00

Realisasi Pajak Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 4.686.268.341,00 terdiri dari : Pajak Hotel Rp. 142.353.702,00 Pajak Restoran Rp. 640.309.687,00 Pajak Hiburan Rp. 462.892.300,00 Pajak Reklame Rp. 47.909.354,00 Pajak Penerangan Jalan Rp. 2.109.997.610,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 7.865.600,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Rp. 934.942.738,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 339.997.350,00.

Untuk realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.701.515.584,00 terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 437.105.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rp. 66.8540.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 104.500.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 516.786.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 113.952.750,00 Retribusi Penyediaan/ atau Penyedotan Kakus Rp. 54.390.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.060.868.394,00 Retribusi Terminal Rp. 11.513.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 41.352.500,00 Retribusi Tempat Rekreasi/ Olahraga Rp. 227.593.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 43.273.700,00 Retribusi Izin Gangguan Rp. 22.891.240,00 dan Retribusi Izin Trayek Rp. 440.000,00.

Tahun Anggaran 2015 realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 4.101.043.541,00 terdiri dari : Pajak Hotel Rp. 135.881.333,00 Pajak Restoran Rp. 524.829.887,00 Pajak Hiburan Rp. 422.777.300,00 Pajak Reklame Rp. 46.769.998,00 Pajak Penerangan Jalan Rp. 2.016.665.979,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 788.845.509,00 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 165.276.535,00.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 2.540.177.543,00 terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 323.992.500,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp. 66.092.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 121.264.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 627.301.500,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 101.008.530,00 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp. 1.000.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 44.880.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 65.096.815,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 846.497.548,00 Retribusi Terminal Rp. 12.000.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 43.665.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi/Olahraga Rp.186.125.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan



Rp. 82.771.700,00 Retribusi Izin Gangguan Rp. 17.802.950,00 dan Retribusi Izin Trayek Rp. 680.000,00. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.185
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah 2015-2017

No	URIAIAN	2015	2016	2017
	Pajak Daerah :			
	Pajak Hotel	135.881.333,00	142.353.702,00	164.733.362,00
	Pajak Restoran	524.826.887,00	640.309.687,00	638.615.093,00
	Pajak Hiburan	422.777.300,00	462.892.300,00	394.309.900,00
	Pajak Reklame	46.769.998,00	47.909.354,00	34.597.079,00
	Pajak Penerangan Jalan	2.016.665.979,00	2.109.997.610,00	2.857.339.658,00
	Pajak Parkir	-	-	3.000.000,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	7.865.600,00	17.905.600,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	788.845.509,00	934.942.738,00	975.816.873,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	165.276.535,00	339.997.350,00	250.826.851,00
	Jumlah Pajak Daerah	4.101.043.541,00	4.686.268.341,00	5.337.144.416,00
	Retribusi Daerah :			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	323.992.500,00	437.105.000,00	1.375.996.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	66.092.000,00	66.850.000,00	56.371.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	121.264.000,00	104.500.000,00	135.400.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	627.301.500,00	516.786.000,00	475.960.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	101.008.630,00	113.952.750,00	107.959.199,00
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000,00	-	-
	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	44.880.000,00	54.390.000,00	45.365.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.096.815,00	-	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	846.497.548,00	1.060.868.394,00	1.178.019.905,00
	Retribusi Terminal	12.000.000,00	11.513.000,00	-
	Retribusi Rumah Potong Hewan	43.665.000,00	41.352.500,00	46.040.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga	186.125.000,00	227.593.000,00	411.150.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	82.771.700,00	43.273.700,00	114.823.078,00
	Retribusi Izin Gangguan	17.902.950,00	22.891.240,00	7.244.700,00



No	URIAIAN	2015	2016	2017
	Retribusi Izin Trayek	680.000,00	440.000,00	320.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah	2.540.177.543,00	2.701.515.584,00	3.954.648.882,00

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Untuk melihat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Sawahlunto 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 2.186
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Sawahlunto

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2017	KET (*Belum Memenuhi, **Telah Memenuhi, ***Telah Melampaui Target)
			2014	2015	2016	2017		
Misi 1: Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal								
1.	PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Juta Rupiah)	288.342,20	321.937,64	343.936,26	381.767,25	423.483,33	114%	***
2.	Daya Beli Masyarakat (Rupiah)	630.200	635.145	643.235	754.250	778.583	120,34%	***
3.	PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta Rupiah)	224.358,31	249.651,32	273.456,26	292.957,85	309.537,83	93%	*
4.	Nilai/ score Pola Pangan Harapan (%)	84,1	83,45	83,67	87,3	89,4	102,76%	***
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah								
1.	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	39.02	42,17	45,11	48,45	52,7	119,56%	***
2.	Tingkat pengangguran (%)	6,16	6,38	7,18	7,18	6,19	88,05%	*
3.	Persentase infrastruktur perkotaan yang ditingkatkan (%)	86	86	88	82	88,5	99,44%	*
4.	Persentase tingkat kesesuaian penataan ruang dengan rencana tata ruang (%)	85	86	88	86	86,5	97%	*
5.	Persentase ruang terbuka hijau (%)	12.80	12,8	15,83	17	15,82	88%	*



NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2017	KET (*Belum Memenuhi, **Telah Memenuhi, ***Telah Melampaui Target)
			2014	2015	2016	2017		
6.	Jumlah sarana prasarana perumahan dan permukiman yang ditingkatkan (unit)	25	29	25	67	48	107%	*
7.	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah (%)	60	68	68	70	75	100%	*
8.	Jumlah peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana (relawan)	31	40	284	574	591	146%	***
Misi 3 : Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter								
1.	Jumlah kasus kenakalan remaja, amoral dan asusila pada generasi muda (kasus)	N/A	0	0	109	196	- ∞	*
2.	Jumlah penurunan konflik SARA bernuansa agama (IKU)	N/A	0	0	0	0	100%	**
3.	Persentase kelulusan UN yang diterima PTN (%)	41,7	28,85	28,41	31,49	25,58	90%	*
4.	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	99,05	99,5	99,9	98,64	98,64	99%	*
5.	Angka RLS (tahun)	9,25	9,42	9,42	9,65	9,65	97%	*
Misi 4 : Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera yang Menguasai berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya								
1.	Persentase tingkat partisipasi pemilih (%)	75.38	66.98	53.31	0	0	100%	**
2.	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu (kasus)	100	100	100	232	230	230%	***



NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2017	KET (*Belum Memenuhi, **Telah Memenuhi, ***Telah Melampaui Target)
			2014	2015	2016	2017		
3.	Persentase layanan jaringan internet (%)	N/A	94	94	70	60	62%	*
4.	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi (unit)	0	1	2	2	2	50%	*
7.	Persentase kepemilikan jaminan kesehatan (%)	93,01	73,5	81,73	82,5	82,5	115%	***
8.	Jumlah kematian ibu melahirkan (orang)	28,9/1000 KH	15,4/1000 KH	11,5/1000 KH	3	0	200%	***
9.	Persentase Prevalensi kekurangan gizi pada balita (%)	12,8	11,5	10,7	10,37	17,63	40%	*
10.	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)	41,2	33,04	52,02	52,96	56,8	95%	*
11.	Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) berKB	7.164	7.311	8.495	Tidak ada pendataan	7.777	97%	*
12.	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan social (%)	41,36	47,89	57,36	39,5	40,08	69%	*
13.	Persentase penduduk miskin (%)	2,17	2,25	2,22	2,21	2,01	94%	*
14.	Jumlah desa/kel yang mempunyai kelompok masyarakat, perempuan, ormas dan karang taruna (desa/kel)	N/A	37	37	30	34	92%	*
15.	Nilai Status pengembangan kota layak anak (nilai)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	100%	**
16.	Jumlah organisasi wanita yang aktif (jumlah)	25	25	25	25	28	100%	*



NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2017	KET (*Belum Memenuhi, **Telah Memenuhi, ***Telah Melampaui Target)
			2014	2015	2016	2017		
17.	Jumlah cabang olahraga massal yang berkembang dimasyarakat (cabang)	4	6	6	8	9	100%	*
Misi 5: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Melayani, Kreatif, Inovatif dan Efisien								
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan (dokumen)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100%	**
2.	Hasil evaluasi LAKIP Kota (nilai)	N/A	C	C	C	CC	0%	*
3.	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan aturan perencanaan (%)	80	80	90	100	100	100%	**
4.	Jumlah PAD (Rp. Milyar)	38,995	45,58	52,268	59.365	62,964	106%	*
5.	Jumlah OPD yang memenuhi SPM dan SOP (OPD)	15	15	15	20	Tidak dilaksanakan menunggu regulasi baru		
6.	Jumlah system pengelolaan arsip dan perpustakaan secara elektronik (jml. Aplikasi)	N/A	1	1	1	1	100%	**
7.	Persentase penduduk dengan KTP elektronik (%)	90,95	95,88	84,67	98,56	96,52	98%	*
Misi 6 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah								
1.	Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	1.484.335,	1.468.809.	1.372.461.	1.666.564.	1.711.028.	95%	*



NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2017	KET (*Belum Memenuhi, **Telah Memenuhi, ***Telah Melampaui Target)
			2014	2015	2016	2017		
2.	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	750.385	760.243	810.340	858.353	870.999	79%	*
Misi 7 : Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi Secara Nasional dan Internasional								
1.	Jumlah nota kerjasama dengan kab./kota dan atau lembaga peneliti (nota)	18	14	21	8	5	100%	***
2.	Jumlah nilai PMDN (Rp.) dan Nilai PMA (\$ juta.)	N/A	345,9 M	544,4 M	38,14 M	71,15	198%	***
3.	Panjang jalan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar (km)	110	115	118	121	124	100%	*

Sumber : Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018





BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ANALISIS BELANJA DAERAH DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prioritas belanja Kota Sawahlunto diarahkan bagi pendanaan bagi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 pada 14 bidang, yakni :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.
2. Pengembangan infrastruktur yang adil dan merata.
3. Peningkatan kesalehan sosial melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti.
4. Menjalinkan kehidupan sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.
5. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
7. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
8. Lanjutan sapu bersih kemiskinan.
9. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan disemua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.
10. Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan.
11. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
12. Pengembangan sektor kepariwisataan.
13. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah.
14. Perluasan jaringan sosial , ekonomi secara nasional dan internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang. Untuk kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 Pemerintah Kota Sawahlunto membuat kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah karena keterbatasan pendapatan yang diperoleh baik pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang diterima.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah adalah kewajiban/semua pengeluaran daerah yang mengurangi kekayaan bersih. Belanja daerah dialokasikan dalam 2 (dua) kelompok belanja, yang terdiri dari :

1. **Belanja Tidak Langsung** adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. **Belanja langsung** adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengklasifikasian belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tak langsung terkait metode penyusunan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah penggunaan anggaran berdasarkan output yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Dalam anggaran berbasisi kinerja, setiap penggunaan



sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang atau jasa yang dihasilkan.

Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk belanja pegawai yang meliputi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Pegawai Non PNS, tunjangan daerah, tunjangan resiko kerja, uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, dan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah serta wakil kepala daerah.

Selain itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan OPD untuk menunjang tupoksinya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telpon, biaya rapat koordinasi, honorarium non PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenis yang dalam penganggarannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi.

Realisasi belanja Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.1
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2017

URAIAN	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
BELANJA	415.971.618.348,89	488.405.317.004,27	537.483.538.214,19	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37	1,95
Belanja Tdk Langsung	221.659.710.363,79	253.921.351.499,74	241.839.283.342,56	227.071.046.047,77	202.200.309.645,19	(1,39)
Belanja Pegawai	192.263.580.319,00	245.084.592.122,47	217.093.345.893,00	215.514.779.305,00	192.528.893.245,00	1,22
Belanja Bunga	1.001.057.845,79	1.446.059.009,27	1.419.502.759,60	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	2,05
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	10.078.163.154,00	3.453.141.002,00	2.060.000.000,00	9.908.257.933,00	7.271.241.900,00	2,63
Belanja Sosial	247.308.400,00	840.358.500,000	0,00	0,00	0,00	(1,91)
Belanja Bagi Hasil	13.540.891.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja bnatuan keuangan	451.849.838,00	467.832.866,00	21.266.434.689,96	0,00	527.038.160,00	5,34
Belanja Tidak Terduga	4.076.859.400,00	2.629.368.000,00	0,00	208.292.255,00	412.951.268,00	(2,21)
Belanja Transfer	0,00	18.798.454.645,00	2.731.344.000,00	59.495.842.866,00	64.081.187.000,00	1,92
Bagi Hasil Pajak	0,00	15.028.794.645,00	2.731.344.000,00	953.480.100,00	863.196.000,00	(2,21)
Bagi Hasil Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	3.769.660.000,00	0,00	58.542.362.766,00	63.217.991.000,00	1,64
Belanja Langsung	194.311.907.977,10	199.673.157.666,00	305.429.166.869,00	315.571.547.586,35	320.180.629.516,00	2,30
Belanja Pegawai	33.553.649.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Barang	92.065.340.163,00	111.588.243.599,00	169.985.487.989,00	182.738.691.416,05	196.437.479.686,67	2,45
Belanja Modal	68.692.918.027,75	88.084.914.067,00	135.443.678.880,00	132.832.856.170,30	123.743.149.829,33	2,35

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah belanja dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 jumlah belanja adalah Rp.415.971.618.348,89 meningkat menjadi Rp. 488.405.317.004,27 pada tahun anggaran 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 menjadi Rp. 537.483.538.214,19 dan pada 2016 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.588.738.442.431,54 namun pada Tahun anggaran 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 584.882.133.253,37. Hal ini tidak terlepas dari berkurangnya jumlah penerimaan pendapatan dari pusat akibat pemotongan dana transfer sehingga juga berpengaruh pada jumlah belanja tahun berkenaan. Secara total, rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun terakhir adalah 1,95%.

Untuk komposisi, maka pada TA 2013 dan 2014 maka belanja tak langsung lebih besar dibanding belanja langsung. Namun pada 2015, 2016 dan 2017 jumlah belanja langsung lebih besar dibanding jumlah belanja tak langsung. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah belanja barang dan belanja modal.

3.1.1 Analisis Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		%	%	%	%	%
	BELANJA	84,63	84,72	88,15	90,43	89,21
A	Belanja Tidak Langsung	84,78	85,46	90,49	94,44	90,79
1	Belanja Pegawai	83,74	85,59	90,55	94,61	90,82
2	Belanja Bunga	81,72	96,40	94,63	95,98	97,35
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	86,49	77,92	61,51	95,57	91,38
5	Belanja Bantuan Sosial	82,44	87,40	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bagi Hasil	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	798,03	98,10	98,30	0,00	100,00
8	Belanja Tidak Terduga	97,07	77,33	0,00	31,18	55,06
B	Belanja Langsung	84,45	83,79	86,38	87,74	88,24
1	Belanja Pegawai	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	82,35	83,13	84,76	88,17	89,69
3	Belanja Modal	87,58	84,63	88,49	87,16	86,03

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja jika dibandingkan dengan anggaran maka persentasenya adalah rata-rata 90%, dan hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang telah dianggarkan, namun tidak jadi direalisasikan karena adanya kendala dan hambatan yang dihadapi. Sedangkan untuk belanja tak terduga, rendahnya realisasi belanja disebabkan selama 3 tahun terakhir tidak ada terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa yang membutuhkan pencairan dana tak terduga.

Berdasarkan data di atas terlihat dengan jelas bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto perlu mengambil langkah strategis sehingga penggunaan belanja benar-benar untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



Penatausahaan belanja merupakan usaha yang tidak kalah pentingnya dibandingkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan pendapatan. Meskipun pendapatan meningkat secara signifikan, jika tidak didukung perbaikan aspek pengeluaran (belanja) maka program pembangunan akan mengalami stagnan bahkan kemunduran. Oleh karena itu, penatausahaan belanja sejak proses penganggaran, perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan harus dikendalikan dengan baik.

Umumnya hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan dan penganggaran. Akibatnya banyak kegiatan yang tidak jadi terealisasi pada awal tahun anggaran dikarenakan kesalahan penganggaran sehingga membutuhkan proses perbaikan anggaran melalui pergeseran atau perubahan anggaran dan kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah melakukan pergeseran ataupun perubahan anggaran.
2. Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya karena kondisi alam yang tidak diinginkan, seperti bencana alam.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
4. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

3.1.2 Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Untuk melihat realisasi belanja untuk kebutuhan aparatur, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:



Tabel 3.3
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	192.263.526.319,00	204.028.847.809,00	217.093.345.893,00	215.504.779.305,00	192.528.893.245,00	-2,11
1	Belanja gaji dan tunjangan	135.338.433.846,00	141.218.638.492,00	150.904.581.255,00	157.897.158.157,00	136.967.562.445,00	-1,88
2	Belanja tambahan penghasilan	55.250.519.917,00	61.091.135.663,00	63.477.336.907,00	54.249.219.868,00	52.090.495.404,00	-2,55
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	1.260.080.720,00	1.352.740.000,00	1.408.000.000,00	1.403.800.000,00	1.982.000.000,00	3,50
4	Belanja pemungutan pajak daerah	160.563.623,00	95.921.928,00	92.228.800,00	44.491.450,00	0,00	-5,31
5	Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah	253.928.213,00	270.411.726,00	267.048.431,00	311.900.190,00	255.694.132,00	0,92
6	Uang Lembur	0,00	778.447.500,00	944.150.500,00	0,00	751.507.250,00	
7	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	0,00	0,00	0,00	1.608.209.640,00	481.989.014,00	
B	Belanja Langsung	77.663.493.374,35	57.112.124.042,00	58.861.858.868,00	66.915.179.356,00	60.118.600.319,00	1,45
1	Belanja pegawai	33.553.649.786,35	13.600.898.700,00	13.055.288.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	211.740.000,00	147.398.500,00	95.000.000,00	115.000.000,00	80.000.000,00	-1,95
3	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.667.744.186,00	6.055.002.975,00	5.091.651.035,00	6.789.225.119,00	6.030.692.718,00	2,89



No	Uraian	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
4	Belanja premi asuransi kesehatan	340.800.000,00	340.800.000,00	1.825.487.160,00	2.149.294.604,00	2.927.034.800,00	3,82
5	Belanja makanan dan minuman pegawai	5.304.358.855,00	6.506.199.797,00	8.064.172.622,00	8.664.130.078,00	7.565.491.250,00	-1,48
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.426.014.725,00	1.621.917.265,00	2.309.058.780,00	3.005.657.285,00	2.225.919.645,00	1,84
7	Belanja perjalanan dinas	16.910.219.947,00	17.967.111.975,00	12.877.498.124,00	22.156.066.611,00	24.511.391.822,00	4,39
8	Belanja perjalanan pindahtugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Belanja pemulangan pegawai	400.750.000,00	255.000.000,00	192.500.000,00	318.500.000,00	0,00	-
10	Belanja modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	12.848.215.875,00	10.617.794.830,00	15.351.202.547,00	23.717.304.659,00	16.778.069.084,00	-1,89
	Total	269.927.019.693,35	261.140.971.851,00	275.955.204.761,00	282.419.958.661,00	252.647.493.564,00	-1,58

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan setiap tahunnya dimana rata-rata pertumbuhannya adalah -2,11%. Hal ini bermakna bahwa pada Kota Sawahlunto, alokasi anggaran lebih banyak diperuntukkan untuk kebutuhan belanja publik yang langsung berdampak pada masyarakat. Misalnya untuk belanja modal.

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun anggaran 2013	269.927.019.693,35	425.902.618.340,89	63,00
2	Tahun anggaran 2014	261.140.971.851,00	463.187.509.165,74	56,38
3	Tahun anggaran 2015	275.955.204.761,00	563.897.794.211,56	48,94
4	Tahun anggaran 2016	282.419.958.661,00	620.680.103.166,45	45,50
5	Tahun anggaran 2017	252.647.493.564,00	593.898.792.827,85	42,54

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari analisis tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa persentase belanja pegawai terhadap total pengeluaran di Kota Sawahlunto rata-rata masih dibawah 50 %. Kecuali untuk tahun anggaran 2013 dan 2014. Hal ini, dikategorikan masih dalam batas kewajaran belanja daerah. Akan tetapi, dari jumlah dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat terbatas. Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.

3.1.3 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan dan belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat berarti pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.



Tabel 3.5
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Wajib	147.986.428.318,79	159.046.232.146,27	156.463.428.014,00	274.485.737.445,77	256.581.429.921,19	1,02
1	Belanja gaji dan tunjangan	135.338.433.846,00	141.218.638.492,00	150.904.581.255,00	212.146.378.025,00	189.058.057.849,00	0,84
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	1.260.080.720,00	1.352.740.000,00	1.408.000.000,00	1.403.800.000,00	1.982.000.000,00	0,86
3	Belanja bunga	1.001.057.845,79	1.446.059.009,27	1.419.502.759,00	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	0,51
4	Belanja bagi hasil	10.386.855.907,00	15.028.794.645,00	2.731.344.000,00	59.495.842.866,00	64.081.187.000,00	0,31
B	Belanja Mengikat	11.673.161.525,00	14.469.440.708,00	14.689.973.125,00	17.036.303.063,33	16.785.669.040,66	0,79
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	0,00	0,00				
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	211.740.000,00	147.398.500,00	95.000.000,00	115.000.000,00	80.000.000,00	0,64
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air dan sejenisnya)	11.078.781.731,00	14.322.042.208,00	14.594.973.125,00	14.846.384.313,000	14.785.728.102,00	0,76
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	382.639.794,00			908.252.084,00	753.274.272,00	
5	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00			
6	Pembayaran pokok hutang	0,00	0,00	0,00	1.166.666.666,33	1.166.666.666,66	
	A + B	159.659.589.844,00	173.515.672.854,27	171.153.401.139,00	291.522.040.509	273.367.098.962,00	0,80

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Wajib dan Mengikat Terhadap Total Belanja Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Wajib dan mengikat	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun anggaran 2013	159.659.589.844,00	425.902.618.340,89	37,48
2	Tahun anggaran 2014	172.069.613.845,00	463.187.509.165,74	37,00
3	Tahun anggaran 2015	171.153.401.139,00	563.897.794.211,56	30,35
4	Tahun anggaran 2016	291.522.040.509,00	620.680.103.166,45	46,97
5	Tahun anggaran 2017	273.367.098.962,00	593.898.792.827,85	46,03

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, persentase belanja wajib dan mengikat adalah di bawah 50%, ini berarti kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto untuk melakukan pembayaran yang harus dikeluarkan adalah 50% dari jumlah dana yang ada. Sehingga kurangnya fleksibilitas Kota Sawahlunto dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diakibatkan adanya kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada IBRD. Belanja bunga digunakan untuk menggagalkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2017 mempunyai kewajiban untuk membayar bunga utang atas pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 untuk Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah,-).

Tagihan kewajiban atas bunga utang terdiri dari Bunga dan Jasa bank, yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu jatuh tempo pada setiap tanggal 15 Mei dan tanggal 15 November pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan. Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, Pemerintah menetapkan PT. Bank Tabungan Negara sebagai Bank penatausahaan atas pinjaman dimaksud dan pembayaran bunga utang disetor ke Rekening Menteri Keuangan, Rekening Pembangunan Daerah dalam rupiah dengan Nomor : 519.000102980 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta.

Sedangkan untuk belanja pegawai sesuai dengan ketentuan :

1. Penyediaan anggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Penyediaan anggaran untuk pemberian gaji bulan ketiga belas dan gaji keempat belas bagi PNSD.
3. Penyediaan anggaran memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD.
4. Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai maka diperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
5. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan efisiensi, kepatutan, kewajaran beban kerja serta pemerataan penerimaan penghasilan dengan melihat kondisi



- kemampuan keuangan daerah.
6. Pembayaran gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda dan dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.
 7. Pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Sawahlunto sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
 8. Anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi walikota, wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Tenaga kerja .
 - e. Peraturan Presiden nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 9. Penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah nomor : 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

3.1.4 Analisis Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Proyeksi meningkatnya pengeluaran wajib dan mengikat ini tentunya harus diseimbangkan dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut bersifat tertutup, artinya pemerintah daerah tidak dibenarkan membuat kebijakan untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi daerah selain dari apa yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut.

Sedangkan untuk belanja, maka dapat diproyeksikan dengan kenaikan rata-rata 1,04%. Dengan adanya kondisi keuangan Kota Sawahlunto yang mengalami defisit sebesar Rp. 105.382.509.782,12 pada tahun 2018, maka untuk proyeksi 2019-2023 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tersebut dengan langsung melakukan pengurangan belanja atas belanja langsung dan tak langsung. Sehingga jumlah proyeksi belanja tersebut jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja tahun-tahun sebelumnya.



Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	622.904.840.571,81	625.593.312.159,89	630.289.566.280,03	637.020.808.718,63	657.760.083.630,03
Belanja Tak langsung	309.477.525.504,75	312.606.722.371,00	315.768.398.849,17	318.969.190.197,20	332.916.773.681,64
Belanja Pegawai	234.199.245.759,66	236.630.125.291,00	239.086.236.224,25	241.572.733.080,98	244.085.089.505,02
Belanja Bunga	1.515.569.304,18	1.531.300.210,52	1.547.194.396,37	1.563.285.218,10	1.579.543.384,36
Belanja Hibah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	18.713.503.906,40
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	999.978.689,18	1.010.358.004,10	1.020.845.051,51	1.031.461.840,04	1.042.189.043,18
Belanja Bantuan Keuangan	64.004.947.099,64	64.669.288.760,12	65.340.525.978,85	66.020.067.449,03	66.706.676.150,50
Belanja Tak Terduga	757.784.652,09	765.650.105,26	773.597.198,19	781.642.609,05	789.771.692,18
Belanja Langsung	313.427.315.067,06	313.986.589.788,89	315.521.167.430,86	319.051.618.521,43	325.843.309.948,39
Pengeluaran Pembiayaan	7.513.855.816,96	7.591.846.154,84	7.670.801.354,85	7.750.577.688,94	7.831.183.696,90
Total	630.418.696.388,77	633.185.158.315,73	637.960.367.6353,88	644.771.386.408,57	665.591.267.237,96

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Untuk perhitungan proyeksi belanja pegawai, yang menjadi acuan perhitungan anggaran adalah realisasi tahun anggaran 2013-2017. Namun telah memasukkan komponen tunjangan daerah. Untuk belanja hibah, disesuaikan dengan kemungkinan kebutuhan tahun – tahun tersebut setelah dikurangi dengan dana pilkada, jadi yang dianggarkan hanya hibah yang bersifat rutin misalnya untuk MUI, Koni, LKAM, BAZ dan sejenisnya. Untuk tahun anggaran 2023, baru ditambah lagi dikarenakan Pilkada. Untuk komponen belanja tak langsung lainnya maka setiap tahunnya diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 1%. Pada belanja langsung, maka dapat dilihat mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan semakin membengkaknya belanja tak langsung . Sedangkan jumlah ketersediaan dana akibat jumlah pendapatata yang diterima tidak sebanding dengan kenaikan belanja tak langsung. Proyeksi belanja ini dengan menggunakan asumsi jumlah belanja sama dengan jumlah pendapatan yang diterima Kota Sawahlunto.

3.2 ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan serta program kegiatan pembangunan ternyata belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan pendapatan sehingga mengakibatkan perbedaan yang signifikan antara rencana pendapatan dengan rencana belanja, dalam hal ini rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Untuk menutupi defisit tersebut, maka diusahakan penerimaan pembiayaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUKD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah.



- c. **Penerimaan Pinjaman Daerah**
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- d. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- e. **Penerimaan piutang daerah**
Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
- f. **Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah**
Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan modal yang diterima kembali.

2. Pengeluaran Pembiayaan :

- a. **Pembentukan Dana Cadangan**
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- b. **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**
 - 1) **Penyertaan modal pemerintah daerah** digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran 2017;
 - 2) **Jumlah yang dianggarkan**, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan;
 - 3) **Investasi (penyertaan modal) daerah** sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- c. **Pembayaran Pokok Utang**
Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2017 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sedangkan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2013–2017 menunjukkan bahwa memang terdapat defisit, dimana jumlah belanja lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Seperti tampak pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.8
Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Sawahlunto
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	428.681.501.793,92	488.405.317.004,27	537.483.538.214,19	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	415.971.618.340,89	472.392.963.810,74	549.999.794.211,56	602.138.436.500,12	586.462.126.161,19
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.931.000.000,00	9.593.000.000,00	13.898.000.000,00	18.541.666.666,33	7.436.666.666,66
A	Surplus (Defisit) Riil	2.778.883.453,03	6.419.353.193,53	(26.414.255.997,37)	(31.941.660.734,91)	(9.016.659.574,48)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan	50.846.216.940,07	66.887.793.261,10	73.754.975.378,63	47.587.060.419,26	15.830.743.966,35
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	45.850.594.997,07	53.625.100.393,10	73.307.146.454,63	47.340.719.381,26	15.638.881.901,35
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	447.828.924,00	246.341.038,00	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.995.621.943,00	13.262.692.868,00	-	-	191.862.065,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	50.846.216.940,07	66.887.793.261,10	73.754.975.378,63	47.587.060.419,26	15.830.743.966,35
B + A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	53.625.100.393,10	73.307.146.454,63	47.340.719.381,26	15.645.399.684,35	6.814.084.391,87

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



3.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Pada tahun anggaran 2013 terdapat sumber penutup defisit sebesar **Rp. 50.846.216.940,07** dengan rincian sebagai berikut :

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 45.850.594.997,07 dengan rincian sebagai berikut :

Kasda	Rp.	1.414.811.535,14
Deposito Bank Nagari	Rp.	27.000.000.000,00
Deposito Bank BNI	Rp.	5.000.000.000,00
Deposito Bank BRI	Rp.	500.000.000,00
Deposito BPR Talawi	Rp.	200.000.000,00
Deposito BPR Silungkang	Rp.	200.000.000,00
Deposito Mudik Air	Rp.	200.000.000,00
Deposito Pasar Baru Durian	Rp.	200.000.000,00
Deposito Pondok Kapur	Rp.	200.000.000,00
Deposito BPR Kubang	Rp.	70.000.000,00
Deposito BSM	Rp.	10.000.000.000,00
Kas BLUD	Rp.	907.768.770,93

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 4.995.621.943,00 yang merupakan penerimaan pinjaman dari jenis pinjaman dana bergulir BDC, UTT, dan Pinjaman Pemuda .

Pada tahun anggaran 2014 terdapat sumber penutup defisit sebesar Rp.66.887.7793.261,10, terdiri atas :

- Penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Rp.53.625.100.393,10 dengan rincian sebagai berikut :

Kasda	Rp.	1.027.674.206,72
Deposito Bank Nagari	Rp.	35.000.000.000,00
Deposito Bank BNI	Rp.	15.000.000.000,00
Deposito Bank BRI	Rp.	500.000.000,00
Kas BLUD	Rp.	2.002.532.186,38

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 13.262.692.868,00 dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Kembali Investasi PT WWS	Rp.	10.000.000.000,00
Pencairan Deposito BPR Cahaya Nagari	Rp.	100.000.000,00
Pengembalian Pokok Pinjaman Investasi Non Permanen	Rp.	3.162.692.868,00

Pada tahun anggaran 2015 terdapat sumber penutup defisit anggaran sebesar Rp 73.754.975.378,63 yang terdiri atas :

- Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 73.307.146.454,63 dengan rincian sebagai berikut :

Kasda	Rp.	65.859.054.244,50
Kas BLUD	Rp.	7.448.092.210,93

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 447.828.924,00 yang merupakan pengembalian pokok dari investasi non permanen.

Pada tahun anggaran 2016 terdapat sumber penutup defisit anggaran sebesar Rp.47.587.060.419,26 yang terdiri atas :

- Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 47.340.719.381,26 dengan rincian sebagai berikut:

Kasda	Rp.	40.009.295.021,27
Kas BLUD	Rp.	7.331.424.359,99

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 246.341.038,00 yang bersumber dari Dana Kemitraan BDC, Gakin, Kopinkra, Dana Bergulir dan Pinjaman Pemuda.

Pada Tahun anggaran 2017 terdapat sumber penutup defisit anggaran sebesar Rp.15.830.743.966,35 dengan rincian :



- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp.15.638.881.901,35 dengan rincian:

Kasda	Rp.	9.918.167.264,37
Kas BLUD	Rp.	5.727.232.419,98
- Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Rp. 191.862.065,00

3.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp.100 Miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 90 Miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp.10 Miliar.

Tabel 3.9
SILPA Kota Sawahlunto TA 2013-2017

No	Uraian	SILPA
1	Tahun anggaran 2013	53.625.100.393,10
2	Tahun anggaran 2014	73.307.146.454,63
3	Tahun anggaran 2015	47.340.719.381,26
4	Tahun anggaran 2016	15.645.399.684,35
5	Tahun anggaran 2017	6.814.084.391,87

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas tampaklah bahwa SiLPA Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan makin sedikitnya sisa lebih antara jumlah penerimaan dengan pengeluaran.

3.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Untuk analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 maka mengacu pada SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.814.084.391,87 dengan rincian sebagai berikut :

Kasda	Rp.	123.243.584,89
Kas BLUD	Rp.	4.959.790.573,98
Kas JKN	Rp.	908.102.407,00
Kas BOS	Rp.	317.664.158,00
Deposito BRI	Rp.	500.000.000,00
Kas pada Bendahara BLUD	Rp.	5.283.668,00

3.2.4. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

3.2.4.1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto

Pengukuran derajat otonomi fiskal daerah merupakan pengukuran terhadap kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tolok ukur kemampuan keuangan daerah ini dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD dengan tolok ukur sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tolok Ukur Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)

DOF = PAD/APBD (%)	KRITERIA
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,10 - 20,00	Kurang
20,10 - 30,00	Sedang
30,10 - 40,00	Cukup
40,10 - 50,00	Baik
dias 50,00	Sangat Baik

Sumber : Kerjasama Litbang Depdagri dengan Fisipol UGM



Menggunakan tolok ukur diatas, dapat didapat derajat otonomi Fiskal daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2013 s/d 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	PAD	37.104.573.790,92	48.580.391.650,27	52.268.500.528,19	53.388.553.982,54	62.459.787.921,37
2	APBD	437.534.871.922,00	488.405.317.004,27	537.483.538.214,19	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37
3	DOFD	8,48	9,85	9,58	8,88	10,16
Kriteria DOFD		Sangat Kurang				

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari analisis diatas, diketahui bahwa derajat otonomi fiskal daerah Kota sawahlunto berada pada kriteria **Sangat Kurang**. Intinya Pemerintah Kota Sawahlunto sangat tergantung pada Pemerintah Pusat akibat kecilnya penerimaan PAD.

3.3. ANALISIS NERACA DAERAH

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset daerah. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan atau penurunan kewajiban.

Berdasarkan Neraca Kota Sawahlunto TA 2013-2017, maka akan nampak jumlah aset mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun anggaran 2013 dan 2014 jumlah aset cenderung meningkat dari Rp. 920.236.528.894,95 menjadi Rp. 1.001.156.316.004,57. Sedangkan mulai tahun anggaran 2015 sampai 2017 jumlah aset mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan dari BPK yang mana untuk aset pinjaman dari PT BA, maka harus dikeluarkan dari neraca. Begitu juga untuk aset yang diserahkan ke propinsi dan desa maka harus dilakukan penyesuaian. Sedangkan untuk nilai investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akibat makin bertambahnya penyertaan pada Bank Nagari dan BUMD. Sedangkan untuk aset lancar, dari tahun anggaran 2013 ke 2014 mengalami peningkatan yakni dari Rp. 64.704.478.745,10 menjadi Rp. 87.015.215.431,99. Dan mulai pada tahun anggaran 2015 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp. 58.667.599.951,65, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 26.168.276.290,63 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 20.387.407.618,56. Ini diakibatkan oleh jumlah SiLPA yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



Tabel 3.12
Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kota Sawahlunto, tahun 2013-2017

Uraian	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
ASET						
Aset Lancar	64.704.478.745,10	87.015.215.431,99	58.667.599.951,64	26.168.276.290,63	20.387.407.618,56	-2,35
Investasi Jangka Panjang	76.743.617.578,29	71.600.563.329,06	82.450.922.493,06	99.393.513.746,25	102.215.265.811,26	2,05
Aset Tetap	741.416.230.513,46	816.339.147.659,38	680.765.328.403,63	483.009.419.214,20	689.756.998.630,18	1,62
Dana Cadangan						
Aset Lainnya	37.372.202.058,10	26.201.389.584,14	7.657.103.016,60	37.403.356.457,60	8.426.365.988,54	2,93
JUMLAH ASET	920.236.528.894,95	1.001.156.316.004,57	829.540.953.864,94	645.974.565.708,68	820.786.038.048,54	0,90
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	3.287.443.422,40	5.784.585.679,56	5.040.227.242,00	6.990.968.953,39	16.732.577.268,89	3,01
Kewajiban Jangka Panjang	17.499.999.776,00	17.499.999.776,00	17.589.534.479,00	24.700.093.894,75	22.164.197.950,82	2,03
JUMLAH KEWAJIBAN	20.787.443.198,40	23.284.585.455,56	22.629.761.721,00	31.691.062.848,14	38.896.775.219,71	2,38
EKUITAS						
SILPA	53.625.100.393,10	73.307.146.454,63				
Pendapatan yang ditangguhkan	21.270.950,00					
Cadangan Piutang	3.798.106.225,99	5.633.710.605,10				
Cadangan Persediaan	7.260.001.176,01	7.499.513.147,26				
Dana Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	-3.287.443.422,40	-5.741.596.078,56				
EDL Bukan Silpa		531.855.624,00				
Ekuitas Dana Investasi	838.032.050.373,85	896.641.100.796,58				
JUMLAH EKUITAS	899.449.085.696,55	977.871.730.549,01	806.911.192.143,94	614.283.502.860,54	781.889.262.828,83	1,36
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	920.236.528.894,95	1.001.156.316.004,57	829.540.953.864,94	645.974.565.708,68	820.786.038.048,5	1,05

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



3.3.1. Rasio Likuiditas

Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Sawahlunto dapat dilakukan analisis rasio keuangan, meliputi current ratio, quick ratio, rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar Pemerintah Kota Sawahlunto dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah kota Sawahlunto dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih akibat besarnya SiLPA atau akibat banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak jadi direalisasikan.

Sedangkan quick ratio akan menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. *Quick Ratio* ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga. Jadi semakin besar rasio, semakin baik juga posisi keuangan. Jika hasilnya mencapai 1:1 atau 100%, maka ini akan berakibat baik jika terjadi likuidasi karena perusahaan akan mudah untuk membayar kewajibannya.

Tabel 3.13
Analisis Rasio Keuangan Kota Sawahlunto
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (current ratio)	19,68	15,04	11,64	3,74	1,22
2	Rasio quick (quick ratio)	17,47	13,75	10,56	2,94	0,89

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Berdasarkan analisis rasio lancar (current ratio), untuk tahun 2017 rasio lancar sebesar 1,22 artinya pemerintah Kota Sawahlunto hanya mampu melunasi hutang jangka pendeknya sebanyak 1,22 kali pada saat jatuh tempo, 3,74 kali pada tahun 2016 dan 11,64 kali pada tahun 2015. Untuk quick ratio, setelah aset lancar dikurangi dengan persediaan maka kemampuan pemerintah Kota Sawahlunto dalam melunasi hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo hanya 0,55 pada tahun 2017. Artinya Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami kesulitan likuiditas dalam melakukan pelunasan utang jangka pendek.

3.3.2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau leverage adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Rasio Solvabilitas membandingkan beban utang pemerintah secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto
TA 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05
2	Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap total ekuitas tidak sampai 1%, artinya kewajiban pemerintah Kota Sawahlunto tidak sampai 1% dibandingkan dengan total aset dan total ekuitas.



3.3.3. RASIO AKTIVITAS

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 3.15
Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Sawahlunto
TA 2013-2017

Tahun	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan	Prioritas
2013	83,49	16,51	Belanja Rutin
2014	81,35	18,65	Belanja Rutin
2015	75,38	24,62	Belanja Rutin
2016	75,52	24,48	Belanja Rutin
2017	76,32	23,68	Belanja Rutin

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir lebih banyak pada belanja rutin, sedangkan untuk belanja modal hanya dibawah 25%. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas), maka didapat rata-rata sebagai berikut :

Tabel 3.16
Rata-rata Tingkat Perputaran Piutang
Kota Sawahlunto TA 2013-2017

Tahun	Tingkat Perputaran Piutang
2013	3,60
2014	2,72
2015	3,83
2016	4,97
2017	6,89

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari rasio diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan setiap tahunnya atas rasio tingkat perputaran piutang tersebut. Ini berarti makin tingginya peluang terjadinya piutang yang mengalami kemacetan. Dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menerima kembali piutang pada masyarakat.

Tabel 3.17
Rata-rata Tingkat Perputaran Persediaan
Kota Sawahlunto TA 2013-2017

Tahun	Tingkat Perputaran Persediaan
2013	906,69
2014	11.246,25
2015	11.510,77
2016	13.846,35
2017	14.839,64

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat perputaran persediaan pada Pemerintah Kota Sawahlunto sangat rendah, maka hal ini menunjukkan banyaknya persediaan yang tertumpuk pada OPD yang ada di Kota Sawahlunto.



3.4. ANALISIS KERANGKA PENDANAAN

Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penguatan dan percepatan pembangunan serta pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto antara tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,03%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari semua komponen pendapatan. Tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan adalah Rp. 428.681.501.793,92 meningkat menjadi Rp. 488.405.317.004,27 pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 menjadi Rp. 537.483.538.214,19 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi Rp. 537.483.538.214,19. Kenaikan ini dikarenakan adanya pendapatan dana alokasi desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak serta Bantuan Keuangan. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan, yakni menjadi Rp. 584.882.133.253,37. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang melakukan pemotongan dana transfer ke daerah.

Melihat komposisi pendapatan daerah Kota Sawahlunto, maka dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah sehingga kelancaran pembangunan kota sangat tergantung dari bantuan keuangan dari pusat. Dimasa yang akan datang diharapkan agar Pemerintah Kota Sawahlunto mengupayakan peningkatan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sehingga proporsi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan pendapatan akan meningkat.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.18
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto tahun 2013 – 2017

N O	URAIAN	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
	PENDAPATAN	428.681.501.793,92	488.405.317.004,27	537.483.538.214,19	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37	2,03
A	Pendapatan Asli Daerah	37.104.573.790,92	48.540.391.650,27	52.268.500.528,19	53.388.553.982,54	62.459.787.921,37	2,22
1	Pajak Daerah	3.185.508.186,00	4.190.396.080,04	4.099.494.574,00	4.686.268.341,00	5.337.144.416,00	2,21
2	Retribusi Daerah	3.044.138.867,00	2.885.464.543,00	2.540.177.543,00	2.701.515.584,00	3.828.111.382,00	2,03
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.342.355.040,00	9.151.546.652,00	8.280.727.904,00	10.095.311.774,00	10.290.929.176,00	1,88
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	22.532.571.697,92	32.352.984.375,23	37.348.100.507,19	35.905.458.283,54	43.003.602.947,37	2,31
B	Dana Perimbangan	388.979.022.723,00	436.449.625.354,00	471.923.233.686,00	532.746.888.449,00	522.257.503.732,00	2,01
1	Dana bagi Hasil Pajak	14.886.752.025,00	10.890.933.078,00	9.622.440.054,00	9.692.978.286,00	8.013.388.807,00	-2,27
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3.890.702.698,00	10.672.360.312,00	5.853.641.393,00	2.869.358.497,00	8.151.307.239,00	2,52
3	Dana Alokasi Umum	296.397.490.000,00	332.780.291.937,00	344.941.712,00	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00	1,93
3	Dana Alokasi Khusus	30.307.130.000,00	31.072.890.000,00	49.424.430.000,00	96.833.140.486,00	75.861.363.283,00	2,47
4	Dana Penyesuaian	31.421.831.000,00	34.786.227.000,00	34.203.008.000,00	0,00	7.500.000.000,00	1,64
5	Dana Alokasi Desa			8.191.432.000,00	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00	2,44
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	12.075.117.000,00	16.246.923.027,00	0,00	20.681.044.180,00	22.184.455.403,00	2,67
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi			19.686.570.239,00	0,00	0,00	
8	Bantuan Keuangan				2.435.248.000,00	1.750.000.000,00	-1,89
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.597.905.280,00	3.375.300.000,00	13.291.804.000,00	2.603.000.000,00	164.841.600,00	-2,84
1	Hibah	2.075.800.000,00	1.470.300.000,00	6.708.204.000,00	2.589.000.000,00	0,00	2,27
2	Dana darurat						
3	Pendapatan Lainnya	522.105.280,00	1.905.000.000,00	6.583.600.000,00	14.000.000,00	164.841.600,00	-8,55

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 diatas, dimana penerimaan pendapatan mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016, sedangkan pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan selama tahun anggaran 2017 adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai pemotongan dana transfer baik DAU maupun DAK. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah 2,03%. Berdasarkan data diatas dapat dilakukan analisis tentang pendapatan daerah .

Sedangkan untuk proyeksi pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.19
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	PENDAPATAN	622.904.840.571,81	625.593.312.159,89	628.289.566.280,03	631.020.808.718,63	633.760.083.630,03
A	Pendapatan Asli Daerah	65.813.499.918,48	66.047.542.560,31	66.282.417.492,76	66.521.034.195,73	66.760.509.918,84
1	Pajak Daerah	5.770.300.304,50	5.790.820.354,78	5.811.413.377,42	5.832.334.465,58	5.853.330.869,66
2	Retribusi Daerah	4.161.878.566,75	4.176.678.828,95	4.191.531.723,09	4.206.621.237,29	4.221.765.073,75
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.679.931.948,36	12.725.023.681,44	12.770.275.767,46	12.816.248.760,22	12.862.387.255,76
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	43.201.389.098,87	43.355.019.695,15	43.509.196.624,79	43.665.829.732,64	43.823.026.719,68
B	Dana Perimbangan	549.557.219.744,25	551.511.527.351,45	553.472.784.768,58	555.465.286.793,75	557.464.961.826,21
1	Dana bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	18.359.685.748,96	18.424.975.535,42	18.490.497.502,12	18.557.063.293,13	18.623.868.720,99
2	Dana Alokasi Umum	376.465.150.356,20	377.803.916.695,27	379.147.443.887,52	380.512.374.685,52	381.882.219.234,39
3	Dana Alokasi Khusus	82.332.751.060,95	82.625.538.628,72	82.919.367.392,84	83.217.877.115,46	83.517.461.473,07
4	Dana Penyesuaian	27.597.794.110,00	27.695.935.990,47	27.794.426.878,13	27.894.486.814,89	27.994.906.967,43
5	Dana Alokasi Desa	23.561.282.537,21	23.645.069.979,25	23.729.155.381,96	23.814.580.341,34	23.900.312.830,57
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	21.240.555.930,93	21.316.090.522,32	21.391.893.726,00	21.468.904.543,41	21.546.192.599,77
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi					
8	Bantuan Keuangan					
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.534.120.909,08	8.034.242.248,13	8.534.364.018,69	9.034.487.729,15	9.534.611.884,98
1	Hibah	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	9.500.000.000,00
2	Dana darurat					
3	Pendapatan Lainnya	34.120.909,08	34.242.248,13	34.364.018,69	34.487.729,15	34.611.884,98

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Proyeksi pendapatan Kota Sawahlunto dengan rata-rata pertumbuhan 2,03%, maka didapat angka-angka seperti yang tampak pada tabel diatas. Jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh diasumsikan langsung digunakan untuk membelanjai belanja yang ada seperti tampak pada tabel 3.7.

3.4.1. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Presentase Sumber Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto TA 2015-2017

NO	URAIAN	TA 2015	%	TA 2016	%	TA 2017	%
	PENDAPATAN	537.483.538.214,19		588.738.442.431,54		584.882.133.253,37	
A	Pendapatan Asli Daerah	52.268.500.528,19	9,72	53.388.553.982,54	9,07	62.459.787.921,37	10,68
1	Pajak Daerah	4.099.494.574,00	0,76	4.686.268.341,00	0,79	5.337.144.416,00	0,91
2	Retribusi Daerah	2.540.177.543,00	0,47	2.701.515.584,00	0,46	3.828.111.382,00	0,65
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.280.727.904,00	1,54	10.095.311.774,00	1,71	10.290.929.176,00	1,76
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	37.348.100.507,19	6,95	35.905.458.283,54	6,09	43.003.602.947,37	7,35
B	Dana Perimbangan	471.923.233.686,00	87,80	532.746.888.449,00	90,49	522.257.503.732,00	89,29
1	Dana bagi Hasil Pajak	9.622.440.054,00	1,79	9.692.978.286,00	1,65	8.013.388.807,00	1,37
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.853.641.393,00	1,09	2.869.358.497,00	0,48	8.151.307.239,00	1,39
3	Dana Alokasi Umum	344.941.712,00	0,06	381.838.808.000,00	64,86	375.131.128.000,00	64,14
3	Dana Alokasi Khusus	49.424.430.000,00	9,19	96.833.140.486,00	16,45	75.861.363.283,00	12,97
4	Dana Penyesuaian	34.203.008.000,00	6,36	0,00		7.500.000.000,00	1,28
5	Dana Alokasi Desa	8.191.432.000,00	1,52	18.396.311.000,000	31,25	23.665.861.000,00	4,05
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	0,00		20.681.044.180,00	3,51	22.184.455.403,00	3,79
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi	19.686.570.239,00	3,67	0,00		0,00	
8	Bantuan Keuangan			2.435.248.000,00	0,41	1.750.000.000,00	0,29
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.291.804.000,00	2,47	2.603.000.000,00	0,44	164.841.600,00	0,03
1	Hibah	6.708.204.000,00	1,25	2.589.000.000,00	0,46	0,00	
2	Dana darurat						
3	Pendapatan Lainnya	6.583.600.000,00	1,22	14.000.000,00	0,01	164.841.600,00	0,03

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel 3.20 diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat yakni pada dana transfer berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Desa serta Dana Penyesuaian. Dimana rasionya mencapai 87-90% dari total pendapatan daerah Kota Sawahlunto. Sehingga nilai pendapatan asli daerah hanya berkisar 9%. Dan penerimaan pajak dan retribusi



daerah masih sangat rendah, dimana persentasenya hanya berkisar 1% dari jumlah pendapatan total. Sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari dividen penyertaan modal pada Bank Nagari dan BPR. Dan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan BLUD, BOS dan kapitasi JKN.

3.4.2. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Seperti pada tabel 3 kinerja realisasi pendapatan dibawah ini.

Tabel 3.21
Kinerja Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto
2013-2017

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		%	Ket								
	PENDAPATAN	97,98	UT	99,99	UT	98,52	UT	97,89	UT	96,06	UT
A	Pendapatan Asli Daerah	95,15	UT	107,38	OT	94,64	UT	89,93	UT	83,93	UT
1	Pajak Daerah	110,33	OT	94,88	UT	93,31	UT	95,90	UT	102,20	OT
2	Retribusi Daerah	101,18	OT	119,09	OT	86,62	UT	79,60	UT	93,83	UT
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100,29	OT	99,94	UT	100,32	OT	99,33	UT	81,43	UT
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	90,93	UT	110,62	OT	94,20	UT	87,74	UT	81,94	UT
B	Dana Perimbangan	98,89	UT	98,14	UT	96,98	UT	98,84	UT	97,76	UT
1	Dana bagi Hasil Pajak	101,40	OT	100,97	OT	75,26	UT	86,10	UT	74,64	UT
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	40,46	UT	71,19	UT	70,80	UT	162,78	OT	174,85	OT
3	Dana Alokasi Umum	100,00	E	98,75	UT	100,00	E	100,00	E	100,00	E
3	Dana Alokasi Khusus	100,00	E	100,00	E	98,25	UT	94,56	UT	84,64	UT
4	Dana Penyesuaian	100,00	E	100,00	E	80,43	UT	0,00	UT	100,00	E
5	Dana Alokasi Desa	0,00		0,00		100,00	E	100,00	E	100,00	E
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	110,49	OT	101,10	UT	100,45	OT	99,42	UT	104,82	OT
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi			0,00		0,00		0,00		0,00	
8	Bantuan Keuangan			0,00		0,00		95,30	UT	100,00	E
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah										
1	Hibah	58,74	UT	99,14	UT		OT	86,30	UT	0,00	
2	Dana darurat			0,00						0,00	
3	Pendapatan Lainnya	31,59	UT	100,00	E	177,89	OT	41,18	UT	82,90	UT

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto

Keterangan : OT (Over Target) = Pelampauan Target Pendapatan
 UT (Under Target) = Tidak Mencapat target yang ditetapkan
 E (Equal) = Sesuai dengan target yang ditetapkan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan Kota Sawahlunto baik itu dari segi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk 3 tahun terakhir berada pada posisi Under Target, dimana realisasi pendapatan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target dan upaya apa yang seharusnya diambil guna mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah akan melanjutkan upaya-upaya melalui:

- 1) Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan;
- 2) Pemantapan kelembagaan dan optimalisasi pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah;
- 4) Akurasi data terkait dengan dasar perhitungan pembagian dana



perimbangan;

- 5) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk peningkatan alokasi dana melalui berbagai bentuk program lainnya;
- 6) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam menyusun perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada kebijakan umum berikut, yaitu :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- c. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan berupa perluasan objek pendapatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan perlu dijamin agar pungutan tersebut tetap memungkinkan terpeliharanya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan kepentingan publik lainnya. Secara intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ada.

3.4.3. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;
- b. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

Upaya riil yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah melalui :

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi dengan memberikan pengertian tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/ retribusi sehingga mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak.
- c. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu. Upaya tersebut dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
- d. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
- e. Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.



3.4.4. Dana Perimbangan

Kebijakan umum dalam perencanaan dana perimbangan didasarkan pada pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2017 yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4.5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan umum dalam perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah;
- c. Penerimaan hibah yang berupa barang mempertimbangkan nilai manfaatnya sehingga dapat memberi manfaat yang optimal dan tidak membebani belanja daerah di kemudian hari;
- d. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah;
- e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2017

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	Anggaran	Realisasi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAPATAN	437.534.871.922,00	428.681.501.793,92	493.336.238.280,00	488.405.317.004,27	545.543.340.291,00	537.483.538.214,19	601.416.292.738,00	588.738.442.431,54	608.862.187.995,00	584.882.133.253,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.995.145.274,00	37.104.573.790,92	45.242.275.994,00	48.580.391.650,27	55.228.529.829,00	52.268.500.528,19	59.365.674.458,00	53.388.553.982,54	74.422.971.261,00	62.459.787.921,37
Pendapatan Pajak Daerah	2.887.270.000,00	3.185.508.186,00	4.416.600.000,00	4.190.396.080,04	4.393.362.163,00	4.099.494.574,00	4.886.500.000,00	4.686.268.341,00	5.222.500.000,00	5.337.144.416,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.008.734.000,00	3.044.138.867,00	2.422.886.615,00	2.885.464.543,00	2.932.605.615,00	2.540.177.543,00	3.394.068.800,00	2.701.515.584,00	4.079.675.450,00	3.828.111.382,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.318.321.708,00	8.342.355.040,00	9.156.991.125,00	9.151.546.652,00	8.254.637.151,00	8.280.727.904,00	10.163.356.258,00	10.095.311.774,00	12.637.608.741,00	10.290.929.176,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.780.819.566,00	22.532.571.697,92	29.245.798.254,00	32.352.984.375,23	39.647.924.900,00	37.348.100.507,19	40.921.749.400,00	35.905.458.283,54	52.483.187.070,00	43.003.602.947,37
PENDAPATAN TRANSFER	393.353.095.048,00	388.979.022.723,00	444.705.962.286,00	436.449.625.354,00	486.613.872.702,00	471.923.233.686,00	539.016.618.280,00	532.746.888.449,00	534.240.375.134,00	522.257.503.732,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	351.002.398.048,00	345.482.074.723,00	393.849.810.286,00	385.416.475.327,00	424.491.207.363,00	418.033.655.447,00	515.659.532.700,00	509.630.596.269,00	503.825.086.134,00	490.823.048.329,00
Dana Bagi Hasil Pajak	14.680.899.921,00	14.886.752.025,00	10.786.614.850,00	10.890.933.078,00	12.786.242.000,00	9.622.440.054,00	11.257.326.850,00	9.692.978.286,00	10.735.742.009,00	8.013.388.807,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.616.878.127,00	3.890.702.698,00	14.990.539.436,00	10.672.360.312,00	8.267.751.363,00	5.853.641.393,00	1.762.708.000,00	2.869.358.497,00	4.662.004.125,00	8.151.307.239,00
Dana Alokasi Umum	296.397.490.000,00	296.397.490.000,00	336.999.766.000,00	332.780.291.937,00	344.941.712.000,00	344.941.712.000,00	381.838.808.000,00	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00	375.131.128.000,00
Dana Alokasi Khusus	30.307.130.000,00	30.307.130.000,00	31.072.890.000,00	31.072.890.000,00	50.304.070.000,00	49.424.430.000,00	102.404.378.850,00	96.833.140.486,00	89.630.351.000,00	75.861.363.283,00
Dana Alokasi Desa					8.191.432.000,00	8.191.432.000,00	18.396.311.000,00	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00	23.665.861.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	31.421.831.000,00	31.421.831.000,00	34.786.227.000,00	34.786.227.000,00	42.524.760.000,00	34.203.008.000,00	-	-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	31.421.831.000,00	31.421.831.000,00	34.786.227.000,00	34.786.227.000,00	42.524.760.000,00	34.203.008.000,00	-	-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	10.928.866.000,00	12.075.117.000,00	16.069.925.000,00	16.246.923.027,00	19.597.905.339,00	19.686.570.239,00	23.357.085.580,00	23.116.292.180,00	22.915.289.000,00	23.934.455.403,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.928.866.000,00	12.075.117.000,00	16.069.925.000,00	16.246.923.027,00	19.597.905.339,00	19.686.570.239,00	20.801.837.580,00	20.681.044.180,00	21.165.289.000,00	22.184.455.403,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan							2.555.248.000,00	2.435.248.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.186.631.600,00	2.597.905.280,00	3.388.000.000,00	3.375.300.000,00	3.700.937.760,00	13.291.804.000,00	3.034.000.000,00	2.603.000.000,00	198.841.600,00	164.841.600,00
Pendapatan Hibah	3.534.000.000,00	2.075.800.000,00	1.483.000.000,00	1.470.300.000,00	-	6.708.204.000,00	3.000.000.000,00	2.589.000.000,00		
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pendapatan Lainnya	1.652.631.600,00	522.105.280,00	1.905.000.000,00	1.905.000.000,00	3.700.937.760,00	6.583.600.000,00	34.000.000,00	14.000.000,00	198.841.600,00	164.841.600,00
Jumlah	437.534.871.922,00	428.681.501.793,92	493.336.238.280,00	488.405.317.004,27	545.543.340.291,00	537.483.538.214,19	601.416.292.738,00	588.738.442.431,54	608.862.187.995,00	584.882.133.253,37



Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA DAERAH	495.087.917.938,00	415.971.618.340,89	535.419.239.942,10	453.594.509.165,74	620.844.550.768,60	547.268.450.211,56	600.084.082.082,00	542.642.593.634,12	585.566.389.555,98	522.380.939.161,19
Belanja Tidak Langsung	264.992.321.532,00	221.659.710.363,79	297.106.288.395,10	253.921.351.499,74	267.244.721.225,60	241.839.283.342,56	240.433.678.595,00	227.071.046.047,77	222.714.740.383,00	202.200.309.645,19
Belanja Pegawai	229.608.458.344,00	192.263.580.319,00	286.336.286.384,10	245.084.592.122,47	239.762.121.963,60	217.093.345.893,00	227.797.743.935,00	215.514.779.305,00	211.980.429.223,00	192.528.893.245,00
Belanja Bunga	1.225.000.000,00	1.001.057.845,79	1.500.000.000,00	1.446.059.009,27	1.500.000.000,00	1.419.502.759,60	1.500.000.000,00	1.439.716.554,77	1.500.000.000,00	1.460.185.072,19
Belanja Subsidi	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	11.652.448.950,00	10.078.163.154,00	4.431.529.400,00	3.453.141.002,00	3.348.782.500,00	2.060.000.000,00	10.367.803.040,00	9.908.257.933,00	7.957.273.000,00	7.271.241.900,00
Belanja Sosial	300.000.000,00	247.308.400,00	961.560.000,00	840.358.500,00	250.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	17.304.564.400,00	13.540.891.407,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	451.849.838,00	451.849.838,00	476.912.611,00	467.832.866,00	21.633.816.762,00	21.266.434.689,96	-	-	527.038.160,00	527.038.160,00
Belanja Tidak Terduga	4.200.000.000,00	4.076.859.400,00	3.400.000.000,00	2.629.368.000,00	750.000.000,00	-	668.131.620,00	208.292.255,00	750.000.000,00	412.951.268,00
Belanja Langsung	230.095.596.406,00	194.311.907.977,10	238.312.951.547,00	199.673.157.666,00	353.599.829.543,00	305.429.166.869,00	359.650.403.487,00	315.571.547.586,35	362.851.649.172,98	320.180.629.516,00
Belanja Pegawai	39.856.921.580,00	33.553.649.786,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	111.801.036.900,00	92.065.340.163,00	134.234.248.816,00	111.588.243.599,00	200.538.826.202,00	169.985.487.989,00	207.254.556.499,00	182.738.691.416,05	219.021.110.733,98	196.437.479.686,67
Belanja Modal	78.437.637.926,00	68.692.918.027,75	104.078.702.731,00	88.084.914.067,00	153.061.003.341,00	135.443.678.880,00	152.395.846.988,00	132.832.856.170,30	143.830.538.439,00	123.743.149.829,33
Jumlah	495.087.917.938,00	415.971.618.340,89	535.419.239.942,10	453.594.509.165,74	620.844.550.768,60	547.268.450.211,56	600.084.082.082,00	542.642.593.634,12	585.566.389.555,98	522.380.939.161,19
TRANSFER	-	-	22.711.425.180,00	18.798.454.645,00	2.908.169.500,00	2.731.344.000,00	59.600.581.840,00	59.495.842.866,00	64.148.211.000,00	64.081.187.000,00
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	22.711.425.180,00	18.798.454.645,00	2.908.169.500,00	2.731.344.000,00	953.480.100,00	953.480.100,00	64.148.211.000,00	64.081.187.000,00
Bagi Hasil Pajak	-	-	18.249.412.180,00	15.028.794.645,00	2.908.169.500,00	2.731.344.000,00	953.480.100,00	953.480.100,00	930.220.000,00	863.196.000,00
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	4.462.013.000,00	3.769.660.000,00	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan kepada prov/kota/desa	-	-	-	-	-	-	58.647.101.740,00	58.542.362.766,00	63.217.991.000,00	63.217.991.000,00
Surplus/defisit	(57.553.046.016,00)	12.709.883.453,03	(64.794.426.842,10)	16.012.353.193,53	(78.209.379.977,60)	(12.516.255.997,37)	(58.268.371.184,00)	(13.399.994.068,58)	(40.852.412.560,98)	(1.579.992.907,82)
PEMBIAYAAN										
PENERIMAAN DAERAH	68.284.046.016,00	50.846.216.940,07	74.874.687.265,10	66.887.793.261,10	92.995.379.977,60	73.754.975.378,63	78.721.037.850,66	47.587.060.419,26	48.289.079.227,64	15.830.743.966,35
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	45.850.594.997,07	45.850.594.997,07	53.625.100.393,10	53.625.100.393,10	73.307.146.454,63	73.307.146.454,63	47.340.719.381,26	47.340.719.381,26	15.645.399.684,35	15.638.881.901,35
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	6.188.233.522,97	-	-	-	-	-



Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	Anggaran	Realisasi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-						
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	22.433.451.018,93	4.995.621.943,00	21.249.586.872,00	13.262.692.868,00					32.643.679.543,29	191.862.065,00
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	13.500.000.000,00	447.828.924,00	31.380.318.469,40	246.341.038,00		
Jumlah	68.284.046.016,00	50.846.216.940,07	74.874.687.265,10	66.887.793.261,10	92.995.379.977,60	73.754.975.378,63	78.721.037.850,66	47.587.060.419,26	48.289.079.227,64	15.830.743.966,35
PENGELUARAN DAERAH										
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-						
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.731.000.000,00	9.931.000.000,00	10.080.260.423,00	9.593.000.000,00	14.786.000.000,00	13.898.000.000,00	19.286.000.000,00	17.375.000.000,00	6.270.000.000,00	6.270.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-			1.166.666.666,66	1.166.666.666,33	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-						
Jumlah	10.731.000.000,00	9.931.000.000,00	10.080.260.423,00	9.593.000.000,00	14.786.000.000,00	13.898.000.000,00	20.452.666.666,66	18.541.666.666,33	7.436.666.666,66	7.436.666.666,66
Pembiayaan Neto	57.553.046.016,00	40.915.216.940,07	64.794.426.842,10	57.294.793.261,10	78.209.379.977,60	59.856.975.378,63	58.268.371.184,00	29.045.393.752,93	40.852.412.560,98	8.394.077.299,69
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	53.625.100.393,10	-	73.307.146.454,63	-	47.340.719.381,26	-	15.645.399.684,35	-	6.814.084.391,87



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Kota Sawahlunto

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui Kualitas pendidikan dapat dilihat dari rata-rata nilai Ujian nasional Siswa SMP/MTs di Kota Sawahlunto tahun 2017 adalah 53,64. Hal ini selalu menurun jika dilihat trendnya dalam tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2015, nilai rata-rata UN untuk SMP/MTs adalah 56,73 dan Tahun 2016 adalah 55,94. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan ini adalah masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kualitas tenaga pendidik di Kota Sawahlunto.

Kualitas pelayanan pendidikan di Kota Sawahlunto yang masih rendah dapat terlihat dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto tahun 2017 sebesar 9,93 Tahun, tertinggi ketujuh diantara Kab/Kota lain se Sumatera Barat. Akan tetapi jika di komparasi dengan Kota-kota lain di Sumatera Barat, ternyata angka ini merupakan yang terendah dibandingkan Kota-kota lain di Sumatera Barat. Angka Harapan Lama Sekolah yang merupakan proyeksi pelayanan pendidikan yang akan diterima oleh masyarakat kedepannya dengan asumsi-asumsi kualitas pendidikan saat ini juga masih rendah. Pada tahun 2017, AHLS Kota Sawahlunto 13,14 Tahun, tertinggi ke 11 (sebelas) dibanding Kabupaten/Kota lain Sesumatera Barat. Bahkan nilai AHLS Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota pun lebih tinggi dari Kota Sawahlunto. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas ekonomi masyarakat, akses terhadap sarana pendidikan, dan fasilitas pendukung terlaksananya proses pendidikan. Dilihat dari data yang ada, secara umum kondisi bangunan sekolah di Kota Sawahlunto sudah dalam kondisi baik. Akan tetapi karena jumlah penduduk yang sedikit dan daerah yang cukup luas (kepadatan Rendah), menyebabkan siswa yang tinggal di daerah terpencil mempunyai jarak tempuh ke sekolah yang jauh. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah murid di Sekolah tersebut. Selain itu sarana pendukung pendidikan seperti laptop guru, laboratorium komputer, infocus, dan bahkan fasilitas internet pun belum dimiliki sebagian besar sekolah di Kota Sawahlunto.

Kualitas dan kompetensi guru di Kota Sawahlunto juga akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota sawahlunto. Pada tahun 2017, terdapat 40,13 % tenaga pendidik Tingkat SD dan 36,30 % tenaga pendidik untuk tingkat SMP di Kota Sawahlunto yang belum disertifikasi. Angka ini masih jauh dari target jika seluruh guru harus memenuhi standar sertifikasi tertentu dalam penyeteraan kualitas guru. Selain itu, pada tahun 2017 masih terdapat 5,48 % guru yang berpendidikan belum setara S1. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam lima tahun kedepan. Selain itu, pemerataan guru yang berkualitas juga harus diperhatikan. Dari pengamatan langsung dilapangan, masih terdapat kecenderungan guru berkualitas dan berprestasi berada pada sekolah-sekolah pusat Kota dan favorit. Hal ini akan menyebabkan terjadinya favoritisasi beberapa sekolah dan sulitnya pemerataan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto. Aplikasi pendidikan berkarakter juga harus lebih ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih adanya kasus kenakalan remaja di Kota Sawahlunto.

4.1.2. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat Di Kota Sawahlunto

Hal ini terlihat dari rendahnya angka harapan hidup Kota Sawahlunto dibanding kab/kota lain di Sumatera Barat. Pada tahun 2017, angka harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto adalah sebesar 69,39 tahun. Angka ini meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,33 tahun. Jika dilihat dari perbandingan dengan kabupaten dan Kota lain se Sumatera Barat, ternyata angka harapan hidup di Kota Sawahlunto



merupakan tertinggi ke 10 (sepuluh). Hal ini memprihatinkan mengingat adanya kabupaten yang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari Kota Sawahlunto. Beberapa faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, baik ditingkat dasar maupun dilayanan rujukan.

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat terlihat dari Masih adanya masyarakat yang mempunyai jamban sesuai standar kesehatan. Kebiasaan masyarakat untuk Buang Air Besar pada kolam atau empang juga masih sulit ditinggalkan. Selain itu, kondisi sanitasi masyarakat juga masih buruk, terutama di kawasan kumuh. Hal ini tentunya menyebabkan rentannya masyarakat tersebut terserang penyakit dan infeksi. Kondisi lingkungan yang kurang bersih terutama didaerah sekitaran PLTU Sijantang juga sulit untuk diatasi karena kondisi sosial masyarakat yang terbiasa dengan lingkungan yang penuh debu bekas pembakaran PLTU tersebut.

Untuk pelayanan kesehatan, secara sarana Puskesmas, Pustu dan Oraktek dokter, dimasing-masing Kecamatan dan desa sudah cukup tersedia. Akan tetapi, perlunya penyediaan kelengkapan alat yang sesuai standar kebutuhannya masih perlu ditingkatkan. Jumlah tenaga kesehatan dimasing-masing Puskesmas, Pustu dan Pratek Dokter tersebut juga sudah tersedia. Akan tetapi jika memperhatikan jumlah dokter spesialis di Kota Sawahlunto khususnya pada satu-satunya Rumah Sakit Umum Daerah yang dipunyai Kota Sawahlunto masih kurang. Hal ini berdampak pada pemenuhan alat kesehatan yang menyesuaikan dengan ketersediaan dokter yang akan menggunakannya. Kualitas pelayanan kesehatan pun perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan kajian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Sawahlunto tahun 2017, diketahui tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan RSUD sudah baik yaitu sebesar 94,61. Akan tetapi, seiring dengan adanya RSUD Dharmasraya dan RSUD Sijunjung, perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan RSUD Sawahlunto ini

4.1.3. Tingginya Pembiayaan Infrastruktur Akibat Topografi Daerah Yang Berbukit, Kondisi Tanah Yang Labil Akibat Penambangan Di Beberapa Titik Sentral Kota Sawahlunto

Permasalahan utama dalam Pekerjaan umum dan Penataan ruang adalah tingginya pembiayaan infrastruktur akibat topografi daerah yang berbukit, kondisi tanah yang labil akibat penambangan di beberapa titik sentral Kota Sawahlunto. Hal ini menyebabkan sulitnya mewujudkan kondisi jalan yang mantap di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2017, dari total panjang jalan kota di Kota Sawahlunto sebesar 454,87 Km, terdapat 21,62 % jalan dengan kondisi rusak berat dan sedang. Hal ini tentunya akan selalu meningkat setiap tahun, terutama jika pemeliharaan jalan tidak rutin dilakukan. Tidak hanya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pada pembangunan sarana Gedung pemerintahan pun, harus betul-betul memperhatikan kondisi tanah.

Untuk penyediaan sumber-sumber air, terutama untuk air bersih dan sumber irigasi, dibutuhkan inovasi dan kejelian pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kondisi daerah yang terletak di kawasan-kawasan perbukitan secara otomatis akan mengakibatkan rendahnya ketersediaan sumber-sumber air masyarakat. Adanya Pamsimas dan Sanimas, telah banyak membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Selain itu, penyediaan air bagi lahan pertanian dan irigasi juga perlu ditingkatkan. Pembangunan embung dan sarana irigasi teknis perlu terus dibangun dan ditambah jumlahnya. Permasalahan yang harus menjadi perhatian adalah sumber air untuk irigasi tersebut.



Untuk permasalahan urusan penataan ruang, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga perlu ditingkatkan lagi. Masih adanya masyarakat yang membangun tanpa mengurus IMB mencerminkan krangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi konsep penataan ruang yang telah disepakati bersama. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW ini. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari pihak Aparat Hukum dan Pemerintah dalam menindaklanjutinya.

4.1.4. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

Permasalahan pokok dalam urusan perumahan dan permukiman ini adalah Menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Sulitnya memperoleh tanah untuk perumahan karena tanah banyak dikuasai oleh kuasa penambangan PT. BA dan PT. KAI. Selain itu, penguasaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan. Dibutuhkan kerjasama dan penyamaan persepsi tentang pengelolaan perumahan di Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto juga mempunyai Rumah Susun Sewa yang konsep awalnya peruntukannya adalah bagi masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, karena karakter masyarakat kurang mampu yang maunya tinggal di dalam lingkungan pedesaan yang masih banyak kerabat dan keluarganya, menyebabkan RUSUNAWA tersebut diisi oleh pegawai-pegawai dari Kepolisian dan Pegawai pemerintah Daerah, yang berasal dari luar Kota Sawahlunto.

4.1.5. Tingginya Angka Pengangguran Dan Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto adalah 6,19 %, turun dari tahun 2016 sebesar 7,18%. Walaupun turun, angka ini masih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi dan angka nasional. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Sumatera barat sebesar 5,58% yang juga lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran secara nasional, sebesar 5,50%. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Sawahlunto adalah Terbatasnya jumlah penawaran kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja relative rendah, rendahnya daya saing pencari kerja serta kurangnya skill dan keterampilan dari pengangguran atau pencari kerja. Sedikitnya jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Sawahlunto sebagai akibat dari rendahnya tingkat investasi di Kota Sawahlunto, menyebabkan sedikitnya kesempatan kerja yang ditawarkan kepada pencari kerja.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja, juga merupakan akumulasi dari permasalahan rendahnya daya saing tenaga kerja dan pengangguran di Kota Sawahlunto. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, terlihat bahwa 85,99% pengangguran di Kota Sawahlunto mempunyai pendidikan tertinggi SMA atau lebih rendah. Hal ini akan berdampak pada rendahnya produktivitas pengangguran ini apabila diterima bekerja pada perusahaan atau dunia usaha. Selain itu, jika hal ini tidak ditindaklanjuti melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan skill pengangguran, akan menyebabkan permasalahan pengangguran ini sulit diatasi.

4.1.6. Terdapatnya Beberapa Kawasan Yang Blankspot/Terisolir Sarana Dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi Dikarenakan Minimnya Infrastruktur Komunikasi

Sebagai daerah dengan luas wilayah yang cukup luas serta kepadatan penduduk yang rendah, menyebabkan rendahnya minat provider untuk membangun tower telekomunikasi di beberapa tempat di Kota Sawahlunto. Hal ini berakibat Masih terdapatnya beberapa kawasan yang blankspot/terisolir sarana dan prasarana komunikasi dan informasi



dikarenakan minimnya infrastruktur komunikasi. hal ini akan mendaji hambatan dalam upaya daerah mewujudkan Kota Sawahlunto SMART City. Selain itu Belum terbentuknya OPD khusus yang membidangi urusan komunikasi dan informasi juga menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan yang berbasis IT kepada masyarakat. Selain itu Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi dibidang komunikasi dan informasi dari sisi kuantitas dan kualitas juga menjadi masalah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan Kota Sawahlunto yang smart City.

4.1.7. Masih rendahnya kontribusi Parwisata terhadap Perekonomian daerah

Hal ini terlihat dari masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB serta terhadap PAD. Permasalahan dalam hal ini belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto sehingga kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto belum memberikan multiplier efek yang besar terhadap ekonomi daerah. Kunjungan ke Objek wisata tidak dibarengi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk berbelanja maupun untuk menginap di Kota Sawahlunto. Kunjungan ke Kota Sawahlunto masih sebatas kunjungan ke Objek Wisata, belum mengharuskan pengunjung untuk menginap di Kota Sawahlunto. Potensi ini sebetulnya terjawab jika pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto mampu mengedepankan potensi wisata tambang. Singkatnya, permasalahan ini adalah belum terintegrasikannya konsep wisata tambang dengan wisata modern di Kota Sawahlunto. Potensi wisata tambang dengan budaya sebagai rohnya belum tereksplorasi oleh pemerintah Kota Sawahlunto.

Selain itu, dari sisi pemasaran juga Belum optimalnya pemasaran wisata baik secara integral melalui koordinasi dengan pusat maupun promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan yang masih didominasi oleh pengunjung lokal, atau setidaknya hanya daerah tetangga terdekat. Sawahlunto belum dijadikan destinasi utama karena potensi wisata yang belum diketahui oleh konsumen. Selain itu, Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju beberapa objek wisata juga masih menjadi masalah dalam pengelolaan pariwisata. Peningkatan SDM Pelaku pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini.

4.1.8. Masih rendahnya pendapatan Petani

Masih rendahnya pendapatan petani di Kota Sawahlunto terlihat dari tingginya jumlah penduduk miskin dengan usaha utamanya petani. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas petani dan masih rendahnya pengelolaan hasil pasca panen oleh petani. Rendahnya produktivitas petani dapat dilihat dari rendahnya produktivitas sektor pertanian pada pembetulan PDRB di Kota Sawahlunto. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 PDRB sektor pertanian Kota Sawahlunto mengalami peningkatan 8,40 persen, namun untuk kontribusi terhadap PDRB kota hanya meningkat 0,045 persen. Ini berarti pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat dari pada sektor lainnya dan ini juga membuktikan bahwa pendapatan petani Kota Sawahlunto masih rendah. Selain itu, masih rendahnya nilai Tukar Petani di Kota Sawahlunto menggambarkan masih rendahnya tingkat pendapatan petani di Kota Sawahlunto. Untuk itu perlu peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pertanian seperti, peningkatan pendapatan petani yang dipengaruhi oleh produksi pertanian, Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan sarana prasarana yang mendukung sektor pertanian.

4.1.9. Rendahnya Nilai Perputaran Uang di Pasar-pasar Kota Sawahlunto

Rendahnya nilai perputaran uang di pasar-pasar Kota Sawahlunto disebabkan oleh beberapa faktor seperti Masih tingginya tingkat ketergantungan ketersediaan barang kebutuhan di pasar yang bersumber dari luar Kota Sawahlunto serta turunnya minat masyarakat untuk berbelanja di Kota Sawahlunto. Ketergantungan barang dari luar Kota Sawahlunto menyebabkan tingginya harga-harga barang di Kota



Sawahlunto dibanding dari asalnya. Selain itu Pada dua pasar utama pasar Sawahlunto dan Talawi jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto lebih banyak dibanding dengan pedagang kaki lima asli sawahlunto.

4.2. ISU STRATEGIS DAERAH

1. Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata serta Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter.

Pelaksanaan pendidikan berkarakter tetap menjadi isue yang harus diperhatikan dalam pembangunan sektor pendidikan tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan isu pembangunan pendidikan ditingkat provinsi dan Nasional. Konsep pendidikan berkarakter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus betul-betul diaplikasikan oleh sekolah dan guru. Perbaikan sikap mental anak, pengamalan ajaran agama, sikap kekeluargaan dan gotong royong serta karakter budaya dan adat istiadat yang mulai ditinggalkan generasi muda menjadi fokus perbaikan dalam mengembangkan pendidikan karakter ini. Perlunya pengawasan dan evaluasi secara rutin dari dinas pendidikan selaku leading Sektor pelaksanaan pendidikan di Kota Sawahlunto. Pendidikan berkarakter ini menjadi sangat penting sekarang ini sebagai proteksi akhlak anak dalam terhadap dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi yang mudah untuk diakses generasi muda dan penduduk usia sekolah.

Kecenderungan orangtua siswa menyekolahkan anaknya di Sekolah-sekolah tertentu menyebabkan pemerataan pendidikan menjadi isu yang penting untuk dikedepankan. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Zonasi sekolah. Akan tetapi beberapa sekolah yang sudah terlanjut dicap sebagai sekolah favorit, tetap menerima calon siswa baru jika nilai mereka diatas rata-rata. Hal ini dapat menghambat pemerataan pendidikan di Kota Sawahlunto.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas serta keluarga sehat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, kota Sawahlunto memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Sawahlunto sendiri dan sebagian penduduk dari kabupaten Sijunjung dan Kab. Tanah Datar. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Seiring dengan program nasional, perilaku hidup bersih dan



sehat ini akan dilanjutkan dengan program keluarga sehat dengan ukuran keberhasilan indeks keluarga sehat.

Kondisi-kondisi tersebut tentu menjadi penghambat terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kota Sawahlunto. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

3. Peningkatan peran lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat

Perbaikan karakter dan mental masyarakat tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta lembaga agama dan adat itu sendiri. Sesuai dengan falsafah Adat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, terlihat karakter masyarakat minangkabau pada umumnya, dan Sawahlunto khususnya, terbentuk dari kebiasaan adat istiadatnya yang didasari oleh agama islam. Hal ini juga dijadikan salah satu misi dalam pembangunan Provisni Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hal ini pulalah yang harus dijadikan kekuatan dalam pembangunan karakter masyarakat di Kota Sawahlunto lima tahun kedepan.

Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dibutuhkan peran lembaga keagamaan dan adat dalam memfilter dan mengantisipasi dampak negatifnya. Jika hal ini tidak diperhatikan, nilai-nilai keagamaan dan budaya akan hilang dengan sendirinya. Semangat kekeluargaan, gotong royong, hormat-menghormati dan saling menghargai harus selalu menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep kembali ke Surau yang juga merupakan aplikasi dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, perlu diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, peran ninik mamak dan alim ulama yang telah mengakar dalam karakter masyarakat Kota Sawahlunto sebagai panutan ditengah masyarakat harus mendapatkan porsi yang lebih dalam pembangunan Kota ke depan. Falsafah “Kanakan Sapanuruikan Parintah Mamak” menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah.

4. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Untuk mendukung Visi Kota menjadi Kota Wisata tambang yang berbudaya, harus disiapkan produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing sebagai suatu kemasan dengan pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata tidak akan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, jika tidak diimbangi dengan kejelian mengoptimalkan multiplier efek dari kunjungan wisatawan tersebut. Masyarakat kota sawahlunto harus mampu menyediakan produk-produk unggulan dari yang akan dijual kepada wisatawan. Inilah yang akan menjadi titik temu permasalahan peningkatan perekonomian masyarakat akibat aktivitas pariwisata. Peningkatan daya saing ini dimulai dari bahan baku yang berkualitas, proses pengolahan yang baik, pengemasan yang menarik dan sesuai standar serta promosi yang tepat sasaran. Produk unggulan yang baik merupakan hasil olahan yang menjadi ciri khas Kota Sawahlunto. beberapa produk yang bisa ditingkatkan kualitas dan daya saingnya seperti Songket Silungkang, Kerajinan Tangan Daeri Batu Bara, Penganan Khas Kota Sawahlunto (Kerupuk Kubang), Konveksi Baju, Makanan Soto, dan lainnya. Selain itu usaha pendukung pariwisata seperti Homestay dengan ciri khas suasana rumahan pun dapat dijadikan Ikon Kota sebagai Kota dengan Karakter Wisata.

Selain itu, inovasi dalam pengembangan wisata di Kota Sawahlunto juga sangat diperlukan. Adanya gab antara permintaan konsumen pariwisata dengan konsep pariwisata tambang yang ditawarkan,



mengharuskan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk dapat mengkolaborasikan atau mengintegrasikan antara Objek Wisata Modern/rekreasi dengan wisata Tambang atau wisata alam lainnya. Wisata Tambang yang dapat didefinisikan sebagai wisata minat khusus, membutuhkan inovasi dan ide kreatif untuk dipromosikan. Akan tetapi, objek ini akan bertahan lama karena merupakan ciri khas daerah yang tidak dimiliki daerah lain. Di sisi lain, objek wisata modern seperti Wisata Selfie dan Wisata Rekreasi, merupakan objek wisata yang booming tetapi bersifat sementara dan dapat diduplikasi oleh daerah lain.

5. Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perlu menjadi perhatian lebih dalam pembangunan Kota Sawahlunto kedepan. Perubahan paradigma aparatur agar lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, harus didukung oleh kualitas aparatur itu sendiri. Selain itu juga harus didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aparatur pemerintah di Kota Sawahlunto juga harus mampu memanfaatkannya dalam efisiensi pengelolaan dan birokrasi pemerintahan

6. Kesetaraan Pembangunan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas, gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selama ini, kampanye untuk keadilan bagi Lansia terlantar, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok marginal lainnya selalu digelorakan. Akan tetapi, khusus untuk Kota Sawahlunto, kampanye bagi kelompok-kelompok ini seakan hanya jadi alat politik semata. Kelompok ini seakan memang termarginalkan dalam pembangunan. Konsep pengarusutamaan Gender ini harus diaktualisasikan secara nyata dalam pembangunan. Kelompok-kelompok ini harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan Kota Sawahlunto lima tahun kedepan. Karena, selain menyangkut hati nurani, urusan Sosial ini merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Selain itu, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam pembangunan, sebagai upaya mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Layak Anak.

7. Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Pasca Tambang Oleh PT BA, PT KAI, Perusahaan Tambang Lainnya Dan Masyarakat

Status kepemilikan lahan di Kota Sawahlunto merupakan issue yang perlu dikedepankan dalam pembangunan Kota. Status Kota sebagai daerah bekas penambangan Batu Bara, bahkan beberapa Perusahaan masih melakukan penambangan di Kota Sawahlunto, dapat menjadi kendala yang serius dalam membangun Kota. Objek Wisata Danau Biru merupakan contoh terdekat terkait kepemilikan lahan tambang yang dapat digunakan untuk Objek Wisata. Letak Danau Biru yang berada dalam Wilayah Kuasa Penambangan suatu Perusahaan Swasta, membatasi ruang gerak pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan objek wisata tersebut.

Kepemilikan Aset PT.BA dan PT.KAI yang dapat dijadikan sebagai objek wisata tambang juga harus diselesaikan dengan baik. Konsep wisata tambang mengharuskan Kota Sawahlunto menjual ikon-ikon bekas penambang sebagai bukti sejarah keberadaan Tambang Batu bara tertua di Indonesia berada di Kota sawahlunto. status World Heritage dari UNESCO juga akan menuntut Kota Sawahlunto untuk selalu melestarikan bukti peninggalan-peninggalan bersejarah yang sebagainya



kepemilikannya ada pada PT. BA dan PT. KAI. Masalah kepemilikan ini akan menjadi dasar proses pelestarian kedepannya.

8. Tingginya Pencemaran Lingkungan Akibat Aktifitas PLTU Di Kota Sawahlunto serta pengurangan resiko bencana

Adanya Perusahaan Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) yang beroperasi di Kota Sawahlunto, juga memberikan masalah lingkungan yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya. Banyaknya debu akibat transportasi batu bara ke PLTU Sijantang ini menyebabkan terjadinya polusi udara. Ditambah lagi aktivitas pembakaran batubara yang juga menyebabkan debu sisa pembakaran ini berterbangan ditengah masyarakat. Keberadaan masyarakat yang terdampak polusi perusahaan Pembangkit listrik ini yang berada ditengah pemukiman masyarakat juga harus dicarikan solusinya, untuk meminimalisasi dampak negatif dari polusi udara ini.

Dokumen Perencanaan tata kelola Lingkungan hidup masih sangat minim, terlihat bahwa tidak adanya dokumen RPPLH. Dokumen ini sangat dibutuhkan dalam pencapaian SPM pada urusan Lingkungan hidup. Selain itu Pengawasan terhadap lingkungan hidup masih sangat kurang karena belum terdokumentasikan secara baik tata kelola Lingkungan di OPD terkait. Dari pelayanan persampahan Capaian pelayanan persampahan masih belum optimal, karena topografi kota yang curam sehingga menyulitkan dalam pelayanan persampahan.

Masih adanya kegiatan penambangan di beberapa Daerah, khususnya di Kecamatan Talawi dan Barangin harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Bagi kegiatan Penambangan Batu Bara dengan izin perusahaan, dampak lingkungannya dapat dimintai pertanggungjawaban perusahaan melalui Amdal Perusahaannya. Lahan bekas penambangan harus dilakukan reklamasi agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Akan tetapi, saat ini muncul beberapa kegiatan penambangan emas yang dikelola oleh rakyat yang juga akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak kalah beratnya dengan penambangan batubara. Penangan ini menjadi agak susah karena mereka melakukan kegiatan penambangan tanpa ada izin dari pihak yang terkait. Untuk mengantisipasi ini, diperlukan koordinasi secara terus menerus antara Pemerintah Provinsi, Kota Sawahlunto dan Aparat Penegak Hukum.

Selain itu, kondisi daerah yang berbukit dengan kemiringan lahan diatas 45 derajat, menyebabkan bencana longsor selalu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk diantisipasi setiap tahun. Daerah pusat kota, khususnya kecamatan Silungkang dan Lembah segar harus mempunyai kesiapsiagaan lebih dalam menghadapi bencana ini. Selain itu, daerah Barangin dan Talawi juga tidak lepas dari bahaya longsor dan tanah bergerak ini.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara langsung oleh masyarakat, makavisi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah

5.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2018-2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah **"Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"**. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, meliputi : **1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum; 3) Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.**

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Sawahlunto pada Tahap ke-4 tahun 2018-2023, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pengamalan keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif, serta Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahap ke-4 tahun 2018-2023, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.



Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam **RPJMN Tahun 2015-2019**, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Strategi Pembangunan Nasional yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, Meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/ karakter.
 - b. Dimensi pembangunan sector unggulan dengan prioritas, Meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan dan pariwisata dan industry.
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, Meliputi antar kelompok pendatapan dan antar wilayah dalam hal desa, pinggirahn, luar jawa dan kawasan timur.
3. Kondisi Sosial, Politik, Hukum dan Keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Antara lain kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi dan tata kelila dan reformasi birokrasi
4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWACITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.



2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalamkerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat retorasi sosial Indonensia.

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi di masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016-2021. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, dengan 4 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah :

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam Visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota disegala Bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, Pemerintah, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kandung. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan Visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “ SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA ” serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya Pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.



INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk yang yang Sawahlunto, baik itu Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Adat Istiadat, Infrastruktur, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

5.2. MISI

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui Blk
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor



Dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik

Misi ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera secara batin dan kembali ke tata kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Konsep meramaikan kembali rumah ibadah sebagai sarana dakwah dan sosial kemasyarakatan, diharapkan akan terwujud melalui misi ini. Pembangunan Islamic Center dan peningkatan kualitas rumah ibadah, serta penyediaan Guru Agama, Guru Mengaji, dan imam masjid yang berkualitas adalah beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan misi ini. Selain itu, peningkatan peran Ninik Mamak, dan alim Ulama serta tokoh masyarakat dalam pembentukan akhlak dan karakter masyarakat juga akan dilaksanakan dalam misi ini. Jika misi ini dapat terlaksana, diharapkan karakter Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata tambang yang berbudaya akan semakin kuat dan dijamin dalam kehidupan sehari-hari.

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto yang semakin baik, berkualitas dan produktif. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini dititikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kota Sawahlunto akan dijadikan perhatian utama dalam pengembangan ekonomi pada periode 2018-2023 ini. Selain itu, sektor industri pengolahan seperti Songket Silungkang, Kerupuk Kubang, Minyak Atsiri dan produk unggulan UMKM lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pembangunan Ekonomi lima tahun kedepan. Sebagai dasar utama peningkatan kualitas ekonomi ini akan dimulai dari peningkatan keterampilan dan kualitas Calon Pencari Kerja. Beberapa kegiatan strategis nantinya yang akan dilaksanakan seperti pendirian Bangunan untuk Balai Latihan Kerja, kerjasama dengan Perusahaan lain dalam penyerapan tenaga kerja, dan fasilitas magang ke luar negeri. Diharapkan, jika secara ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sudah baik, maka kesejahteraan masyarakat secara ekonomi akan terwujud.

Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahlunto, khususnya dari segi Pendidikan. Penekanan misi ini adalah pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam pendidikan, kreatif mengambil tindakan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik, pada misi ini juga akan diperhatikan aplikasi dari pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta pengamalannya oleh generasi muda pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat, melalui beasiswa dan reward kepada siswa berprestasi.

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Melalui misi ini diharapkan adanya upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bersih dalam pengelolaan tata pemerintahan dan mampu berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif ini akan terwujud jika aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan Kota Sawahlunto ini mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja dan mampu menterjemahkan



kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahlunto, khususnya dari segi kesehatan. Penekanan misi ini adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat ditingkat pelayanan dasar dan rujukan, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara jasmani, dan mempunyai kepercayaan diri dalam jaminan pelayanan kesehatannya. Hal ini akan diwujudkan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pada misi ini juga akan diperhatikan perilaku hidup sehat masyarakat, yang dimulai dari diri, keluarga dan lingkungannya.

Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk melanjutkan komitmen daerah dalam mencapai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto ini perlu inovasi, keseriusan, terkonsep secara jelas dan berkelanjutan. Melalui misi ini diharapkan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto betul-betul mampu menjadi mesin penggerak utama dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Yang menjadi perhatian utama pada misi ini adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, pembinaan atraksi wisata sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas promosi wisata agar lebih tepat sasaran dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan mendukung berkembangnya sektor pariwisata ini. Pariwisata diharapkan mampu memberikan multiplier efek yang positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Public yang Merata dan Memadai

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui misi ini, diharapkan ketersediaan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas seluruh sektor berada dalam kondisi baik, ketersediaan lingkungan yang bersih dan berkualitas, ketersediaan air bersih masyarakat yang layak, ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman yang lebih baik, serta pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Pada misi ini, juga akan memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, penanggulangan dan pengangan bencana.

Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya di Kota Sawahlunto. Misi ini merupakan pengejawantahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi kelompok marginal tersebut. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kesetaraan pembangunan pada Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan kesetaraan dan keberdayaan gender dalam pembangunan lima tahun kedepan.

Misi 9 : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien yang berbasis Informasi dan Teknologi. Melalui misi ini, diharapkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Sawahlunto akan cepat, efektif dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan. Jika hal ini terwujud, secara langsung akan mempermudah pelayanan



investasi ke Kota sawahlunto melalui kemudahan birokrasinya. Akses terhadap informasi potensi daerah juga akan mudah diketahui oleh masyarakat.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:



Tabel 5.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KOTA SAWAHLUNTO

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif / total masjid dan mushola) x 100 % , Total Jumlah Masjid dan mushola 2017 adalah 221	65	65	75	83	88	93	97	97
		1 Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif minimal sholat 5 waktu/ total masjid dan mushola) x 100 % , Total Jumlah Masjid dan mUshola 2017 adalah 221	65	65	75	83	88	93	97	97
			Persentase Rumah Ibadah agama lain yang aktif (%)	(Jumlah rumah ibadah agama lain yang aktif / total rumah ibadah agama lain) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
		2 Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	Persentase sarana peribadatan yang memadai	Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag	70	75	80	85	90	95	97	97



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang terdaftar di Kemenag	10	15	20	25	30	35	40	40
	2 Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota		Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	44	52	60	68	76	84	88	88
		1 Meningkatkan profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif/total komunitas budaya) x 100 %	44	52	60	68	76	84	88	88
		2 meningkatkan budaya asli sawahlunto yang lestari	Persentase budaya benda yang lestari	(jumlah cagar budaya yang lestari/total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100 %	57.98	59.66	61.34	63.02	64.7	66.38	68.06	68.06
			Persentase budaya tak benda yang lestari	(jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ total jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan) x 100 %	n/a	10.7	13.3	17.8	22.2	26.7	31.1	31.1



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK	1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5.75	5.78	5.8	5.83	5.85	5.88	5.91	5.91
			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52.7	55.81	58.24	61.02	64.17	67.01	70.7	70.7	
			Tingkat Kemiskinan (SDGs)	Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk x 100%	2.01	2,39	2,27	2,21	2,15	2,09	2,023	2,023	
		1	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Produktivitas tenaga kerja	PDRB ADHB /Tenaga Kerja(Juta/jiwa/tahun)	86.44	88.05	89.68	91.35	93.05	94.78	96.54	96.54
			Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6.19	6.15	6.03	5.65	5.02	4.82	4.53	4.53	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	423,483.33	466,255.15	513,346.92	565,194.95	622,279.65	685,129.89	754,328.01	754,328.01
		3 Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9,343	9,522.39	9,746.16	10,008.33	10,300.58	10,632.26	11,024.59	11,024.59
			Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	22,767	23,635.41	23,946.52	24,106.79	24,837.33	25,785.71	26,015.91	26,015.91
		4 Meningkatkan produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	309,537.83	321,300.27	335,758.78	350,867.92	368,411.32	390,516.00	417,852.12	417,852.12
3 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman,	1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72.30	73.71	75.33	76.99	78.62	80.67	80.67



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)												
		1 Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,14	13.36	13.62	13.92	14.22	14.57	14.96	14.96
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	9,93	10.09	10.29	10.52	10.75	11.01	11.30	11.30
		2 Meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP Kota Sawahlunto	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	53.9	54.9	55	55.1	55.2	55.4	55.6	55.6



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kasus Kenakalan Remaja menurun	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	7	9	8	7	5	3	2	2
			Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan) x 100 %	n/a	4	10	20	30	40	50	50
4	Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	57.64	63.41	69.18	74.95	80.72	86.49	86.49
		1 Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Peringkat Nilai LPPD tingkat Provinsi	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	5	3	2	1	1	1	1	1
		2 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	CC	B	B	B	B	B	BB	BB
			Nilai Maturitas SPIP	Penilaian Pengendalian Internal Pemerintah oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3					
		4 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	n/a	80	85	90	90	95	95	95
		5 meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	B	B	B	B	A	A	A	A
			Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	n/a	17	20	23	25	30	35	35



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto		Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
		1 Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat	1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72.30	73.71	75.33	76.99	78.62	80.67	80.67
		1 Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69.39	69.49	69.83	70.47	71.11	71.75	72.4	72.4



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dengan Indeks > 0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga dikali seratur persen	25	27	29	31	33	35	37	37
		2 Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68.01	95	95	96	97	98	99	99
			Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2	94.26	94.46	94.66	94.86	95.06	95.26	95.46	95.46
			Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %	1.91	≤ 2,51	≤ 2,40	≤ 2,35	≤ 2,30	≤ 2,25	≤ 2,20	≤ 2,20
6	Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan	1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto	PDRB sektor Pariwisata-SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60,733.09	71,119.37	77,373.30	83,627.23	89,881.16	96,135.09	102,389.01	102,389.01
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata / Total PAD) x 100 %	2.58	2.76	2.95	3.16	3.38	3.65	3.87	3.87



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	n/a	n/a	65	70	75	80	90	90
			Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	32.35	32.35	38.24	44.12	50	55.88	61.76	61.76
		2 berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	60.55	60.55	61.76	63.00	64.26	65.54	66.85	66.85
		3 tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	331,483	354,610	379,350	405,816	434,128	1,000,000	1,300,000	1,300,000
		4 tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	% persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	13.22	13.22	13.88	14.58	15.30	16.07	16.87	16.87
7	Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai	1 Menyediakan infrastruktur kota berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi	74.83	75.94	77.33	79.00	81.00	82.67	84.67	84.67



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan berwawasan lingkungan			baik/tiga								
		1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	53.93	54.96	72.66	74.35	76.44	78.13	80.22	80.22
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45.35	45.35	46.35	47.35	48.35	49.35	50.35	50.35
		2 meningkatkan kesiagaan kota dalamantisipasi dan penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah		n/a	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.57
		3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	56.79	56.79	58	60	64	67	70	70
			Persentase Ketaatan terhadap tataruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan RTRW	86	86	87	88	89	90	91	91



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6.4	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4	1	1
			Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	42.58	22.81	15	10	8	5	4	4
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	83	84	86	87	89	90	91	91
8	Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	1 Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang difasilitasi / Total Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial) dikali 100 %	18.64	13.17	59.76	84.89	89.84	94.78	100.00	100
		1 Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah	Persentase lansia yang terfasilitasi	(Jumlah lansia yang terfasilitasi / Total Jumlah lansia kurang mampu) dikali 100 %	19.74	19.25	19.25	100	100	100	100	100



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		kesejahteraan sosial lainnya										
			Persentase ABK yang terfasilitasi	(Jumlah ABK yang terfasilitasi / Total Jumlah ABK) dikali 100 %	44.74	22.87	100	100	100	100	100	100
			Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang disabilitas yang terfasilitasi / Total Jumlah penyandang disabilitas) dikali 100 %	4.64	7.47	19.79	39.57	59.35	79.13	100	100
			Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	(Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar yang terfasilitasi / Total Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar) dikali 100 %	5.43	3.09	100	100	100	100	100	100
		2 Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65.59	65.6	65.61	65.62	65.63	65.64	65.65	65.65
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan	95.52	95.53	95.54	95.55	95.56	95.57	95.58	95.58



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ketimpangan gender								
			Predikat Kota Layak Anak	Predikat bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
9	Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor	1 tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	n/a	n/a	26	26	36	36	41	260



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 meningkatkan kualitas smartcity dalam menarik investor	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2.02	2.3	2.7	3	3.3	3.6	3.8	3.8



BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto sesuai visi **DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KOTA SAWAHLUNTO

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik				
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis	1.	Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	Peningkatan kenyamanan tempat ibadah dengan konsep wisata religi yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat di tempat ibadah
		2.	Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	
2.	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	1	Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	Pemajuan pokok-pokok pikiran kebudayaan
		2	meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari	
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK				
1.	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1.	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja
		2.	Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	Peningkatan kualitas produk unggulan daerah
		3.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Peningkatan kemampuan daya beli dan kemauan untuk berbelanja di Kota Sawahlunto bagi masyarakat
		4.	Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian dan Perkebunan
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)				
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota	1.	Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Penyediaan Pelayanan, sarana dan Prasarana pendidikan serta



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Tujuan		Sasaran		Strategi
	Sawahlunto	2.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	tenaga pendidik yang berkualitas, terjangkau dan merata
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1.	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
		2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
		3.	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik	Perbaikan sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan
		4.	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	
		5.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas dan moral Sumber Daya Aparatur dengan konsep pemerintah yang melayani bukan dilayani
2.	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	1.	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Peningkatan Moral, Etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat				
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan
		2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan serta Peningkatan kualitas Sarana, Prasarana dan pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar dan Rujukan
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan				
1.	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto	1.	Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	Peningkatan kualitas dan Daya Tarik Destinasi Wisata
		2.	Berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan kualitas SDM Pelaku industri dan kelembagaan Pariwisata
		3.	Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	Peningkatan kualitas Promosi pariwisata yang tepat sasaran
		4.	Tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	Peningkatan kualitas kelembagaan kepariwisataan
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai				
1.	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota
		2.	meningkatkan kesiagaan kota dalamantisipasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Tujuan		Sasaran		Strategi
		3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan
		4.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Pencapaian Universal Akses 100-0-100
Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya				
1.	Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	1.	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
		2.	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor				
1.	tersedianya iklim investasi yang kondusif	1.	meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi

Untuk melaksanakan strategi tersebut, disusunlah arah kebijakan untuk lima tahun yang akan datang, seperti pada tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KOTA SAWAHLUNTO

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA					
Arah Kebijakan					
2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik					
Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan					
Menyediakan Penyuluhan Hukum Keluarga Islami kepada Masyarakat terkait pernikahan, keluarga dan kehidupan bermasyarakat					
Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz					
Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan					
Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas					
			Menyediakan dan meningkatkan kualitas imam di masjid-masjid yang berkualitas setara Lc		
Membangun Islamic Center					



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah				
Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya				
Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya, kreativitas, dan produktivitas				
Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum				
Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya				
Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat				
Mendorong peningkatan kunjungan wisata religi				
Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan				
Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka				
Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan				
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK				
Menyiapkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja yang berkualitas dan sesuai standar				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional,				
Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi				
Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri				
Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.				
melakukan kerjasama magang ke daerah lain dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan professional				
Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri				
Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri				
Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto				
Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah				



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)				
Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir				
Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan				
Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif				
		Menjadikan muaro kalaban sebagai terminal barang dan pasar Grosir silungkang		
Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan				
Melakukan Revitalisasi tanaman coklat dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak				
Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak				
Memfasilitasi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan kepada masyarakat				
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi				
Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan				
Penguatan peran pendidikan dalam menanamkan persepsi positif bahwa profesi petani yang awalnya dianggap profesi yang “rendah” menjadi profesi yang terhormat dan bergengsi.				
Pembukaan akses lahan-lahan terlantar untuk petani atau calon petani sehingga dapat produktif.				
Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial				
Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan				
Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran				
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)				
Peningkatan kualitas guru sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik				
Melakukan kerjasama dengan guru di daerah lain dalam bentuk magang guru dan studi banding				
Pemerataan guru di setiap satuan pendidikan				
	Menyediakan jaminan pendidikan gratis 9 tahun melalui Kartu Sawahlunto Pintar atau sejenis			
Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah dan mengoptimalkan fungsi SKB				
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millennial, nyaman dan menyenangkan secara merata				
Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini				



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
	Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto			
Menyiapkan regulasi tentang pemberian penghargaan dan reward terhadap siswa dan mahasiswa berprestasi				
menyediakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu serta siswa dan mahasiswa berprestasi				
Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi				
Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat				
Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI				
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi				
Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan				
Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif				
Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa				
Pengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan				
Memperbaiki sistem dan manajemen informasi keuangan daerah				
Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi				
Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah				
Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya				
Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD				
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda				
Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan				
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan				
Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD				
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat				
Mengembangkan Sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan				
	memperkuat kerjasama dengan daerah/negara lain sebagai upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan dalam melayani masyarakat			



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
memberikan fasilitas dan insentif khusus bagi dokter spesialis untuk menjamin kenyamanannya dalam bekerja di Sawahlunto				
melakukan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk mengembangkan sistem karir dan perjenjangan serta insentif finansial dan non-finansial untuk pemenuhan tenaga kesehatan				
Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar				
Menyusun, menetapkan dan melaksanakan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya				
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan			
Menjamin kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik				
Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia				
Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan				
Menyusun regulasi yang mendukung pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat				
Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi				
	menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)			
Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat				
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan				
Menyusun Perencanaan Teknis Pengembangan Pariwisata Sesuai RIPARDA				
	menumbuhkembangkan destinasi dan atraksi wisata sesuai potensi daerah			
Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus				
Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas				
Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus				
Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan				
Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto				
mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark				
Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata				
Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya				
Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang profesional				
Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran				
Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas				



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
	Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya			
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai				
Menyediakan infrastruktur jalan dan Jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah				
melakukan pembangunan jalan yang berkualitas dengan Kabupaten tetangga (Simpang Napar-Padang Sibusuk) ; (Perumnas Kolok-Sulit Air)				
	Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban			
Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto				
	Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Rest Area Muaro Kalaban agar lebih representatif			
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata				
Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum				
Meningkatkan pelayanan moda transportasi Kota				
Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api				
Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan				
Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperjelas status hukum kepemilikan tanah di Kota Sawahlunto				
Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana				
Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial				
Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota				
Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya				
Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas				
meningkatkan pengelolaan terhadap sumber daya air				
menjaga ekosistem hutan sebagai kawasan DAS				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman				
Melakukan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat				
Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat				
Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi				
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana				
Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana				
Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sector				



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Arah Kebijakan

2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana				
Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
menyediakan Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana				
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana				
meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana				
Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan				
Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah				
Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendalian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan				
Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan				
meningkatkan kesadaran masyarakat pemanfaatan ruang				
meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang				
mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota				
meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata				
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan				
Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,				
Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup				
Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				
Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Kota				
Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah				
Penyempurnaan dan validasi data PMKS Kota Sawahlunto				
Memberikan bantuan dan fasilitasi permukiman, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				
Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				
	Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya			
Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana				



Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
melakukan pemilahan data berdasarkan gender				
perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender				
menerapkan anggaran berbasis gender				
Pemenuhan hak anak dalam setiap aspek pembangunan				
Misi 9 : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor				
menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city				
	menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi			
Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi				
meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah				
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan				
Memberikan kemudahan bagi investor				
Meningkatkan Koordinasi sampai kerjasama dengan perantau dalam membangun kota dan peningkatan ekonomi kota				

Dari arah kebijakan yang telah diuraikan pada tabel diatas, maka disusunlah tema pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tahun 2019 : Peningkatan kualitas informasi dan pelayanan pembangunan yang berkeadilan dan tepat sasaran.
2. Tahun 2020 : Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata serta penguatan karakter kota menuju wisata tambang yang berbudaya.
3. Tahun 2021 : Melanjutan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata dalam mewujudkan wisata tambang yang berbudaya dan pengembangan ekonomi lokal.
4. Tahun 2022 : Penguatan ekonomi lokal berbasiskan potensi dan inovasi daerah serta keunggulan pariwisata.
5. Tahun 2023 : Mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya sebagai Ikon perekonomian daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi tersebut diatas, maka disusunlah program Pembangunan daerah yang strategis untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sarasan sesuai strategi sebagai berikut :



Tabel 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KOTA SAWAHLUNTO

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik																			
Tujuan 1.1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif / total masjid dan mushola) x 100 %, Total Jumlah Masjid dan Mushola 2017 adalah 221	65	-	65	555.00	75	8,490.79	83	7,200.00	88	7,400.00	93	7,190.00	97	8,190.00	97	39,025.79	
Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif minimal sholat 5 waktu/ total masjid dan mushola) x 100 %, Total Jumlah Masjid dan Mushola 2017 adalah 221	65	-	65	-	75	7,990.79	83	6,700.00	88	6,900.00	93	6,690.00	97	7,690.00	97	35,970.79	
	Persentase Rumah Ibadah agama lain yang aktif (%)	(Jumlah rumah ibadah agama lain yang aktif / total rumah ibadah agama lain) x 100 %	100		100		100		100		100		100		100		100	-	
Program Pembinaan Keagamaan (PD)	Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun	(jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %	n/a	-	20	-	25	7,990.79	28	6,700.00	30	6,900.00	40	6,690.00	50	7,690.00	50	35,970.79	Bagian Kesra, Setdako
	Persentase Imam Masjid yang berkualitas	(Jumlah Imam tetap dimasjid yang berijazah Lc atau setara/ Jumlah Imam Tetap Masjid) x 100 %	n/a	-	n/a	-	0	-	10	-	15	-	25	-	30	-	30	-	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 1.1.2 : Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	Persentase sarana peribadatan yang memadai	Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag	70	-	75	555.00	80	500.00	85	500.00	90	500.00	95	500.00	97	500.00	97	3,055.00	
	Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang terdaftar di Kemenag	10	-	15	-	20	-	25	-	30	-	35	-	40	-	40	-	
Program Peningkatan Kualitas Sarana peribadatan (PD)	Persentase sarana peribadatan yang memadai	Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag	70	-	75	555.00	80	500.00	85	500.00	90	500.00	95	500.00	97	500.00	97	3,055.00	Bagian Kesra, Setdako
	Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang terdaftar di Kemenag	10	-	15	-	20	-	25	-	30	-	35	-	40	-	40	-	
Tujuan 1.2 : Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	44	2,642.78	52	5,173.67	60	3,710.37	68	6,240.49	76	5,678.92	84	4,687.36	88	4,604.39	88	35,838.52	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	44	192.08	52	352.54	60	352.85	68	716.46	76	408.71	84	685.90	88	687.90	88	3,028.09	
Program Pengembangan Nilai Budaya (PD)	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	Jumlah Kelompok Seni yang mandiri/ Jumlah Kelompok seni yang ada (%)	0.25	-	4.4	176.27	8.9	352.85	13.3	716.46	13.3	408.71	13.3	685.90	13.3	687.90	13.3	3,028.09	Dinas Permusyawaratan dan Peninggalan Bersejarah
	Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	Jumlah Kelompok Budaya yang mandiri/ Jumlah Kelompok Budaya yang ada (%)	40	-	40	-	56	-	64	-	72	-	80	-	84	-	84	-	
	Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)	Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)	43	192.08	45	176.27													
	Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)	Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)	43		44														
	Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)	Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)	18		19														
Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya budaya asli Sawahlunto yang lestari	Persentase budaya benda yang lestari	(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100 %	57.98	2,450.70	59.66	4,821.13	61.34	3,357.52	63.02	5,524.03	64.7	5,270.21	66.38	4,001.46	68.06	3,916.49	68.06	32,810.43	
	Persentase budaya tak benda yang lestari	(jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ total jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan) x 100 %	n/a		10.7		13.3		17.8		22.2		26.7		31.1		31.1		



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		2023				
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PD)	Persentase budaya benda yang lestari	(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100 %	0	2,390.25	0	4,492.68	61.34	1,981.12	63.02	3,523.73	64.7	1,933.53	66.38	2,196.16	68.06	2,171.27	68.06	16,298.49	Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah
	Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan	Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan	0	0	0	0	0	0											
	- . Buku (Buah)	- . Buku (Buah)	2	0	1	0	0	0											
	- . Film (Buah)	- . Film (Buah)	0	0	0	0	0	0											
	Jumlah Museum dikelola (buah)	Jumlah Museum dikelola (buah)	6	0	6	0	0	0											
	Angka Kunjungan Museum (buah)	Angka Kunjungan Museum (buah)	31,839	0	31,062	0	0	0											
	Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)	Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)	1	0	4	0	0	0											
	Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/Kawasan)	Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/Kawasan)	4	0	4	0	0	0											
	Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)	Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)	2	0	20	0	0	0											
	Jumlah Pengunjungan Infobox (Orang)	Jumlah Pengunjungan Infobox (Orang)	10653	0	8549	0	0	0											
	Jumlah Pengunjungan Iptek Center (Orang)	Jumlah Pengunjungan Iptek Center (Orang)	0	0	1878	0	0	0											



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)	Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)	3	0	4	0	0	0											
Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD)	Persentase budaya tak benda yang lestari	(jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ total jumlah objek pemajuan kebudayaan) x 100 %	0	60.45	0	328.45	13.3	1,376.40	17.8	2,000.30	22.2	3,336.68	26.7	1,805.30	31.1	1,745.22	31.1	16,511.94	Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah
	Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah (Jenis)	Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah (Jenis)	14	0	14	0													
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK																			
Tujuan 2.1: Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5.75	3,542.88	5.78	14,243.56	5.8	5,220.56	5.83	14,675.68	5.85	14,430.02	5.88	14,371.38	5.91	15,110.15	5.91	78,051.35	
	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52.7		55.81		58.24		61.02		64.17		67.01		70.7		70.7		-
	Tingkat Kemiskinan (SDGs)	Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk x 100%	2.01		2.39		2.27		2.21		2.15		2.09		2.023		2.023		-
Sasaran 2.1.1 : Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Produktivitas tenaga kerja	PDRB ADHB /Tenaga Kerja(Juta/jiwa/tahun)	86.44	361.53	88.05	315.06	89.68	579.14	91.35	3,368.00	93.05	2,708.00	94.78	2,208.00	96.54	2,208.00	96.54	11,386.20	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6.19		6.15		6.03		5.65		5.02		4.82		4.53		4.53		-



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (PD)	Persentase angkatan kerja yang berkualitas (%)	(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi/ jumlah peserta pelatihan) x 100 %	n/a	283.68	n/a	216.33	0	500.57	60	3,178.00	70	2,518.00	80	2,018.00	90	2,018.00	90	10,448.90	PTSP Naker	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah Tenaga Kerja/Penduduk usia kerja) x 100 %	70.44	77.85	71.24	98.73	72.04	78.57	72.86	190.00	73.68	190.00	74.51	190.00	75.35	190.00	75.35	937.30	PTSP Naker	
Sasaran 2.1.2 : Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	423,483.33	1,049.04	466,255.15	8,160.92	513,346.92	1,649.57	565,194.95	3,163.05	622,279.65	3,900.00	685,129.89	3,428.00	754,328.01	3,704.00	754,328.01	24,005.54		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya kecil (unit)	0	664.00	0	5,799.84	50	962.34	50	1,910.05	50	1,782.00	50	2,009.00	50	2,205.00	1554	14,668.23	Dinas Koperindag	
	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	7	-		
	Jumlah IKM yang menerima Bantuan Kemasan Produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	Jumlah IKM yang menerima Bantuan Kemasan Produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	47	0	56	0														
	Jumlah Sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)	Jumlah Sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)	1	0	1	0														
	Jumlah Petenun Songket yang meningkat keterampilan (orang)	Jumlah Petenun Songket yang meningkat keterampilan (orang)	877	0	912	0														



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	32	0	35	0													
	Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami (Kelompok)	Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami (Kelompok)	6	0	12	0													
	Penerapan gugus kendali mutu (Kelompok)	Penerapan gugus kendali mutu (Kelompok)	12	0	12	0													
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PD)	jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 Pengrajin (sentra industri)	jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 Pengrajin (sentra industri)	0	164.00	0	1,641.96	1	-	1	125.00	1	180.00	1	235.00	1	290.00	7	2,471.96	Dinas Koperind ag
	Jumlah sentra industri potensial (Sentra)	Jumlah sentra industri potensial (Sentra)	14	0	14	0													
	Jumlah Pengrajin cendera mata dan Souvenir (IKM)	Jumlah Pengrajin cendera mata dan Souvenir (IKM)	19	0	24	0													
Program Penataan Struktur Industri (PD)	jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM)	Jumlah produk hasil IKM yang memenuhi standar	35	-	38	-	40	35.00	42	5.00	44	10.00	46	15.00	48	20.00	48	85.00	Dinas Koperind ag
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (PD)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)	0	221.04	75	719.12	50	652.23	50	1,123.00	50	1,928.00	50	1,169.00	50	1,189.00	375	6,780.35	Koperind ag
	Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	0	-	0	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	45	-	Koperind ag
	Jumlah kelompok yang menjadi koperasi(Koperasi)	Jumlah Kelompok yang menjadi koperasi	1		3														Koperind ag
	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (Orang)	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (Orang)	250	0	1330	0													Koperind ag



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah penerima fasilitas modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	Jumlah penerima fasilitas modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	50	0	285	0													Koperindag
Sasaran 2.1.3. : Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9,343	1,269.00	9,522.39	5,557.44	9,746.16	530.85	10,008.33	2,588.19	10,300.58	2,594.63	10,632.26	2,494.00	11,024.59	2,567.13	11,024.59	16,332.24	
	Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	22,767		23,635.41		23,946.52		24,106.79		24,837.33		25,785.71		26,015.91		26,015.91	-	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (PD)	Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (juta)	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	22767	1,235.00	23,635.41	5,388.55	23,946.52	530.85	25,106.79	2,528.19	25,837.33	2,524.63	26,785.71	2,414.00	27,015.91	2,477.13	27,015.91	15,863.35	Dinas Koperindag
	Jumlah Peluang untuk promosi (event)	Jumlah Peluang untuk promosi (event)	40	0	49	0													
Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan (PD)	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari Mikro menjadi kecil (Pedagang)	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari Mikro menjadi kecil (Pedagang)	300	34.00	322	168.89	342	-	362	60.00	382	70.00	402	80.00	422	90.00	2,532.00	468.89	Dinas Koperindag
	Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)	Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)	100	0	95	0													
Sasaran 2.1.4 : Meningkatkan produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	309,537.83	863.31	321,300.27	210.14	335,758.78	2,461.00	350,867.92	5,556.44	368,411.32	5,227.39	390,516.00	6,241.38	417,852.12	6,631.02	417,852.12	26,327.37	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023					
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program Peningkatan Produksi tanaman pangan (PD)	Jumlah Produksi padi (ton GKG)	Produktivitas x luas panen	0	-	0	-	0	-	14600	1,292.70	14700	1,180.31	14800	1,394.90	14900	1,534.10	14900	5,402.01	DKP3	
Program Peningkatan Produksi Perkebunan (PD)	Jumlah Produksi karet (ton)	Produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan	0	-	0	-	0	-	1255	824.60	1260	871.85	1265	1,104.90	1270	1,252.80	1270	4,054.15	DKP3	
	Jumlah Produksi kakao(ton)	Produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan	0	-	0	-	0	-	535	-	540	-	545	-	550	-	550	-	DKP3	
Program Peningkatan Produksi Peternakan (PD)	- Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)	(pemotongan tercatat +5 % (pemotongan tercatat) x 173,5	0	-	0	112.91	351.68	1,508.00	352.68	1,189.16	353.68	1,102.40	354.68	1,303.26	355.68	1,394.90	1768.4	6,610.63	DKP3	
	- Jumlah Produksi Telur (Ton)	Telur ayam ras : 60% x populasi x 10,6 kg	0	-	0	-	133.86	-	134.36	-	134.86	-	135.36	-	135.86	-	674.3	-	DKP3	
		Telur Itik 60% x populasi x 7,6 kg																		DKP3
		telur ayam buras :																		DKP3
		30% x populasi x 1,4 kg																		DKP3
	- Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton)	Daging ayam buras:	0	-	0	-	897.06	-	897.86	-	898.66	-	899.46	-	900.26	-	4493.3	-	DKP3	
		(150% x populasi) x 0,715 kg																		DKP3
		Daging ayam ras pedaging:																		DKP3
		(600% x 97% x populasi) x 0,825 kg																		DKP3
		Daging ayam petelur :																		DKP3
		(50% x populasi) x 0,825 kg																		DKP3
		Jumlah Populasi Ternak Sapi (Ekor)		6,051	208.31	6,464	0													DKP3
	Jumlah Populasi Ternak Kerbau(Ekor)		1,261		1,363														DKP3	
	Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)		2,941		2,943														DKP3	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (Ekor)		175,649		176,600														DKP3
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (Ekor)		54,154		54,770														DKP3
Program Peningkatan Produksi Perikanan (PD)	Jumlah Produksi ikan (Ton)	Jumlah Produksi perairan umum dan budidaya	214.98	124.00	216.05	-	216	-	216.5	959.14	217	864.96	217.5	996.44	218	938.08	869	3,758.62	DKP3
Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perikanan (PD)	Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	(perbandingan luas sawah dengan Hand Tractor)	0	-	1:20	-	1 : 18	539.00	1:16	717.34	1:14	704.37	1:12	870.58	1:10	970.34	1:10	3,801.63	DKP3
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PD)	Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba, bahan kimia/berbahaya dan residu pestisida (%)	Perbandingan Produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan		531.00	97.23	95.5	414.00	96	573.50	96.5	503.50	97	571.30	97.5	540.80	97.5	2,700.33	DKP3	
	tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)		94		95.2														DKP3
	Konsumsi Bahan pangan pokok perkapita per tahun (Kg)		91.98		91.6														DKP3
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)																			



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		2023				
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 3.1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71.13	21,335.49	72.3	11,127.02	73.71	16,335.29	75.33	13,188.07	76.99	14,331.09	78.62	14,348.44	80.67	14,935.90	80.67	90,904.79	
Sasaran 3.1.1 : Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13.14	18,398.72	13.36	9,021.50	13.62	14,416.00	13.92	10,798.48	14.22	11,607.68	14.57	11,478.17	14.96	12,266.72	14.96	74,750.22	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	9.93		10.09		10.29		10.52		10.75		11.01		11.3		11.3	-	
Program Pendidikan anak usia Dini (PD)	APK TK	(Jumlah Siswa TK/Jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99.4	589.11	99.5	1,107.80	99.5	1,460.00	99.7	581.10	99.9	1,024.25	100.2	642.39	101.3	810.61	101.3	6,079.40	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (PD)	Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	(Jumlah SD yang memiliki Sarana Prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh SD di Kota Sawahlunto) x 100 %	70	17,323.29	75	6,719.12	78	3,074.90	83	1,252.40	85	1,537.01	87	1,508.20	90	1,544.12	90	16,458.12	Dinas Pendidikan
	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	(Jumlah SMP yang memiliki Sarana Prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh SD di Kota Sawahlunto) x 100 %	75	-	80	-	82	-	85	-	88	-	93	-	95	-	95	-	Diknas
	APM SD	Angka Partisipasi Murni SD	96.23	-	96.5	-	96.6	-	96.7	-	96.8	-	96.9	-	97.1	-	97.1	-	Diknas
	APM SMP	Angka Partisipasi Murni SD	78.49	-	78.79	-	79.09	-	79.39	-	79.69	-	79.99	-	80.29	-	80.29	-	Diknas



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023					
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Persentase Siswa Baru dari Keluarga kurang mampu yang diberikan sarana pendidikan (%)	Persentase Siswa Baru dari Keluarga kurang mampu yang diberikan perlengkapan sekolah	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Diknas
Program Pendidikan Non Formal (PD)	Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal	Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal	81	486.32	85	371.94	85	1,440.60	89	540.80	91	463.36	93	459.41	95	453.24	95	3,975.74	Dinas Pendidikan	
Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (PD)	Angka Partisipasi Kasar SD (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	109.19	-	109.35	-	109.5	2,384.50	109.65	1,798.20	109.8	1,540.87	109.95	1,528.17	110.5	1,511.09	110.5	9,583.00	Dinas Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	104.08	-	104.25	-	104.4	-	104.6	-	104.75	-	104.9	-	105.5	-	105.5	-	Diknas	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (PD)	persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	56	2,093.61	56	822.64	59.2	6,056.00	60.56	6,625.98	64.7	7,042.19	67.6	7,340.00	70.4	7,947.66	70.4	38,653.96	Diknas	
																			-	
Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP Kota Sawahlunto	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	53.9	2,936.77	54.9	2,105.52	55	1,919.29	55.1	2,389.59	55.2	2,723.41	55.4	2,870.27	55.6	2,669.17	55.6	16,154.57		
	Kasus Kenakalan Remaja menurun	Kasus Kenakalan Remaja menurun	7		9		8		7		5		3		2		2			
	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan) x 100 %	n/a		4		10		20		30		40		50		50			



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pendidikan berkarakter (PD)	Kasus Kenakalan Remaja	Kasus Kenakalan Remaja	7	125.00	9	-	8	-	7	300.00	5	364.14	3	361.25	2	356.19	2	1,575.00	Dinas Pendidikan
	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 / total jumlah lulusan) x 100 %	0	-	4	-	10	-	20	-	30	-	40	-	50	-	50	-	Diknas
	Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%)	(Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter / Jumlah Sekolah) x 100 %	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	Diknas
Program Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa (PD)	Jumlah Siswa yang menerima Reward	Jumlah Siswa yang menerima Reward	302	1,112.41	352	690.87	382	555.00	482	561.00	582	1,096.70	682	1,088.00	782	1,072.77	2910	5,646.87	Dinas Pendidikan
	Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	0	-	200	-	540	-	550	-	560	-	570	-	580	-	2800	-	Diknas
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PD)	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik / Jumlah Total Guru) x 100 %	74.81	1,699.36	78.95	1,414.65	80.5	1,364.29	84.2	1,528.59	87.3	1,262.57	88.5	1,421.02	90.3	1,240.21	90.3	8,932.70	Dinas Pendidikan
	Persentase guru yang berkualifikasi min S1	(Jumlah Guru yang Kualifikasi Min S1 / Jumlah Total Guru) x 100 %	88.97	-	91.27	-	93.11	-	94.95	-	96.79	-	98.63	-	100	-	100	-	Diknas
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif																			
Tujuan 4.1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	13,025.44	57.64	17,859.86	63.41	16,470.60	69.18	16,958.90	74.95	17,897.97	80.72	18,737.91	86.49	21,076.31	86.49	91,341.27	
Sasaran 4.1.1 : Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Peringkat Nilai LPPD tingkat Provinsi	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	5	1,677.47	3	1,964.86	2	2,650.00	1	2,650.00	1	2,650.00	1	2,650.00	1	3,650.00	1	16,214.86	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab		
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %	0	1,051.17	0	1,321.14	100	1,500.00	100	1,500.00	100	1,500.00	100	1,500.00	100	2,500.00	100	9,821.14	Barenlitb angda dan seluruh OPD		
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)	(Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun)	5	0	7	0													Barenlitb angda dan Seluruh OPD		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Ekonomi kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %	0	100.00	0	102.99	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	2,602.99	Barenlitb angda
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)	2	0	2	0														Barenlitb angda	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Sosial Budaya kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %	0	26.30	0	40.73	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	790.73	Barenlitb angda
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)	3	0	4	0														Barenlitb angda	
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Fisik kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	3,000.00	Barenlitb angda
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Perencanaan Lokasi pada Kegiatan di RKPD dengan Peruntukan di RTRW	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Barenlitb angda



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Sasaran 4.1.2 : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	3,259.37	WTP	2,147.53	WTP	1,584.11	WTP	1,379.70	WTP	1,157.80	WTP	1,157.80	WTP	1,114.49	WTP	8,541.43		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah (PD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	0	1,893.46	0	842.73	WTP	89.88	WTP	51.94	WTP	51.34	WTP	51.34	WTP	46.30	WTP	1,133.52	BPKAD, Setdako	
	Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)	Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)	100		100														BPKAD, Setdako	
	Realisasi Belanja Daerah (%)	Realisasi Belanja Daerah thd APBD	94		94															BPKAD, Setdako
	Realisasi Penerimaan Daerah (%)	Realisasi Penerimaan Daerah terhadap Target	100		100															BPKAD, Setdako
	Realisasi PAD (%)	Realisasi PAD terhadap Target	100		100															BPKAD, Setdako
	Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)	Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)	95		95															BPKAD, Setdako
	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)	30		30															BPKAD, Setdako
	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100		100															BPKAD, Setdako
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD)	Penetapan APBD	kesesuaian Tanggal Penetapan APBD dengan aturan Permendagri	0	1,365.91	0	1,304.80	Tepat Waktu	1,494.23	Tepat Waktu	1,327.76	Tepat Waktu	1,106.46	Tepat Waktu	1,106.46	Tepat Waktu	1,068.19	Tepat Waktu	7,407.91	BPKAD, Setdako	
	Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)	Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)	Tepat Waktu		Tepat Waktu														BPKAD, Setdako	
Sasaran 4.1.3 : Terwujudnya Tata kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	CC	1,500.00	B	1,000.00	B	1,000.00	B	1,000.00	B	1,000.00	B	1,000.00	BB	1,000.00	BB	6,000.00		



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemerintahan yang baik	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian Pengendalian Internal Pemerintah oleh BPKP	Level 2		Level 2		Level 3												
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD)	Persentase tindak lanjut temuan	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/jumlah temuan) x 100 %	100	1,000.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	3,000.00	Inspektoral
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PD)	Nilai APIP	Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto	level 2	500.00	Level 3	500.00	Level 3	500.00	Level 3	500.00	Level 3	500.00	level 3	500.00	level 4	500.00	level 4	3,000.00	Inspektoral
																		-	
Sasaran 4.1.4 : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	n/a	66.00	80	8,818.31	85	7,065.00	90	7,391.67	90	7,970.00	95	9,070.00	95	10,270.00	95	50,584.98	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (PD)	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah propemperda) x 100 %	n/a	66.00	50	8,818.31	75	7,065.00	80	7,391.67	85	7,970.00	86	9,070.00	87	10,270.00	0	50,584.98	Sekretariat Dewan
																		-	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 4.1.5 meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	B	6,522.60	B	3,929.16	B	4,171.49	A	4,537.54	A	5,120.17	A	4,860.11	A	5,041.82	A	10,000.00	
	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	n/a		17		20		23		25		30		35		35		-
Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	Persentase Aparatur yang meningkat SDMya	(Jumlah Aparatur yang meningkat SDMya / Jumlah Aparatur) x 100 %	22	5,821.00	26	3,821.00	30	4,060.00	34	4,123.60	38	4,721.77	41	4,329.75	44	4,448.54	44	25,504.66	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan (PD)	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan (%)	(Jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen kependudukan / jumlah penduduk) x 100 %	98.26	701.60	98.44	108.16	100	111.49	100	413.94	100	398.40	100	530.36	100	593.28	100	1,032.72	Disdukcapil dan Kecamatan
	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)	(Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah penduduk) x 100 %	0	-	0	-	0	-	97.5	-	98	-	100	-	100	-	100	-	Disdukcapil dan Kecamatan
Tujuan 4.2 : meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	819.29	100	1,800.76	100	1,580.96	100	1,481.31	100	1,443.80	100	1,444.03	100	1,446.64	100	9,197.50	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 4.2.1 : Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	819.29	100	1,800.76	100	1,580.96	100	1,481.31	100	1,443.80	100	1,444.03	100	1,446.64	100	9,197.50	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu	(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)	100	226.94	100	1,286.55	100	832.73	100	699.86	100	601.07	100	659.29	100	597.73	100	4.677.23	Satpol PP dan Kesbang pol dan PBD
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal (PD)	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	592.35	100	514.22	100	370.47	100	282.23	100	220.76	100	252.41	100	278.65	100	1.918.74	Satpol PP dan Kesbang pol dan PBD
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat																			
Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71.13	28,979.26	72.3	12,179.96	73.71	31,541.57	75.33	20,557.16	76.99	21,866.00	78.62	24,167.11	80.67	24,484.41	80.67	134,796.21	
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69.39	1,187.22	69.49	745.80	69.83	1,168.57	70.47	1,594.16	71.11	1,636.00	71.75	1,702.11	72.4	1,715.41	72.4	8,562.05	
	Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga	25		27		29		31		33		35		37		37		



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		2023				
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	Persentase UKBM yang aktif	Jumlah UKBM yang melaksanakan kegiatan sesuai standar dibagi dengan Jumlah UKBM yang terdaftar	72	589.58	75	329.45	78	447.00	81	827.00	84	843.00	87	893.00	90	895.00	90	4,234.45	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD)	Angka kematian balita per 1.000	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu	2.77	299.09	2.51	247.71	2.35	394.30	2.17	404.81	2.01	415.28	1.97	426.01	1.75	436.90	1.75	2,325.01	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
	Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PD)	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan dikali seratus persen	100	50.33	100	1.98	100	16.92	100	7.35	100	7.72	100	8.10	100	8.51	100	50.58	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PD)	Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai Standar	Jumlah penderita TBC yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita TBC dikali seratus persen	100	231.66	100	153.99	100	230.35	100	220.00	100	225.00	100	230.00	100	230.00	100	1,289.34	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
	Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai Standar	Jumlah penderita DBD yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita DBD dikali seratus persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		2023				
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Penderita HIV yang mendapat pelayanan HIV sesuai Standar	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai Standar	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	Jumlah penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita Diabetes dikali seratus persen	100	16.56	100	12.67	100	80.00	100	135.00	100	145.00	100	145.00	100	145.00	100	662.67	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
	Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat dikali seratus persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita hipertensi dikali seratus persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sasaran 5.1.2 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68.01	27,792.04	95	11,434.16	95	30,373.00	96	18,963.00	97	20,230.00	98	22,465.00	99	22,769.00	99	126,234.16	
	Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2	94.26		94.46		94.66		94.86		95.06		95.26		95.46		95.46		Dinas Kesehatan dan RSUD



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %	1.91		≤ 2,51		≤ 2,40		≤ 2,35		≤ 2,30		≤ 2,25		≤ 2,20		≤ 2,20	-	RSUD
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata (PD)	Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar	(Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia / sarana prasarana RS yang sesuai standar) x 100 %	67.8	5,424.00	72.8	5,485.00	77.8	7,949.00	79	9,715.00	81	10,382.00	83	11,855.00	85	12,151.00	85	57,537.00	Dinas Kesehatan dan RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (PD)	Akreditasi Rumah Sakit	Penilaian terhadap standar pelayanan rumah sakit yang dikeluarkan oleh komite akreditasi rumah sakit	n/a	462.30	utama	682.98	utama	308.04	utama	480.00	paripurna	480.00	paripurna	490.00	paripurna	520.00	paripurna	2,961.02	RSUD
	Persentase puskesmas yang terakreditasi	jumlah puskesmas terakreditasi/jumlah puskesmas x 100%	66.6	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (PD)	Persentase Sarana dan Prasarana, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sesuai Standar	Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas, puskesmas pembantu sesuai standar	69	10,378.18	71	5,209.00	73	8,239.53	75	8,369.00	76	8,953.00	78	9,688.00	80	9,650.00	80	50,108.53	Dinas Kesehatan dan RSUD
Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan (PD)	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %	93	88.61	93	30.63	94	112.00	93	115.00	94	118.00	95	121.00	96	124.00	96	620.63	Dinas Kesehatan dan RSUD
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PD)	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68.01	11,438.95	95	26.55	95	13,764.43	96	284.00	97	297.00	98	311.00	99	324.00	99	15,006.98	Dinas Kesehatan dan RSUD



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023					
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Persentase rujukan pasien yang terlaksana	(Jumlah rujukan terlaksana/jumlah pasien dirujuk) x 100%	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100			
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan																				
Tujuan 6.1 : Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto	(PDRB sektor Pariwisata-SDGs)	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60,733.09	7,090.70	71,119.37	6,150.44	77,373.30	6,880.69	83,627.23	9,657.25	89,881.16	14,185.41	96,135.09	6,373.55	102,389.01	6,321.46	102.389.01	49,525.90		
	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata / Total PAD) x 100 %	2.58		2.76		2.95		3.16		3.38		3.65		3.87					
Sasaran 6.1.1 : Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi pengunjung terhadap Objek Wisata	n/a	4,491.60	n/a	3,706.70	65	3,200.30	70	6,695.00	75	10,386.46	80	4,463.74	90	3,636.39	90	32,088.59		
	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	32.35		32.35		38.24		44.12		50		55.88		61.76		61.76			
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	0	4,491.60	0	3,706.70	32.35	3,200.30	38.24	6,695.00	44.12	10,386.46	50	4,463.74	55.88	3,636.39	55.88	32,088.59		
	Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)	Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)	8	0	6	0														
	Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)	Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)	2	0	2	0														
Sasaran 6.1.2 : Berkembangnya industri pariwisata berdaya saing	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	60.55	-	60.55	35.05	61.76	268.34	63	272.61	64.26	486.25	65.54	257.48	66.85	345.49	66.85	1,665.21		



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023					
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (PD)	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri/Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif) x 100 %	0	-	0	35.05	15	268.34	17	272.61	18	486.25	19	257.48	20	345.49	20	1,665.21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR	
	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)	0	0	21	0														
	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)	0	0	16	0														
Sasaran 6.1.3 : Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	331,483	2,523.00	354,610	2,322.89	379,350	2,388.59	405,816	2,284.64	434,128	2,514.38	1,000,000	1,213.69	1,300,000	1,777.47	1,300,000	12,501.66		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD)	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	331484	2,523.00	354611	2,322.89	379351	2,388.59	405817	2,284.64	434130	2,514.38	1000000	1,213.69	1300000	1,777.47	1300000	12,501.66	Dinas Pariwisata	
Sasaran 6.1.4 : Tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	13.22	76.10	13.22	85.80	13.88	1,023.46	14.58	405.00	15.3	798.32	16.07	438.65	16.87	562.12	16.87	3,270.45		
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD)	Persentase MoU Kemitraan Aktif (%)	Jumlah MoU Kemitraan aktif dibagi dengan jumlah MoU Kemitraan dikali seratus persen	n/a	-	33	42.90	50	1,023.46	70	405.00	75	798.32	80	438.65	90	562.12	90	3,270.45	Dinas Pariwisata	
	Jumlah Rumah Makan (buah)	Jumlah Rumah Makan (buah)	46	76.1	46	42.9														
	Jumlah Home Stay (Buah)	Jumlah Home Stay (Buah)	45	0	37	0														
	Jumlah Pramuwisata (orang)	Jumlah Pramuwisata (orang)	19	0	10	0														
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai																				



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 7.1 : Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	74.83	11,934.25	75.94	30,781.35	77.33	62,699.05	79.00	61,422.89	81.00	72,112.84	82.67	77,867.01	84.67	76,313.01	84.67	381,196.15	
Sasaran 7.1.1 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	53.93	-	54.96	15,479.67	72.66	48,480.02	74.35	48,889.11	76.44	60,521.23	78.13	68,317.33	80.22	67,064.47	80.22	308,751.83	
	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45.35		45.35		46.35		47.35		48.35		49.35		50.35		50.35	-	
Program Pemeliharaan / rehabilitasi jalan dan jembatan (PD)	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	(Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan) x 100 %	65.98		66.98	5,024.74	67	9,883.27	68	17,684.25	69	13,789.00	70	17,949.88	71	17,762.88	71	82,094.01	DPU PR
	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	(Panjang Jembatan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	76		78	-	80	-	82	-	85	-	87	-	90	-	90	-	
Program Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong (PD)	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	51.98	-	51.98	1,552.92	71.19	3,924.00	72.78	3,318.38	74.37	2,489.69	75.96	3,478.70	77.55	3,498.78	77.55	18,262.47	DPU PR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD)	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	75.7	-	77.85	5,236.42	80	21,009.35	82	17,483.98	85	12,908.14	87	21,125.40	90	21,561.72	90	99,325.01	DKP3/D PUPR



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sosial (PD)	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar : jumlah bangunan pemerintah yang ada) x 100%	52	-	60	3,665.59	65.12	13,663.40	66.98	10,402.50	68.84	31,334.40	70.7	25,763.35	72.56	24,241.10	72.56	109,070.34	Bag Kesra/D PUPR
Sasaran 7.1.2 : meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalamantisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah		n/a	-	0.47	610.96	0.49	745.41	0.51	839.26	0.53	1,338.41	0.55	1,102.36	0.57	1,150.60	0.57	5,787.00	
Program Peningkatan Mitigasi Bencana (PD)	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	3	0	3	-	3	-	3	37.16	3	393.41	3	32.75	3	29.71	3	493.03	Badan Kesbang pol dan PBD
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (PD)	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	(Jumlah Bencana yang tertangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100 %	n/a	0	50	530.81	65	656.45	70	541.01	75	695.12	80	769.36	85	713.04	85	3,905.79	Badan Kesbang pol dan PBD
Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan (PD)	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar / Jumlah Sarana Prasarana) x 100 %	n/a	0	35	80.15	45	88.96	50	261.09	60	249.88	65	300.26	70	407.86	70	1,388.18	Badan Kesbang pol dan PBD
Sasaran 7.1.3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	56.79	3,413.82	56.79	2,602.57	58	4,145.21	60	3,032.71	64	2,511.67	67	2,325.99	70	2,340.42	70	16,958.57	
	Persentase Ketaatan terhadap tataruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan RTRW	86		86		87		88		89		90		91		91		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA	(Jumlah Luas yang direklamasi / Luas Kewajiban Reklamasi) x 100 %	30	-	32	-	35	683.02	37	248.18	40	299.80	43	228.55	45	231.23	45	1,690.77	Dinas Pertakim LH



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alam (PD)	(%)																		
Proram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD)	Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota	(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %	15.86	1,052.25	16	1,254.90	17	1,380.39	18	416.10	19	307.20	20	422.35	20	417.95	20	4,198.89	Barenlitb angda, PUPR, DPKP2LH
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %	61.28	-	61.56	167.21	62	242.28	63	331.18	64	244.51	65	336.16	66	332.65	66	1,653.99	Barenlitb angda, PUPR, DPKP2LH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %	66.9	2,361.57	73	1,180.46	80	1,839.52	75	2,037.25	74	1,660.17	73	1,338.93	72	1,358.59	72	9,414.92	Dinas Pertakim LH
	Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Terkurangi / Timbulan Sampah Kota) x 100 %	17	-	18	-	20	-	22	-	24	-	26	-	27	-	27	-	
Sasaran 7.1.4 : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6.4	8,520.43	6.4	12,088.15	5.4	9,328.41	4.4	8,661.80	3.4	7,741.52	2.4	6,121.34	1	5,757.51	1	49,698.74	
	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	42.58		22.81		15		10		8		5		4		4		
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	83		84		86		87		89		90		91		91		
Program Pengembangan Perumahan (PD)	persentase luas permukiman yang tertata	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	56	6,265.00	60	9,968.50	65	8,025.98	70	5,883.10	75	5,335.62	80	4,283.48	85	3,905.30	85	37,401.98	Dinas Pertakim LH
Program lingkungan sehat perumahan (PD)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak / Jumlah RT) x 100 %	83	2,035.00	84	2,009.37	86	1,074.12	87	1,859.31	89	1,419.51	90	1,094.16	91	1,110.81	91	8,567.27	Dinas Pertakim LH, Dinas Kesehatan dan Dalduk



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		2023				
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak / Jumlah RT) x 100 %	76	-	77	-	78	-	81	-	83	-	85	-	100	-	100	-	
Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (PD)	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %	65	220.43	70	110.28	72	228.31	75	919.40	80	986.39	85	743.70	90	741.40	90	3,729.49	Dinas Pertakim LH
Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya																			
Tujuan 8.1 : Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang difasilitasi / Total Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial) dikali 100 %	18.64	610.67	13.17	732.01	59.76	3,018.15	84.89	2,028.99	89.84	788.02	94.78	784.01	100	772.25	100	8,123.43	
Sasaran 8.1.1 : Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia yang terfasilitasi	(Jumlah lansia yang terfasilitasi / Total Jumlah lansia kurang mampu) dikali 100 %	19.74	610.67	19.25	732.01	19.25	2,254.32	100	1,446.51	100	455.65	100	451.85	100	441.20	100	5,781.55	
	Persentase ABK yang terfasilitasi	(Jumlah ABK yang terfasilitasi / Total Jumlah ABK) dikali 100 %	44.74		22.87		100		100		100		100		100				
	Persentase penyandang masalah disabilitas yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang disabilitas yang terfasilitasi / Total Jumlah penyandang disabilitas) dikali 100 %	4.64		7.47		19.79		39.57		59.35		79.13		100		100		



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	(Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar (yang tidak punya jaminan kesehatan) yang terfasilitasi / Total Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar) dikali 100 %	5.43		3.09		100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (TKPK) (PD)	Persentase Masyarakat Miskin yang terfasilitasi	(Jumlah masyarakat Miskin yang terfasilitasi/jumlah masyarakat miskin) x 100 %	60	195.00	64	490.00	69	1,470.00	74	926.10	78	291.72	83	289.29	86	285.89	86	3,753.00	Dinsos PMD
Program pembinaan dan fasilitasi para penyandang cacat dan trauma (PD)	Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang difasilitasi / Total Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial) dikali 100 %	18.64	232.40	13.17	64.72	59.76	626.05	84.89	362.91	89.84	114.32	94.78	113.36	100	106.70	100	1,388.06	Dinsos PMD
Program Pembinaan dan fasilitasi Panti Asuhan/Panti Jompo (PD)	Persentase panti asuhan/ jompo yang terfasilitasi	Jumlah panti asuhan/jompo difasilitasi / Total Jumlah panti asuhan/jompo) dikali 100 %	100	183.27	100	177.29	100	158.27	100	157.50	100	49.61	100	49.20	100	48.62	100	640.49	Dinsos PMD
Sasaran 8.1.2 : Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65.59	-	65.6	-	65.61	763.83	65.62	582.48	65.63	332.37	65.64	332.16	65.65	331.05	65.65	2,341.88	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95.52		95.53		95.54		95.55		95.56		95.57		95.58		95.58		



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
			realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak	Nindya		Nindya		Nindya		Utama		Utama		Utama		Utama		Utama		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PD)	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Anugerah yang diberikan kepada daerah yang sukses melakukan pemerataan dan keadilan pembangunan dari segi gender oleh menteri PP dan PA	n/a	-	n/a	-	n/a	500.00	pratama	351.75	pratama	99.23	madya	98.40	utama	97.24	utama	1,146.61	Dinsos PMD
Program Peningkatan peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (PD)	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Peran Perempuan dalam Ekonomi dan politik	65.59	-	65.6	-	65.61	263.83	65.62	171.43	65.63	72.84	65.64	73.12	65.65	72.62	65.65	653.83	Dinsos PM
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor																			
Tujuan 9.1 : tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	n/a	2,198.92	n/a	1,965.40	26	2,351.21	26	3,078.61	36	3,324.00	36	3,735.00	41	3,561.00	260	14,760.11	



Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator	Definisi Operasional	Tahun Awal Perencanaan 2017		Target Capaian Kinerja												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		2023				
			realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 9.1.1 : meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2.02	2,198.92	2.3	1,965.40	2.7	2,351.21	3	3,078.61	3.3	3,324.00	3.6	3,735.00	3.8	3,561.00	3.8	14,760.11	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (PD)	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	(Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK / Jumlah OPD) x 100 %	10%	1,800.00	15%	1,500.00	30%	1,600.00	50%	1,650.00	70%	1,650.00	85%	1,700.00	95%	1,750.00	95%	9,850.00	Dinas Perbuhn gan dan Bagian Humas dan Kominfo
	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota	(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota / Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %	n/a	-	10%	-	30%	-	60%	-	75%	-	85%	-	95%	-	95%	-	
Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi (PD)	jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan)	jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan)	n/a	193.26	4	153.54	8	174.71	12	265.00	16	320.00	20	320.00	24	320.00	80	1,553.25	PM PTSP Naker
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi (PD)	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Lokal	0	0	0	0	20	150	20	260	25	260	25	0	30	450	215	1120	PM PTSP Naker
	Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Nasional	0	0	0	0	5	0	5	0	10	0	10	0	10	0	40	0	
	Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi PMA	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	
Program Pembinaan dan pelayanan perizinan (PD)	Jumlah Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	1093	205.66	1232	240	509	205.75	560	377.11	620	387	670	638	750	389	3109	2236.86	PM PTSP Naker
	Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan	0	0	0	71.86	491	220.75	540	526.5	550	707	630	1077	650	652	2861	3.255.11	



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	622.904.840.571,81	625.593.312.159,89	630.289.566.280,03	637.020.808.718,63	657.760.083.630,03
Belanja Tak langsung	309.477.525.504,75	312.606.722.371,00	315.768.398.849,17	318.969.190.197,20	332.916.773.681,64
Belanja Pegawai	234.199.245.759,66	236.630.125.291,00	239.086.236.224,25	241.572.733.080,98	244.085.089.505,02
Belanja Bunga	1.515.569.304,18	1.531.300.210,52	1.547.194.396,37	1.563.285.218,10	1.579.543.384,36
Belanja Hibah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	18.713.503.906,40
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	999.978.689,18	1.010.358.004,10	1.020.845.051,51	1.031.461.840,04	1.042.189.043,18
Belanja Bantuan Keuangan	64.004.947.099,64	64.669.288.760,12	65.340.525.978,85	66.020.067.449,03	66.706.676.150,50
Belanja Tak Terduga	757.784.652,09	765.650.105,26	773.597.198,19	781.642.609,05	789.771.692,18
Belanja Langsung	313.427.315.067,06	313.986.589.788,89	315.521.167.430,86	319.051.618.521,43	325.843.309.948,39
Pengeluaran Pembiayaan	7.513.855.816,96	7.591.846.154,84	7.670.801.354,85	7.750.577.688,94	7.831.183.696,90
Total	630.418.696.388,77	633.185.158.315,73	637.960.367.6353,88	644.771.386.408,57	665.591.267.237,96

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto



Untuk proyeksi pendapatan 2020 dan seterusnya didasarkan pada angka APBD perubahan anggaran tahun 2018 dan rancangan perda tentang rencana awal APBD 2019. Dimana kondisi yang ada pada Kota Sawahlunto, seperti nampak pada tabel diatas, mengalami defisit yang sangat besar yakni Rp100 M pada tahun 2018 ini, sedangkan pendapatan hanya bisa diusahakan peningkatan yang sangat sedikit, dan jika dilihat dari masing-masing komponen pendapatan, maka mengalami fluktuasi, ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan.

Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan Dana transfer, sedangkan kondisi yang ada pada Kota Sawahlunto, dimana selama ini mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat (Derajat Otonomi Fiskal Kota Sawahlunto sangat rendah) yang artinya tingkat ketergantungan Pemko Sawahlunto sangat tinggi karena kemampuan keuangan Kota Sawahlunto yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sangat sedikit. Untuk PAD, memang belum bisa ditingkatkan secara signifikan karena memang kondisi Kota Sawahlunto yang hanya bisa mengandalkan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, karena ini terkait dengan penerimaan deviden atas penyertaan modal pada Bank Nagari dan BPR, sedangkan dari Lain-lain PAD yang sah maka yang bisa diharapkan adalah dari pendapatan BLUD, JKN dan BOS, sedangkan dari pajak dan retribusi, belumlah bisa diupayakan maksimal karena jumlah objek pajak dan retribusi yang tidak seberapa.

Sedangkan untuk prediksi belanja, maka dengan adanya kebijakan TPP. Maka jumlah belanja tak langsung mengalami peningkatan yang lumayan besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka mau tak mau jumlah belanja langsung yang terdiri atas komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal harus dikurangi.



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Sawahlunto

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023					
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				62,529.55		97,468.06		174,207.53		170,373.01		173,757.46		180,896.27		182,583.23		984,269.76		
A.1	Urusan Pendidikan				21,625.29		11,343.94		16,729.00		13,584.87		14,677.58		14,702.72		15,299.21		93,166.92		
A.1.1	Program Pendidikan anak usia Dini (PD)	APK TK	(Jumlah Siswa TK/Jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99.40	589.11	99.50	1,107.80	99.50	1,460.00	99.70	581.10	99.90	1,024.25	100.20	642.39	101.30	810.61	101.30	6,079.40	Dinas Pendidikan	
A.1.2	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (PD)	Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	(Jumlah SD yang memiliki Sarana Prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh SD di Kota Sawahlunto) x 100 %	70	17323.29	75	6,719.12	78	3,074.90	83	1,252.40	85	1,537.01	87	1,508.20	90	1,544.12	90	16,458.12	Dinas Pendidikan	
		Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	(Jumlah SMP yang memiliki Sarana Prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh SD di Kota Sawahlunto) x 100 %	75		80		82		85		88		93		95		95		-	Dinas Pendidikan
		APM SD	Angka Partisipasi Murni SD	96.23		96.5		96.6		96.7		96.8		96.9		97.1		97.1		-	Dinas Pendidikan
		APM SMP	Angka Partisipasi Murni SD	78.49		78.79		79.09		79.39		79.69		79.99		80.29		80.29		-	Dinas Pendidikan



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase Siswa Baru dari Keluarga kurang mampu yang diberikan sarana pendidikan (%)	Persentase Siswa Baru dari Keluarga kurang mampu yang diberikan perlengkapan sekolah					100		100				100				100		Dinas Pendidikan
A.1.3	Program Pendidikan Non Formal (PD)	Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal	Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal	81	486.32	85	371.94	85	1,440.60	89	540.80	91	463.36	93	459.41	95	453.24	95	3,975.74	Dinas Pendidikan
A.1.4	Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (PD)	Angka Partisipasi Kasar SD (%)	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100%	109.19		109.35		109.5	2,384.50	109.65		109.8		109.95		110.5		110.5	9,583.00	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100%	104.08		104.25		104.4	104.6		104.75	1,798.20	104.9	1,540.87	104.9	105.5	1,528.17	105.5	105.5	1,511.09
A.1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (PD)	persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	56	2,093.61	56	822.64	59.2	6,056.00	60.56	6,625.98	64.7	7,042.19	67.6	7,340.00	70.4	7,947.66	70.4	38,653.96	Dinas Pendidikan
A.1.6	Program Pendidikan berkarakter (PD)	Kasus Kenakalan Remaja	Kasus Kenakalan Remaja	7	125	9	-	8	-	7	300.00	5	364.14	3	361.25	2	356.19	2	1,575.00	Dinas Pendidikan
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100%	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100%	0		4		10		20		30		40		50		50		-



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%)	(Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter/ Jumlah Sekolah) x 100 %	70		75		80		85		90		95		100		100	-	Dinas Pendidikan
A.1.7	Program Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa (PD)	Jumlah Siswa yang menerima Reward	Jumlah Siswa yang menerima Reward	302	1,112.41	352	690.87	382	555.00	482	561.00	582	1,096.70	682	1,088.00	782	1,072.77	2,910	5,646.87	Dinas Pendidikan
		Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward			200		540		550		560		570		580		2,800	-	Dinas Pendidikan
A.1.8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PD)	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik / Jumlah Total Guru) x 100 %	74.81	1,699.36	78.95	1,414.65	80.5	1,364.29	84.2	1,528.59	87.3	1,262.57	88.5	1,421.02	90.3	1,240.21	90.3	8,932.70	Dinas Pendidikan
		Persentase guru yang berkualifikasi min S1	(Jumlah Guru yang Kualifikasi Min S1 / Jumlah Total Guru) x 100 %	88.97		91.27		93.11		94.95		96.79		98.63		100		100	-	Dinas Pendidikan
A.1.9	Program peningkatan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP)	Angka rata-rata nilai USBN SD (skala 0-100)	(Jumlah Nilai Siswa USBN SD/ Jumlah Murid yang mengikuti USBN) x 100 %	78.9	289.8	77.9	216.92	78.1	393.71	78.6	396.80	78.9	346.49	79.1	354.28	79.4	363.32	79.4	2,262.13	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata nilai UN SMP (skala 0-100)	(Jumlah Nilai Siswa UN SMP/ Jumlah Murid yang mengikuti UN) x 100 %	53.9		54.9		55.2		55.5		55.8		56.1		56.3		56.3		
A.2	Urusan Kesehatan				29,905.73		36,919.51		67,929.42		65,553.23		66,824.15		69,223.44		69,749.06		376,192.31	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.1	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	Persentase UKBM yang aktif	Jumlah UKBM yang melaksanakan kegiatan sesuai standar dibagi dengan Jumlah UKBM yang terdaftar	72	589.58	75	329.45	78	447.00	81	827.00	84	843.00	87	893.00	90	895.00	90	4,234.45	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.2	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD)	Angka kematian balita per 1.000	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu	2.77	299.09	2.51	247.71	2.35	394.30	2.17	404.81	2.01	415.28	1.97	426.01	1.75	436.90	1.75	2,325.01	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
		Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun	0		0		0		0		0		0		0		0		
A.2.3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PD)	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan dikali seratus persen	100	50.33	100	1.98	100	16.92	100	7.35	100	7.72	100	8.10	100	8.51	100	50.58	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PD)	Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai Standar	Jumlah penderita TBC yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita TBC dikali seratus persen	100	231.66	100	153.99	100	230.35	100	220.00	100	225.00	100	230.00	100	230.00	100	1,289.34	Dinas Kesehatan Dan Dalduk



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai Standar	Jumlah penderita DBD yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita DBD dikali seratus persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Dan Dalduk
		Persentase Penderita HIV yang mendapat pelayanan HIV sesuai Standar	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai Standar	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PD)	Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	Jumlah penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita Diabetes dikali seratus persen	100	16.56	100	12.67	100	80.00	100	135.00	100	145.00	100	145.00	100	145.00	100	662.67	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
		Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat dikali seratus persen	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Dan Dalduk
		Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita hipertensi dikali seratus	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Dan Dalduk



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			persen																	
A.2.6	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata (PD)	Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar	(Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia / sarana prasarana RS yang sesuai standar) x 100 %	67.8	5,424.00	72.8	5,485.00	77.8	7,949.00	79	9,715.00	81	10,382.00	83	11,855.00	85	12,151.00	85	57,537.00	Dinas Kesehatan dan RSUD
A.2.7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (PD)	Akreditasi Rumah Sakit	Penilaian terhadap standar pelayanan rumah sakit yang dikeluarkan oleh komite akreditasi rumah sakit	n/a	462.3	utama	682.98	utama	308.04	utama	480.00	paripurna	480.00	paripurna	490.00	paripurna	520.00	paripurna	2,961.02	RSUD
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	jumlah puskesmas terakreditasi/jumlah puskesmas x 100%	66.6		100		100		100		100		100		100		100		
A.2.8	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (PD)	Persentase Sarana dan Prasarana, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sesuai Standar	Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas, puskesmas pembantu sesuai standar	69	10,378.18	71	5,209.00	73	8,239.53	75	8,369.00	76	8,953.00	78	9,688.00	80	9,650.00	80	50,108.53	Dinas Kesehatan dan RSUD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.9	Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan (PD)	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %	93	88.61	93	30.63	94	112.00	93	115.00	94	118.00	95	121.00	96	124.00	96	620.63	Dinas Kesehatan dan RSUD
A.2.10	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PD)	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68.01	11,438.95	95	26.55	95	13,764.43	96	284.00	97	297.00	98	311.00	99	324.00	99	15,006.98	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Persentase rujukan pasien yang terlaksana	(Jumlah rujukan terlaksana/jumlah pasien dirujuk) x 100 %	100						100		100		100		100		100		100
A.2.11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%)	(Jumlah Obat dan Vaksin Indikator yang terdedia / Jumlah Kebutuhan Obat dan Vaksin Indikator) x 100 %	98.1	411.44	98.7	197.48	88	261.52	90	5,990.00	91	5,889.00	94	5,848.00	95	5,922.00	96	24,108.00	Dinas Kesehatan Dan Dalduk dan RSUD
A.2.12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Keluarga Sehat (%)	Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga	25	42.75	75	20.20	29	4,726.24	31	2,512.92	33	2,535.44	35	2,569.48	37	2,598.06	37	14,962.34	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.13	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%)	(Jumlah sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar / Jumlah Sarana Obat, Makanan dan Alkes yang tersedia) x 100 %	n/a	42.75	75	20.20	77	55.68	78	84.00	79	92.00	80	101.00	81	110.00	81	462.88	Dinas Kesehatan Dan Dalduk



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.1 4	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah Balita yang menjadi Target Pelayanan) x 100 %	n/a	203	70	213.73	74	270.00	76	210.00	78	210.50	80	211.53	80	213.10	80	1,328.86	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.1 5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	(Jumlah Lansia terlanjar / Jumlah Lansia yang dapat pelayanan) x 100 %	n/a	82	70	17.00	70	20.15	75	21.15	75	22.21	78	23.32	80	24.49	80	128.32	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.1 6	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan makanan yang diperiksa) x 100 %	n/a	15.73	90	8.08	90	15.00	91	20.00	91	25.00	92	28.00	92	30.00	80	126.08	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
A.2.1 7	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian balita per 1000	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu			2.51		2.35	766.80										766.80	Dinas Kesehatan Dan Dalduk
		Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun																	
A.2.1 8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan (%)	(Jumlah sarana prasarana yang dipelihara / jumlah sarana prasarana yang ada) x 100 %							80	3,195.00	82.5	3,168.00	85	3,202.00	87.5	3,241.00	87.5	12,806.00	RSUD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.19	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas					100	1,034.70	100	1,066.00	100	1,091.00	100	1,120.00	100	1,144.00	100	5,455.70	Dinas Kesehatan Dan Daiduk
A.2.20	Program Upaya Kesehatan Kerja	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	Jumlah kelompok kerja informal yang difasilitasi	n/a	4.08	4	-	4	15.00										15.00	Dinas Kesehatan Dan Daiduk
A.2.21	Program Upaya Kesehatan Olahraga	Persentase terbentuknya pos kesehatan olah raga di puskesmas	Jumlah kelompok olah raga yang difasilitasi	n/a	2.56	4	-	1	6.50											Dinas Kesehatan Dan Daiduk
A.2.22	Program Peningkatan Kualitas Air	Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%)	(Jumlah sarana air minum yang diawasi/jumlah sarana air minum yang ada) x 100 %	89	122.16	70	51.86	72	216.26	74	243.00	76	271.00	79	299.00	80	328.00	80	1,409.12	Dinas Kesehatan Dan Daiduk
A.2.23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)	Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)	12	28,136	12	24,211.00	12	29,000.00	12	31,654.00	12	31,654.00	12	31,654.00	12	31,654.00	60	179,827.00	RSUD
A.3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				1,052.25		32,223.85		72,529.16		77,406.43		80,425.57		86,887.50		87,768.89		437,241.39	
A.3.1	Program Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan (PD)	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	(Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan) x 100 %	65.98		66.98	5,024.74	67	9,883.27	68	17,684.25	69	13,789.00	70	17,949.88	71	17,762.88	71	82,094.01	DPU PR
		Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	(Panjang Jembatan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang Jembatan) x 100 %		76		78		80		82		85		87		90		90	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.3.2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong (PD)	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	51.98		51.98	1,552.92	71.19	3,924.00	72.78	3,318.38	74.37	2,489.69	75.96	3,478.70	77.55	3,498.78	77.55	18,262.47	DPU PR
A.3.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD)	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	75.7		77.85	5,236.42	80	21,009.35	82	17,483.98	85	12,908.14	87	21,125.40	90	21,561.72	90	99,325.01	DKP3/DPUPR
A.3.4	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sosial (PD)	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar : jumlah bangunan pemerintah yang ada) x 100%	52		60	3,665.59	65.12	13,663.40	66.98	10,402.50	68.84	31,334.40	70.7	25,763.35	72.56	24,241.10	72.56	109,070.34	Bag Kesra/DPUPR
A.3.5	Proram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD)	Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota	(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %	15.86	1,052.25	16	1,254.90	17	1,380.39	18	416.10	19	307.20	20	422.35	20	417.95	20	4,198.89	Barenlit bangda, PUPR, DPKP2LH
A.3.6	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %	61.28		61.56	167.21	62	242.28	63	331.18	64	244.51	65	336.16	66	332.65	66	1,653.99	Barenlit bangda, PUPR, DPKP2LH
A.3.7	Program perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang			0	-	80	-	5	840.52	5	497.66	5	515.27	5	509.90	100	2,363.35	DPUPR, Barenlit bangda
A.3.8	Program pemanfaatan ruang	Persentase bangunan ber IMB	(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %			61.56	-	62	245.10	63	203.97	64	150.59	65	207.04	66	204.88	66	1,011.58	DPUPR
A.3.9	Program Pembangunan / peningkatan jalan dan	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)			911.09	10,481.70	11.987	20,089.37	9.318	23,122.11	9.318	16,922.62	9.318	15,442.20	9.318	16,664.46	9.318	102,722.46	DPUPR



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	jembatan																			
A.3.10	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)	Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)			600	4,609.82	600	1,502.00	650	1,730.98	675	1,320.96	675	1,072.77	700	2,006.16	700	12,242.69	DPUPR
		Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)	Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)			2,736		2,861		3011		3161		3311		3461		3461		DPUPR
A.3.11	Program sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah alat berat dan alat labor yang tersedia dalam kondisi baik (unit)	Jumlah alat berat dan alat labor yang tersedia dalam kondisi baik (unit)			69	230.55	0	590.00	69	1,872.45	6	460.80	81	574.40	81	568.41	81	4,296.61	DPUPR
A.4	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman				8,440.98		13,045.23		10,884.10		9,302.88		8,214.54		6,556.65		6,265.48		54,268.88	
A.4.1	Program Pengembangan Perumahan (PD)	persentase luas permukiman yang tertata	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	56	6,265.00	60	9,968.50	65	8,025.98	70	5,883.10	75	5,335.62	80	4,283.48	85	3,905.30	85	37,401.98	Dinas Pertakim LH
A.4.2	Program lingkungan sehat perumahan (PD)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak / Jumlah RT) x 100 %	83	2,035	84	2,009.37	86	1,074.12	87	1,859.31	89	1,419.51	90	1,094.16	91	1,110.81	91	8,567.27	Dinas Pertakim LH, Dinas Kesehatan dan Dalduk
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak / Jumlah RT) x 100 %	76		77		78		81		83		85		100		100		



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.4.3	Program Pemeliharaan Rumah Susun Meliputi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama	Persentase Tingkat Keterhunan Rumah Susun (%)	(Jumlah Kamar di di Rusunawa yang dihuni/jumlah kamar di Rusunawa) x 100 %	88	140.98	85	1,067.36	96	1,634.00	97	1,255.69	98	1,184.60	98	956.51	98	1,012.62	98	7,110.79	Dinas Pertakim LH
A.4.4	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	Jumlah Rumah yang direhabilitasi / Jumlah yang terkena bencana)					100	150.00	100	304.78	100	274.81	100	222.51	100	236.74	100	1,188.84	Dinas Pertakim LH, Kesbangpol dan PBD
A.5	Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat				819.29		2,868.45		3,525.29		2,809.66		3,075.10		2,989.93		2,982.29		16,665.16	
A.5.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu	(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)	100	226.94	100	977.32	100	671.25	100	566.78	100	464.11	100	522.50	100	485.01	100	3,686.97	Badan Kesbangpol dan PBD
						100	291.93	100	122.48	100	78.14	100	79.44	100	79.88	100	75.32	100	727.20	Satpol PP Damkar dan Kecamatan
											18.62		19.50		19.29		0.78			Barangin
							17.30		19.00		17.69		18.52		18.33		17.84			L. Segar
									20.00		18.62		19.50		19.29		18.78			Talawi
A.5.2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal (PD)	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	592.35	100	257.11	100	185.42	100	168.43	100	148.35	100	179.59	100	179.17	100	1,118.07	Badan Kesbangpol dan PBD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						100	257.11	100	185.05	100	113.80	100	72.41	100	72.82	100	99.48	100	800.67	Satpol PP Damkar
A.5.3	Program Peningkatan Mitigasi Bencana (PD)	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	3		3	-	3	-	3	37.16	3	393.41	3	32.75	3	29.71	3	493.03	Badan Kesbangpol dan PBD
A.5.4	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (PD)	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	(Jumlah Bencana yang tertangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100 %	n/a		50	530.81	65	656.45	70	541.01	75	695.12	80	769.36	85	713.04	85	3,905.79	Badan Kesbangpol dan PBD
A.5.5	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan (PD)	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar / Jumlah Sarana Prasarana) x 100 %	n/a		35	80.15	45	88.96	50	261.09	60	249.88	65	300.26	70	407.86	70	1,388.18	Badan Kesbangpol dan PBD
A.5.6	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PE	Persentase ketersediaan aparatur kesiapsiagaan Bencana	(Jumlah ketersediaan aparatur Kesiapsiagaan Bencana / Jumlah Aparatur kesiapsiagaan bencana) x 100 %			23		50	-	48%	2.06		1.65		1.82		1.65	100%	7.19	Badan Kesbangpol dan PBD
		Persentase Kesiapsiagaan Bencana yang meningkatkan kompetensinya	(Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkatkan kompetensinya (sertifikat) / Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana) x 100 %					10%		12%			14%		16%		18%		70%	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab		
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
A.5.7	Program Penanganan tanggap Darurat	Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani	(Jumlah kejadian Tanggap Darurat Tertangani/jumlah kejadian) x 100 %						-		33.03		19.84		-		-		52.87	Badan Kesbangpol dan PBD		
A.5.8	Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana	(Jumlah perencanaan rehabilitasi yang terlaksana Jumlah Perencanaan Rehabilitasi) x 100 %			25%		30%	16.45	35%	181.68	40%	150.56	45%	171.50	50%	161.03	50%	681.21	Badan Kesbangpol dan PBD		
A.5.9	Program Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani	Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani				100.00		361.06		156.90		130.02		148.11		139.08		1,035.17	Badan Kesbangpol&PBD		
A.5.10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang			69	51.79	610	214.44	610	144.93	610	126.09	610	150.85	610	148.82	3,050	836.92	Badan Kesbangpol&PBD dan Setdako		
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)	Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)					4		4		4		4		4		4			15	-
		Jumlah Forum-forum strategis daerah	Jumlah Forum-forum strategis daerah					3		4		4		4							11	-
		Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%)	Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan							19.33		17.97		18.82		18.61		18.12				Kec. Barangin
								-		23.28		23.28		24.37		24.11				23.48	L. Segar	
								-		23.28		23.28		24.37		24.11				23.48	Silungkang	
									520.65		121.04		126.74		125.39		122.08				Talawi	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.5.1 1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat				43.85	250	43.20	250	36.92	250	30.60	250	34.85	250	32.73	1,250	222.15	Badan Kesbangpol dan PBD
		Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	-		85	59.84	85	37.10	75	23.67	65	24.06	55	24.20	45	22.81	35	191.68	Satpol PP Damkar
A.5.1 2	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Jumlah Gangguan terhadap kegiatan PEMILU (Kasus)	Jumlah Gangguan terhadap kegiatan PEMILU (Kasus)			0	68.90	0	101.85										170.75	Badan Kesbangpol dan PBD
A.5.1 3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya politik	Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya politik			290	30.03	900	63.35		-		-		-		-	900	93.38	Badan Kesbangpol dan PBD
		Persentase Anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol	Persentase Anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol					70		70		70		70		70		70	350	
A.5.1 4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100%	Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100%				51.16	100	88.00	100	85.14	100	86.55	100	87.04	100	82.06	100	479.96	Satpol PP Damkar
A.5.1 5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)	Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)			100	51.16	100	88.00	100	138.40	100	151.19	100	165.29	100	179.95	100	773.99	Satpol PP Damkar
A.6	Urusan Sosial				686.01		1,067.08		2,610.56		1,715.94		540.52		536.02		518.30		6,735.10	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.6.1	Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (TKPK) (PD)	Persentase Masyarakat Miskin yang terfasilitasi	(Jumlah masyarakat Miskin yang terfasilitasi/jumlah masyarakat miskin) x 100 %	60	195	64	490.00	69	1,470.00	74	926.10	78	291.72	83	289.29	86	285.89	86	3,753.00	Dinsos PMD
A.6.2	Program pembinaan dan fasilitasi para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi (PD)	Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang difasilitasi / Total Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial) dikali 100 %	18.64	232.4	13.17	64.72	59.76	626.05	84.89	362.91	89.84	114.32	94.78	113.36	100	106.70	100	1,388.06	Dinsos PMD
A.6.3	Program Pembinaan dan fasilitasi Panti Asuhan/Panti Jompo (PD)	Persentase panti asuhan/jompo yang terfasilitasi	Jumlah panti asuhan/jompo difasilitasi / Total Jumlah panti asuhan/jompo) dikali 100 %	100	183.27	100	177.29	100	158.27	100	157.50	100	49.61	100	49.20	100	48.62	100	640.49	Dinsos PMD
A.6.4	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi (%)	(Jumlah penyandang sosial yang terfasilitasi /Jumlah Penyandang Sosial) x 100 %	15	75.34	20.00%	81.74	25%	74.69	25%	47.05	25%	14.82	25%	14.70	25%	13.83	28%	246.83	Dinsos PMD
A.6.5	Program Pembinaan Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang di bina (%)	(Jumlah anak terlantar yang dibina /Jumlah anak terlantar) x 100 %	0	0	N/A	-	N/A	-	100%	45.00	100%	14.18	100%	14.06	100%	11.11	100%	84.35	Dinsos PMD
A.6.6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif.	(Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Aktif / Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang ada) x 100 %	75	336.15	80.00%	253.33	85%	281.56	87%	177.38	90%	55.88	95%	55.41	100%	52.15	100%	622.37	Dinsos PMD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				17,501.16		18,350.44		27,102.44		34,147.91		30,023.04		29,875.60		28,349.07		169,149.97	
B.1	Urusan Ketenagakerjaan				502.96		315.06		626.14		3,497.23		2,837.23		2,337.23		2,337.23		11,950.12	
B.1.1	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (PD)	Persentase angkatan kerja yang berkualitas (%)	(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi/ jumlah peserta pelatihan) x 100 %	n/a	283.68	n/a	216.33	0	500.57	60	3,178.00	70	2,518.00	80	2,018.00	90	2,018.00	90	10,448.90	PTSP Naker
B.1.2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah Tenaga Kerja/Penduduk usia kerja) x 100 %	70.44	77.85	71.24	98.73	72.04	78.57	72.86	190.00	73.68	190.00	74.51	190.00	75.35	190.00	75.35	937.30	PTSP Naker
B.1.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki bipartid	Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga kerjasama bipartid	0	141.43	1	-	5	47.00	5	129.23	10	129.23	15	129.23	20	129.23	24	563.92	PTSP Naker
B.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				172.26		276.73		1,393.61		523.18		172.06		171.52		169.86		2,511.67	
B.2.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PD)	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Anugerah yang diberikan kepada daerah yang sukses melakukan pemerataan dan keadilan pembangunan dari segi gender oleh menteri PP dan PA	n/a	0	n/a	-	n/a	500.00	pratama	351.75	pratama	99.23	madya	98.40	utama	97.24	utama	1,146.61	Dinsos PMD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.2.2	Program Peningkatan peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (PD)	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Peran Perempuan dalam Ekonomi dan politik	65.59		65.6		65.61	200.00	65.62	140.70	65.63	39.69	65.64	39.36	65.65	38.81	65.65	458.56	Dinsos PM dan Kecamatan
									32.00		30.73		33.15		33.76		33.81			Kec. Barangin
									31.83		-		-		-		-			Silungkang
B.2.3	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase terhadap kasus perempuan yang tertangani	Kasus pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan atau tidak	100	68.78	100	103.60	100	378.27	0	-	0	-	0	-	0	-	100	481.87	Dinsos PM
B.2.4	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat capaian kata layak anak	Anugrah yang diberikan kepada daerah yang berhasil dalam pembinaan layak anak	nindya	103.48	madya	173.13	nindya	251.50	0	-	0	-	0	-	0	-	nindya	424.63	Dinsos PM
B.3	Urusan Pangan				531.00		97.23		414.00		573.50		503.50		571.30		540.80		2,700.33	
B.3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PD)	Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan	Perbandingan Produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan		531		97.23	95.5	414.00	96	573.50	96.5	503.50	97	571.30	97.5	540.80	97.5	2,700.33	DKP3



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)	tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)	94		95.2														
		Konsumsi Bahan pangan pokok perkapita per tahun (Kg)	Konsumsi Bahan pangan pokok perkapita per tahun (Kg)	91.98		91.6														
B.4	Urusan Pertanahan				-	-		497.77		1,079.14		969.87		948.08		688.36			4,183.22	
B.4.1	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum (%)	Jumlah Tanah budidaya yang memiliki aspek hukum dibagi dengan tanah budidaya x 100%				2	307.35	2	332.86	2	425.96	2	461.04	2	278.24			1,805.45	Dinas Pertakim LH
B.4.2	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%			80	80	42.04	80	384.89	80	315.50	80	237.48	80	229.71			1,209.62	Dinas Pertakim LH
B.4.3	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilakukan (%)					80	148.38	80	361.38	80	228.42	80	249.57	80	180.41			1,168.15	Dinas Pertakim LH
B.5	Urusan Lingkungan Hidup				2,830.99	1,410.05		3,473.43		4,125.28		3,801.65		2,992.65		3,042.83			18,845.89	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
B.5.1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	(Jumlah Luas yang direklamasi / Luas Kewajiban Reklamasi) x 100 %	30		32		35	683.02	37	248.18	40	299.80	43	228.55	45	231.23	45	1,690.77	Dinas Pertakim LH	
B.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %	66.9	2,361.57	73	1,180.46	80	1,839.52	75	2,037.25	74	1,660.17	73	1,338.93	72	1,358.59	72	9,414.92	Dinas Pertakim LH	
		Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Terkurangi / Timbulan Sampah Kota) x 100 %	17		18		20		22		24		26		27		27		-	Dinas Pertakim LH
B.5.3	Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (PD)	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %	65	220.43	70	110.28	72	228.31	75	919.40	80	986.39	85	743.70	90	741.40	90	3,729.49	Dinas Pertakim LH	
B.5.4	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup	persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup	30	29	50	29.88	60	201.02	62	393.62	63	384.18	64	305.81	65	320.29	65	1,634.80	Dinas Pertakim LH	
B.5.5	Program Peningkatan pengendalian polusi	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	56.25		56.25		56.25	100.00	56.40	91.43	56.45	78.52	56.50	60.42	56.55	60.98	56.55	391.36	Dinas Pertakim LH	
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84.56		84.56		84.56		84.56		84.56		84.56		84.56		84.56			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36.85		36.85		36.85		36.95		37		37.15		37.20		37.20		37.20	
B.5.6	Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	(Jumlah masyarakat yang peduli lingkungan / jumlah masyarakat kota) x 100 %	25	219.99	25	89.43	28	421.56	29	435.40	30	392.59	33	315.24	35	330.33	35	1,984.55	Dinas Pertakim LH	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.6	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil				862.82		293.74		243.10		527.94		506.40		530.36		593.28		1,469.91	
B.6.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan (PD)	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan (%)	(Jumlah Penduduk yang memiliki Dokumen kependudukan / jumlah penduduk) x 100 %	98.26	701.60	98.44	108.16	100	100.00	100	395.31	100	378.90	100	506.25	100	569.80	100	1,032.72	Disdukc apil
		Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)	(Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah penduduk) x 100 %					97.5		98		100		100		100		100		Disdukc apil Kec. Barangi n
							-		18.62		19.50		24.11		23.48					L. Segar
							-	5.70		-	-		-		-		-			Silung ang
							-	1.79		-	-		-		-		-			Talawi
							4.00			-	-		-		-		-			
B.6.2	Program Penguatan Kelembagaan	Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001-2015	Jumlah Dokumen SOP Sesuai Standar ISO 9001-2015			1	56.84	1	8.42	1	114.00	1	108.00					1	185.26	Disdukc apil
B.6.3	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 dan penerbitan akte kematian (%)	(Persentase realisasi kepemilikan akte kelahiran dan akte kematian) x bobot	97.37	161.22	85.00	128.74	93.00	123.19										251.93	Disdukc apil
B.7	Urusan Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa				2,358.70		1,172.46		5,262.95		3,232.77		1,325.93		1,319.38		1,285.02		10,757.79	
B.7.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kel	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/Jumlah	80	305.262	85.00%	260.55	85%	238.33	87%	177.72	90%	50.13	95%	49.71	100%	46.79	100%	823.23	Dinsos PMD Kec. Barangi n
							477.03				436.20		454.96		450.27		436.20			



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %				-		20.55		16.28		16.98		16.80		16.28			L. Segar
							-		-		15.81		16.49		16.32		15.81			Silungkang
							-		-		16.28		16.98		16.80		16.28			Talawi
B.7.2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel	Presentase masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam membangun desa/kel (%)	(Jumlah masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam musrenbang desa/kel / jumlah masyarakat yang hadir) x 100 %	80	305.262	85.00%	290.91	90%	1,472.82	87%	1,036.13	90%	292.28	95%	289.85	100%	286.44	100%	3,668.43	Dinsos PMD
B.7.3	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kel	Presentase PKK yang aktif (%)	(Jumlah Kelompok PKK Desa/Kel yang aktif/ Jumlah Kelompok PKK) x 100 %	100	437.834	100.00 %	4.69	100%	614.97	100%	432.63	100%	122.04	100%	121.02	100%	119.60	100%	1,414.96	Dinsos PMD dan Kecamatan
							20.00		24.15		29.76		31.04		30.72		29.76			L. Segar
							-		-		29.76		31.04		30.72		29.76			Silungkang
B.7.4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa yang Perdesaan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%)	(Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif/Jumlah Lembaga Desa) x 100 %	75	7.979	80.00%	8.46	85%	7.46	90%	5.25	95%	1.48	97%	1.47	100%	1.45	100%	25.56	Dinsos PMD
B.7.5	program peningkatan kapasitas pemerintahan terdepan	indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan terdepan (%)	persentase masyarakat yang merasa puas terhadap layanan (%)	85	242.76	90.00%	5.27	95%	842.70	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		847.97	Dinsos PMD
B.7.6	program peningkatan SDM Aparatur terdepan	indeks kepuasan layanan (%)	persentase aparatur desa terhadap peningkatan SDM (%)	75	417.47	78.94%	244.29	80%	90.93	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		335.22	Dinsos PMD
B.7.7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat kapasitas nya (%)	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitas nya/ jumlah aparatur desa	80	642.129	85.00%	3.23	90%	1,117.77	92%	786.35	93%	221.82	95%	225.60	100%	217.38	100%	2,572.15	Dinsos PMD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(%)																	
B.7.8	program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif/ jumlah kesejahteraan yang ada x 100 %	75	336.15	80.00%	253.33	85%	281.56	87%	198.08	90%	55.88	95%	55.41	100%	54.76	100%	899.00	Dinsos PMD
B.7.9	program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi	jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi	15	75.341	20	81.74	25	74.69	25%	52.54	25	14.82	25	14.70	25	14.53	28	171.27	Dinsos PMD
B.8	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				420.87	221.00	585.52		1,783.87		1,107.06		1,407.52		1,108.49		1,124.29		7,116.75	
B.8.1	Program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	96	63.47	32	95.10	30.4	172.00									30.4	267.10	Dinas Kesehatan dan Dalduk
B.8.2	Program kesehatan reproduksi remaja	Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun	Jumlah perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun / Jumlah Ibu melahirkan	0	0	-	-	0	-	29,73	130.45	29,13	168.89	28,61	118.00	28,15	123.00	28,15	540.33	Dinas Kesehatan dan Dalduk
B.8.3	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pasangan Usia Subur yang terputus/ terhenti menggunakan kontrasepsi	Pasangan Usia Subur yang terputus/ terhenti menggunakan kontrasepsi	85	185.74	64	262.93	65	407.52	67	248.12	68	319.68	69	214.09	70	224.89	70	1,677.23	Dinas Kesehatan dan Dalduk



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.8.4	program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	93	85.11	63	156.20	64	137.24	65	81.95	67	112.58	68	166.00	70	166.00	70	819.98	Dinas Kesehatan dan Dalduk
B.8.5	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%)	(Jumlah Balita yang terpantau tumbuh kembangnya / Jumlah Balita yang menjadi target) x 100 %							83	81.95	83	112.58	85	166.00	85	166.00	85	526.54	Dinas Kesehatan dan Dalduk
B.8.6	Program peningkatan pelayanan KB	Pasangan Usia Subur yang terputus/ terhenti menggunakan kontrasepsi	Pasangan Usia Subur yang terputus/ terhenti menggunakan kontrasepsi	85	86.55	62	71.29	65	1,067.11										1,138.40	Dinas Kesehatan dan Dalduk
B.8.7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi / jumlah pasangan usia Subur) x 100 %							66	564.58	67	693.79	68	444.40	69	444.40	69	2,147.17	Dinas Kesehatan dan Dalduk
B.9	Urusan Perhubungan				0		417.43		2,093.14		1,736.45		1,781.87		1,751.86		1,696.87		9,477.62	
B.9.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (dokumen)	(Jumlah sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia / Jumlah Sarana yang dibutuhkan) x 100 %			-		-		100	150.00	100	10.90	100	10.90	100	10.90	100	182.69	Dinas Perhubungan



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.9.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)	(Jumlah sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik/ Jumlah Sarana prasarana perhubungan yang ada) x 100 %			80	15.00	80	124.62	80	125.00	85	125.00	85	125.00	90	125.00	90	639.62	Dinas Perhubungan
B.9.3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%)	angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan x 100 %			1	278.00	1	286.64	1	300.88	1	808.09	1	773.09	1	823.09		3,269.79	Dinas Perhubungan
B.9.4	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (%)	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum			30	7.81	30	31.56	35	60.57	40	62.88	45	62.88	50	62.88	50	288.57	Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat pelayanan angkutan umum (%)	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum			30		30												-
B.9.5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor	(Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor / Jumlah Kendaraan bermotor) x 100 %			80	116.63	80	1,650.32	80	1,100.00	90	775.00	90	780.00	90	675.00	90	5,096.95	Dinas Perhubungan
B.10	Urusan Komunikasi dan Informatika				1,911.00		1,856.00		1,766.00		1,832.60		1,850.86		1,920.95		1,993.04		11,219.45	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.10.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (PD)	Persentase OPD yang menggunakan Sistem informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	(Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK / Jumlah OPD) x 100 %	10%	1,800.00	15%	1,500.00	30%	1,600.00	50%	1,650.00	70%	1,650.00	85%	1,700.00	95%	1,750.00	95%	9,850.00	Dinas Perhubungan dan Bagian Humas dan Kominfo
		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota	(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota / Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %	n/a		10%		30%		60%		75%		85%		95%		95%		
B.10.2	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah media massa yang bekerjasama	Jumlah media massa yang bekerjasama	12	111	12	250.00	11	60.00	11	66.00	12	72.60	11	79.86	11	87.85	20	616.31	Bagian Humas dan Kominfo dan Seluruh OPD
B.10.3	Program Peningkatan Konektifitas Intra dan Antar SKPD	Persentase jaringan informasi dan komunikasi yang terkoneksi satu sama lain	Terwujudnya jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi				106.00	26	106.00	26	116.60	26	128.26	26	141.09	26	155.19	26	753.14	Bagian Humas dan Kominfo dan Seluruh OPD
B.11	Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				457.46		1,637.00		1,163.95		2,137.85		2,761.98		2,100.26		2,259.70		12,060.74	
B.11.1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (PD)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)		221.036	75	719.12	50	652.23	50	1,123.00	50	1,928.00	50	1,169.00	50	1,189.00	375	6,780.35	Dinas Koperindag



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Koperasi yang meningkatkan skala usahanya (unit)	Jumlah Koperasi yang meningkatkan skala usahanya (unit)					5		5			5		5			45	-	
		Jumlah kelompok yang menjadi koperasi(Koperasi)	Jumlah Kelompok yang menjadi koperasi	1		3														
		Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (Orang)	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (Orang)	250		1,330														
		Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	50		285														
B.11.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%		30.579		86.08	68	388.00	71	719.95	74	469.58	77	540.53	80	623.77	80	2,827.91	
		Persentase UKM yang memiliki ijin Usaha (%)	Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/jumlah UKM x100%					41		44		47		50		53		53	-	Dinas Koperindag
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkatkan Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkatkan Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	33		33													-	
B.11.3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	Jumlah koperasi yang sehat/jumlah koperasi x 100%		205.85		831.80	74	123.72	77	294.90	80	364.40	83	390.73	85	446.93	85	2,452.48	Dinas Koperindag
		Jumlah Koperasi berkualitas yang dinilai	Jumlah Koperasi berkualitas yang dinilai	24		54													-	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(unit)	(unit)																	
		bertambahnya koperasi yang aktif (Koperasi)	bertambahnya koperasi yang aktif (Koperasi)	2		2														-
		berkurangnya kredit macet (%)	berkurangnya kredit macet (%)	5		5														-
B.12	Urusan Penanaman Modal				398.92		465.40		751.21		1,428.61		1,674.00		2,035.00		1,811.00		8,165.22	
B.12.1	Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi (PD)	jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan)	jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan)	n/a	193.26	4	153.54	8	174.71	12	265.00	16	320.00	20	320.00	24	320.00	80	1,553.25	PM PTSP Naker
B.12.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi (PD)	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Lokal		-		-	20	150.00	20	260.00	25	260.00	25	-	30	450.00	215	1,120.00	PM PTSP Naker
		Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi PMDN Nasional		-			5		5		10		10		10		40		PM PTSP Naker
		Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi PMA		-			1		1		1		1		1		5		
B.12.3	Program Pembinaan dan pelayanan perizinan (PD)	Jumlah Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	1093	205.66	1232	240.00	509	205.75	560	377.11	620	387.00	670	638.00	750	389.00	3109	2,236.86	PM PTSP Naker
		Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan		-		71.86	491	220.75	540	526.50	550	707.00	630	1,077.00	650	652.00	2861	3,255.11	
B.13	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga				3,629.40		3,370.26		2,056.00		4,809.43		3,618.84		6,232.80		4,887.49		24,974.82	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.13.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)	organisasi yang memiliki kepengurusan dan program serta kegiatan yang jelas	12	1,548.70	12	573.96	13	908.10	15	1,121.03	17	1,525.34	18	1,974.20	19	2,591.39	19	8,694.02	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR
B.13.2	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang aktif (organisasi)	organisasi yang memiliki kepengurusan dan program serta kegiatan yang jelas		2,031.80		812.10			15	120.00	0	-	16	120.00	0	-	39	1,052.10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR
		Jumlah Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat (cabang)	Jumlah Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat (cabang)	12		14														
B.13.3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi (atlet)	atlet beprestasi tingkat Provinsi/Regional/Nasional/Internasional				812.20	135	1,147.90	143	1,668.40	148	2,093.50	153	2,124.60	160	2,296.10	160	10,142.70	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR
B.13.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (jumlah)	sarana dan prasarana yang memiliki fasilitas sesuai dgn peraturan	2	48.90	2	1,172.00			3	1,900.00	4	-	5	2,014.00	6	-	6	5,086.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR
B.14	Urusan Kebudayaan				2,642.78		5,173.67		4,225.27		6,240.49		5,678.92		4,687.36		4,604.39		36,529.69	
B.14.1	Program Pengembangan Nilai Budaya (PD)	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	Jumlah Kelompok Seni yang mandiri/ Jumlah Kelompok seni yang ada (%)	0.25		4.4	176.27	8.9	352.85	13.3	716.46	13.3	408.71	13.3	685.90	13.3	687.90	13.3	3,028.09	Dinas Permus euman dan Peninggalan Bersejarah
		Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	Jumlah Kelompok Budaya yang mandiri/ Jumlah Kelompok Budaya yang ada (%)	40		40		56		64		72		80		84		84		



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)	Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)	43	192.08	45	176.27												176.27	
		Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)	Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)	43		44													-	
		Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)	Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)	18		19													-	
B.14.2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PD)	Persentase budaya benda yang lestari	(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100%		2,390.25		4,492.68	61.34	1,981.12	63.02	3,523.73	64.7	1,933.53	66.38	2,196.16	68.06	2,171.27	68.06	16,298.49	
		Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan	Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan																-	
		- Buku (Buah)	- Buku (Buah)	2		1													-	
		- Film (Buah)	- Film (Buah)	-		-													-	
		Jumlah Museum dikelola (buah)	Jumlah Museum dikelola (buah)	6		6													-	
		Angka Kunjungan Museum (buah)	Angka Kunjungan Museum (buah)	31,839		31,062													-	
		Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)	Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)	1		4													-	

Dinas Permusuman dan Peninggalan Bersejarah



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/ Kawasan)	Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/ Kawasan)	4		4														
		Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)	Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)	2		20														
		Jumlah Pengunjung Infobox (Orang)	Jumlah Pengunjung Infobox (Orang)	10,653		8,549														
		Jumlah Pengunjung Iptek Center (Orang)	Jumlah Pengunjung Iptek Center (Orang)	-		1,878														
		Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)	Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)	3		4														
B.14.3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD)	Persentase budaya tak benda yang lestari	(jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ total jumlah objek pemajuan kebudayaan) x 100 %		60.45		328.45	13.3	1,376.40	17.8	2,000.30	22.2	3,336.68	26.7	1,805.30	31.1	1,745.22	31.1	16,511.94	Dinas Permus euman dan Peningg alan Bersejar ah
		Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah (Jenis)	Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah (Jenis)	14		14														
B.14.4	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif	Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif					10	514.90										514.90	Dinas Permus euman dan Peningg alan Bersejar ah
B.15	Urusan Statistik				782.00		813.08		885.46		654.88		576.93		588.46		695.16		3,856.75	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
B.15.1	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%)	Ketersediaan data Statistik daerah dan OPD (termasuk kerjasama BPS)	85	282	85	242.00	86	309.00	87	22.50	88	23.63	88	24.81	90	24.81	90	646.75	Barenlit bangsa, Bag. Perekonomian dan seluruh OPD	
		Persentase Data PNS yang Diperbarui dan diverifikasi (%)	(Jumlah Data PNS yang diperbarui dan Verifikasi/Jumlah seluruh data PNS) x 100 %	100		100		100		100		100		100		100		100			Pertanian
							51.66		41.80												Kesbang Pol & PBD
							9.42		9.66		4.15		3.30		3.65		3.30				Koperindag
B.15.2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)	Ketersediaan data profil daerah dan OPD	28	500	28	510.00	28	520.00	28	530.00	28	540.00	28	550.00	28	560.00	1	3,210.00	Barenlit bangsa, Bag. Perekonomian dan seluruh OPD	
											5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		L. Segar
													5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
B.16	Urusan Persandian				-		28.90		28.90		31.79		34.97		38.47		42.31		205.34		
B.16.1	Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengamanan informasi pemda	Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	n/a		12	28.90	12	28.90	12	31.79	12	34.97	12	38.47	12	42.31	12	205.34	Bagian Humas dan Kominfo	
B.17	Urusan Perpustakaan				0		235.74		151.31		154.34		157.42		160.57		163.78		1,023.16		



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.17.1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Angka kunjungan (orang)	jumlah orang yang berkunjung ke pustaka daerah	61,922	0	61,314	235.74	63,000	151.31	65,000	154.34	66,000	157.42	68,000	160.57	70,000	163.78	135,500	1,023.16	Dinas kearsipan dan Pustaka
B.18	Urusan Kearsipan				0		202.18		286.33		455.38		363.09		380.85		413.67		2,101.50	
B.18.1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (%)	(OPD yang mengelola arsip secara baku / jumlah OPD) x 100 %	27		30	68.55	40	49.40	45	50.38	55	51.39	65	52.42	75	53.47	75	325.61	Dinas kearsipan dan Pustaka
B.18.2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip Statis yang terselamatkan (Lembar)	Jumlah arsip Statis yang tersimpan di depo arsip	1,700		1,725	67.84	2,500	154.63	4,000	200.00	5,000	175.00	6,000	180.00	7,000	200.00	7,000	977.47	Dinas kearsipan dan Pustaka
B.18.3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelola kearsipan dan perpustakaan yang memperoleh sertifikat / jumlah pengelola yang ada (%)	(jumlah pengelola kearsipan dan perpustakaan yang memperoleh sertifikat / jumlah pengelola yang ada) x 100 %	30		40	65.79	45	82.30	50	85.00	60	86.70	70	88.43	75	90.20	1,317	498.42	Dinas kearsipan dan Pustaka
B.18.4	Program pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar (%)	(Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar / jumlah sarana prasarana yang ada) x 100 %	20		20		20		30	120.00	35	50.00	40	60.00	50	70.00	50	300.00	Dinas kearsipan dan Pustaka
C	URUSAN PILIHAN				13,321.63		26,754.94		17,972.96		24,177.41		28,068.36		22,314.73		23,458.39		142,746.79	
C.1	Urusan Kelautan Dan Perikanan				124		247.06		336.00		959.14		864.96		996.44		938.08		4,341.68	
C.1.1	Program Peningkatan Produksi Perikanan (PD)	Jumlah Produksi ikan (Ton)	Jumlah Produksi perairan umum dan budidaya	214.98	124	216.05	-	216	-	216.5	959.14	217	864.96	217.5	996.44	218	938.08	869	3,758.62	DKP3



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C.1.2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi ikan (Ton)	Jumlah Produksi perairan umum dan budidaya	214.98	124.00	216.05	247.06	216.00	336.00									432.05	583.06	DKP3
C.2	Urusan Pariwisata				7,014.60		6,150.44		6,880.69		9,657.25		14,185.41		6,373.55		6,321.46		49,568.80	
C.2.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %		4491.6		3,706.70	32.35	3,200.30	38.24	6,695.00	44.12	10,386.46	50	4,463.74	55.88	3,636.39	55.88	32,088.59	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR
		Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)	Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)	8		6													-	
		Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)	Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)	2		2													-	
C.2.2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (PD)	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri/Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif) x 100 %				35.05	15	268.34	17	272.61	18	486.25	19	257.48	20	345.49	20	1,665.21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)	0		21													-	
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)	0		16													-	
C.2.3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD)	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	331,484	2,523	354,611	2,322.89	379,351	2,388.59	405,817	2,284.64	434,130	2,514.38	1,000,000	1,213.69	1,300,000	1,777.47	1,300,000	12,501.66	Dinas Pariwisata dan OR dan Setdako



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
C.2.4	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD)	Persentase MoU Kemitraan Aktif (%)	Jumlah MoU Kemitraan aktif dibagi dengan jumlah MoU Kemitraan dikali seratus persen	n/a		33	42.90	50	1,023.46	70	405.00	75	798.32	80	438.65	90	562.12	90	3,270.45	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR	
		Jumlah Rumah Makan (buah)	Jumlah Rumah Makan (buah)	46	76.1	46	42.90												42.90		
		Jumlah Home Stay (Buah)	Jumlah Home Stay (Buah)	45		37													-		
		Jumlah Pramuwisata (orang)	Jumlah Pramuwisata (orang)	19		10													-		
C.3	Urusan Pertanian				4,031.27		2,842.00		8,838.00		8,218.72		7,691.36		9,377.44		10,256.72		47,224.24		
C.3.1	Program Peningkatan Produksi tanaman pangan (PD)	Jumlah Produksi padi (ton GKG)	Produktivitas x luas panen							14,600.00	1,292.70	14,700.00	1,180.31	14,800.00	1,394.90	14,900.00	1,534.10	14,900.00	5,402.01	DKP3	
C.3.2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan (PD)	Jumlah Produksi karet (ton)	Produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan							1,255.00	824.60	1,260.00	871.85	1,265.00	1,104.90	1,270.00	1,252.80	1,270.00	4,054.15	DKP3	
		Jumlah Produksi kakao(ton)	Produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan							535		540		545		550		550	-	DKP3	
C.3.3	Program Peningkatan Produksi Peternakan (PD)	- Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)	(pemotongan tercatat +5 % (pemotongan tercatat) x 173,5			112.91	351.68	1,508.00	352.68	1,189.16	353.68	1,102.40	354.68	1,303.26	355.68	1,394.90	1,768.40	6,610.63	DKP3		
			Telur ayam ras : 60% x populasi x 10,6 kg				133.86		134.36			134.86		135.36		135.86		674.3	-	DKP3	
		- Jumlah Produksi Telur (Ton)	Telur Itik 60% x populasi x 7,6 kg																	-	DKP3
			telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg																		-



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
				Reali sasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton)	Daging ayam buras:					897.06		897.86		898.66		899.46		900.26		4,493.3	-	DKP3	
			(150% x populasi) x 0,715 kg																	-	DKP3
			Daging ayam ras pedaging:																	-	DKP3
			(600% x 97% x populasi) x 0,825 kg																	-	DKP3
			Daging ayam petelur :																	-	DKP3
			(50% x populasi) x 0,825 kg																	-	DKP3
		Jumlah Populasi Ternak Sapi (Ekor)		6,051	208.31	6,464														DKP3	
		Jumlah Populasi Ternak Kerbau(Ekor)		1,261		1,363														DKP3	
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)		2,941		2,943														DKP3	
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (Ekor)		175,649		176,600														DKP3	
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (Ekor)		54,154		54,770														DKP3	
C.3.4	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perikanan (PD)	Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	(perbandingan luas sawah dengan Hand Tractor)					1 : 18	539.00	1:16	717.34	1:14	704.37	1:12	870.58	1:10	970.34	1:10	3,801.63	DKP3	
C.3.5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang naik skor sesuai kriteria Permentan	Hasil penilaian kelompok tani sesuai kriteria Permentan					5	240.00	5	546.84	5	540.07	5	668.74	5	751.68	5	2,747.33	DKP3	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(Kelompok/ Wilayah Binaan)																		
		Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang, studi banding (Orang /tahun)	Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang, studi banding (Orang /tahun)	956	138.73	362	115.18											362	115.18	DKP3
C.3.6	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Prosentase penambahan sawah beririgasi (%)	Penambahan sawah beririgasi/sawah data awal	0	0	0	-	0	-	15	3,159.52	5	2,947.86	5	3,493.92	5	3,761.88	30	13,363.18	DKP3
C.3.7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (GKG) (Ton/Luas Panen)	Jumlah Produksi Padi Saat Panen	14,274.00	2,181.38	16,108.00	1,806.65	14,500	5,106.00									30,608.00	6,912.65	DKP3
		Jumlah Luas Penanaman Palawija (Ha)	Jumlah Luas Penanaman Palawija (Ha)	175.75		194.80													-	DKP3
		Jumlah Luas Penanaman Sayur (Ha)	Jumlah Luas Penanaman Sayur (Ha)	140.00		199.19													-	DKP3
		Jumlah Populasi tanaman buah-buahan (batang)	Jumlah Populasi tanaman buah-buahan (batang)	370,077		385,273													-	DKP3
		Produktivitas Karet Kering (Kg/Ha)		1,248.23		1,250.23													-	DKP3
		Produktivitas Kakao Kering (Kg/Ha)		1,024.68		1,055.56													-	DKP3
		Jumlah Produksi karet (ton)						1,250										1,250	-	DKP3
		Jumlah Produksi kakao (Ton) (ton)						530										530	-	DKP3



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C.3.8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Prosentase Penyuluh yang naik Jenjang jabatan (%)	(Penyuluh naik jenjang jabatan / Total Penyuluh) x 100 %					5.55	190.00	5.55	141.36	5.55	147.34	5.55	190.24	5.55	219.24	27.75	888.18	DKP3
		Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten di bidangnya	Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten di bidangnya	571.00	385	176.00	152.58												152.58	DKP3
C.3.9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Ternak yang aman dari Penyakit PHMS dan zoonosis (%)	(Ternak yang tidak terserang penyakit / total ternak dilayani) x 100%					90	1,255.00	91	347.20	92	197.16	93	350.90	94	371.78	94	2,522.04	DKP3
		Penanganan Penyakit ternak / hewan (jenis layanan pertahun)	Penanganan Penyakit ternak / hewan (jenis layanan pertahun)	7	399.38	7	182.64											7	182.64	DKP3
C.3.10	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dipromosikannya produk pertanian Sawahlunto ditingkat kota provinsi dan nasional (Kali/Tahun)	Dipromosikannya produk pertanian Sawahlunto ditingkat kota provinsi dan nasional (Kali/Tahun)	4	81.11	5	130.21											5	130.21	DKP3
C.3.11	Program Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang	Tersedianya kawasan Agrowisata (Lokasi)	Tersedianya kawasan Agrowisata (Lokasi)	1	637.28	1	341.83											1	341.83	DKP3
C.4	Urusan Perdagangan				1,323.76		10,073.64		740.93		2,789.25		2,824.63		2,758.30		2,857.13		22,043.88	
C.4.1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (PD)	Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (juta)	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	22,767	1,235.00	23,635.41	5,388.55	23,946.52	530.85	25,106.79	2,528.19	25,837.33	2,524.63	26,785.71	2,414.00	27,015.91	2,477.13	27,015.91	15,863.35	Dinas Koperindag
		Jumlah Peluang untuk promosi (event)	Jumlah Peluang untuk promosi (event)	40		49.00														Dinas Koperindag



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
C.4.2	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan (PD)	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari Mikro menjadi kecil (Pedagang)	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari Mikro menjadi kecil (Pedagang)	300	34.00	322	168.89	342	-	362	60.00	382	70.00	402	80.00	422	90.00	2532	468.89	Dinas Koperin dag	
		Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)	Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)	100		95															Dinas Koperin dag
C.4.3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tradisional tertib ukur (pasar)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur dari timbanga, harga, dan kualitas produk		54.76		4,516.20	1	210.08	2	201.06	2	230.00	3	264.30	3	290.00	3	5,711.64	Dinas Koperin dag	
		Ketersediaan Sembako di Pasar (%)	Ketersediaan Sembako di Pasar (%)	100		95															Dinas Koperin dag
		Alat ukur yang ditera ulang (timbangan)	Alat ukur yang ditera ulang (timbangan)	0		750															Dinas Koperin dag
		Jumlah Pasar terkelola (buah)	Jumlah Pasar terkelola (buah)	9		9															Dinas Koperin dag
C.5	Urusan Perindustrian				828.00		7,441.80		1,177.34		2,553.05		2,502.00		2,809.00		3,085.00		19,568.19		
C.5.1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	Jumlah IKM yang meningkatkan klasifikasinya ke kecil (unit)	Jumlah IKM yang meningkatkan klasifikasinya ke kecil (unit)		664.00		5,799.84	50	962.34	50	1,910.05	50	1,782.00	50	2,009.00	50	2,205.00	1554	14,668.23	Dinas Koperin dag	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah IKM yang meningkatkan klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	Jumlah IKM yang meningkatkan klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)					1		1			1		1			1		Dinas Koperindag
		Jumlah IKM yang menerima Bantuan Kemas Produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	Jumlah IKM yang menerima Bantuan Kemas Produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	47		56														Dinas Koperindag
		Jumlah Sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)	Jumlah Sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)	1		1														Dinas Koperindag
		Jumlah Petenun Songket yang meningkatkan keterampilan (orang)	Jumlah Petenun Songket yang meningkatkan keterampilan (orang)	877		912														Dinas Koperindag
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	32		35														Dinas Koperindag
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami (Kelompok)	Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami (Kelompok)	6		12														Dinas Koperindag
		Penerapan gugus kendali mutu (Kelompok)	Penerapan gugus kendali mutu (Kelompok)	12		12														Dinas Koperindag



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C.5.2	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial (PD)	jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 Pengrajin (sentra industri)	jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 Pengrajin (sentra industri)		164.00		1,641.96	1	-	1	125.00	1	180.00	1	235.00	1	290.00	7	2,471.96	Dinas Koperindag
		Jumlah sentra industri potensial (Sentra)	Jumlah sentra industri potensial (Sentra)	14		14														Dinas Koperindag
		Jumlah Pengrajin cendera mata dan Souvenir (IKM)	Jumlah Pengrajin cendera mata dan Souvenir (IKM)	19		24														Dinas Koperindag
C.5.3	Program Penataan Struktur Industri (PD)	jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM)	Jumlah produk hasil IKM yang memenuhi standar	35		38		40	35.00	42	5.00	44	10.00	46	15.00	48	20.00	48	85.00	Dinas Koperindag
C.5.4	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)					10	180.00	45	513.00	45	530.00	45	550.00	45	570.00	190	2,343.00	Dinas Koperindag
D	URUSAN PENUNJANG				13,938.18		41,900.34		85,774.11		84,683.06		83,672.31		85,965.02		91,452.62		473,007.92	
D.1	Urusan Perencanaan				1,677.47		2,170.38		6,340.00		3,678.64		3,669.62		3,797.14		4,857.25		24,513.03	
D.1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %		1,051.17		1,321.14	100	1,500.00	100	1,500.00	100	1,500.00	100	1,500.00	100	2,500.00	100	9,821.14	Barenlit bangda dan seluruh OPD
		Persentase Ketersediaan	(Jumlah Dokumen	5		7														



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)	Perencanaan yang tersusun)						4.00		2.81		0.79		0.79		0.74		9.14	Dinsos
							7.73		15.00		16.08		6.80		3.40		4.30		53.31	Pariwisata
							10.53		8.00		6.20		5.83		12.76		14.56		57.88	Pertanian
							-		14.99		19.55		20.47		20.25		14.09		89.35	L. Segar
							9.75		13.04		12.62		7.26		12.15		18.62		73.45	Kebudayaan
									15.00		13.97		14.62		14.47		14.09		72.14	Talawi
									6.40		4.40		10.84		5.32		12.86		39.82	Koperindag
D.1.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Ekonomi kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %		100		102.99	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	2,602.99	Barenlit bangda
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)	2		2														Barenlit bangda
D.1.3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Sosial Budaya kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %		26.3		40.73	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	790.73	Barenlit bangda
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)	3		4														Barenlit bangda
D.1.4	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Fisik kedalam RKPD	(Jumlah Program di RKPD dengan nomenklatur dan indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100 %	100	500	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	3,000.00	Barenlit bangda



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Perencanaan Lokasi pada Kegiatan di RKPD dengan Peruntukan di RTRW	100		100		100		100		100		100		100		100	-	Barenlit banda
D.1.5	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	Jumlah Doumen yang disusun (Dok)	Jumlah Doumen yang disusun (Dok)	0	-	0	-	1	60.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	860.00	Barenlit banda
D.1.6	Program Penelitian, Pengembangan dan Kajian Daerah	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi					16	2,475.00	16	475.00	16	475.00	16	600.00	16	650.00	80	4,675.00	Barenlit banda
D.1.7	Program Perencanaan Pengembangan wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (Dok)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (Dok)	8	212.62	8	177.51	3	1,078.57	3	278.00	3	278.00	3	278.00	3	278.00	23	2,368.08	Barenlit banda
D.2	Urusan Keuangan				3,259.37		2,820.00		1,597.48		1,391.20		1,169.17		1,169.17		1,124.73		9,271.74	
D.2.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah (PD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah		1,893.46		842.73	WTP	89.88	WTP	51.94	WTP	51.34	WTP	51.34	WTP	46.30	WTP	1,133.52	BPKAD, Setdako
		Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)	Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)	100		100													-	BPKAD, Setdako
		Realisasi Belanja Daerah (%)	Realisasi Belanja Daerah thd APBD	94		94													-	BPKAD, Setdako
		Realisasi Penerimaan Daerah (%)	Realisasi Penerimaan Daerah terhadap Target	100		100													-	BPKAD, Setdako
		Realisasi PAD (%)	Realisasi PAD terhadap Target	100		100													-	BPKAD, Setdako



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)	Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)	95		95													-	BPKAD, Setdako
		Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)	30		30													-	BPKAD, Setdako
		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100		100													-	BPKAD, Setdako
D.2.2	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD)	Penetapan APBD	kesesuaian Tanggal Penetapan APBD dengan aturan Permendagri		1,365.91		1,304.80	Tepat Waktu	1,494.23	Tepat Waktu	1,327.76	Tepat Waktu	1,106.46	Tepat Waktu	1,106.46	Tepat Waktu	1,068.19	Tepat Waktu	7,407.91	BPKAD, Setdako
		Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)	Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)	Tepat Waktu		Tepat Waktu													-	
D.2.3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan berpredikat baik (%)	Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan berpredikat baik/Jumlah Desa x100%	n/a	0.00	n/a	-	20.00	13.37	40.00	11.50	60.00	11.36	80.00	11.36	96.00	10.25	96.00	57.84	BPKAD, Setdako, dan Dinsos PMDA
D.2.4	Program Pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan	Penerimaan PBB (Rupiah Juta)	Penerimaan PBB (Rupiah Juta)	975.82	585.61	937.39	269.15												269.15	BPKAD, Setdako
D.2.5	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PAD (Rupiah Milyar)	Penerimaan PAD (Rupiah Milyar)	20.72	977.5	19.8	403.32												403.32	BPKAD, Setdako
D.3	Urusan Pengawasan				1,500.00		2,195.69		4,220.64		3,065.14		3,164.15		3,161.32		3,128.25		18,935.20	
D.3.1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Persentase tindak lanjut temuan	(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / jumlah temuan) x 100	100	1,000.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	100	3,000.00	Inspektoral dan Kecamatan



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD)		%						1,315.80		936.51		978.73		970.56		942.09		5,143.69	Kec. Barangin
							1,195.69		1,773.30		983.94		1,026.26		1,015.68		993.57		6,988.44	L. Segar
D.3.2	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PD)	Nilai APIP	Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto	level 2	500	Level 3	500.00	Level 3	500.00	Level 3	500.00	Level 3	500.00	level 3	500.00	level 4	500.00	level 4	3,000.00	Inspektoral
D.3.3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Nilai SAKIP	Penilaian terhadap SAKIP Kota Sawahlunto	CC		CC		B	131.54	B	144.69	B	159.16	B	175.08	BB	192.59	BB	803.07	Inspektoral
		Nilai Evaluasi SAKIP OPD yang minimal B (OPD)	Nilai Evaluasi SAKIP OPD yang minimal B (OPD)	5		6		12		16		18		19		21		21		
D.4	Urusan Sekretariat Dewan				66.00		8,818.31		7,065.00		7,391.67		7,970.00		9,070.00		10,270.00		50,584.98	
D.4.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (PD)	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah propemperda) x 100 %	n/a	66	50	8,818.31	75	7,065.00	80	7,391.67	85	7,970.00	86	9,070.00	87	10,270.00		50,584.98	Sekretariat Dewan
D.5	Urusan Sekretariat Daerah				7,435.34		25,895.96		66,551.00		69,156.41		67,699.37		68,767.39		72,072.38		369,702.97	
D.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran				12	2,232.09	12	3,055.30	12	2,660.83	12	2,956.92	12	3,052.61	12		12	13,957.76	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
								4,487.11		3,958.27		4,508.54		4,212.14		4,994.63			22,160.68	Dinas Pendidikan
								1,488.0		3,341.0		3,711.0		4,123.0		4,581.0				17,244.00



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									0		0		0		0		0			
							949.87		1,161.10		816.81		230.42		228.50		225.81		3,612.51	Dinsos
							1,433.65		1,640.69		1,739.13		1,253.57		664.39		890.67		7,622.10	Pariwisata
							1,888.27		2,103.00		1,349.74		1,177.66		1,314.86		1,202.24		9,035.77	Pertanian
							108.06		137.67		283.50		277.50		378.00		424.50		1,609.23	Capil
									3,459.39		3,662.16		3,350.97		3,414.30		3,320.40		17,207.23	Dinas Pertakim LH
							1,475.25		1,578.17		1,206.00		958.99		1,060.70		958.99		7,238.10	Kesbangpol & PBD
							3,642.25		3,160.61		2,016.47		2,065.14		2,061.32		1,943.53		14,889.32	Satpol PP
									553.04		538.27		586.40		602.33		600.08		2,880.13	Kec. Barangin
							383.08		395.73		396.76		416.40		416.78		406.75		2,415.50	L. Segar
							-		452.03		470.67		504.22		498.84		486.64		2,412.40	Silungkang
									468.20		480.03		502.61		497.25		484.15		2,432.24	Talawi
							-		1,882.43		2,674.74		2,923.14		3,205.05		3,512.42		14,197.78	Koperindag
							1,437.37		1,600.69		1,567.07		890.94		1,491.36		1,499.88		8,487.31	Kebudayaan
							1,608.11		1,271.84		1,429.53		1,412.91		1,412.91		1,385.51		8,520.80	BPKAD
D.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						12	2,351.10	12	2,886.21	12	2,974.83	12	3,122.31	12	3,834.55	12	15,169.00	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
																				RSUD



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023					
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		Target
1																					
											849.00		944.00		1,050.00		1,153.00			3,996.00	
							233.18		214.00		1,088.55		307.07		304.51		288.61			2,435.91	Dinsos
							292.41		177.68		285.88		153.78		81.50		109.26			1,100.50	Pariwisata
							414.10		550.00		1,286.50		1,341.60		762.70		707.20			5,062.10	Pertanian
							48.47		124.00		680.00		665.00		504.00		566.00			2,587.47	Capil
									1,034.30		900.67		738.28		543.42		525.63			3,742.30	Dinas Pertakim LH
									633.63		681.23		1,303.39		1,088.40		654.75			4,361.40	Dinas Pendidikan
							344.00		327.30		271.66		216.02		238.93		216.02			1,613.93	Kesbangpol & PBD
							571.14		1,058.50		675.32		691.62		690.34		650.89			4,337.82	Satpol PP
									162.55		156.05		165.68		172.45		165.09			821.83	Kec. Barangan
							-		94.00		173.91		162.96		177.47		182.19			790.52	L. Segar
							-		63.95		127.97		213.98		94.14		119.83			619.86	Silungkang
									73.70		118.76		123.87		123.17		119.92			559.42	Talawi
							299.74		531.70		700.65		452.73		663.74		498.22			3,146.77	Kebudayaan
							1,292.71		1,551.28		960.06		1,082.34		1,082.34		1,151.51			7,120.24	BPKAD
									155.00		972.00		431.20		526.35		740.20			2,824.75	Koperindag
																				-	



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
D.5.3	Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	(Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah Aparatur) x 100 %	22	5,821.00	26	3,821.00	30	4,060.00	34	4,123.60	38	4,721.77	41	4,329.75	44	4,448.54	44	25,504.66	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
											691.00		768.00		853.00		948.00		3,260.00	RSUD
							73.27		100.00		70.35		19.85		19.68		19.45		302.59	Dinsos
							80.98		120.00		170.45		91.68		48.59		65.14		576.84	Pariwisata
							96.80		150.00		108.50		106.00		130.50		130.00		721.80	Pertanian
							40.18		156.00		472.50		508.75		504.00		566.00		2,247.43	Capil
									200.00		300.00		257.04		254.85		251.43		1,263.32	Dinas Pendidikan
									75.00		75.00		60.00		50.00		40.00		300.00	Dinas Pertakim LH
							148.83		120.00		49.80		39.60		43.80		39.60		441.63	Kesbangpol & PBD
							144.45		273.00		174.17		178.38		178.05		167.87		1,115.91	Satpol PP
									76.30		74.49		82.87		81.98		79.82			Kec Barangan
							10.00		30.00		55.87		58.49		57.87		56.35		268.58	L. Segar
							-		35.00		41.90		43.87		43.40		42.26		206.43	Silungkang
									29.14		41.90		43.87		43.40		42.26		200.57	Talawi
							97.60		128.00		125.31		72.79		119.26		119.94		662.90	Kebudayaan
							457.11		138.00		387.86		297.50		297.50		333.00		1,910.97	BPKAD
									250.00		250.00		275.00		300.00		330.00		1,405.00	Koperindag



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Realisasi	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
D.5.4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap						100	349.50	100	364.45	100	480.90	100	498.98	100	518.88	100	2,212.71	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
															403.72				403.72	Dinas Pendidikan
											154.00		169.00		183.00		198.00		704.00	RSUD
							10.00		10.00		7.04		1.99		1.97		1.94		32.93	Dinsos
											23.81		27.20		42.34		53.49		146.83	Capil
									94.69		94.69		73.00		68.00		66.00		396.38	Dinas Pertakim LH
							10.00		10.00		8.30		6.60		7.30		6.60		48.80	Kesbangpol & PBD
							271.60		240.00		153.12		156.82		156.53		147.58		1,125.64	Satpol PP
									3.50		3.26		3.41		3.38		3.29		16.83	Kec. Barangan
							-		2.50		3.26		3.41		3.38		3.29		15.83	L. Segar
									-		3.26		3.41		3.38		3.29		13.33	Silungkang
									2.40		3.26		3.41		3.38		3.29		15.73	Talawi
D.5.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2,000	945.43	2,000	1,536.30	2000	1,678.50	2020	2,041.35	2050	2,550.99	2080	2,896.09	2100	3,385.70	2100	14,088.93	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
		Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar / Jumlah ASN x 100%	(Jumlah ASN yang diberi Izin dan Tugas Belajar / Jumlah ASN) x 100%	2.50		5.60		5.60		5.70		5.70		5.80		5.80		5.80	-	BKPSDM



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab		
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	(Jurnal ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat / Jumlah ASN) x 100%	11.48		24.10		20.40		20.70		21.30		22.00		23.00		23.00	-	BKPSDM		
D.5.6	Program Penanganan Pengaduan Kasus ASN	Persentase Aparatur yang melakukan pelanggaran Disiplin	(Jumlah Aparatur yang melanggar disiplin / Jumlah ASN) x 100%	0.31	24.16	0.47	24.00	0.45	62.90	0.44	64.20	0.43	70.45	0.42	76.18	0.41	82.42	0.41	380.15	BKPSDM		
D.5.7	Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kepala Daerah	3	265	5	204.65	3	719.36	3	741.30	3	765.43	3	791.97	3	821.17	3	4,043.88	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD		
D.5.8	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah, Pihak Ketiga dan Lainnya	n/a		3	30.46	3	330.46	3	365.06	3	398.57	3	445.42	3	495.96	3	2,065.93	Sekretariat Daerah		
D.5.9	Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%)	Jumlah kecamatan, kelurahan/desa yang melaksanakan movev	n/a		41	72.44	41	459.64	41	522.73	41	545.00	41	569.50	41	596.46	41	2,765.78	Sekretariat Daerah dan Kecamatan		
									-		46.56		48.75		53.05		51.65		200.00	Barangin		
									-		-		32.59		34.12		33.76		32.87		133.34	L. Segar
									-		30.00		27.93		29.25		28.94		28.17		144.29	Silungkang
									-		-		27.93		29.25		28.94		28.17		114.29	talawi
D.5.10	Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP	Predikat hasil penilaian SAKIP oleh KEMENPAN RB					B	64.20	B	70.62	B	77.68	B	85.45	BB	93.99	BB	391.93	Sekretariat Daerah		



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
D.5.1.1	Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan				385		400	421.88	400	-	-	-	-	-	-	-	-	421.88	Sekretariat Daerah
D.5.1.2	Program Pengembangan SDM Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa						175	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.99	Sekretariat Daerah
D.5.1.3	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa								250	82.00	250	90.20	250	99.22	250	109.14	250	380.56	Sekretariat Daerah
D.5.1.4	Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik								350	182.00	350	200.20	350	220.22	350	242.24	350	844.66	Sekretariat Daerah
D.5.1.5	Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa								175	246.00	175	270.60	175	297.66	175	327.43	175	1,141.69	Sekretariat Daerah
D.5.1.6	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	47	5	88.64	5	35.47	5	39.02	5	42.92	5	47.21	6	51.93	26	305.18	Sekretariat Daerah
D.5.1.7	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP	Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP	n/a		n/a		5	78.93	5	86.82	5	95.50	5	105.05	6	115.56	26	481.85	Sekretariat Daerah
D.5.1.8	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan (Perda)	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan (Perda)	14	268	14	180.00	14	183.00	15	200.20	15	220.22	16	242.24	16	266.47	76	1,292.13	Sekretariat Daerah



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
D.5.19	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Konsultasi Jasa Hukum (Kali)	Jumlah Konsultasi jasa hukum dengan lembaga Konsultan hukum	20	65	20	115.00	20	112.46	20	123.71	20	136.08	20	149.68	20	164.65	100	801.58	Sekretariat Daerah
		Jumlah Penanganan Perkara/Kasus (Perkara/Kasus)	jumlah perkara dan persoalan hukum yang yang terfasilitasi	-		-		2		2		2		2		2		10		
D.5.20	Program Pembinaan Keagamaan (PD)	Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun	(jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %	n/a	-	20		25	7,990.79	28	6,700.00	30	6,900.00	40	6,690.00	50	7,690.00	50	35,970.79	Bagian Kesra, Setdako
		Persentase Imam Masjid yang berkualitas	(Jumlah Imam tetap dimasjid yang berijazah Lc atau setara/Jumlah Imam Tetap Masjid) x 100 %	n/a	-	n/a		0		10		15		25		30		30		
		Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)									234.92		270.53		357.15		260.60		1,123.21	Kec. Barangin
											260.71		272.97		270.06		262.95		1,066.69	L. Segar
											260.71		224.23		270.06		215.99		970.99	Situngkang
											772.81		189.57		187.55		182.61		1,332.54	Talawi
D.5.21	Program Peningkatan Kualitas Sarana peribadatan (PD)	Persentase sarana peribadatan yang memadai	Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag	70	-	75	555.00	80	500.00	85	500.00	90	500.00	95	500.00	97	500.00	97	3,055.00	Bagian Kesra, Setdako



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang terdaftar di Kemenag	10		15		20		25		30		35		40		40	-	
D.5.2.2	Program Pembinaan Agama dan Adat	Jumlah masjid dan mushola yang aktif melaksanakan sholat lima waktu	Jumlah masjid dan mushola yang aktif melaksanakan sholat lima waktu	n/a	0	n/a	-	172	3,443.67										3,443.67	Bagian Kesra, Setdako
		Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)							285.55		-		-		-		-		285.55	Kec. Barangin
							-		204.35		-		-		-		-		204.35	L. Segar
							-		177.50		-		-		-		-		177.50	Silungkang
									148.81		-		-		-		-		148.81	Talawi
D.5.2.3	Program pembangunan infrastruktur Kelurahan	Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan)	Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara			10		10	1,490.00	10	1,490.00	10	1,490.00	10	1,490.00	10	1,490.00	10	7,450.00	Setdako dan Kecamatan
									1,360.00		1,379.63		1,452.33		1,435.07		1,392.91		7,019.94	Barangin
							1,356.00		2,090.00		1,688.84		1,730.19		1,788.93		1,729.49		10,383.46	L. Segar
D.5.2.4	Program Operasional Kecamatan	Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)	Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun			100		100	254.67	100	224.21	100	236.71	100	236.11	100	231.77	100	1,183.46	Barangin
									280.25		228.13		239.83		238.24		246.05		1,232.49	L. Segar
							-		87.78		206.55		214.36		213.04		214.47		936.20	Silungkang
							-		100.82		228.71		239.47		236.91		230.67		1,036.59	Talawi
D.5.2	Program Penyiapan	Persentase pelayanan	(Jumlah Perizinan dan			100		100	62.84	100	23.28	100	26.32	100	28.94	100	28.17	100	169.55	Barangin



No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		Penanggung jawab
				Realisasi	Rp. (Juta)	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%)	non perizinan yang diterbitkan/jumlah yang diusulkan) x 100 %		25.00		19.84		19.55		20.47		20.25		19.72		124.85		L. Segar	
					-		-		19.55		20.47		20.25		19.72		80.00		Silungkang	
					25.00		19.84		19.55		20.47		20.25		19.72		124.85		Talawi	
D.5.2 6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%)	(Jumlah jaringan Informasi Publik yang dioptimalisasi/ jumlah jaringan informasi di Kecamatan) x 100 %	-	-	50	20.00	60	6.52	70	7.80	80	8.68	90	9.39	90	52.39		Barangin	
					-		-		18.62		9.75		9.65		9.39		54.00		L. Segar	
					-		-		46.56		9.75		9.65		9.39		50.00		Silungkang	
					-		-		46.56		9.75		9.65		9.39		50.00		Talawi	
D.5.2 7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja rumah sakit yang tersedia (dokumen)	Jumlah laporan kinerja rumah sakit yang tersedia	2	960	2	-	2	-	2	50.00	2	55.00	2	61.00	2	68.00	8	234.00	RSUD
TOTAL BELANJA LANGSUNG							184,47 3.78		305,05 7.04		313,38 1.39		315,52 1.17		319,05 1.62		325,84 3.31		1,769,174.4 4	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut :



Tabel 8.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA SAWAHLUNTO

No	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Masjid Dan Mushola Yang Aktif (%)	(Jumlah Masjid Dan Mushola Aktif / Total Masjid Dan Mushola) X 100 %, Total Jumlah Masjid Dan Mushola 2017 Adalah 221	65	65	75	83	88	93	97	97
2	Persentase Komunitas Budaya Yang Aktif	(Jumlah Komunitas Budaya Yang Aktif / Total Komunitas Budaya) X 100 %	44	52	60	68	76	84	88	88
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun N Dikurangi Nilai PDRB ADHK Tahun N-1)/ Nilai PDRB ADHK Tahun N-1) X 100%	5.75	5.78	5.8	5.83	5.85	5.88	5.91	5.91
4	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (Sdgs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan Tahun)	52.7	55.81	58.24	61.02	64.17	67.01	70.7	70.7
5	Tingkat Kemiskinan (Sdgs)	Jumlah Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan / Jumlah Penduduk X 100%	2.01	2,39	2,27	2,21	2,15	2,09	2,023	2,023
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran Indeks Pembangunan Dari Harapan Hidup, Melek Huruf, Pendidikan Dan Standar Hidup Untuk Semua Negara Seluruh Dunia	71,13	72.30	73.71	75.33	76.99	78.62	80.67	80.67
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Keberhasilan Pencapaian Reformasi Birokrasi Di Suatu Pemerintah Daerah Oleh KemenpanRB	n/a	57.64	63.41	69.18	74.95	80.72	86.49	86.49



No	Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
8	Persentase Penegakan Perda (%)	(Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda) X 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
9	PDRB Sektor Pariwisata-(Sdgs)	PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Restoran	60,733.09	71,119.37	77,373.30	83,627.23	89,881.16	96,135.09	102,389.01	102,389.01
10	Persentase Pad Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total Pad) X 100 %	2.58	2.76	2.95	3.16	3.38	3.65	3.87	3.87
11	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Persentase Infrastruktur Dasar (Jalan, Air Minum, Sanitasi) Dalam Kondisi Baik/Tiga	74.83	75.94	77.33	79.00	81.00	82.67	84.67	84.67
12	Persentase Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Terfasilitasi	(Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Difasilitasi / Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dikali 100 %	18.64	13.17	59.76	84.89	89.84	94.78	100.00	100
13	Nilai Total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional Dan Asing	n/a	n/a	26	26	36	36	41	260



Tabel 8.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA SAWAHLUNTO

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Masjid Dan Mushola Yang Aktif (%)	(Jumlah Masjid Dan Mushola Aktif Minimal Sholat 5 Waktu/ Total Masjid Dan Mushola) X 100 %, Total Jumlah Masjid Dan Mushola 2017 Adalah 221	65	65	75	83	88	93	97	97
2	Persentase Rumah Ibadah Agama Lain Yang Aktif (%)	(Jumlah Rumah Ibadah Agama Lain Yang Aktif / Total Rumah Ibadah Agama Lain) X 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Sarana Peribadatan Yang Memadai	Jumlah Masjid Dan Mushola Yang Terdaftar Di Kemenag Dengan Fasum Yang Lengkap Dibagi Total Jumlah Masjid Dan Mushola Yang Terdaftar Di Kemenag	70	75	80	85	90	95	97	97
4	Persentase Sarana Pendidikan Agama Yang Memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) Dengan Fasum Yang Lengkap Dibagi Total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama Yang Terdaftar Di Kemenag	10	15	20	25	30	35	40	40
5	Persentase Komunitas Budaya Yang Aktif	(Jumlah Komunitas Budaya Yang Aktif / Total Komunitas Budaya) X 100 %	44	52	60	68	76	84	88	88
6	Persentase Budaya Benda Yang Lestari	(Jumlah Cagar Budaya Yang Lestari / Total Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan) X 100 %	57.98	59.66	61.34	63.02	64.7	66.38	68.06	68.06



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari	(Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan/ Total Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan) X 100 %	n/a	10.7	13.3	17.8	22.2	26.7	31.1	31.1
8	Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB ADHB /Tenaga Kerja(Juta/Jiwa/Tahun)	86.44	88.05	89.68	91.35	93.05	94.78	96.54	96.54
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja/Jumlah Penduduk Angkatan Kerja X 100%	6.19	6.15	6.03	5.65	5.02	4.82	4.53	4.53
10	PDRB Sektor Industri Pengolahan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB Dari Sektor Industri	423,483.33	466,255.15	513,346.92	565,194.95	622,279.65	685,129.89	754,328.01	754,328.01
11	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Konsumsi Semua Anggota Rumah Sebulan Dibagi Dengan Banyaknya Anggota Rumah Tangga (Dijadikan Pertahun)	9,343	9,522.39	9,746.16	10,008.33	10,300.58	10,632.26	11,024.59	11,024.59
12	Jumlah Omset Di Pasar-Pasar Tradisional Sawahlunto (Juta)	Jumlah Uang Yang Didapat Dari Hasil Penjualan Dalam Jangka Waktu Setahun	22,767	23,635.41	23,946.52	24,106.79	24,837.33	25,785.71	26,015.91	26,015.91
13	PDRB ADHB Sektor Pertanian Dan Perikanan (Jutaan Rupiah)	Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian Dan Perikanan	309,537.83	321,300.27	335,758.78	350,867.92	368,411.32	390,516.00	417,852.12	417,852.12
14	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Lamanya Sekolah (Dalam Tahun) Yang Diharapkan Akan Dirasakan Oleh Anak Pada Umur Tertentu Di Masa Mendatang.	13,14	13.36	13.62	13.92	14.22	14.57	14.96	14.96



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah Tahun Belajar Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Telah Diselesaikan Dalam Pendidikan Formal (Tidak Termasuk Tahun Yang Mengulang)	9,93	10.09	10.29	10.52	10.75	11.01	11.30	11.30
16	Rata-Rata Nilai UN SMP Kota Sawahlunto	Rata-Rata Nilai Yang Dihasilkan Dari Ujian Nasional Yang Diselenggarakan Secara Nasional Pada Tingkat SMP Di Kota Sawahlunto	53.9	54.9	55	55.1	55.2	55.4	55.6	55.6
17	Kasus Kenakalan Remaja Menurun	Rata-Rata Nilai Yang Dihasilkan Dari Ujian Nasional Yang Diselenggarakan Secara Nasional Pada Tingkat SMP Di Kota Sawahlunto	7	9	8	7	5	3	2	2
18	Persentase Lulusan SD Hafidz Al-Quran Minimal Juz 30 (%)	(Lulusan SD Hafidz Al-Quran Minimal Juz 30/Total Jumlah Lulusan) X 100 %	n/a	4	10	20	30	40	50	50
19	Peringkat Nilai LPPD Tingkat Provinsi	Penilaian Kemendagri Terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	3	2	1	1	1	1	1
20	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Nilai Sakip	Penilaian KemenpanRB Terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	CC	B	B	B	B	B	BB	BB
22	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian Pengendalian Internal Pemerintah Oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3					



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Persentase Jumlah Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu	(Jumlah Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu / Jumlah Ranperda Yang Diusulkan) X 100 %	n/a	80	85	90	90	95	95	95
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Dan Informasi Tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Yang Diperoleh Dari Hasil Pengukuran Secara Kuantitatif Dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Dari Penyelenggaraan Pelayanan Publik	B	B	B	B	A	A	A	A
25	Persentase Keluarga Yang Tertib Administrasi Kependudukan (%)	(Jumlah Keluarga Yang Tertib Administrasi Kependudukan / Jumlah KK) X 100 %	n/a	17	20	23	25	30	35	35
26	Persentase Penegakan Perda (%)	(Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda) X 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka Perkiraan Lama Hidup Rata-Rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur	69.39	69.49	69.83	70.47	71.11	71.75	72.4	72.4
28	Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat Dengan Indeks > 0,8 Dibagi Dengan Seluruh Kepala Keluarga Dikali Seratur Persen	25	27	29	31	33	35	37	37
29	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Dibagi Jumlah Penduduk X 100 %	68.01	95	95	96	97	98	99	99



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran Kepuasan Dari Pasien/Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas Yang Diukur Melalui Kuesioner) / 2	94.26	94.46	94.66	94.86	95.06	95.26	95.46	95.46
31	Persentase Rujukan Yang Dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD Dan Rawat Inap / Jumlah Kunjungan IGD Dan Rawat Inap) X 100 %	1.91	≤ 2,51	≤ 2,40	≤ 2,35	≤ 2,30	≤ 2,25	≤ 2,20	≤ 2,20
32	Persentase Pengunjung Yang Mengantakan Puas Dan Sangat Puas Terhadap Objek Wisata (%)	Persepsi Kepuasan Pengunjung Terhadap Objek Wisata	n/a	n/a	65	70	75	80	90	90
33	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(Jumlah Objek Wisata Unggulan Tipe A / Total Jumlah Objek Wisata Yang Ada) X 100 %	32.35	32.35	38.24	44.12	50	55.88	61.76	61.76
34	Persentase Industri Pariwisata Yang Berdaya Saing (Unit)	Jumlah Industri Pariwisata Dengan Omset Minimal 250 Juta Setahun / Jumlah Total Industri Pariwisata) X 100 %	60.55	60.55	61.76	63.00	64.26	65.54	66.85	66.85
35	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah Pengunjung Objek Wisata (Tiket Masuk)	331,483	354,610	379,350	405,816	434,128	1,000,000	1,300,000	1,300,000
36	Persentase Kelembagaan Kepariwisataan Yang Profesional	(Jumlah Kelembagaan Pariwisata Yang Memiliki Perizinan / Total Kelembagaan Pariwisata Yang Ada) X 100 %	13.22	13.22	13.88	14.58	15.30	16.07	16.87	16.87
37	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	(Jumlah Persentase Kondisi Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung Pemerintahan Dan Drainase Dalam Kondisi Baik) / 5	53.93	54.96	72.66	74.35	76.44	78.13	80.22	80.22



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Persentase Luas Sawah Yang Terairi Dengan Irigasi (%)	(Luas Lahan Sawah Yang Terairi Dari Irigasi / Total Luas Sawah) X 100 %	45.35	45.35	46.35	47.35	48.35	49.35	50.35	50.35
39	Indek Ketahanan Daerah		n/a	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.57
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran Indikasi Lingkungan Hidup Dari Indeks Pencemaran Air, Pencemaran Udara Dan Tutupan Lahan Dengan Proporsi 30 % Ika, 30 % Iku, 40 % Iktl)	56.79	56.79	58	60	64	67	70	70
41	Persentase Ketaatan Terhadap Tataruang	Perbandingan Antara Realisasi RTRW Dengan Rencana Peruntukan RTRW	86	86	87	88	89	90	91	91
42	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) X 100 %	6.4	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4	1	1
43	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Hektar) (SDGs)	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai SK Walikota (Ha)	42.58	22.81	15	10	8	5	4	4
44	Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Yang Layak / Total Jumlah Rumah Tangga) X 100 %	2035	2009.37	988.01	816.18	866.63	953.29	1048.63	1048.63
45	Persentase Lansia Yang Terfasilitasi	(Jumlah Lansia Yang Terfasilitasi / Total Jumlah Lansia Kurang Mampu) Dikali 100 %	19.74	19.25	19.25	100	100	100	100	100
46	Persentase ABK Yang Terfasilitasi	(Jumlah ABK Yang Terfasilitasi / Total Jumlah ABK) Dikali 100 %	44.74	22.87	100	100	100	100	100	100
47	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Terfasilitasi	(Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Terfasilitasi / Total Jumlah Penyandang Disabilitas) Dikali 100 %	4.64	7.47	19.79	39.57	59.35	79.13	100	100



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Persentase Penderita Gangguan Jiwa Yang Terfasilitasi	(Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Terlantar Yang Terfasilitasi / Total Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Terlantar) Dikali 100 %	5.43	3.09	100	100	100	100	100	100
49	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Peran Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik	65.59	65.6	65.61	65.62	65.63	65.64	65.65	65.65
50	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia Yang Sama Seperti Ipm Dengan Memperhatikan Ketimpangan Gender	95.52	95.53	95.54	95.55	95.56	95.57	95.58	95.58
51	Predikat Kota Layak Anak	Predikat Bagi Kabupaten/Kota Yang Mempunyai Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak Melalui Pengintegrasian Komitmen Dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia Usaha, Yang Terencana Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan Dalam Kebijakan, Program Dan Kegiatan Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Dan Perlindungan Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
52	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian Dari Kemenpan Rb Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Teknologi Oleh Pemerintah Daerah	2.02	2.3	2.7	3	3.3	3.6	3.8	3.8





BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Menyusun RPJMD ini sudah melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, top down-bottom up, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

26 MAR 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014